SERI STUDI INDONESIA

Lea Jellinek

SEPERTI RODA BERPUTAR

Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta

Pengantar: Sajogyo

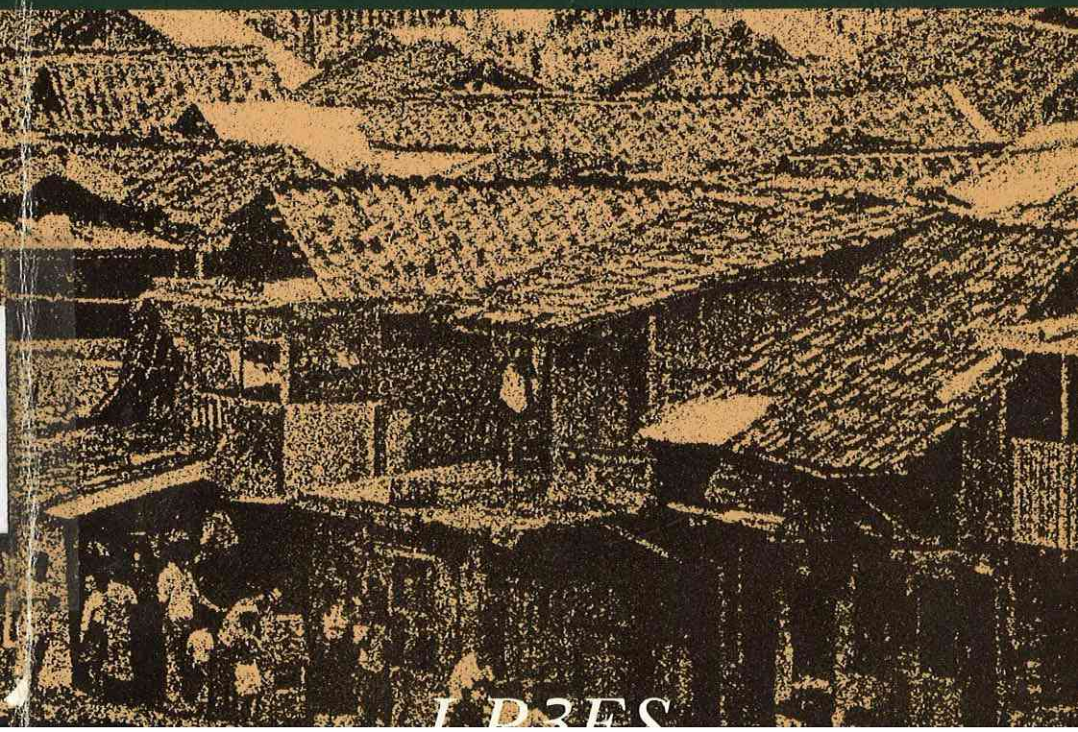

LP3ES

Pasal 44

(1) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah).*

(2) *Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah).*

UU-RI No.7 Tahun 1987

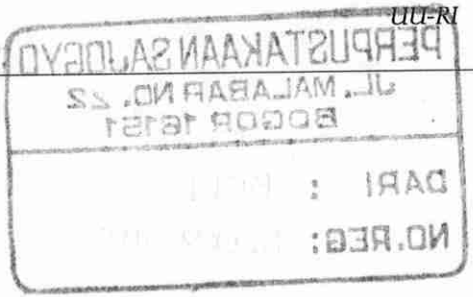

Lea Jellinek

SEPERTI RODA BERPUTAR

Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta

Pengantar: Sajogyo

LP3ES

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan

JELLINEK, Lea
Seperti roda berputar : perubahan sosial sebuah kampung di Jakarta / Lea Jellinek ; penerjemah, Eddy Zainuri. -- Cet. 1. -- Jakarta : LP3ES, 1994.
xxviii + 281 hal. : ilus. : 23 cm.

Judul asli : The Wheel of fortune : the history of a poor community in Jakarta
Bibliografi
Indeks.
ISBN 979-8391-35-7

1. Sosial kota I. Judul
II. Zainuri, Eddy

307.760 059 83

Judul asli : The wheel of fortune: the history of a poor community in Jakarta. Jellinek, Lea, 1949 – . © Lea Jellinek 1991. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1991, oleh Allen & Unwin Australia Pty Ltd., 8 Napier Street, North Sydney NSW 2059.

Cetakan pertama, Mei 1995
Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI
Jl S. Parman 81, Jakarta 11420, Telp. 5674211-13, 5663525, 5663527
© Hak terjemahan bahasa Indonesia pada penerbit
Diterbitkan atas kerja sama dengan AII (Australia Indonesia Institute)
Diterjemahkan oleh Eddy Zainuri
Disunting oleh Widjanarko, Nisrahmawati, dan Sudjinah
Disain sampul + Desktop Publishing: PT Pustaka LP3ES Indonesia

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	ix
Catatan Penyunting	xi
Ucapan Terima Kasih	xiii
Kata Pengantar	xv
Pengantar, Sajogyo	xxi
Pendahuluan	1
1. Kenangan Kebun Kacang: Dari Kebun Sayur ke Kota Gubug	15
2. Jaringan Sosial: Hubungan Manusia dalam Suatu Kampung, 1971 - 1981	48
3. Kegiatan Ekonomi yang Bersifat Sementara	87
4. Penetrasi Pemerintah	144
5. Penggusuran (1981)	172
6. Akibat Selanjutnya (1981 - 1987)	202
7. Seperti Roda Berputar	228
Post Script: Kembali ke Kebun Kacang 1994	245
Apendiks	259
Bibliografi	261
Indeks	276

Untuk yang terkasih,
kedua orang tuaku, Eva dan Fred

Pengantar Penerbit

Penerbitan buku-buku berbahasa Indonesia yang berisikan studi-studi Indonesia, baik yang ditulis oleh para sarjana dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam kenyataannya sebagian besar dilakukan secara serius oleh para sarjana dari luar negeri. Usaha-usaha mereka ini telah memberikan sumbangan berarti bagi *theory-building*, sehingga beberapa karya mereka sering dirujuk sebagai referensi utama. Meskipun studi-studi tersebut menyangkut tentang negeri ini, anehnya pusat studi dan hasil penerbitannya seringkali jauh lebih dikenal di luar negeri ketimbang di Indonesia sendiri. Sebagai contoh, pusat-pusat studi Indonesia yang terkenal adalah di Universitas-universitas Cornell, Yale, Leiden, Utrecht, Murdoch, dan Monash. Yang lebih menyedihkan, ternyata karya-karya studi Indonesia yang dihasilkan para sarjana dari luar negeri itu tidak sepenuhnya bisa diakses oleh para sarjana dan mahasiswa di Indonesia.

Program penerbitan buku Seri Studi Indonesia yang diterbitkan LP3ES ini, selain dalam rangka menyediakan bahan-bahan berbahasa Indonesia tentang karya-karya studi Indonesia, baik yang ditulis oleh para Indonesianis asing maupun domestik -- khususnya bidang studi sosial-ekonomi, juga untuk mendorong para sarjana Indonesia agar lebih berpartisipasi dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial dengan perspektif yang bersifat *indigenous* di Indonesia. Paling tidak, program ini akan menjadi infrastruktur yang berarti bagi pengembangan studi-studi Indonesia di dalam negeri.

Semoga seri penerbitan buku ini dapat dimanfaatkan oleh para sarjana dan mahasiswa Indonesia serta mereka yang berminat.

Catatan Penyunting

Buku yang sedang Anda baca ini telah mengalami banyak perubahan dari edisi aslinya, berbahasa Inggris – karena memang terbitan ini edisi Indonesia. Perubahan-perubahan ini – akan semakin tampak jelas ketika Anda membandingkannya dengan edisi aslinya – selain dalam nama-nama pelaku kisah kehidupan sebuah kampung Kebun Kacang pada suatu masa, juga dalam efisiensi dan efektivitas sejumlah kalimat dan atau paragraf yang nota bene sebenarnya dimaksudkan untuk para pembaca Indonesia, sejauh tidak mengubah substansi buku ini.

Ucapan Terima Kasih

Hutang budi saya yang paling besar adalah kepada penduduk kampung, khususnya Sumira, yang mengundang saya masuk ke dalam kehidupannya dan memungkinkan adanya kisah ini. Belakangan, Ir. Duddy Soegoto (Kepala Perencanaan dan Kelayakan di Perum Perumnas) memberikan semangat kepada saya tentang idealisme, jasa baik serta kecakapan para pejabat Indonesia. Adalah Indonesia, penduduk kampung, keluarganya dan saya merasa kehilangan atas meninggalnya dalam usia yang masih muda dan sebelum menyelesaikan proyek pemukiman kembali. Dr. Howard Dick membantu dengan baik proses penerbitan buku ini dengan memberikan kepercayaan atas kisah penduduk kampung dan kemampuan saya untuk menuliskannya. Saya juga merasa berhutang budi kepada Profesor Merle Ricklefs dan Dr Susan Blackburn (Abeyasekere). Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Widjanarko dan Nisrahmawati yang telah membantu menyempurnakan edisi Indonesia buku ini.

Kata Pengantar

Riset ini dimulai dari keingintahuan mengenai bagaimana golongan miskin dapat bertahan. Sejak pertama kali saya ke Jakarta pada awal tahun 1970-an, studi ini selama lima belas tahun secara perlahan-lahan berkembang, dimulai dari gagasan yang tidak jelas, saya mencari informasi dari satu orang ke orang lain, dari satu tempat ke tempat lain sampai pada akhirnya saya menemukan gambaran mengenai pemunculan perkembangan dan kepunahan sebuah kampung yang merupakan bagian dari metropolis Jakarta yang berkembang secara cepat.

Sementara saya mengajar di Universitas Indonesia sebagai sukarelawan Australia pada tahun 1972-1973, berkembanglah kegemaran saya pada es putar air jeruk sitrun panas yang dijual oleh para pedagang kecil di Jakarta. Sumira, seorang pedagang tempat saya biasa makan di warungnya, mengundang saya ke rumahnya. Pada mulanya studi saya berfokus pada kehidupannya dan kemudian meluas mencakup para tetangga terdekatnya yang dijumpainya sehari-hari. Pada akhirnya, fokus studi saya ini mencakup semua, termasuk 77 rumah tangga yang merupakan lingkungan Sumira. Sepuluh tahun kemudian cakrawala saya meluas melampaui lingkungan itu, yang dipengaruhi oleh penggusuran kampung.

Lebih sering saya mengunjungi Sumira dan lebih lama saya tinggal dalam lingkungannya, saya lebih bisa diterima oleh para penduduk kampung itu. Bahkan mereka yang pada mulanya enggan untuk berbicara, semakin ingin berbicara dengan saya. Kebanyakan di antara mereka menceritakan rahasia mereka mengenai kekhawatiran dan keprihatinannya yang sangat mendalam. Saya

mendengarkanya secara seksama. Beberapa penduduk kampung itu mengharapkan agar saya dapat membantu makanan, pendidikan bagi anak-anaknya, atau perawatan medis. Penduduk lainnya meminta saya untuk mencarikan pekerjaan sebagai tukang masak, supir, pembersih atau tukang kebun. Pada beberapa kesempatan, saya melakukan perjalanan dengan mereka kembali ke kampung-kampung halaman mereka. Pada saat-saat yang lain saya menghadiri pesta-pesta tempat komunitas berkumpul untuk ngobrol dan merayakannya. Ketika komunitas itu terancam penggusuran, banyak orang meminta nasehat dan bantuan saya. Bagaimanapun, saya hanya memainkan peran marginal dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya merekalah yang harus berjuang menurut kemampuannya dalam lingkungan yang sangat keras dan berat.

Mulai memasuki kampung sebagai orang asing dengan hasrat untuk memahami lingkungan rakyat yang sepenuhnya berbeda dengan rakyat saya sendiri, saya berada di antara kampung itu dan dunia luar. Saya memandang komunitas dan penduduknya dengan segala keingintahuan saya sebagai orang luar. Saya ingin menjadi bagian dari komunitas itu dan mempelajari pengalaman serta nilai-nilai penduduk kampung, tetapi dibebani oleh ide-ide sebelumnya dan latar belakang yang berbeda sebagai orang Australia kelas-menengah. Tanpa benar-benar hidup di tengah-tengah mereka dengan segala permasalahannya dan secara pribadi mengalami kesenangan dan kesedihannya, saya tidak akan pernah mengetahui secara tepat bagaimana mereka berjuang. Bagaimanapun, saya dapat mengamati, mendiskusikan dan melibatkan diri, dan pada akhirnya berharap untuk memahami beberapa aspek kehidupan mereka.

Setelah sepuluh tahun, saya tidak lagi hanya sebagai seorang pengamat, tetapi sudah menjadi anggota dari komunitas itu. Ketika saya datang di gang-gang sempit, setelah ketidakhadiran saya dalam jangka waktu tertentu, anak-anak di kampung itu memanggil "Lea, Lea, Lea" dan berlarian untuk mengatakan kepada orang tuanya bahwa saya telah kembali. Setelah mereka tidak sabar menunggu, maka hadiah-hadiah -- pakaian, permen, boneka beruang koala -- dibagikan dan obrolan tak henti-hentinya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi selama saya tidak ada, banyak anak dilahirkan, seseorang telah meninggal dunia, seorang isteri telah memukuli suaminya, karena mengejar perempuan lain. Se-

orang tetangga yang kehilangan pekerjaan dan seorang pedagang yang kehilangan segala barang dagangannya, karena terkena razia, sebuah rumah terbakar dan hampir membakar seluruh komunitas itu. Kehidupan saya sangat statis dibanding dengan skenario kehidupan penduduk kampung yang berubah secara terus-menerus.

Tidak seperti penduduk kampung yang harus bekerja setiap hari untuk mempertahankan hidupnya, saya memiliki waktu, sumber daya, dan kemampuan untuk mencatat kisah-kisah mereka. Setelah menulis sejumlah kisah kehidupan penduduk kampung, saya melakukan pengulasan.* Setiap kehidupan individu sangat berbeda. Setiap kasus menunjukkan perbedaan pengalaman manusia. Antara tahun 1978-1984, keterlibatan profesional dengan Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong saya untuk terlibat dalam berbagai permasalahan kemiskinan perkotaan.

Saya masuk ke kampung itu tanpa gagasan yang jelas, melainkan lebih didorong oleh rasa ingin tahu. Namun lama-kelamaan rasa ingin tahu ini terstruktur dan menjadi suatu studi yang bersifat ilmiah. Dari pengamatan itu, yang mengherankan saya adalah bahwa di kampung itu dominasi kemiskinan tidak tampak. Justru yang terlihat adalah usaha-usaha keras para wiraswastawan kecil untuk memenuhi segala keperluan hidup mereka. Namun keadaan seperti ini cepat berubah setiap kali saya datang kembali ke kampung itu. Artinya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kampung membutuhkan waktu lama. Sesuatu yang tidak dapat diramalkan dan tidak menentu merupakan ciri utama kehidupan penduduk kampung tersebut. Suatu periode mobilitas yang meningkat secara cepat diikuti oleh penurunan. Hubungan manusia dengan pekerjaan berada dalam perubahan yang terus-menerus. Pemerintah yang tampaknya tidak berperan, tiba-tiba menjadi sangat berkuasa. Selama pengalaman akhir yang tragis dalam penggusuran kampung, saya menetapkan posisi saya di

---

* Jellinek, L. "The Life of a Jakarta Street Trader" dalam Abu-Lughod, J. et al. (eds) *Third World Urbanization*, (Chicago, 1977), 244-56; "The Life of a Jakarta Street Trader- Two Years Laters" (Melbourne, 1977); "Circular Migration and the Pondok Dwelling System: A Case Study of Ice Cream Traders in Jakarta" dalam Rimmer P.J. et al.(eds) *Food, Shelter and Transport in South-East Asia and the Pacific*, (Canberra, 1978), 135-54; "The Changing Fortunes of a Jakarta Street Trader" dalam Gugler, J (ed.) *The Urbanization of the Third World*, (New York, 1988).

antara komunitas dan dunia luar agar dapat digunakan sebagai saluran komunikasi. Dengan semakin dekatnya usaha pemusnahan kampung, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana hal itu terjadi. Dari mana para penduduk itu datang dan ke mana mereka akan pergi ?

Posisi saya dalam komunitas itu mendua. Di mata pejabat, status saya tidak jelas, karena saya memasuki komunitas itu tanpa izin resmi dari kepala kampung. Agaknya, seperti halnya sebagian besar tamu kampung lainnya, saya telah diperkenalkan dengan kampung dan pimpinannya oleh tuan rumah saya, Sumira. Beberapa tahun kemudian, Sumira menceritakan kepada saya bahwa seorang pejabat telah melakukan penyelidikan tentang apa yang saya lakukan dalam lingkungan itu. Tanpa sepengetahuan saya, Sumira dan penduduk kampung lainnya mendukung dan melindungi saya atas penyelidikan itu. Mereka menjelaskan bahwa saya adalah dosen pada universitas yang hanya ingin mencari persahabatan dan sebuah rumah dalam lingkungan mereka.

Ketika untuk pertama kali saya menemui Sumira, ia sangat bersemangat dan kehidupannya tampak luar biasa. Saya datang untuk meneliti kemiskinan dan malahan menjadi sahabat seorang penjual makanan yang makmur. Sejak tahun 1967 perdagangannya berhasil baik; ia memiliki banyak pembantu -- suami, isteri kedua dari suaminya dan beberapa orang desa yang bekerja untuk Sumira dan mendapat makanan, akomodasi, pakaian dan uang saku. Sumira dengan bangganya menjaga warungnya dari larut malam sampai pagi-pagi benar. Ia memiliki wajah berseri-seri seperti bulan dengan gigi palsu besar yang tidak pantas. Para tentara, polisi dan pegawai sipil menjadi pelanggan warungnya yang penuh persediaan. Ia menjual kue pisang, ayam goreng, daging sapi, ikan, biji jambu monyet, bir dan sejumlah makanan lezat lainnya. Sumira dapat merenovasi gubugnya dan membeli sejumlah barang kebutuhan. Ia berangan-angan agar dapat memperoleh sebuah warung dagangan yang permanen dan bayi perempuannya kelak menjadi dokter.

Pada tahun 1976, keberuntungan Sumira mulai menjadi suram. Warung dagangannya terdesak keluar dari pusat kota oleh bangunan-bangunan bertingkat, jalan-jalan besar, lalu-lintas dan pemerintah kota yang sedang giat membangun Jakarta sebagai metropolis modern. Pada tahun 1978, Sumira tidak lagi memiliki warung besar di lokasi pusat kota yang strategis tetapi ia menja-

jakan barang-barang dagangannya dengan digendong dan di letakkan di kepala menyusuri jalan-jalan di Jakarta. Sejumlah pembantunya telah menghilang. Yang masih tinggal hanyalah ibunya yang sudah tua dan anak perempuannya. Ia merasa miskin, bingung dan tertekan. Untuk menghidupi mereka ia terpaksa menjual barang-barang miliknya yang baru diperolehnya. Pada tahun 1979, Sumira tidak aktif lagi berdagang makanan matang dan dengan bantuan saya, ia menjadi pembantu rumah tangga meski agak segan. Meskipun pekerjaan barunya memberikan keamanan yang lebih besar dan pendapatan tetap per bulannya, namun ia telah kehilangan kebanggaan, kebebasan dan ketidaktergantungan dalam perdagangan kecil-kecilan.

Pada tahun 1981, rumah Sumira, seperti halnya rumah-rumah tetangganya di kampung terancam penggusuran. Pemerintah kota memandang Kebun Kacang sebagai daerah yang mengganggu pemandangan di mata kaum menengah Jakarta modern. Para penduduk kampung ditawari pemukiman di flat-flat pusat kota, tempat kampung itu dulunya berada. Sumira merasa takut dan ingin pergi tetapi saya membesarkan hatinya untuk menempati sebuah flat. Sumira dapat pindah menempati flatnya setelah dua setengah tahun mengalami trauma dan kesengsaraan tinggal di bedeng sementara. Meskipun ia kekurangan dana, namun ia merenovasi flatnya yang dianggapnya seperti kandang burung. Ia mengakui bahwa dirinya tidak mampu berada di antara para tetangganya jika rumahnya tidak direnovasi.

Setahun kemudian ibunya Sumira meninggal dunia. Sumira tampak terkejut dan secara terus-menerus mengalami penurunan mental dan fisik. Pada tahun 1987 ia pun meninggal dunia. Anak perempuannya yang berusia empat belas tahun hamil sebelum nikah, dibiarkan menjaga dirinya sendiri.

Ketika saya pertama kali menemui Sumira, kehidupannya tampak lebih baik daripada kehidupan para tetangganya. Pada akhirnya tampak lebih tragis. Bagaimanapun, saya segera menemukan bahwa setiap anggota komunitas memiliki tragedinya sendiri yang serupa. Kisah Sumira menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dengan kehidupan para anggota komunitas lainnya. Mereka juga mengalami keberhasilan dan kegagalan dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan, lepasnya ikatan-ikatan sosial, hilangnya jaminan tempat tinggal dan timbulnya perasaan bahwa pemerintah semakin banyak melakukan penetrasi ke dalam kehidupan

mereka. Mereka juga memiliki aspirasi-aspirasi yang timbul dengan cepat, namun tercerai-berai.

Karakter pokok yang sama -- Sumira, Janto, Idi, Karsinah, Juria, Salim, Mista, Mus, keluarga Peking, Yusuf, Ibu Cia dan Innah -- selalu muncul di seluruh halaman buku ini. Beberapa di antaranya memainkan peran penting dalam sejarah Kebun Kacang karena mereka lebih tua dan mempunyai daya ingat yang kuat mengenai seperti apa daerah itu. Sedangkan yang lainnya muncul dalam bab mengenai jaringan sosial karena mereka telah lama menguatkan ikatan-ikatan kekerabatan atau berjuang untuk mempertahankan hubungan-hubungan sosial dalam sebuah dunia yang semakin kompetitif dan individualistik. Sebagian besar teman kampung saya akan dijelaskan dalam bab mengenai penerimaan pendapatan. Dengan adanya ancaman penggusuran yang meliputi komunitas itu pada tahun 1981, maka kisah ini meluas dan mendalam mencakup seluruh anggota komunitas itu.

Pengantar:
Pemerataan Pembangunan dan Nasib Penduduk Kampung Kumuh di Kota

Sajogyo

Membaca kisah dalam buku ini memang mengasyikkan. Suatu "lingkungan" di suatu kampung, di suatu kelurahan di kota Jakarta Pusat, tempat penulis melakukan studi masyarakat kecil, adalah suatu basis pengamatan dari bawah, menurut apa yang dialami oleh orang-orang, keluarga dan tetangga se lingkungan tempat tinggal. Nama kampung, tempat penelitian, tidak disamarkan -- akan tetap terkenal dalam sejarah pembangunan kota Jakarta, masa Orde Baru.

Gaya berkisah, melaporkan kegiatan, pemikiran dan apa yang dirasakan oleh para pelaku membuat cerita itu hidup dan berkesan. Jika penelitiannya menggunakan metode biografi, penulis berhasil meramu bahan-bahan dari sumber beragam biografi itu dengan baik. Ini tidak berarti setiap peneliti ilmu sosial mempunyai daya cipta cukup untuk dapat menggambarkan kehidupan suatu masyarakat kecil (lokal atau masyarakat lebih besar), berdasar catatan berupa bahan-bahan biografi orang/keluarga yang telah dikumpulkan.

Dalam tiga bab pertama, pembaca mulai dikenalkan dengan masalah penduduk kampung kumuh secara nyata. Di Jakarta, ada banyak lingkungan dan kampung kumuh yang jumlah dan lokasinya dapat dilihat dengan foto citra landsat (hasil teknologi satelit), atau dapat dibaca dari catatan, laporan rutin bulanan (diasumsikan ada) di kantor kelurahan/kecamatan Pemda DKI Jakarta. Laporan ini merupakan paduan data yang diperoleh dari tingkat RT, RW dengan data yang berhasil dikumpulkan dan dicatat oleh para petugas. Laporan semacam ini tak akan dapat menandingi hasil

laporan pengamat dan peneliti bermata jeli dan berempati, yang pernah tinggal bersama penduduk itu.

Dalam dua bab berikutnya tampil wajah "Pemerintah" yang meskipun dikatakan "bermaksud baik" bagi penduduk di kampung kumuh itu, namun tampak amat menakutkan! Apalagi jika ada tindakan pemerintah berupa "pembongkaran kampung"! Di sana jelas ada perbedaan besar antara ciri-ciri suatu kebijakan (di bidang pemukiman/perumahan) dengan cara-cara implementasi program yang dapat dirasakan oleh penduduk kecil di kampung kumuh. Dalam dua bab ini, pemerintah tidak ditampilkan dalam sosok pribadi-pribadi yang hidup. Siapa pemerintah itu? Sebenarnya pihak penguasa bersama-sama dengan para pengusaha besar memainkan peranan menentukan dalam masyarakat kota besar Jakarta Pusat, tetapi dalam buku ini tinggal bayang-bayang karena cakupan studi ini terbatas pada masyarakat kecil, bagian dari satu kelurahan. Di sana sini disebut juga adanya "kelas menengah" yang mempunyai kedudukan menentukan, juga terhadap nasib penduduk kampung kumuh ini.

Dua bab penutup akhirnya menunjuk ke akhir cerita di mana penulis tampil dengan judul cerita "Roda Keberuntungan" ("The Wheel of Fortune"). Ia menggambarkan bagaimana sebagian kecil keluarga di kampung kumuh itu mampu menjangkau uluran tangan program pemerintah dan sebagian besar lainnya tidak mampu dan memilih lokasi berumah tinggal di kampung baru di pinggiran Jakarta atau kembali ke desa asal.

Sebagai penjelasan pola perilaku, ternyata ada perbedaan antara dua golongan penduduk itu, yang diduga penulis bersandar pada dua sumber teori atau kerangka pikiran, yaitu pertama "kebudayaan kemiskinan", dan istilah "involusi", meminjam istilah Geertz untuk menjelaskan kondisi urbanisasi terperosok, di mana kedua istilah ini tidak muncul dalam buku ini. Rujukan kedua menunjuk ke "struktur sosial" di mana orang kecil mendapat ruang gerak yang serba terbatas.

Apakah kisah penduduk kampung kumuh itu menunjuk pada pola "kebudayaan kemiskinan"? Kehadiran penduduk yang beragam suku dan daerah asal di Indonesia, yang bergaul sehari-hari di pemukiman padat kampung kumuh, menonjolkan ikatan sosial yang longgar, di mana ikatan dalam keluarga batih juga terkena proses pelonggaran dengan ikatan-ikatan lama. Namun tidak ada catatan mengenai kondisi ikatan pelaku itu dengan kerabat dan

orang lain di desa asal: sebelum dan sesudah bermukim di kota. Siapa yang berasal dari keluarga di lapisan atas di desa, dan siapa yang berasal dari lapisan bawah. Dengan biografi yang berbeda (termasuk dalam penguasaan lahan, modal dan dasar pendidikan), mungkin penjelasan kondisi kemiskinan yang kini dialami di kota besar tidak cocok merujuk ke pola "kebudayaan kemiskinan" di mana sebagian besar penduduk itu terperangkap. Merujuk ke suatu pola "kebudayaan kemiskinan" mengandaikan bahwa golongan migran ke kota di daerah kampung kumuh menunjukkan upaya "melestarikan" pola itu (kritik C.A. Valentine atas karya O. Lewis).

Jika penulis juga mempunyai rujukan ke teori "struktural" hasilnya kurang meyakinkan. Sebagai seorang warga dari kebudayaan "Barat" (lebih mengenal sejarah Eropa Barat), penulis lebih cepat merujuk ke sejarah kota besar London di abad lalu. Dan walaupun membandingkan dengan hasil studi di satu kota di Jawa bagian tengah -- hasil penelitian dua orang secara terpisah, Sullivan dan Guinness, di Yogyakarta, mereka menemukan masyarakat kampung yang ("masih") serba serasi -- penulis yang mendalami kasus Kebun Kacang di Jakarta, tidak sampai pada titik pengamatan bahwa ada perbedaan besar antara kota metropolitan Jakarta dan (kota sedang) Yogyakarta, pada masa 1970-an.

Jika kita memperluas pandangan dalam mencari sumber penjelasan "struktural" yang lebih menantang dalam proses urbanisasi, kita dapat merujuk karya dua pakar geografi yang pernah mengkaji urbanisasi di Asia dan Amerika Latin yaitu W. Armstrong dan T.G. McGee (*Theaters of Accumulation*, 1985). Menurut mereka, sistem perkotaan di Dunia Ketiga tidak dapat dikaji terlepas dari meluasnya akumulasi modal internasional oleh TNC, perusahaan besar transnasional, karena kemudahan yang disediakan oleh negara-negara Dunia Ketiga. Perubahan struktur sosial yang mendukung proses itu terpusat pada produksi barang konsumsi untuk lapisan atas-menengah, terutama di kota-kota besar. Masuknya kapitalisme di pedesaan membawa perluasan tanaman dagang dan teknologi baru, dipihak lain semakin banyak petani yang terkena proletarisasi, sehingga terdorong menjadi buruh upahan penuh atau paruh-waktu dalam produksi agribisnis, produksi lokal atau ekspor atau mereka pindah ke kota. Perkembangan itu mesti ditinjau dalam konteks studi hubungan antara kelas-kelas sosial dan membesarnya peranan modal.

Dalam proses urbanisasi, menurut Armstrong dan McGee, adalah penting untuk mengamati tema-tema berikut. Tema pertama, mengkaji bagaimana proses konsentrasi modal menjurus ke divergensi (keragaman yang membesar) di bidang produksi dan konvergensi (keragaman yang mengecil) di bidang konsumsi di Dunia Ketiga. Pola konsumsi baru, sisi lain dari produksi kapitalis, telah merasuki semua lapisan masyarakat: pasaran massa telah berkembang. Bukan kemampuan berproduksi modern yang disebarkan melainkan pola-pola kebudayaan baru konsumerisme. Meluasnya konsumerisme tiruan ini didorong oleh sektor komunikasi yang bermonopoli dan memperkuat ketergantungan dan kesenjangan. Fungsi khas suatu kota besar (dan subsistemnya) menjadi panggung pemusatan modal dan pusat penyebaran pola-pola konsumsi baru itu, kurang berperan sebagai pembagi kekayaan dan kegiatan ekonomi (tema kedua).

Jelas kecenderungannya bahwa kegiatan bukan-kapitalis akan terkena disolusi (lebur-habis) atau terlindungi oleh moda produksi kapitalis jika dinilai masih menguntungkan sistem. Sebagian, hal ini hasil perjuangan lama dan gigih produsen kecil yang ulet dalam mempertahankan kemandirian mereka. Dalam proses itu, sektor modern dapat menekan tingkat upah, sering dapat menghindari biaya "overhead" suatu angkatan kerja industri atau penganggur. Buruh upahan di kota yang bekerja di sektor modern ada yang masih mempunyai ikatan dengan pedesaan yang memberi subsidi pada upah rendah, juga siap membantu dalam hal buruh itu sakit atau menganggur. Namun ada juga buruh upahan di sektor modern yang memikul kewajiban membantu keluarga di desa, dengan mengirim sebagian upah ke desa. Antara desa dan kota, antarsektor kapitalis dan bukan-kapitalis, terjalin hubungan yang tak sederajat, di mana terjadi proses yang memperkecil peluang untuk mengembangkan strategi pembangunan yang lebih seimbang, mandiri dan egaliter.

Singkat kata, Armstrong dan McGee menyimpulkan bahwa strategi utama (globalisasi modal) selama tiga dasawarsa lalu di Dunia Ketiga berupa modernisasi terpusat yang telah menguntungkan suatu minoritas terpilih, memperkuat struktur penguasaan yang ada dan mendahulukan kepentingan pusat-pusat kota (terpusat) di kota metropolitan) sambil merugikan daerah dan pedesaan. Untuk sebagian karena pengaruh kuat sistem media mo-

dern yang monopolistik telah meniadakan hambatan dalam meluasnya lebih lanjut produksi, distribusi dan konsumsi kapitalis.

Dalam pengamatan atas Dunia Ketiga di Asia, mereka mencatat bahwa di dalam hubungan antara golongan elite politik, angkatan bersenjata, teknokrasi baru dan kapitalis lokal, ada upaya untuk menghindari konfrontasi antarkelas. Upaya ini dibantu oleh kenyataan bahwa proses pertumbuhan ekonomi yang pesat terbukti dapat meningkatkan pendapatan penduduk, mengurangi golongan miskin. Pada tahap selanjutnya tak akan dapat dihindari strategi baru di mana lapisan bawah dapat menemukan cara untuk membebaskan diri dari struktur yang membuat mereka tidak berdaya, tidak memperoleh hak sama. Bagaimana mereka mendapat kepastian dalam penguasaan tanah milik dan lain sarana produksi, dapat berperan serta dalam mengambil keputusan, mendapat akses pada pendidikan, mempunyai hak menyampaikan pendapat, sebaliknya memperoleh informasi yang benar, mencerahkan di dalam sistem komunikasi yang demokratis (Catatan: strategi ini tercantum di Buku Repelita VI).

Untuk menempatkan studi urbanisasi di dalam kerangka "perkembangan dunia" itu, yang terpusat pada peranan modal besar, yang tak kenal batas-batas antarnegara/benua dan studi atas gejala struktur kelas-kelas sosial, memerlukan analisa di berbagai tingkatan: internasional, nasional, dan daerah/kawasan (dalam suatu negara) sampai ke tingkat komunitas besar dan kecil (kampung/desa) bahkan ke tingkat satuan produksi: pabrik, bengkel, dan warung. Studi satu kampung yang bernama Kebun Kacang (mikro) masih perlu ditempatkan dalam studi komunitas lebih besar, misal tingkat kota Jakarta Pusat. Dalam hal penduduk migran juga mencakup jalur ke pedesaan (atau kota kecil) tempat asal yang masih terkait ataupun tidak lagi penting.

Studi baru mengenai sektor informal di kota besar yang pantas disebutkan dan membawakan cerita optimis adalah yang dilakukan oleh LP3ES di Jakarta dan Surabaya, pada tahun 1990. Metode survai yang dipakai menjadi sama sekali berbeda dari pendekatan etnografi yang pernah diikuti Jellinek yang geograf. Kita dapat bertanya, apakah disain sampel responden studi LP3ES dipilih dengan memperhatikan strata dalam masyarakat (sektor informal), atas dasar segmen sektoral atau lokasi/kawasan (geografis)? Jika yang ditemukan adalah responden sukses (tipe Agus dalam studi Kebun Kacang), apakah mereka tergolong unsur-unsur yang terlin-

dungi dalam sistem kapitalis, di samping hasil keuletan dan kemandirian pengusaha kecil, informal dan bukan perkecualian yang langka? Jika memperhitungkan waktu yang berjalan (studi Kebun Kacang dari kurun waktu belasan tahun sebelumnya) apakah responden pengusaha informal yang sukses (dalam studi LP3ES) merupakan "hasil saringan (seleksi)"? Apakah mereka yang tergusur (bangkrut) dan menghilang dari panggung sektor informal di pusat kota telah mundur ke pinggiran kota, atau memilih daerah operasi di wilayah Botabek (Bogor Tangerang Bekasi)? Mungkinkah bagi mereka itu peluang hidup lebih baik di kota sedang, di Bogor misalnya, di mana dapat ditemukan banyak migran, pengusaha kecil di sektor informal yang tetap memelihara hubungan dengan keluarga/kerabat di desa (dari Jawa Timur sampai Jawa Barat)? (tesis Wariso RAM di IPB). Jika dalam sistem urban ada hierarki kota-kota kecil, sedang, besar dan metropolitan (atau kota utama), bagaimana halnya dengan ciri-ciri pengusaha sektor informal yang hidup dalam "bayangan" sektor modern di berbagai tipe kota itu?

Yang menarik dari kasus studi LP3ES mengenai sektor informal di dua kota besar di Jawa itu, adalah karena sempat mengundang Hernando de Soto dari Peru, untuk suatu ceramah/diskusi di Jakarta. Terjemahan bukunya ke dalam bahasa Indonesia berjudul *Masih Ada Jalan Lain: revolusi tersembunyi di negara Dunia Ketiga*, diterbitkan Yayasan Obor Indonesia, pada tahun 1991. Setelah melakukan studi meluas di kalangan pengusaha kecil (informal) di bidang perumahan, dagang dan transportasi di Peru, de Soto kemudian mendirikan dan mengembangkan suatu Lembaga Kebebasan dan Demokrasi atau ILD, yang menjadi motor suatu gerakan masyarakat di Peru.

Sampai di mana kita di Indonesia dapat bercermin dari kasus Peru yang diuraikan oleh de Soto? Diakui olehnya bahwa "analisa kelas itu bermanfaat ..." Studi ILD menunjukkan bawa "kekhawatiran mengenai timbulnya perpecahan dalam masyarakat mengikuti garis-garis kelas mempunyai dasar yang kuat." Namun lanjutnya ... "bersamaan dengan itu fakta-fakta ini tidak mendukung gambaran mengenai konflik antarkelas ... Karena di Peru kelas pekerja industri tidak banyak menonjol dan karena negeri ini bukan suatu perekonomian pasar modern tetapi perekonomian merkantilis, maka tidak tepat membahas mengenai kaum proletariat dan kaum borjuis." (kutipan berlanjut) ..."Penelitian ILD mem-

buktikan bahwa di Peru ada perpecahan yang membedakan antara mereka yang dapat memanfaatkan lembaga-lembaga yang sah setiap waktu mereka mau, dengan mereka yang harus bekerja di luar lembaga-lembaga itu." Maka ..."konsep kelas (menurut pemikiran Marx) yang melihat kelas sebagai suatu tembok horizontal yang memisahkan kaum borjuis di atas dengan kaum proletar di bawah, diganti dengan konsep kelas dari sudut kelembagaan, yakni suatu dinding tembok vertikal yang memisahkan mereka yang menikmati manfaat dan hak-hak istimewa dari negara dengan golongan mayoritas yang harus bersaing mati-matian dan mendapat perlakuan diskriminatif dari sistem hukum yang ada dan tidak memadai."

Boleh dikatakan sejak Repelita VI ini, kata asing "sektor informal" telah diganti menjadi "perekonomian rakyat" di mana mayoritas rakyat banyak terlibat. Mengenai hal ini, silakan mengkaji Bab 9, Buku II, Repelita VI yang berjudul "Pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan."

Jika di Indonesia kita juga ditantang oleh suatu perubahan kelembagaan, unsur-unsur apa yang merupakan peluang? Pengembangan sistem hukum? Sejak Repelita VI pembangunan hukum merupakan satu bidang khusus, bersamaan dengan tampilnya bidang "Ilmu Pengetahuan dan Teknologi". Bagaimana kesiapsiagaan kita dalam membangun bidang hukum, dari segi sumber daya manusia dan dana? Hal ini tak urung membuka peluang yang menjurus ke jalur perubahan kelembagaan yakni masalah politik yang bukan hanya soal operasionalisasi sejumlah pokok kebijaksanaan, misalnya dapat kita angkat dari Bab 9, Buku II, Repelita VI itu.

Jika terhadap pengusaha formal (usaha sedang/besar) dianut "deregulasi" (ada dorongan dari luar), sebaliknya pada perekonomian rakyat (juga bidang lain di luar ekonomi) masih tetap berlaku "regulasi", dalam arti "rekayasa" langsung oleh pusat yang bersumber dari kebijaksanaan "korporatisme" pada negara yang hanya membuka peluang bagi "gerakan masyarakat" yang dapat dikendalikan oleh negara, menjadikannya bukan gerakan masyarakat yang murni.

Kasus Kebun Kacang di Jakarta Pusat dapat disebut kasus "maksud baik pemerintah menyediakan pemukiman baru bagi rakyat kecil", tetapi akhirnya menjadi lagu bernada mineur "penggusuran". Sejak itu makin santer berita dan sering terjadi perebutan

tanah oleh mereka yang di atas dengan merugikan rakyat kecil yang di bawah, muncul sebagai masalah penggusuran di mana hukum selalu berpihak pada si kuat. Dari segi Jakarta, penyebaran lokasi suatu "real estate", pemukiman bagi lapisan atas/menengah, plus fasilitas lapangan golf, sport baru bagi mereka.

Membangun tanpa menggusur... niat baik yang masih langka terbukti. Sayang contoh kasus-kasus pemukiman bagi rakyat banyak yang ternyata dapat terlaksana baik, belum cukup tersiar luas. Contoh, di kota Surabaya, di mana Johan Silas dan kawan-kawannya dari ITS besar jasanya dan berhasil dalam mendorong pemindahan penduduk kampung kumuh, setelah diajak berpartisipasi, di mana proses memasuki perumahan berbentuk rumah susun (serba baru) terlaksana dengan memuaskan semua pihak. Bukti bahwa "roda keberuntungan" dalam hal pemukiman (terkait dengan lapangan usaha/kerja keluarga yang terlibat) perputarannya dapat kita rekayasa bersama dan memuaskan rasa keadilan rakyat kecil itu.

Kuncinya pada musyawarah rakyat kecil tersebut, sebab mereka cukup bijaksana di dalam memilih apa yang baik bagi mereka, memilih dari apa yang ditawarkan oleh birokrat, teknokrat dan pengusaha.

Pendahuluan

Buku ini menggambarkan dan menganalisa evolusi dan transformasi sebuah kampung di Jakarta sejak tahun 1930-an. Ini adalah sebuah sejarah mengenai sebuah masyarakat yang mengalami perubahan cepat. Sejarah ini memfokuskan pada perubahan-perubahan tentang pendapatan, perumahan dan hubungan sosial. Usaha-usaha untuk menghasilkan pendapatan yang bersifat sementara merupakan kegiatan-kegiatan yang menonjol penduduk kampung. Pasang surutnya peluang ini tergantung pada pengaruh-pengaruh dari luar, di luar kontrol mereka. Akibatnya adalah sifat tidak punya pegangan hidup dan rasa tidak aman merupakan ciri-ciri dominan kehidupan mereka.

Agar dapat memahami proses perubahan di kampung itu, orang harus membicarakan kekuatan-kekuatan di kota dan daerah pinggiran yang mengelilinginya yang mengakibatkan timbulnya kampung pada tingkat pertama dan akhirnya menggiringnya ke arah kepunahan. Sampai pertengahan tahun 1970-an kampung dan kota, bersifat simbiotis, yang tumbuh bersama secara fisik dan ekonomis. Proses ini berpuncak pada *boom* pembangunan di pusat kota pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Penduduk kampung menyediakan tenaga kerja, barang-barang dan jasa yang murah untuk memperluas kota, sementara diri mereka sendiri memperoleh peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi daripada jika mereka tinggal di daerah pinggiran. Setelah pertengahan tahun 1970-an kekuatan-kekuatan perubahan di dalam kota yang sedang dimodernisasikan secara cepat mulai merusak kemakmuran kampung. Pada tahun 1975 pekerjaan-pekerjaan berskala, kecil, tidak tetap

dan mandiri yang telah menolong banyak penduduk kampung meningkatkan standar kehidupan mereka, telah dipindahkan.

Pada tahun 1980 keberadaan kampung di pusat kota Jakarta dipandang oleh para perencana kota sebagai keganjilan yang mengganggu. Lingkungan itu siap dilanggar oleh program pusat kota modern yang meningkat pesat. Para perencana memandang kampung yang berbatasan sebagai daerah kumuh, dan memutuskan supaya penduduknya dimukimkan kembali dalam flat-flat modern yang bersusun. Beberapa orang yang beruntung dengan pekerjaan tetap atau pendapatan yang memadai menerima tawaran pemerintah atas flat dan mendapatkan pekerjaan tetap di kantor-kantor atau pabrik-pabrik. Namun sebagian besar penduduk enggan untuk meninggalkan Kebun Kacang dan pindah ke pinggiran kota, tempat mereka mencoba untuk mendirikan kembali pekerjaan dan rumah-rumah mereka yang telah hilang di pusat kota.

Tidak ada organisasi politik atau sosial di dalam masyarakat itu yang memungkinkan penduduknya secara bersama-sama menahan serangan gencar ini. Sekalipun mereka telah dapat mengorganisasikan, namun tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat mencegah penggusuran. Meskipun para perencana kota secara nyata bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan, namun justru mengakibatkan putusnya ikatan masyarakat yang lemah, bersama-sama dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang memusuhi para pedagang kecil dan tukang becak, yang memperburuk masalah yang sebenarnya sedang mereka coba untuk diatasi.

Penduduk kampung mempunyai gagasan yang berbeda dengan para perencana kota. Penduduk kampung menganggap kampung sebagai sarang kegiatan yang sibuk dan tempat harapan, batu loncatan ke arah standar kehidupan yang lebih baik. Sedangkan para perencana kota menganggapnya sebagai daerah kumuh yang penduduknya terjerat dalam lingkaran setan kemiskinan.[1] Secara implisit, para perencana menganggap bahwa kondisi-kon-

---

1 Sudut pandangan yang dulu diwakili oleh Lloyd P., *Slum of Hope? Shanty Towns of the Third World*, (Harmondsworth, 1979) hal. 32-33; Mangin, W. "Latin American Squatter Settlements: a Problem and a Solution," *Latin American Research Review*,Vol. 2, No. 3: 1967: 65-98; Mangin, W. "Squatter Settlements," *Scientific American*, Vol. 217, Oktober: 1967: 21-29. Dukungan terhadap pandangan yang belakangan dapat diperoleh dari deskripsi-deskripsi

disi perumahan merupakan indikator standar kehidupan. Jika kampung merupakan jalur perpindahan dari kemiskinan ke kerja keras di daerah pinggiran, maka menghancurkannya adalah suatu kesalahan. Jika, di pihak lain, ia merupakan perangkap kemiskinan, maka menghancurkannya mungkin dapat memberikan kesempatan mengenai kehidupan lebih baik kepada penduduknya.

Perbedaan pandangan antara penduduk kampung dan perencana kota di Jakarta termuat dalam literatur mengenai pembangunan kota-kota lain. Banyak sarjana membuktikan bahwa daerah-daerah kumuh dan kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan pendapatan berskala kecil (sektor informal) akan terus berlangsung. Tetapi sarjana-sarjana lain membuktikan bahwa cara-cara untuk menghasilkan pendapatan dan penghidupan ini pada akhirnya menurun ketika pembangunan ekonomi menciptakan kesempatan-kesempatan kerja dan perumahan yang baru,[2] seperti halnya di London pusat setelah tahun 1890-an, pedagang kecil, industri rakyat, pekerjaan lepas dan daerah kumuh pada akhirnya hilang.[3]

Sebagian besar kekuatan yang menghancurkan daerah-daerah kumuh di pusat-kota dan kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan pendapatan berskala kecil di London tampaknya akan terjadi di Jakarta seratus tahun kemudian. Di kedua kota itu, misalnya, persaingan dari pabrik-pabrik yang memproduksi secara massal dan toko-toko pengecer yang lebih canggih, mempengaruhi produksi

---

mengenai golongan miskin di perkotaan oleh Lewis dan de Jesus: Lewis, O. *The Children of Sanches: Autobiography of a Mexican Family*, (Harmondsworth, 1961); Lewis, O. "The Culture of Poverty," *Scientific American*, Vol. 215, No. 4: 1966: 19-25; Lewis, O. *La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty - San Juan and New York*, (New York, 1966); Lewis, O. *Five Families - Mexican Case Studies in the Culture of Poverty*, (London, 1976); de Jesus, C.M. *Child of the Dark-The Diary of Carolina Maria de Jesus*, (London, 1962). Juga lihat Hollnsteiner, M.R. "The Case of 'The People Versus Mr Urbano Planner Y Administrator'" dalam Abu-Lug-hod *Third World Urbanization*, hal. 307-320.

2 Armstrong, W.R. dan McGee, T.G. "Revolutionary Change and the Third World City: A Theory of Urban Involution," *Civilizations*, Vol. 18, No. 3: 1968: 353-78; McGee, T.G. "The Persistence of the Proto-Proletariat: Occupational Structures and Planning for the Future of Third World Cities" dalam Abu-Lughod *Third World Urbanization*, hal. 259-62.

3 Green, D.R. "Street Trading in London: A Case Study of Casual Labour 1830-1860" dalam Johnson, J. H. et al. (eds.) *The Structure of Nineteenth Century Cities*, (London, 1982) 129-51; Stedman-Jones, G. *Outcast London: A Study in the Relationship Between Classes in Victorian Society*, (Harmondsworth, 1971) hal. 336, 348-49.

dan perdagangan kecil. Ini diperkuat oleh perubahan dalam selera konsumen dan berkurangnya pejalan kaki. Jakarta pada tahun 1970- an dan London pada tahun 1860-an menampakkan tumbuhnya rasa tidak senang kelas menengah terhadap pekerjaan-pekerjaan di pinggiran jalan dan undang-undang pemerintah menghapuskan pekerjaan-pekerjaan ini dari jalanan dan menggusur rumah-rumah penduduk di daerah kumuh. Di kedua kota itu, tanah di pusat kota, yang harganya semakin mahal telah diambil alih untuk jalan-jalan besar, kantor, pasar dan daerah perumahan mewah, sehingga mengakibatkan terjadinya depopulasi di pusat kota.

Meskipun ada kesamaan yang menarik dalam bentuk perubahan di London pusat dan Jakarta pusat yang berselang waktu satu abad, namun ada risiko jika terlalu memberikan tekanan pada keduanya. Para penulis yang pesimistik di Dunia Ketiga menekankan bahwa meskipun pola-pola perubahan eksternal mungkin kelihatan serupa, namun besarnya, kecepatan dan sebab-sebab perubahan berbeda secara mencolok. Penetrasi kapitalisme secara global dan saling ketergantungan ekonomi yang berkembang di antara negara-negara memungkinkan terjadinya pengulangan pola-pola Barat mengenai kesulitan industrialisasi yang berproduksi sendiri dan lebih otonom. Ukuran kota-kota kini jauh lebih besar dan tingkat penyerapan buruh oleh industri modern jauh lebih lambat daripada yang terjadi di Inggris seratus tahun yang lalu.[4]

Ada sejumlah besar literatur mengenai masyarakat kumuh di kota-kota Dunia Ketiga.[5] Literatur yang lebih awal menyoroti aspek-aspek negatif dari kemiskinan perkotaan. Ini termasuk struktur keluarga yang longgar, ikatan-ikatan kekerabatan yang lemah, ketiadaan nilai-nilai yang jernih, pendapatan yang rendah dan tidak terjamin, kekurangan perumahan, fasilitas, barang-barang milik dan kurangnya keterlibatan politik. Sedangkan penelitian-

---

4 Frank, A.G. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil*, (New York, 1967); Amin, S. *Unequal Development: An Essay on the Social Formation of Peripheral Capitalism*, (Sussex, 1976). Reissman membandingkan dan mengkontraskan proses urbanisasi di Timur dan Barat: Reissman, L. *The Urban Process: Cities in Industrial Societies*, (Glencoe, 1970) hal. 150-95.

5 Gilbert, A. dan Gugler, J. *Cities, Poverty, and Development: Urbanization in the Third World*, (Oxford, 1982); Roberts, B.R. *Cities of Peasants: The Political Economy of Urbanization in the Third World*, (London, 1978); Lloyd *Slums of Hope*.

penelitian yang kemudian menekankan ciri-ciri positif semacam jaringan-jaringan sosial yang ketat, inisiatif individu dan kerja sama masyarakat untuk mengentaskan golongan miskin meskipun sering timbul pengaruh negatif dari pemerintah terhadap pekerjaan dan rumah mereka. Penelitian-penelitian ini telah menunjukkan adanya orang-orang yang mencoba melakukan sesuatu yang paling baik pada situasi yang sulit, meskipun banyak juga yang telah menunjukkan adanya orang-orang yang kecewa karena kemiskinan yang terus-menerus dan tidak ada perbaikan.

Sebagian besar literatur mengenai kemiskinan di perkotaan Indonesia memfokuskan pada pekerjaan, pendapatan, dan pengeluaran. Inti literatur ini berasal dari penelitian yang disponsori oleh ILO di Jakarta selama pertengahan tahun 1970-an. Berdasarkan pada statistik-statistik resmi, Sethuraman memberikan tinjauan luas mengenai pekerjaan di Jakarta, yang memfokuskan secara khusus pada besar "sektor informal."[6] Ia memperkirakan bahwa sektor ini menyerap kira-kira setengah dari angkatan kerja kota. Dengan munculnya tinjauan luas yang pertama dari Sethuraman, maka ILO bersama dengan LEKNAS mengadakan survai terhadap 4367 pimpinan perusahaan "sektor informal" di Jakarta untuk memperoleh data mengenai sifat dan jenis perusahaan-perusahaan ini, kondisi-kondisi kerjanya, para pegawai, cara operasi, pendapatan, pengeluaran, hubungan dengan pemerintah dan jaringan-jaringan pemasarannya. Survai itu menemukan bahwa perdagangan kecil merupakan kegiatan "sektor informal" yang utama, mencakup dua per tiga dari perusahaan-perusahaan yang disurvai.[7]

Riset ILO bertepatan dengan perdebatan seru yang berlangsung di kalangan para pengamat Indonesia tentang apakah golongan lebih miskin yang merupakan setengah jumlah penduduk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Dalam perdebatan ini, bahasan pokoknya adalah Laporan Leiserson dari Bank Dunia, yang bersama dengan sebagian besar pengamat membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata telah memperbaiki banyak golongan miskin di seluruh Indonesia.[8] Meskipun

---

6 Sethuraman, S.V. *Urbanization and Employment in Jakarta*, (Geneva, 1974).

7 Moir, H. dan Wirosardjono, S. *The Jakarta Informal Sector*, (Jakarta, 1977).

8 Lieserson, M. et al. *Employment and Income Distribution In Indonesia*, (Washington DC, 1978).

ada argumen tentang luas dan dalamnya kemiskinan di daerah pedesaan, namun sebagian besar setuju bahwa perbaikan telah terjadi pada semua lapisan masyarakat perkotaan.[9] Dalam sebuah studi yang akurat, Sundrum dan Booth menyatakan bahwa proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan menurun dari 40,4% menjadi 31,3% di daerah perkotaan; namun ini diiringi oleh ketidakmerataan yang berkembang dan kemungkinan terjadinya kenaikan jumlah rakyat miskin yang tinggal di daerah pedesaan Jawa.[10]

Di Jakarta, perdebatan serupa terjadi mengenai merebaknya kemiskinan. Banyak penelitian menyatakan bahwa pendapatan dari semua golongan penduduk meningkat sejak paruh kedua tahun 1960-an sampai pertengahan tahun 1970-an. Karena konsentrasi kekayaan di Jakarta, maka keuntungan yang diperoleh penduduk kota dari pembangunan ini tidak sepadan. Selama periode tahun 1970 sampai tahun 1976, pengeluaran rumah tangga yang riil di Jakarta meningkat lebih dari 50%, yang bagaimanapun juga lebih tinggi dari rata-rata pengeluaran rumah tangga lainnya di daerah perkotaan di Jawa, serta lebih dari dua kali untuk daerah pedesaan di Jawa dan lebih dari lima kali untuk daerah di luar pulau Jawa.[11] Di Jakarta pada periode yang sama, pengeluaran rumah tangga yang riil meningkat luar biasa untuk semua kelompok. Penemuan-penemuan ini bertentangan dengan penemuan-

---

9 Sajogyo menemukan bahwa antara tahun 1970 dan 1976 tidak hanya jumlah absolut rakyat yang jatuh di bawah garis kemiskinan meningkat, tetapi proporsinya tidak berubah secara berarti dan persentase kemelaratan telah meningkat dari 20% menjadi 25% di pedesaan Jawa: Sajogyo "Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan," *Laporan Seminar Nasional HIPIIS Periode 1975-1977*, (Menado, 1977). Dapice dan Sritua Arief mendukung pandangan Sajogyo bahwa posisi golongan miskin hampir tidak diperbaiki dan dalam beberapa kasus, mungkin telah menjadi lebih buruk: Dapice D.O.: Trends in Income Distribution and Levels of Living 1970-75" dalam Papanek, G. (ed.) *The Indonesian Economy*, (New York, 1980) 67-81; Sritua Arief *Indonesia: Growth, Income Disparity and Mass Poverty*, (Jakarta, 1977). Sajogyo menggunakan tingkat-tingkat konsumsi beras daripada tingkat-tingkat pengeluaran uang untuk sampai pada kalkulasi-kalkulasi ini yang telah dikritik dalam Sundrum, R. and Booth, A. "Income Distribution in Indonesia: Trends and Determinants" dalam Fox, J.J. et al. (eds.) *Indonesia: Australian Perspectives*, (Canberra, 1980) hal. 464.

10 Sundrum dan Booth "Income Distribution in Indonesia" hal. 462-64, 479-82.

11 Sundrum, R. "Income Distribution, 1970-76," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 15, No. 1: 1979: hal. 140.

penemuan Evers, yang didasarkan pada tiga penelitian mikro mengenai golongan miskin di Jakarta, yang menunjukkan penurunan dalam standar kehidupan.[12]

Pandangan-pandangan yang berlawanan ini pada tingkat tertentu dipadukan oleh penelitian Bank Dunia yang membuktikan bahwa meskipun pendapatan golongan miskin perkotaan meningkat pada awal tahun 1970-an dan jumlah mutlaknya telah menurun, namun pendapatan itu mengalami stagnasi atau menurun menjelang akhir dasawarsa itu.[13]

Pada titik yang lain dari literatur ini yang didasarkan pada survai-survai yang meliputi Jakarta, ada sejumlah penelitian yang memfokuskan dengan cermat pada sejarah-sejarah kasus mengenai penduduk kampung secara perorangan. Critchfield menampilkan potret nyata kehidupan tukang becak di Jakarta.[14] Saya menyusul dengan penelitian mengenai sejarah kehidupan pedagang kecil.[15] Sketsa-sketsa kehidupan lainnya telah muncul di berbagai majalah dan surat kabar. Belakangan saya menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan penduduk kampung untuk mendapatkan penghasilan telah berubah selama dasawarsa yang lalu.[16] Penelitian-penelitian kasus ini menyatakan adanya mobilitas yang

---

12 Evers salah dalam membandingkan pendapatan para pencari nafkah dari Survai LP3ES pada tahun 1972 dengan pendapatan per kapita dari survai Pemerintah Jakarta terhadap daerah- daerah miskin dan survai PLPIIS nya sendiri (Program Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dari Universitas Indonesia) pada tahun 1979. Lihat Evers, H. "Urban Subsistence Production in Jakarta," *Seminar Field studies in Southeast Asian Development*, ISEAS, Singapore 15-19 November 1979, hal. 5, DKI, Hasil Survai Tenaga Kerja di Kecamatan Miskin DKI-Jakarta, Kanwil. Dit.Jen. Bina Guna, Jakarta, 1978/1979, hal. 25-26.

13 Steer, A. "Indonesia Urban Services Sector Report," (Washington D.C., 1983) hal. 26-28.

14 Critchfield, R. *Hello Mister! Where are you going?* Bagian II (New York, 1970).

15 Jellinek "The Life of a Jakarta Street Trader," "The Life of a Jakarta Street Trader-Two Years Later," "Circular Migration and the Pondok Dwelling System."

16 Jellinek, L. "Underview: Memories of Kebun Kacang, 1930s to 1980s" dalam Abeyasekere, S. (ed.). *From Batavia to Jakarta: Indonesia's Capital 1930-1980*, (Melbourne, 1985); "Three Petty Enterpreneurs-The Wheel of Fortune" dalam Pinches, M. dan Lakha, S. (eds.) *Wage Labour and Social Change*, (Melbourne, 1987); "The Changing Fortunes of a Jakarta Street Trader."

besar dalam kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan penghasilan di "sektor informal."[17]

Kesenjangan antara penelitian yang meliputi kota dan penelitian kasus individual sangat lebar. Hanya Sunindyo yang telah meneliti sebuah masyarakat.[18] Ini adalah penelitian sosio-ekonomi terhadap 560 rumah tangga ditambah dengan penelitian-penelitian kasus secara rinci terhadap sembilan anggota masyarakat. Ia melihat bahwa penduduk kampung hidup dalam keadaan perubahan terus-menerus. Kehilangan pekerjaan dan rumah sering terjadi. Namun ia tidak menguraikan atau menganalisa keadaan ketidakamanan.

Meskipun tidak berkaitan dengan Jakarta namun dua penelitian yang menarik mengenai kampung-kampung di perkotaan dilakukan oleh John Sullivan dan Patrick Guinness.[19] Penelitian Sullivan terhadap sebuah kampung tua di pusat Yogyakarta membuktikan bahwa literatur mengenai golongan miskin di perkotaan lebih menekankan pada aspek-aspek marginalnya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak terjamin dan tidak aman, rumah-rumah dan jaringan-jaringan sosial. Dalam menghadapi masyarakat pinggiran dan baru saja terbentuk di kota yang sama, Guinness juga menekankan harmoni dan ketertiban. Adalah menarik bahwa kedua penelitian di Yogyakarta ini menekankan kuatnya ikatan-ikatan sosial bertentangan sekali dengan penemuan Sunindyo dan saya mengenai Jakarta.

Sebagian besar penelitian mengenai golongan miskin di perkotaan, baik di Dunia Ketiga maupun di Indonesia, gagal untuk menyampaikan makna perubahan atau makna masyarakat. Jalan keluar yang nyata untuk masalah ini adalah mencoba dan menghu-

---

17 Bandingkan penemuan-penemuan Steele, R.M. *"Origins and Accupational Mobility of Lifetime Migrants to Surabaya, East Java,"* Tesis Ph.D, ANU, 1980) dengan Papanek, G.F. "The Poor of Jakarta," *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 24, No. 1: 1975: hal. 15; Sethuraman, *Urbanization and Employment in Jakarta*, hal. 7, 13 dan Moir dan Wirosardjono *The Jakarta Informal Sector*, hal. 35.

18 Sunindyo, Saraswati "Kampung Sawah, Studi Eksploratif Tentang Perkampungan Liar di Jakarta," B.A. Thesis, Universitas Indonesia, 1981.

19 Sullivan, J. "Back Alley Neighbourhood: Kampung as Urban Community in Yogyakarta" (Melbourne, 1980); Sullivan, G. "Rukun Kampung and Kampung: State Community Relation in Urban Yogyakarta," Ph.D. Thesis, Monash University, 1982; Guinness, P. *Harmony and Hierarchy in a Javanese Kampung*, (Singapore, 1986).

bungkan penelitian-penelitian kasus individual dengan sejarah masyarakatnya dan perubahan-perubahan dalam pekerjaan rumah dan hubungannya satu sama lain maupun dengan pemerintah. Namun demikian, analisa perubahan masyarakat memang sulit. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai ragam kekuatan di luar pengalaman biassanya serta pengertian penduduk kampung. Persepsi mereka tentang sebab-sebab perubahan perlu dihubungkan dengan penelitian yang lebih luas mengenai dinamika perubahan di kota dan yang meliputi bangsa secara umum.

Kaum Marxis dan Neo-Marxis dapat membuktikan bahwa untuk memahami perubahan dalam kehidupan penduduk kampung diperlukan pengetahuan yang luas mengenai hubungan negara-negara kaya dan miskin, dan pengaruh-pengaruh yang diterimanya secara timbal balik. Ini merupakan literatur mengenai teori pusat-pinggiran dan teori ketergantungan. Meskipun kabur karena jargon, namun tidak diragukan bahwa literatur itu mengandung beberapa kebenaran penting. Semua masyarakat Dunia Ketiga perlu diteliti dalam konteks perluasan kapitalisme. Negara-negara seperti Indonesia telah menjadi miskin sebagian karena hubungannya yang tidak seimbang dengan bangsa-bangsa yang lebih kaya di dunia, dan pada akhirnya hal ini telah mempengaruhi juga penduduk kampung di Kebun Kacang. Namun demikian, kaum Neo-Marxis mengritik teori semacam itu karena terlalu abstrak dan mekanistik.[20] Kritik-kritik semacam itu menghendaki agar teori itu diterapkan dan diilustrasikan oleh penelitian-penelitian mikro.

Kerangka acuan yang paling efektif untuk menghubungkan masyarakat kampung dengan dunia luar tampaknya adalah kota itu sendiri. Dalam hal ini ada pendekatan menarik dan ambisius dalam penelitian mengenai London pada abad ke sembilan belas, yang dilakukan oleh Stedman-Jones yang mencoba untuk menyelidiki masalah-masalah serupa khususnya kondisi-kondisi buruh lepas dan perumahan.[21] Seperti halnya para penghimpun data penelitian dewasa ini, bagaimanapun Stedman-Jones memberikan pandangan dari berbagai sisi mengenai dimensi-dimensi kemis-

---

20. Palma, G. "Dependency: A Formal Theory of Underdevelopment or a Methodology for the Analysis of Concrete Situations of Underdevelopment?," *World Development*, No. 6, 7, 8: 1978: 881-924; McGee "From Urban Involuti-on to Proletarian Transformation"; Pinches, M.D. "Anak-Pawis Children of Sweet: Class and Community in a Manila Shanty Town" Ph.D. Thesis, Monash University, 1984.

21 Stedman-Jones *Outcast London*.

kinan, perbedaan yang beragam mengenai pedagang dan pekerja kelas bawah dan kekuatan-kekuatan yang mentransformasikan kota, tetapi sedikit memahami kehidupan rakyat di dalam lingkungan di mana mereka tinggal atau bagaimana masyarakat-masyarakat ini berkembang.

Pendekatan saya adalah mencoba memahami dinamika lingkungan perkotaan yang kecil dan individu-individu yang tinggal di dalamnya. Dengan memperhatikan penduduk kampung dalam komunitasnya yang menyatu, tersingkap banyak segi yang beragam dalam kehidupan mereka. Tugas saya adalah mencoba mengindentifikasi dan menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dan menentukan peran apa yang dimainkan penduduk kampung, lingkungan, kota atau lingkungan politik dan ekonomi yang lebih luas dalam menentukan nasib mereka.

Penelitian mengenai sebuah masyarakat dengan sendirinya membentuk sejarah lisan. Saya memulainya dengan mempelajari masyarakat itu melalui dialog dengan individu-individu tentang kehidupan mereka. Karena hampir tidak ada sama sekali bahan tertulis mengenai masyarakat tersebut, maka tidak ada sumber informasi lainya. Para sarjana lain yang telah menulis mengenai sejarah Jakarta hampir tidak menemukan apa-apa dalam sumber-sumber Belanda mengenai kampung-kampung perkotaan.[22] Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kampung sampai tahun 1970-an ditandai oleh ketidakacuhan dan tiadanya data resmi yang tersedia. Tanpa peralatan normal dari sejarawan, penulis tidak memiliki pilihan kecuali mengandalkan -- hampir sepenuhnya -- pada wawancara lisan.

Sejarah lisan memiliki kekuatan dan kelemahannya. Mereka yang terlibat, lebih baik dibanding siapa pun lainnya, dapat menceritakan apa yang telah terjadi dalam kehidupan dan bagaimana mereka mengalami atau memandang peristiwa-peristiwa tertentu. Penjelasan-penjelasan yang bersifat pribadi memberikan keakraban dan rincian yang para pengamat luar, apalagi pewawancara yang mengadakan survai, tidak mampu memahaminya. Pandangan-pandangan mereka memberikan wawasan penting tentang bagaimana rakyat miskin berpikir dan merasakan kehidupan mereka. Hanya dengan cara ini dimungkinkan untuk me-

22 Komunikasi-komunikasi personal dengan Wertheim, W.F. 26 Januari 1975; Cobban, J.L. 1 Desember 1975; Abeyasekerre, S. Februari 1984.

menuhi dalih bahwa seseorang ingin mencoba memahami bagaimana penduduk kota gubuk melihat masyarakatnya sendiri.[23] Pada saat yang sama, sejarah lisan menimbulkan berbagai kesulitan. *Pertama,* ada persoalan mengenai bagaimana para informan menseleksi. Seleksi saya membias ke mereka yang suka berbicara tentang dirinya sendiri, para tetangganya dan dunia luar. Untuk beberapa tahun pertama saya melihat masyarakat itu melalui sudut pandang perseptif dari ibu angkat informal saya, Sumira. Pada mulanya, penelitian saya berfokus pada kehidupannya dan orang-orang yang sebagian besar berhubungan dekat dengan dia. Penelitian itu diperluas ke luar dari rumah Sumira ke arah yang mencakup para tetangga yang dapat dijumpainya sehari-hari, diketahui namanya dan dengan siapa ia sering tukar-menukar barang dan jasa. Pada akhirnya penelitian itu mencakup 77 rumah tangga yang merupakan lingkungan Sumira. Hanya ketika terjadi penggusuran, maka cakrawala Sumira dan saya benar-benar meluas melampaui lingkungan itu mencakup rumah-rumah tangga lain dalam kampung yang lebih besar. Pada akhir penelitian, ketika dirasa perlu untuk memperoleh sejarah lingkungan sejak tahun 1930-an para informan diikutsertakan dari luar lingkungan Sumira, hanya sedikit sekali dari mereka yang mengalami atau dapat mengingat masa lampau Kebun Kacang, yang lebih lama.

Kedua, terdapat kesulitan dalam teknik wawancara. Menurut Sumira, satu-satunya cara untuk berbicara dengan orang Jawa adalah lemah-lembut dan tidak langsung. Orang Jawa tidak pernah mengemukakan pertanyaan secara langsung. Ia tidak pernah membuat pendengar menyadari bahwa ia ingin mengetahui hal tertentu. Mempertanyakan secara langsung dapat mengakibatkan goncangan dan ketakutan dan tak terelakkan lagi akan memberikan tanggapan yang menyesatkan. Ada topik-topik tertentu yang orang Jawa sama sekali tidak ingin menanyakan, seperti halnya utang, pendapatan, hubungan antarperseorangan dan sikap-sikap terhadap pemerintah. Satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan peka semacam itu adalah membiarkannya secara lambat-laun timbul dengan mendorong informan untuk berbicara secara bebas dengan caranya sendiri. De-

---

23 Loyd *Slums of Hope?*, hal. 10.

ngan demikian mengadakan wawancara memang menghabiskan waktu dan prosedur yang tidak praktis, sering mengakibatkan terjadinya banyak percakapan tanpa tujuan.

Memang tidak ada artinya untuk mencoba dan memaksa orang-orang Jawa berbicara jika mereka enggan atau takut untuk berbicara. Adanya tanda keraguan, kecurigaan atau ketakutan, secara otomatis membuat percakapan itu tidak menyenangkan. Jika seseorang terlalu sibuk untuk berbicara, dengan sopan saya berjalan terus. Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka yang takut, malu dan sibuk mau juga berbicara dan mengundang saya ke rumahnya, tetapi hal itu memerlukan kunjungan selama sepuluh tahun untuk mencapai hubungan dengan sebagian besar orang dalam lingkungan itu.

Ketika saya frustrasi karena memperoleh banyak informasi yang tidak berkaitan satu sama lain dan mencoba untuk beralih ke wawancara formal, pelaksanaannya terkesan dibuat-buat, tidak menyenangkan dan sebagian besar tidak produktif. Pada tahap ini, sebagian besar informan saya sudah biasa dengan maksud kunjungan saya dan mendengarkan mereka berbicara, tetapi mereka merasakan adanya ketegangan dalam wawancara formal itu. Hanya Sumira dan satu atau dua orang yang lain dapat duduk berlama-lama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memungkinkan saya untuk membuat catatan-catatan. Beberapa orang bahkan tertarik untuk berbicara melalui alat perekam. Tetapi sebagian besar lainnya merasa diintimidasi oleh pendekatan formal ini. Melihat pena atau kertas saja mereka sudah takut. Akibatnya saya terpaksa kembali pada mode pengumpulan data yang agak sembarangan.

Kesulitan besar saya yang ketiga adalah keandalan daya ingat para informan atau laporannya tentang hal itu. Penduduk kampung tidak berpikir bahwa kebenaran kenyataan begitu penting. Bukan kebenaran yang diperhitungkan tetapi menjaga harga diri, menghindarkan keadaan yang memalukan, menciptakan kesan yang baik dan menjaga keselarasan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya sederhana dan tidak menyerang sering dijawab tidak benar. Misalnya, beberapa orang merasa malu untuk mengakui bahwa mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu sebagai tukang becak atau pedagang, dan malahan berpura-pura menganggur. Tanggapan-tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai perkawinan sering menyesatkan, khususnya

jika seorang laki-laki ingin menyombongkan diri tentang jumlah isteri-nya, atau sebaliknya berpura-pura bahwa ia masih bujangan. Jika seorang perempuan ditinggalkan oleh suaminya, ia sering berpura-pura, bahwa suaminya telah meninggal dunia daripada mengaku, bahwa suaminya telah meninggalkan dia, atau bahwa ia telah mengusir suaminya. Ketika perempuan-perempuan yang mandul mengangkat anak, mereka sangat enggan untuk mengakui bahwa mereka telah melakukan yang demikian, karena takut bahwa kemandulannya akan tersingkap. Tidak ada kekurangan mengenai salah penafsiran dan salah pengertian yang dapat diakibatkan dari wawancara-wawancara itu. Karena itu proses untuk memperoleh informasi yang akurat dan bermakna, menghabiskan banyak waktu dan sulit.

Daya ingat para informan barangkali sangat tidak dapat diandalkan, ketika berkenaan dengan menentukan tanggal. Kebanyakan para informan saya buta huruf, dan bahkan mereka yang dapat membaca dan menulis cenderung untuk menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan mereka dengan apa yang bagi kita mungkin tampak sebagai penanggalan yang agak tidak lazim. Salah satu dari informan saya yang sudah tua menyatakan tanggal peristiwa-peristiwa Ratu Juliana kehilangan keperawanan. Ketika saya meminta sumber dari pengetahuan yang mendalam mengenai rumah tangga Kerajaan Belanda, ia menjelaskan bahwa mata uang Belanda dalam masa sirkulasinya telah diterbitkan kembali dengan lubang yang terletak ditengahnya, dan ia berpikir bahwa Belanda tentu hanya bersusah payah demikian dalam peristiwa yang sedemikian penting. Sedangkan yang lain menyebutkan peristiwa-peristiwa luar biasa berkaitan dengan iklim, atau lebih umum, berkaitan dengan kelahiran anak-anak mereka. Sebagian besar yang mengingat kup traumatik pada bulan September 1965 tidak dapat mengingat pada tahun berapa terjadi peristiwa itu. Orang-orang tua lebih ingat saat pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan, tetapi sedikit orang yang dapat mengingat mengenai tanggal-tanggal peristiwa itu. Untuk menetapkan apa yang dilakukan para informan saya pada waktu tertentu, saya harus menghubungkan peristiwa-peristiwa itu dengan peristiwa-peristiwa lainnya yang mereka anggap sebagai sesuatu yang berarti dalam kehidupan mereka.

Sumira merupakan tempat utama untuk pemeriksaan ulang bagi data apa pun yang saya kumpulkan. Kadang-kadang ia men-

ceritakan kepada saya tentang orang-orang tertentu dalam lingkungan itu dan saya kemudian mengadakan pemeriksaan ulang kepada mereka tentang apakah yang dikatakannya itu benar, tanpa membiarkan mereka tahu, bahwa ia sudah menceritakannya kepada saya. Pada waktu-waktu yang lain, wanita-wanita rumah tangga menceritakan kepada saya tentang diri mereka sendiri dan saya kembali ke rumah untuk mengadakan pemeriksaan kepada Sumira tentang apakah yang mereka katakan kepada saya benar. Jika ketidakcocokan terjadi dalam informasi semacam itu, maka Sumira dan saya mengadakan konsultasi sekali lagi dengan para ibu rumah tangga pada waktu-waktu yang lain untuk mencoba merujukkan perbedaan-perbedaan ini. Pada akhirnya, saya bersandar pada Sumira untuk menilai apakah informasinya semacam itu masuk akal dari sudut pandangan penduduk kampung.

Kesulitan yang keempat adalah adanya masalah sebab dan akibat yang hampir tidak dapat dipecahkan. Meskipun penduduk dapat menceritakan kisah hidup mereka serta masyarakat mereka sendiri lebih baik daripada orang lain, namun mereka mengalami kesulitan untuk melihat lebih jauh dari itu. Dengan demikian, mereka dapat menceritakan apa yang telah terjadi terhadap mereka tetapi tidak perlu menceritakan mengapa telah terjadi. Penjelasan-penjelasan dikemukakan untuk peristiwa-peristiwa yang mungkin terlalu berlebihan dalam menyederhanakan faktor-faktor yang rumit di luar pemahaman dan kontrol mereka yang paling dekat. Dalam keadaan ini, sejarawan mungkin tergoda untuk membuang sama sekali "penjelasan-penjelasan" semacam itu. Bagaimanapun, melakukan hal sedemikian, mungkin sama dengan membuang hal yang penting. Persepsi orang tentang mengapa peristiwa-peristiwa telah terjadi, bagaimanapun subjektif atau kurang informatifnya, mungkin masih dapat menyampaikan banyak sekali wawasan ke dalam pandangan dunia mereka. Pendekatan yang diberikan di sini adalah untuk mencoba bukan membuat penilaian tentang kebenaran persepsi penduduk kampung, tetapi untuk menetapkannya dalam konteks sumber-sumber apa pun lainnya yang ada.

1

Kenangan Kebun Kacang: Dari Kebun Sayur ke Kota Gubug

Kebun Kacang terletak di jantung Jakarta modern yang membentang. Lima puluh tahun yang silam, wilayah itu merupakan daerah pedesaan di pinggiran Batavia pada zaman penjajahan. Nama "Kebun Kacang" menunjukkan asal-usul pedesaan kampung itu. Sebagaimana lingkungan-lingkungan Jakarta lainnya, sebutan itu timbul setelah ada hasil bumi yang tumbuh di sana.[1] Pada tahun 1960-an, daerah itu telah berubah dari kebun sayur menjadi kota gubug. Sejarah kebun kacang bermula dari apa yang menjadi rujukan penduduk kampung sebagai Zaman Normal. Kemudian menyusul Zaman Perang, Zaman Merdeka dan Zaman Pembangunan.[2]

Zaman Normal, 1930-an-1942

Pada akhir tahun 1970-an, saya hanya dapat menjumpai tiga orang yang mampu menceritakan kehidupan seperti apa yang terjadi di Kebun Kacang pada tahun 1930-an, dan bahkan mereka mengakui bahwa ingatan mereka lemah. Ibu Cia dan Ibu Innah berasal dari keluarga-keluarga yang dianggap sebagai pendiri Kebun Kacang. Mereka tinggal di sana lebih lama daripada semua penduduk kampung lainnya yang masih hidup dan keluarga-keluarga mereka dari semula telah menguasai banyak lahan. Sebaliknya, Yusuf datang di Kebun Kacang pada akhir tahun 1930-an dan merupakan pendatang sementara, sebagaimana kebanyakan

1 Misalnya, Kebun Jeruk, Kebun Sirih, Kampung Sawah, Kota Bambu.

2 Zaman Pembangunan juga termasuk apa yang disebut penduduk kampung sebagai Zaman Kurang Ajar.

orang yang di kemudian hari mendiami daerah itu. Pada akhir 1970-an, usia Ibu Cia dan Yusuf sekitar 60 tahun dan pada tahun 1930-an mereka masih belasan tahun. Ibu Innah yang telah berusia lebih dari tujuh puluh tahun, merasa sulit untuk berkonsentrasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya.

Mereka mampu mengingat semua detil kehidupan mereka sendiri, tetapi pada umumnya hanya sedikit mengenai Batavia. Belakangan, mereka sangat tertarik untuk memperoleh rumah dan mata pencarian. Sebagian besar kehidupan kaum perempuan berkisar di dalam rumah. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk membaca surat kabar, buku-buku atau mendengarkan radio dan tidak mengetahui peristiwa-peristiwa besar yang terjadi mengenai bangsanya, dan juga di Batavia pada masa itu. Mereka tidak terpengaruh oleh aspirasi-aspirasi nasionalis atau kekacauan politik pada tahun 1930-an. Kebun Kacang merupakan daerah terbelakang dan tidak merupakan bagian dari arus utama kehidupan Batavia.

Keluarga Ibu Cia telah tinggal di Kebun Kacang lebih lama daripada siapa pun yang dapat diingatnya. Sejauh yang diketahuinya, ayahnya adalah orang Betawi Asli. Keluarganya memiliki hak yang sah atas tanah yang ditempatinya dan telah membangun rumah desa yang besar di atas tanah yang lebih tinggi dan jauh dari Kali Cideng, yang sering banjir pada musim hujan. Keluarga Ibu Innah, sebaliknya, merupakan penghuni liar secara tidak sah yang membangun gubug reot di antara rumpun bambu dan rawa-rawa di tepi sungai, tidak terlihat dari jalanan berdebu yang menjurus ke arah barat laut di daerah itu.

Ibu dari Ibu Cia datang di Kebun Kacang dari Bogor pada tahun 1920-an dan Ibu Cia lahir pada tahun 1925. Keluarga itu adalah yang terkaya di daerah itu. Rumahnya yang seluas 200 meter persegi lebih besar daripada rumah lainnya di daerah itu. Seperti halnya rumah-rumah desa lainnya, rumah itu berlantai tanah, berdinding bambu yang dianyam dan beratap daun kelapa dan dikelilingi oleh kebun sayur, pohon buah-buahan dan kolam ikan. Ayam-ayam dan bebek-bebek mengais-ngais di sekeliling rumah, sementara kambing-kambing dikurung dalam kandang bambu supaya tidak makan tanaman sayur-sayuran. Ibu dari Ibu Cia menanam, menyiangi dan memanen kangkung/bayam dan sawi, tebu dan cabe rawit. Sebagian dari hasil kebun ini selain dikonsumsi sendiri juga untuk para tetangganya. Sayur-mayur yang

merupakan hasil yang berlebih dari kebutuhan mereka dibungkus dan diletakkan di pinggir jalan dan secara tetap para pedagang memungut dan meletakkannya di atas kereta kuda atau ke dalam keranjang-keranjang bambu untuk dipikulnya. Kemudian sayur-sayuran ini dijual di pasar Tanah Abang, atau di pasar Senen, atau dijajakan dari rumah ke rumah di Menteng atau di Kota. Meskipun keluarga Ibu Cia adalah yang paling kaya di daerah itu, ibunya selalu mencari cara-cara baru untuk mendapatkan hasil tambahan. Misalnya, ia membuat tali dari daun-daun pisang untuk dijual di pasar. Ayah Ibu Cia merupakan satu-satunya orang yang memiliki keterampilan teknik di lingkungannya, bekerja sebagai tukang listrik untuk rumah-rumah tangga orang Belanda di Kota dan Menteng. Kadang-kadang ia dikirim untuk bekerja di Bogor, Bandung atau bahkan di luar Jawa.

Para tetangga Ibu Cia yang mempunyai hubungan keluarga sebagian besar memperoleh penghasilan dari menjual sayur-sayuran. Tidak seperti ayahnya, yang beruntung memperoleh pendidikan, kakeknya yang tinggal di sebelah rumah, buta huruf dan memperoleh penghasilan dari menyabit dan mengumpulkan rumput untuk makanan kuda penarik kereta yang ditambatkan di daerah itu. Tetangga lainnya memperoleh penghasilan sebagai sais kereta kuda, sarana penting bagi angkutan penumpang di kota. Ada lagi tetangga yang mengurus tempat pembuangan sampah kota praja dan menembak mati kuda-kuda yang lumpuh dan sakit, yang kemudian dikubur di tempat itu.

Meskipun Ibu Cia tinggal kira-kira 125 meter dari rumah Ibu Innah, namun mereka kurang begitu akrab. Tanah yang menghalangi tidak dilintasi oleh jalan-jalan kecil. Rumput-rumput yang tinggi, pohon-pohon kelapa, rumpun bambu, kolam-kolam ikan dan rawa-rawa memisahkan keduanya dan menyebabkan antara satu kelompok rumah dengan lainnya tidak tampak jelas. Meskipun Ibu Cia mengetahui bahwa ada Ibu Innah di dekatnya, namun mereka tidak pernah saling mengunjungi.

Innah dan suaminya, Harja, adalah petani yang tak punya tanah dari sebuah desa dekat Bogor yang datang ke Batavia pada tahun 1920-an. Setelah disuruh keluar secara paksa dari tanah yang secara tidak sah telah mereka tanami di Matraman, mereka mendengar ada tanah yang tidak dimanfaatkan di Kebun Kacang, dikelilingi rawa-rawa dan ditumbuhi rumput-rumput yang tinggi, tempat tanaman sayuran dapat tumbuh.

Menurut Ibu Innah, pemerintah kota mengizinkan mereka untuk menanami sayur-sayuran dan mendirikan gudang kecil untuk menyimpan perkakas kebun, tetapi bukan sebuah rumah. Akibatnya, keluarga besar Innah berdesak-desakan di dalam gudang perkakas kebun itu untuk tidur. Setiap malam, suami dan ketujuh anaknya masuk secara hati-hati ke dalam gudang perkakas itu dan menjelang tidur berharap semoga mereka tidak akan tertangkap dan diusir. Ketika keluarga itu tidak dapat lagi menahan kondisi yang terkekang itu, maka Harja secara tidak sah membangun sebuah rumah yang lebih besar. Pada beberapa kesempatan seorang petugas Belanda yang secara teratur melakukan patroli di daerah itu memaksa Harja membongkar rumah itu, tetapi dengan keras hati Harja dan keluarganya tetap di daerah itu.

Ketika Harja memperluas daerah itu untuk menanaminya dengan sayur-sayuran sampai ke lokasi yang kini berdiri Hotel Indonesia, Jalan Thamrin dan Sarinah, maka ia mengundang sanak-saudara atau teman-temannya dari Bogor untuk membantunya mengelola daerah itu dengan bertani. Pada akhir 1930-an, paling sedikit ia memiliki empat pekerja untuk membantu menanami, menyiangi, menyirami dan memanen hasil pertaniannya itu. Kemudian, beberapa dari para pekerja ini mengawini anak-anak Harja dan Innah. Mereka mulai memandang Harja sebagai pelindung dan tuan tanah yang kaya, meskipun sama dengan mereka, Harja telah datang dari Bogor, miskin dan tak punya tanah hanya 15 tahun lebih dahulu. Lagi pula ia tidak memiliki tanah itu secara sah, melainkan menyewanya dari pemerintah kota. Baik keluarga Ibu Cia maupun Ibu Innah membayar pajak pada pemerintah kolonial agar diizinkan menanami tanah itu. Pada saat itu, rumah Innah, seperti halnya Ibu Cia dikelilingi oleh empat atau lima rumah gubug yang dihuni sanak-saudaranya untuk mengolah tanah mereka.

Bagi orang-orang desa, perjalanan ke Batavia pada tahun 1930-an masih dirasakan sulit. Beberapa penduduk kampung seperti Yusuf, yang datang dari Tiga Raksa, sebuah daerah di Tangerang, masih mengadakan perjalanan dengan kuda dan kereta atau lebih sering dengan berjalan kaki. Yusuf, yang tiba di Kebun Kacang pada tahun 1938, menceritakan tentang perjalanan pertamanya ke Batavia beberapa tahun sebelumnya, ketika ia baru berumur kira-kira tiga belas tahun. Ia dan pamannya, yang telah bekerja di Batavia, meninggalkan desa asalnya untuk pergi berjalan kaki se-

panjang siang dan malam sampai mereka mencapai Batavia. Mereka berjalan sepanjang jalanan yang gelap dan melalui hutan-hutan besar yang sangat menakutkan. Perjalanan semacam itu dipandang sebagai sebuah petualangan yang besar. Orang-orang desa takut di-serang harimau, perampok, roh jahat dan tentara Belanda, yang didesas-desuskan menculik orang-orang Indonesia dan mencampakkannya di bawah jembatan.

Kepindahan ke kota yang dilakukan oleh ibunya Ibu Cia, Innah dan Yusuf merupakan bagian dari perpindahan para petani yang lebih umum dari Bogor dan Tangerang, sebagai sumber utama para migran ke Jakarta.[3] Tekanan penduduk atas tanah dan menurunnya kesempatan kerja di daerah pedesaan, khususnya dari tahun 1920-an, memaksa para petani untuk pindah ke kota. Batavia menjadi daya tarik kuat karena bertambahnya penduduk Eropa dan Cina dan perluasan kantor-kantor, bank-bank dan fasilitas-fasilitas prasarana. Hal ini menciptakan pekerjaan-pekerjaan jasa dan perburuhan bagi penduduk desa yang miskin. Antara tahun 1905 dan 1941 penduduk Batavia (termasuk daerah pinggiran sebelah selatan *Meester Cornelis*) hampir mencapai tiga kali lipat, dari 196.000 menjadi 544.000.[4] Pada dasa warsa tahun 1920-an, penduduk kota tumbuh sangat cepat, kira-kira 75 persen, tetapi menjadi lambat selama dasa warsa berikutnya yang hanya mencapai 2 persen.

Yusuf dan pamannya, berasal dari Bogor yang menyertai Harja, datang untuk mencari pekerjaan. *Kerja* adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang desa untuk buruh upahan. Yusuf menyatakan tidak ada kerja yang tersedia di desanya. Para buruh dibayar dengan barang. Sebagian besar orang desa harus pergi ke Batavia jika mereka ingin memperoleh uang. Tetapi tanpa mengadakan kontak-kontak sebelumnya sebenarnya tidak mungkin untuk bepergian ke Batavia. Biasanya orang yang bepergian itu memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang telah diatur oleh sanak-saudara atau teman sedesa sebagaimana Harja atau paman Yusuf.

---

3 Hugo "Population Mobility in West Java" hal. 127 (Gamb. 3)

4 Hugo "Population Mobility in West Java" hal. 674; Cohen, D.J. "Proverty and Development in Jakarta," Ph. D Thesis, University of Wisconsin, 1975, hal. 19.

1905	196.000
1920	306.000
1930	533.000
1941	544.000

Migrasi berantai dan pengelompokan pekerjaan sudah biasa di beberapa tempat di Jakarta. Seperti Ibu Innah, Harja dan ibunya Ibu Cia, orang-orang desa yang lain dari Bogor datang untuk bekerja sebagai pekerja kebun sayur. Seperti Yusuf, orang-orang desa lainnya dari daerah-daerah dekat Banten dan Tangerang datang untuk bekerja di dermaga-dermaga kota dan atau sebagai para pembantu rumah tangga kaum elite Batavia. Para pembantu rumah tangga datang dari Bogor dan Tangerang, sementara para penjual roti, sayur-mayur dan tukang binatu terutama datang dari desa-desa tertentu dekat Bogor dan para penjaja daging dari Pandeglang (Banten).[5]

Tidak ada persyaratan pendidikan, uang atau kartu tanda penduduk yang diperlukan.[6] Setelah diperkenalkan dengan pekerjaan dan tempat tinggal, maka pekerjaan lainnya kemudian menjadi mudah dicari dan orang-orang desa seperti Yusuf sering berpindah-pindah pekerjaan dan tempat tinggal, dan sering pula menjalankan satu pekerjaan selama kurang dari satu atau dua tahun. Yusuf bekerja di dermaga Tanjung Priok, ikut serta dengan awak kapal antara Indonesia dengan Singapura, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sambilan seperti menjadi tukang kebun dan membersihkan kakus untuk rumah-rumah tangga Belanda di Menteng, sebagaimana pada saat pertama kali ia datang dan tinggal di Kebun Kacang.

Yusuf tidak hidup secara menetap di Batavia, tetapi pulang dan pergi antara desa kampung halamannya dan Kebun Kacang.[7] Setelah bekerja beberapa tahun, Yusuf kembali ke desa kampung halamannya di Tiga Raksa. Selama masa ini ia dapat menabung untuk membiayai perkawinannya dan sebuah rumah baru di desa.[8] "Kami mengadakan pesta-pesta besar dengan pertunjukkan-

---

5 Hugo "Population Mobility in West Java" hal. 130 (Gambar 3).

6 Orang-orang Indonesia di Jakarta harus memiliki kartu tanda penduduk sudah sejak tahun 1860-an (Abeyasekere, S. *Jakarta: A History*, (Singapore, 1987) hal. 67). Sejak masa itu keharusan ini semakin berubah-ubah.

7 Untuk bukti yang lebih bersifat sementara atau migrasi sirkuler pada saat ini lihat Hugo "Population Mobility in West Java" hal. 111-114.

8 Untuk bukti bahwa standar kehidupan di Indonesia pada tahun 1937 adalah tinggi atau lebih tinggi daripada kapan pun sejak saat itu, lihat Papanek, G.F. "The Effect of Economic Growth and Inflation on Workers' Income" dalam Papanek, G.F. (ed) *The Indonesian Economy*, (New York, 1980) hal. 83-84; Sunuharyo, B.S. "Analisa Biaya Hidup di Jakarta" dalam Sumardi, M. dan Evers, H. (eds) *Golongan Miskin di Jakarta*, (Jakarta, 1980) hal. 82-83; Castles, L. *Religion, Politics and Economic Behaviour in Java: The Kudus Cigarette Industry*,(New Haven,1967) hal. 17, 74-79; Mears, L.A. "Economic Development in Indonesia through 1958," *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 14, No. 1 dan 2: 1961: hal. 27-28.

pertunjukkan lawak, makanan dan pawai-pawai sepanjang siang dan malam dari satu desa ke desa lainnya." Dengan penghasilan Yusuf sebanyak 3 *picis* (30 sen) sehari, disamping untuk menyediakan kebutuhan pokok bulanan seperti beras, kopi dan teh, ia pun mampu membeli tanah dan memperoleh tempat tinggal di Kebun Kacang, tetapi ia menganggap itu tidak penting. Ia dengan mudah bisa menumpang di rumah pamannya dan merasa tidak lagi membutuhkan rumah lainnya, karena ia telah memiliki rumah di desa.

Di Kebun Kacang, sebagaimana di desa, sebagian besar kebutuhan pokok penduduk kampung diperoleh dari lingkungan mereka yang terdekat. Mereka mencuci dan mendapatkan air untuk minum dan masak dari sungai. Bahan bakar tersedia dari semak belukar yang tumbuh di kebun dan sekelilingnya. Rumpun-rumpun bambu dan pohon- pohon kelapa digunakan sebagai bangunan rumah. Para tetangga terdekat, biasanya sanak-saudara, membantu mengerjakan bangunan rumah. Ikan segar ditangkap di sungai atau kolam-kolam dan kelebihan sayur-sayuran dan buah-buahan yang tumbuh di dekatnya sering dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga dekat.

Karena rendahnya tingkat kepadatan penduduk perkampungan dan tidak adanya hubungan dengan pihak luar, maka hanya beberapa pedagang memasuki kampung itu. Jika penduduk kampung ingin membeli beras, garam, gula atau teh, mereka pergi ke pasar Tanah Abang--hanya memerlukan waktu lima belas menit perjalanan -- atau berbelanja di dua toko Cina yang terletak di jalan tak beraspal yang membujur ke arah barat dari kampung itu. Di Tanah Abang perdagangan dimonopoli oleh orang-orang Arab, India dan khususnya Cina, yang tinggal di dataran yang lebih tinggi dan di rumah-rumah yang besar. Beberapa pedagang Cina dan Arab datang di Kebun Kacang menjual baju, peralatan dapur atau permen.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan uang tunai dalam perekonomian kampung menjelang akhir dasa warsa, maka ibu dari Ibu Cia mencoba mencari tambahan pendapatan dengan cara menyewakan pondok-pondok kepada para pendatang baru yang secara perlahan-lahan mulai memasuki daerah itu. Pada tahun 1937 ia mengusulkan kepada pemerintah kota untuk membangun pondok-pondok tambahan. Ibu Cia ingat sebuah jajaran gubug yang berukuran sama dengan kandang ayam, yang atap-

atapnya terbuat dari seng bekas kaleng-kaleng kecil yang mulai disewa oleh ibunya. Pada saat itu pemerintah Belanda mengganti kerugian ibunya Ibu Cia dan tetangganya Haji Tejo dengan sebidang tanah yang di kemudian hari menjadi Jalan Thamrin. Ketika kota berkembang lebih dekat ke Kebun Kacang, maka harga tanah di situ meningkat dan mulai terbagi-bagi lebih kecil.

Para pengamat Barat yang membandingkan kampung perkotaan pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an dengan wilayah di kota mereka sendiri melihat adanya kepadatan penduduk yang melimpah, kurangnya fasilitas, buruknya kondisi penghidupan dan menyebarluasnya penyakit.[9] Mereka menggambarkan kampung-kampung itu sebagai "kantong-kantong otonom atau perkampungan pribumi yang lebih menampakkan suasana keterbelakangan umum daripada suasana segar dan teratur yang meliputi bagian kota-kota Eropa."[10] Gambaran ini mungkin benar mengenai kampung lama yang terletak di pusat Batavia, tetapi Kebun Kacang masih merupakan daerah pinggiran. Ibu Cia dan Ibu Innah tidak membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan golongan elite Belanda di bagian Eropa Batavia. Agaknya mereka membandingkan apa yang mereka lihat sebagai suatu kemudahan, kesederhanaan dan kesenangan hidup pada tahun 1930-an dengan kepadatan yang berlebihan dan perjuangan hidup yang lebih besar di kemudian hari.

Jumlah penduduk di Kebun Kacang memang kecil, dan ini mengandung keuntungan. Misalnya polusi tidak merupakan masalah meskipun di situ tidak ada sistem penyaluran kotoran. Memang dinyatakan bahwa pemerintah kolonial pada suatu saat membangun keran air dan kakus umum di atas tanah yang lebih tinggi, di sebelah barat komunitas tetapi beberapa tahun kemudian fasilitas ini mengalami kerusakan dan tidak digunakan lagi.[11] Ada banyak lahan untuk tempat bermain anak-anak dan tempat perte-

---

9 Tesch, J.W. "The Hygiene Study Ward Centre at Batavia: Planning and Preliminary Results 1937-1941," Dissertatie, Leiden, 1948; Tesch, J.W. "Living Conditions of Municipally Employed Coolies in Batavia 1937" dalam Wertheim, W.F. (ed.) *The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology* (The Hague, 1958) 85-224; Abeyasekere *Jakarta* hal. 93-93.

10 Cobban *"The City on Java"* hal. 228.

11 Ini mungkin merupakan bagian dari Program Perbaikan Kampung yang sangat terbatas yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial yang disebutkan oleh Cobban ,J.L *"The City on Java: An Essay in Historical Geography,"* Ph. D Thesis, University of California, *Berkeley, 1970,* hal. 161-166; Krausse, G. "The

muan. Di daerah itu banyak ditumbuhi pohon sehingga lingkungan di sekitarnya terasa teduh dan nyaman. Kehidupan sosial dan agama sebagian besar diadakan secara pribadi di dalam rumah-rumah mereka sendiri. Rumah ibadah yang merupakan sebuah gubug tak terpelihara berada terselip di balik rumah-rumah desa, yang jarang digunakan. Keyakinan agama penduduk merupakan hal yang bersifat pribadi. Pemerintah hanya sedikit mencampuri urusan kehidupan mereka.

Penduduk kampung merasakan diri mereka lebih merupakan bagian dari kelompok yang memiliki hak istimewa, mudah kemana-mana di Batavia daripada sebagai massa penduduk kota yang luas seperti yang terjadi kemudian. Ibu Cia menjadi orang yang paling kaya, memiliki rumah besar, sepeda, tempat tidur, kasur, mesin jahit *Singer* dan bahkan listrik. Sebagian besar anak-anak memasuki Sekolah Desa berbahasa Indonesia yang diselenggarakan pemerintah, dan beberapa orang seperti Ibu Cia mengikuti sekolah pribumi berbahasa Belanda HIS (*Hollandsch Inlandsche School*). Anak perempuan Ibu Innah diingatnya kadang-kadang bermain bola dengan anak-anak Belanda di jalanan Menteng. Ia bepergian dengan naik kuda dan kereta bahkan taksi ke Gambir untuk menonton film. Penduduk kampung merasa bahwa mereka bebas untuk pergi ke mana-mana di kota dengan berjalan kaki, sepeda atau trem listrik. Menteng, Cikini, Gambir, Kota, Tanah Abang, semuanya berada dalam jangkauan mereka. Pada tahun-tahun belakangan itu mereka tidak merasa ingin untuk bepergian ke daerah-daerah ini. Mereka dengan sendirinya menerima bahwa mereka tidak akan pernah dapat hidup sepreti orang Belanda tetapi merasa bahwa semua kebutuhannya bisa dipenuhi dengan mudah.

Ibu Cia, Innah dan Yusuf masih muda tanpa kesulitan seperti yang dialami di usia sedang atau lanjut, dan barangkali hal ini merupakan dunia idealis atau romantis yang mereka ingat. Namun demikian, pandangan mereka mengenai "masa keemasan" diperkuat oleh penduduk kampung lainnya yang diwawancarai Cohen.[12] Penduduk kampung pada umumnya melihat ke belakang pada tahun 1930-an sebagai masa ketenteraman, ketertiban

---

Kampungs of Jakarta, Indonesia: A Study of Spatial Patterns in Urban Poverty," Ph. D Thesis, University of Pittsburgh, 1975, hal. 36.

12 Cohen "Poverty and Development in Jakarta" hal. 276-277.

dan ketenangan. Ada stabilitas dan keamanan. Uang masih berharga. Ada penghargaan terhadap hukum dan ketertiban dan kepercayaan yang lebih di antara rakyat. Buah-buahan masih sempat masak di pohon tanpa kemungkinan dicuri dan sayur-sayuran atau beras berkarung-karung dapat ditinggalkan dengan aman di pinggir jalan. Para tetangga siap menolong satu sama lain. Ada pertolongan yang tulus tanpa mengharapkan upah.[13] Tampaknya mungkin semuanya lebih menarik dibanding dengan pendudukan Jepang yang selanjutnya terjadi. Apapun alasannya, penduduk kampung merasakan hal yang menyenangkan di bawah pendudukan Belanda dibanding dengan tahun-tahun berikutnya.

Zaman Perang, 1942-1949

Dengan datangnya Jepang pada bulan Maret 1942, ketenteraman, kemudahan dan stabilitas "Zaman Normal" berantakan. Sebagian besar penduduk kampung, khususnya mereka yang semula melarikan diri dari Kebun Kacang karena takut kepada Jepang, tetapi juga mereka yang belum tiba dari desa, mengingat kurun waktu itu sebagai keadaan yang paling buruk dalam kehidupan mereka.[14] Para anggota keluarga tercerai-berai, kadang-kadang untuk waktu yang bertahun-tahun, ketika mereka mencoba mengelakkan diri dari Jepang dan menghindari anggapan bahwa mereka pernah bekerja untuk Belanda.

Ketika Jepang menduduki kota, Ibu Innah dan ketujuh anaknya melarikan diri ke rumah mereka dekat Bogor karena takut, membiarkan Harja dan empat orang pembantunya memelihara hasil panen dan rumahnya di Kebun Kacang. Di desa Ibu Innah lebih merasakan kekacauan daripada kenyamanan dan keamanan. Makanan dan pakaian sukar didapat. Sebagian besar orang

---

13 Dengan menulis secara lebih umum, Dick menyatakan bahwa meskipun terjadi eksploitasi dan penindasan, kekuasaan Belanda antara tahun 1901 dan 1942 "diperhalus" dan menegakkan "hak azasi manusia yaitu perdamaian, keadilan dan penghidupan yang layak ... perdamaian dan tenteram (*rust en orde*) yang tidak diragukan merupakan keuntungan utama yang mana masyarakat Jawa telah menerimanya dari masa akhir pemerintahan kolonial." Lihat Dick, H.W. "The Rise of a Middle Class and the Changing Concept of Equity in Indonesia: An Interpretation," *Indonesia*, No. 39, April: 1985: hal. 83.

14 Kesukaran yang hebat tidak diderita oleh orang-orang Jakarta selama pendudukan. Mungkin ada sedikit perubahan pada beberapa bulan pertama dan itu hanya pada akhir tahun 1943, bahwa kehidupan sebenarnya menjadi sangat menyedihkan (Abeyasekere *Jakarta* hal. 138-142).

kekurangan makan mereka, menggantinya dengan makanan akar-akaran dan daun-daun yang direbus dan memakai pakaian karung goni. Tanah tidak dapat ditanami karena irigasi telah rusak. Benih-benih tidak tersedia karena jaringan transportasi telah hancur. Orang-orang desa tidak berani keluar rumah untuk menanami sawahnya karena takut ditangkap Jepang. Tentara Jepang sangat sering menggerebek desa untuk mencari pemuda-pemuda untuk dijadikan kuli dan para wanita dipaksa melayani nafsu seksual mereka atau dijadikan pembantu rumah tangga. Mereka merampas hasil panen dan mengambil tempat tidur besi, ternak, makanan dan perabot rumah tangga. Selama lebih kurang enam bulan, sejauh yang dapat diingat Ibu Innah, ia dan anak-anaknya kembali ke Kebun Kacang.[15]

Sebaliknya daerah pedalaman, Kebun Kacang, sebagaimana bagian Jakarta yang lain, tetap dalam keadaan tenang. Tentara Jepang yang menyerbu sebenarnya mengabaikan kampung. Keluarga Ibu Cia tetap tinggal di sana karena mereka tidak punya tempat ke mana harus pergi. Ayah Ibu Cia telah meninggal karena sebab alami dan suami Ibu Cia menjauhkan diri dari orang-orang Belanda, dengan siapa ia telah bekerja. Apabila orang Jepang mengetahui bahwa suami Ibu Cia bekerja untuk orang Belanda, maka ia akan dibunuh. Sanak-saudara yang lain dari keluarga itu juga berpura-pura tidak memiliki hubungan dengan Belanda, dan mulai bekerja pada Jepang, yang kekurangan tenaga kerja dan sangat menginginkan untuk menerima mereka yang bersedia. Suami Ibu Cia mulai bekerja di Departemen Tekstil, sementara sanak-saudara Ibu Cia lainnya yang pernah bekerja untuk membersihkan, memasak dan merawat kebun-kebun dan rumah-rumah orang Belanda, hanya meneruskan pekerjaannya dan melayani orang-orang Jepang.

Dengan masuknya orang-orang Belanda dan dirintanginya orang-orang Cina untuk berbisnis oleh tentara Jepang, semakin

---

15 Banyak orang Jakarta yang semula melarikan diri dari kota tetapi beberapa bulan kemudian mulai kembali. Dengan mendengar adanya kondisi-kondisi yang lebih baik di kota, orang-orang desa yang putus asa berbondong-bondong pergi ke kota (Abeyasekere *Jakarta* hal. 140-141; Hugo "Population Mobility in West Java" hal. 243; Kroef, J.M. van der "The City, its Culture and Evolution" dalam Kroef, J.M. van der *Indonesia in the Modern World* (Bandung, 1954) hal. 157-58; Heeren, "The Urbanization of Djakarta," *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* (*Jakarta, 1955), 8, 11, hal. 734.

banyak orang Indonesia mulai pindah ke pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan dan bisnis. Memang lebih mudah petani Jawa untuk menyelundupkan sekarung kecil beras atau beberapa buah-buahan atau sayur-sayuran ke kota daripada pedagang besar yang mungkin barang-barangnya lebih mencolok sehingga dapat disita.[16] Meskipun penduduk kampung tidak menyadari seluk-beluk itu sepenuhnya, namun mereka menyaksikan orang-orang Belanda diseret masuk ke dalam penjara dan semua barangnya disita. Mereka juga menyaksikan toko-toko Cina dijarah oleh tentara Jepang. Penjajahan Jepang secara cepat menjadi semakin kejam, ketika bahan makanan, pakaian dan persediaan obat-obatan kosong. Kegiatan impor menjadi terhenti dan sebagian besar sarana telah diambil alih oleh Jepang untuk upaya perangnya. Di kampung-kampung dan sekitarnya dan di sepanjang jalan di Jakarta, bengkel-bengkel reparasi sepeda, tukang-tukang becak, pelacur-pelacur dan para pedagang yang menjual botol-botol kosong dan pakaian-pakaian bekas telah menjadi pemandangan yang mencolok.[17] Abeyasekere mencatat adanya peningkatan dalam produksi lokal dan penjualan, ketika orang-orang membuat sabun, lilin, rokok dan barang-barang kecil lainnya yang tidak tersedia.[18]

Beberapa penduduk kampung merasa bahwa mereka diperlakukan secara baik oleh orang Jepang, selama mereka segera memenuhi permintaan-permintaannya dan bekerja keras untuknya, tetapi sebagian besar merasa sangat benci. Yusuf, yang pernah bekerja pada Belanda di Menteng, beralih pekerjaan menjadi tukang becak. Ia menyatakan bahwa Jepang telah menjadikannya pedal yang sangat meletihkan: "Saya lelah, saya tidak melanjutkan, tetapi orang Jepang itu berteriak 'bakaro Indonesia' (bodoh orang Indonesia) dan memaksa saya melanjutkan. Jika saya berhenti dan menolak untuk melanjutkan, maka saya akan dipukul dan

---

16 Banyak terjadi kontradiksi antara perdagangan menengah dan kecil. Beberapa penulis menyatakan bahwa selama pendudukan Jepang sebagian besar pedagang Cina, para pedagang kecil Indonesia dan pemilik-pemilik warung menderita karena pembatasan-pembatasan, mobilitas yang terbatas dan kapasitas pembelanjaan konsumen: Swasono, Sri Edi (ed) *Entrepreneurship in Indonesia*, (Jakarta, 1976) hal. 62; Sutter, J.O. *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy, 1940-1955*, (Ithaca, 1959) hal. 268-269.

17 Becak-becak muncul di Jakarta sebelum perang, tetapi menjadi lebih banyak di bawah pendudukan Jepang untuk mengatasi kekurangan kendaraan (lihat juga Sutter *Indonesianisasi* hal. 164).

18 Abeyasekere *Jakarta* hal. 141.

mungkin dibunuh." Selama siang hari para penduduk kampung bekerja pada Jepang, sedangkan pada malam hari mereka mencoba untuk membunuh mereka. Mereka bergabung dengan kelompok-kelompok persekongkolan yang menyergap kendaraan-kendaraan Jepang dengan cara melintangkan pohon-pohon di tengah jalan dan membunuh para penumpangnya dengan senjata apa pun, tombak, kampak, pisau atau senapan yang berada di tangan mereka.[19]

Setelah satu atau dua tahun, jumlah penduduk yang meningkat mulai menuju ke Batavia untuk melepaskan diri dari penderitaan dan kelaparan di desa.[20] Dari tahun 1942 sampai tahun 1944, penduduk kota meningkat diperkirakan 100.000 orang. Pertumbuhan yang cepat ini diikuti oleh kecenderungan untuk menurun dalam tiga tahun berikutnya. Tidak semua orang berhasil dalam melewati transisi dari daerah pedalaman ke kehidupan dan pekerjaan dalam kota. Salah satu dari sanak-saudara Ibu Innah menggambarkan bagaimana ia kebetulan menemukan mayat atau tubuh orang yang sekarat ketika ia menjajakan sayur-sayuran sepanjang jalan di Batavia. Statistik menyatakan bahwa tingkat kematian melonjak secara mencolok. Pada tahun 1942, 14.832 kematian terdaftar di kota, sedangkan dua tahun kemudian, 40.845 yang terdaftar.[21] Mereka yang beruntung dan memiliki kontak-kontak pribadi dengan orang-orang di kampung seperti Kebun Kacang membuat jalur ke sana.

Pada suatu saat antara tahun 1945 dan 1949, Haji Tejo, yang mendiami rumah di dekat Ibu Cia, dengan licik mengambil hak tanah-tanah rawa yang dulu dimiliki oleh pemerintah kota. Sebelum pendudukan Jepang, pemerintahan kolonial telah membeli tanah ini dari keluarga Ibu Cia dan keluarga Haji Tejo untuk pembangunan jalan besar yang diusulkan, yang kini disebut Jalan Thamrin. Ketika Belanda sudah tidak berkuasa lagi, tidak seorang pun memiliki hak yang jelas terhadap tanah itu dan ibu dari Ibu Cia merasa ragu untuk mulai menggunakannya lagi. Tetapi Haji

19. Bagaimanapun, laporan-laporan lain menyatakan bahwa masa "bersiap" merujuk kepada tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemuda Indonesia melawan Sekutu (Inggris dan Belanda), pada dua bulan terakhir tahun 1945. (Smail, J.W.R. *A Study in the Social History of Indonesian Revolution*, (Ithaca, 1964); Abeyasekere Jakarta hal. 151).

20 Hugo "Population Mobility in West Java" hal. 243.

21 Kementerian Penerangan *Kota Pradja Djakarta Raja*, hal. 401, 404.

Tejo tidak memiliki keraguan semacam itu dan secara pintar menetapkan tanah itu sebagai miliknya. Para penguasa Jepang mendorong dilakukannya penanaman atas tanah perkotaan yang kosong untuk membantu mengatasi kekurangan bahan makanan yang mengerikan.[22] Selama perjuangan kemerdekaan, kaum Republiken juga mendorong dilakukannya pengambilalihan terhadap tanah di Jakarta, sebagai tanda perlawanan terhadap Belanda.

Dengan datangnya para pendatang baru, Haji Tejo membangun pondok- pondok persewaan. Meskipun terlambat, keluarga-keluarga Ibu Cia dan Ibu Innah mengikuti usaha Haji Tejo ini. Beberapa sanak-saudara yang datang ke daerah itu hanya diberikan bidang-bidang tanah untuk dibangun atau ditanami. Orang-orang lain menukar bahan makanan untuk tanah yang mereka gunakan. Tanah dijatahkan dalam kapling-kapling daripada diukur secara tepat dengan meteran atau kaki. Tampaknya tidak ada pola yang tunggal dalam pengalihan tanah. Dalam pandangan Ibu Cia, bagaimanapun, banyak tanah yang hanya diambil alih oleh "orang luar" segera setelah Belanda kehilangan kekuasaannya.

Memang tetap tidak jelas mengenai apa yang dilakukan keluarga-keluarga Ibu Cia, Ibu Innah dan Yusuf selama perjuangan kemerdekaan antara tahun 1945-1949. Mereka begitu sibuk dalam usaha untuk memperpanjang hidup dari hari ke hari, dan dalam ingatan mereka, pendudukan Jepang berlangsung selama empat tahun itu dianggapnya sebagai kurun waktu kekacauan, ketidakpastian dan kebingungan. Sebagian besar penduduk kampung hanya menganggap bahwa Belanda telah kembali dan tidak menyadari bahwa Inggris merupakan bagian dari kekuatan lain yang juga akan menduduki. Mista, yang meninggalkan Cirebon menuju Jakarta, menyatakan bahwa kereta api tidak berjalan secara teratur dan ia terpaksa bepergian dengan berjalan kaki. Ia melakukan perjalanan dari desa ke desa dan bahaya mengintai di mana-mana. Di desa-desa Jawa Barat gerombolan-gerombolan penjahat yang telah bertempur melawan Jepang dan kemudian Belanda, kini berbalik melawan bangsanya sendiri. Mereka menggerebeg desa-desa yang miskin, mencuri bahan makanan dan ternak, dan menculik atau membunuh kaum pria. Mista tidak membawa uang, sehingga ia

---

22 Kementerian Penerangan *Kota Pradja Djakarta Raja* hal. 109, 110, 303; Abeyasekere *Jakarta* hal. 141.

tidak akan dikenali sebagai kaum Nasionalis atau Belanda. Jenis-jenis mata uang yang berbeda digunakan di daerah-daerah yang dikuasai Belanda dan kaum Republiken, dan seseorang akan ditangkap jika membawa mata uang yang tidak berlaku di daerah yang bersangkutan dan akan dituduh sebagai mata-mata bagi pihak lain dan akan dibunuh.[23]

Memang sulit untuk mengetahui siapa melawan siapa karena banyak kelompok bersaing dan pembunuhan maupun kematian telah menjadi cara hidup. Bahkan para anggota dari keluarga yang sama satu sama lain mencurigai sebagai mata-mata. Ayah Mista menjadi serdadu dalam *Royal Netherland East Indies Army*, sementara Mista bekerja untuk orang Jepang. Untuk melindungi diri mereka, penduduk kampung berbohong, mengambil jarak terhadap mereka yang ditakuti dan belajar untuk mengubah identitas mereka dengan cepat. Ketika Jepang datang, mereka melepaskan segala ikatan dengan Belanda. Ketika Belanda kembali pada tahun 1945, mereka berpura-pura tidak punya hubungan apa-apa dengan Jepang. Selama empat tahun berikutnya, ketika Belanda menyerang dari pangkalannya di Batavia untuk memperoleh kembali kekuasaannya terhadap kaum Nasionalis Indonesia yang banyak menguasai daerah pedalaman, para penduduk kampung banyak yang bermuka dua. Di kota mereka berpura- pura menjadi pro-Belanda, sementara di desa mereka berpura-pura menjadi kaum Nasionalis Indonesia.

Zaman Merdeka, 1949-1965

Penduduk kampung mengambil keuntungan dari kekacauan ekonomi dan ketidakmampuan administratif yang melilit zaman Soekarno. Selama awal tahun 1950-an, mereka tertarik untuk hidup di kota karena peluang-peluang untuk mendapatkan penghasilan yang timbul akibat kemajuan ekonomi sesudah perang Korea. Ti-

---

23 Uang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) atau Gulden adalah mata uang Belanda, sedangkan uang Jepang ialah Yen dan setelah tahun 1946, Rupiah Indonesia adalah mata uang Republik. Kedua jenis mata uang ini dapat dijumpai di kota, tetapi mata uang Belanda di desa digunakan sebagai tanda kolusi dengan Belanda. Untuk rincian lebih lanjut mengenai mata uang lihat Cribb, R. "Political Dimension of the Currency Question 1945-1947," *Indonesia*, No. 31, April: 1981: hal. 113-135; Cribb, R. "The Nationalist World of Occupied Jakarta, 1946-1949" dalam Abeyasekere *From Batavia to Jakarta* hal. 99-101.

dak seperti para ekonom dan kelas menengah, mereka tidak tampak disusahkan oleh hiperinflasi, kerusakan prasarana dan kekurangan bahan makanan yang timbul setelah tahun 1957.

Selama tahun 1950-an penduduk kampung merasakan adanya kebahagiaan rohani dan jasmani serta kebebasan. Mereka tidak merasakan adanya sesuatu yang dapat menjadikan suasana seburuk dasa warsa sebelumnya. Sebagai perbandingan, perjalanan menjadi mudah. Meskipun bis-bis, jalan-jalan raya, jalan-jalan kereta api dalam kondisi yang buruk, namun pada akhirnya dapat berfungsi. Surat-surat identitas, meskipun harus diperoleh secara resmi, namun tidak diteliti dengan cermat.[24] Mista menyatakan bahwa ia dapat melakukan perjalanan secara gratis. Ia mengatakan pada kondektur kereta api, pada peristiwa-peristiwa langka, kalau ditanya, bahwa ia sedang mencari orang tuanya yang hilang selama perang.

Sebagian besar para informan saya, datang di Kebun Kacang antara tahun 1950-1968. Mereka memulai perjalanan mereka ke kota selama akhir tahun 1940-an -- awal tahun 1950-an, karena perpindahan yang diakibatkan oleh peperangan, kekerasan dan kesukaran ekonomi di desa. Hal ini cocok dengan kenaikan dramatis penduduk Jakarta setelah tahun 1948. Dalam penelitian terhadap 11.500 penduduk kampung di Jakarta, Heeren menemukan bahwa sepertiganya telah datang sejak tahun 1949.[25]

Sebagian besar penduduk kampung tidak datang secara langsung ke Kebun Kacang dari kampung halaman mereka. Suami Sumira, Janto, diangkat menjadi tentara Jepang (Heiho), kemudian bergabung dengan Sekutu melawan Jepang dan kemudian dengan kaum Nasionalis melawan Belanda. Ia telah melakukan perjalanan ke Jawa, Borneo dan Sumatera. Sumira, yang telah dilatih oleh Palang Merah selama perang, mengikuti suaminya dalam mencari kehidupan baru, ketika mereka melakukan perjalanan dari satu saudara ke saudara yang lain, dari Semarang ke Solo dan Jakarta dan kembali ke Solo dan Semarang lagi antara tahun 1948-1952. Satu contoh lagi dari Kebun Kacang, Mus, berasal dari Klaten, berdagang telur, cabe rawit dan hasil pertanian lainnya dengan kereta api antara Yogyakarta, Semarang dan Surabaya. Selama

---

24 Lihat catatan 6.

25 Heeren "The Urbanization of Djakarta" hal. 704.

awal tahun 1950-an, pada usia 11 tahun, Juria pergi ke Menteng untuk mengikuti kakak perempuannya sebagai pembantu rumah tangga. Orang tuanya telah meninggal dunia selama perang dan revolusi dan ia tidak menyukai tinggal bersama sanak-saudaranya di Depok, yang berjarak 30 kilometer sebelah selatan Jakarta. Calon suaminya, Salim, juga datang dari sebelah selatan Jakarta dekat Parung, yang selama peperangan ia telah kehilangan orang tuanya, tanah mereka dan bebeknya yang banyak.

Para pendatang baru yang pertama di Kebun Kacang, seperti keluarga-keluarga Ibu Innah dan Yusuf, berasal dari Jawa Barat, dekat kota-kota Bogor dan Tangerang. Pada tahun 1954, Ibu Citro adalah orang Jawa Tengah pertama yang menyewa tempat tinggal di lingkungan Innah. Ia kemudian mengundang sanak-saudara dan teman-temannya datang ke daerah itu, sekaligus bertindak sebagai perantara bagi Ibu Innah yang ingin menyewakan lebih banyak gubug. Ketujuh anak Ibu Innah satu persatu menikah dan Ibu Innah memerlukan uang untuk merayakan pesta pernikahan itu. Setelah penikahan, masing-masing anaknya diberi jatah sebidang tanah, dekat dengan rumah Innah, yang di atasnya dapat dibangun rumah masing-masing. Lama-kelamaan kebun sayur milik Ibu Innah secara cepat berkurang dan mata pencariannya tergantung pada persewaan pondokan dan dagang daripada hasil perkebunan yang biasa dipasarkan.

Pada tahun 1957, ketika Ibu Citro memperkenalkan Sumira de-ngan daerah itu, kebun sayur yang dulu itu telah menjadi perkampungan kumuh. Yang masih tersisa adalah pohon mangga, pohon jambu, dan pohon kelapa. Semua tetumbuhan hijau lainnya musnah. Rumah-rumah reot dalam segala bentuk dan ukuran dibangun dan berbagai rupa bahan untuk membangun rumah-rumah itu yang dicari dari sampah, lambat laun menghabiskan tanah yang tersedia. Rumah Sumira sendiri dibangun dari peti-peti bambu yang hitam bekas pengangkut arang kayu. Atapnya sebagian besar berasal dari seng bekas kaleng-kaleng logam dan sebagian dari daun kelapa. Tidak ada jendela kecuali lubang-lubang yang renggang tampak di atap dan dinding-dindingnya. Lantainya terdiri dari tanah yang dipadatkan, yang sering berubah menjadi lumpur di kala musim hujan. Menurut ukuran tahun 1970-an, gubug itu besar, 60 meter persegi, tetapi tak seorang pun ingin

menempatinya dan Sumira bisa menyewakannya hanya dengan membayar Rp 25,- sebulan (5 liter beras).[26]

Keluarga Ibu Cia secara bijak telah memilih untuk membangun rumah mereka di atas tanah yang sudah ditinggikan di sebelah barat laut Kebun Kacang. Tetapi penduduk kini menyebar ke setiap penjuru dan membangun pada setiap bidang tanah yang tersedia dan mengabaikan ketinggiannya di atas Sungai Cideng. Para pendatang baru yang paling akhir dan paling miskin menempati tanah paling dekat dengan sungai. Sungai itu meluap pada setiap musim hujan dan hampir selalu membanjiri tepi-tepinya, kadang-kadang secara berulang-ulang. Air hitam pekat yang meluap dan deras sering mencapai ketinggian satu meter, membanjiri kampung itu. Setiap rumah tangga berupaya sedapat mungkin untuk pindah di luar jangkauan air yang meluap itu. Para keluarga memindahkan dirinya dan beberapa harta miliknya di atas atap atau di rumah-rumah tetangganya jika mereka cukup beruntung terhindar dari banjir. Memang hal itu sulit dilakukan. Mereka menunggu sampai air surut dan kemudian mulai menata kembali kehidupan mereka. Tetapi bau air yang surut, yang membekas di dinding menyebabkan berjangkitnya radang usus atau penyakit-penyakit lainnya.[27]

Setelah banjir, jalan-jalan kecil dari tanah berubah menjadi rawa sehingga orang yang akan lewat harus menyeberang terbenam dalam lumpur. Para pedagang serbuk gergaji menjajakan dagangannya dari rumah ke rumah, sedang serbuk itu ditaburkan di permukaan tanah yang berlumpur untuk menghisap kelembaban. Dalam upaya meninggikan daerah itu di atas banjir tahunan, papan-papan kayu dan batu-batu besar yang didapat kembali dari tempat-tempat bangunan sepanjang Jalan Thamrin diletakkan dari ujung ke ujung sepanjang jalan-jalan kecil dan di dalam rumah-rumah.

Penduduk kampung yang terpaksa keluar dari tanah yang diperlukan untuk pembangunan Jalan Thamrin, Hotel Indonesia, Sarinah atau Kompleks Olah Raga Senayan pindah ke Kebun Ka-

---

26 Dengan tidak stabilnya mata uang, maka Rupiah paling baik dipahami berkenan dengan jumlah yang sama dengan beras. Lihat Apendiks, untuk harga beras per liter dari tahun 1953 sampai 1981. Setiap keluarga rata-rata yang terdiri dari 5 anggota membutuhkan 2,5 sampai 3 liter beras per hari.

27 Untuk gambaran kehidupan serupa di pasar Senen pada saat ini, lihat Abeyasekere *Jakarta*, hal. 174.

cang dan menambah kepadatan yang sedang berkembang. Mereka membawa bahan-bahan bangunan lebih banyak dari kampung mereka yang digusur. Menurut perkiraan resmi, sebuah daerah seluas 1,8 hektar seperti Kebun Kacang, berpenduduk antara 400 sampai 500 orang.[28]

Sebaliknya dari lingkungan mereka yang memburuk, penduduk kampung tampaknya tidak menderita akibat kondisi-kondisi ekonomi yang semakin kacau setelah tahun 1957. Mereka tidak disusahkan oleh kerusakan telpon dan pelayanan pos, yang jarang ataupun belum pernah mereka gunakan. Mereka tidak mengeluh akibat kelangkaan sarana bis dan taksi, karena mereka bepergian ke sebagian tempat dengan berjalan kaki, dan sebaliknya becak-becak juga memenuhi kebutuhan transportasi. Para tukang becak merasakan bahwa diri mereka sangat dibutuhkan. Anehnya, penduduk kampung tidak tampak disusahkan oleh diberlakukannya penjatahan makanan. Mereka tidak khawatir sebagaimana kelas menengah menggunakan waktunya berdiri antri. Agaknya mereka dapat mengubah sistem perangsuman demi keuntungan mereka sendiri, dengan cara berdiri dalam antrian atas dasar suruhan orang-orang yang tidak punya waktu untuk melakukannya. Kadang-kadang mereka dapat memperoleh dua atau tiga kali jumlah jatahnya, dengan memiliki lebih daripada satu anggota dari keluarga mereka dalam antrian. Sumira menjelaskan bagaimana ia dan sejumlah tetangganya memperoleh beras dan tekstil pada harga-harga yang telah tersubsidi dan kemudian dijual kembali ke pasar gelap.

Penduduk kampung mengubah kekurangan, penjatahan dan kurangnya barang-barang impor demi keuntungan mereka sendiri dengan cara-cara lain. Mereka memperbaiki sepeda dan radio, mengangkut barang-barang, menyampaikan pesan-pesan dan menyalurkan kembali barang-barang dagangan hasil curian. Mereka mendaur ulang gelas, kertas, kardus, logam, aluminium dan onderdil-onderdil mobil. Mereka menjual air, serbuk gergaji kayu, kayu bakar, minyak tanah, arang kayu dan daun-daun pisang yang sangat dibutuhkan untuk membungkus makanan. Mereka memperdagangkan apa pun yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dengan gaya hidup yang sederhana, keluwesan, dan sikap mereka yang gampang-gampangan terhadap waktu, penduduk kampung

---

28 Watts, K et al. *Rentjana Pendahuluan/Outline Plane*, (Jakarta, 1957) hal. 13 dan 14.

tampaknya acuh tak acuh terhadap kekacauan yang semakin meningkat dalam perekonomian dan pemerintahan.[29]

Penduduk kampung menegaskan bahwa pekerjaan dan penghasilan mudah didapat. Banyak lowongan tersedia. Pada tahun 1950-an Sumira melamar pekerjaan di rumah sakit, yang dikatakannya bahwa di situ ada "delapan puluh lowongan dan hanya ada sepuluh pelamar." Hal ini bukan luar biasa, bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak berketerampilan. Penduduk kampung menyebutnya sebagai "suatu masa ketika pekerjaan mencari orang bukan sebaliknya." Para pegawai atau pekerja dari dermaga-dermaga, bank-bank dan Departemen Urusan Sampah Kota memasuki kampung itu pada awal tahun 1960-an untuk merekrut pekerja.

Karena tersedianya pekerjaan, maka suami Sumira, Janto siap beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, dengan harapan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ia mencoba paling tidak delapan pekerjaan yang berbeda-beda -- reparasi sepeda, becak, mesin jahit dan radio, membuat dan menjual es remuk, bekerja pada tempat bangunan, membeli dan menjual radio tua dan barang-barang lainnya. Tingkat perpindahan pekerjaan yang tinggi ini merupakan sesuatu yang khas dari penduduk kampung (khususnya laki-laki) ketika mereka berupaya untuk memperbaiki nasib mereka dan mendapatkan pekerjaan yang mereka sukai.

Pada akhir tahun 1950-an, penduduk kampung mulai beralih ke perdagangan kaki lima. Dengan menurunnya pertumbuhan sayur-mayur, Harja dan sanak-saudaranya beralih ke perdagangan sayur, mengangkutnya dengan berjalan kaki ke pasar Tanah Abang, Senen dan daerah Menteng. Tibanya para pendatang baru menimbulkan beragam jenis perdagangan lain di daerah itu.

Timbulnya perdagangan kaki lima sebagai pekerjaan utama seiring dengan transformasi Jalan Thamrin menjadi jalan protokol. Penduduk kampung mengamati, bahwa meledaknya pembangunan pada masa Soekarno telah menggerakkan pusat kota secara cepat ke arah selatan, menuju Kebun Kacang. Pada mulanya kaum perempuan kampung merasa malu berdagang. Mereka memasak kue-kue di rumahnya dan merekrut anak-anak untuk menjajakannya sepanjang jalan raya yang baru. Namun pada awal tahun 1960-

29 Untuk laporan lain mengenai bagaimana penduduk kampung bertahan pada saat ini lihat Cohen "Poverty and Development in Jakarta" hal. 20-21.

an, sebagian besar perempuan membawa barang-barang dagangannya sendiri dengan berjalan kaki menyeberangi dan menjajakannya di sekitar tempat-tempat bangunan baru. Para pekerja bangunan selalu lapar dan dalam sejam kue-kuenya terjual habis dan mereka kembali ke rumah untuk memasak kue-kue lagi. Mista teringat pernah bekerja di bangunan Hotel Indonesia dan toko serba ada Sarinah dan memiliki uang lebih banyak daripada yang dapat ia gunakan.

Orang yang datang ke kebun Kacang sejak tahun 1950-an memperlihatkan inisiatif dan usaha yang jauh lebih besar daripada para penduduk lain yang telah menetap lama. Para pendatang baru tidak siap untuk menerima pekerjaan tetap sebagai satpam, pesuruh di kantor-kantor pemerintah atau swasta. Gajinya terlalu rendah. Keluarga-keluarga yang sudah mapan seperti Ibu Cia dan Ibu Innah yang para suaminya telah menerima pekerjaan yang terjamin namun dengan gaji rendah di kantor-kantor pemerintah, merasakan bahwa penghasilannya terkikis oleh inflasi antara tahun 1963-1967.[30] Para pekerja mandiri, tukang-tukang becak dan para pedagang hanya menaikkan harga-harganya ketika biaya hidup mereka meningkat.[31]

Antara tahun 1962-1968 sebagian besar pendatang baru dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk membeli rumah di Kebun Kacang. Meskipun keluarga-keluarga asli tetap menguasai status dan rumah besar, namun mereka kekurangan uang tunai dan ingin menjual pondok yang sebelumnya mereka sewakan. Pada tahun 1962, sebuah rumah yang berukuran 30 sampai 60 meter persegi berharga antara Rp 3.000,--Rp 6.000,- (100-200 liter beras). Harga bervariasi menurut ukuran rumahnya, tingkat ketahanan tanahnya terhadap banjir, legalitas hak dan hubungan pribadi antara pembeli dan penjual. Mereka yang telah menyewa tanah dalam jangka waktu lama dapat membeli tanah serta gubug di atasnya dengan harga murah. Juria yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, merupakan salah seorang di antara mereka. Salim suaminya Juria bekerja sebagai tukang becak. Selama lima tahun sejak kedatangannya di Kebun Kacang, mereka telah menabung secukupnya untuk membeli sebuah gubug seluas 21 meter

30 Mackie, J. *Problems of the Indonesian Inflation*, (Ithaca, 1967) hal. 81-83 (Lampiran 1).

31 Cohen "Poverty and Development in Jakarta" hal. 20-21.

persegi. Kemudian Juria membantu kakaknya membayar rumah yang disewanya di sebelahnya. Sumira membeli rumah seluas 60 meter persegi dari Ibu Innah, dari penghasilan yang diperolehnya dari jualan makanan matang dan usaha suaminya dalam reparasi becak. Pada tahun 1968, Ibu Innah menjual sebagian besar tanahnya dan menyewakan pondok-pondok yang tidak diwarisi oleh anak-anaknya. Proses yang sama juga terjadi di lingkungan Ibu Cia di mana kelompok-kelompok yang terdiri dari 15 sampai 20 warga yang masing-masing mempunyai hubungan keluarga, tinggal sebelah-menyebelah dan para pendatang baru dari Jawa menempati tempat-tempat yang kosong pertama menyewa dan kemudian membeli pondok-pondok tersebut.

Penjualan sebagian besar tanah tidak terdaftar secara resmi. Hanya keluarga-keluarga pendiri di daerah Ibu Cia dan satu atau dua keluarga lainnya yang memahami prosedur-prosedur pemerintahan formal dapat memperoleh hak yang sah atas tanah.

Sebagian besar penduduk kampung memiliki tanah mereka atau transaksi-transaksi rumah "tercatat" dalam dokumen-dokumen khusus. Meskipun disaksikan oleh pimpinan warga setempat dan distempel serta ditandatangani oleh lurah, namun pemerintahan kota akan tetap menganggapnya sebagai tidak memiliki status yang sah.

Ketidakmampuan pemerintah selama tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an menguntungkan bagi mereka yang tinggal di kampung-kampung pusat kota seperti Kebun Kacang. Para pedagang kaki lima dan tukang becak, meskipun dikecam, namun tidak disingkirkan.[32] Kampung-kampung yang terpaksa digusur untuk memenuhi beberapa dari impian Soekarno segera tumbuh kembali di mana-mana. Penduduk kampung tidak merasa sulit untuk membangun kembali diri mereka sendiri di daerah lain dekat pusat kota. Penertiban pedagang atau penggusuran bukan merupakan beban berat seperti sepuluh tahun kemudian, ketika tidak ada tempat di mana pun untuk pindah.

Sebagian besar penduduk kampung sangat sibuk untuk mencari nafkah sehari-hari dan tidak ada waktu untuk memikirkan

---

32 Upaya-upaya dilakukan pemerintah kota untuk menghapus pedagang kaki lima, tukang becak, gelandangan dan gubug-gubug liar dari daerah-dearah umum di kota, namun mendapat sedikit keberhasilan (DKI, karya Jaya, (Jakarta, 1977) hal. 39, 73, 91, 142; Abeyasekere *Jakarta* hal. 196-199.

politik saat itu. Mereka bingung dengan adanya banyak partai selama tahun 1950-an.[33] Setiap partai berupaya mendapatkan dukungan melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap massa. Uang, makanan, latihan kejuruan dan pekerjaan-pekerjaan ditawarkan. Karena memiliki sedikit, maka penduduk kampung merasa sulit untuk menolak tawar-tawaran ini. Tetapi biasanya mereka mendukung satu kelompok atau kelompok yang lain, karena mereka telah dinasehati untuk melakukan itu oleh seorang teman, majikan atau pimpinan. Sulit menentukan apa yang dipertahankan kelompok-kelompok itu atau apa perbedaan-perbedaannya. Seorang penduduk kampung yang pintar, Mista, pura-pura mendukung tiga partai utama (Masyumi, PKI, dan PNI) untuk melindungi dirinya dari tuduhan mendukung yang satu dan tidak mendukung lainnya. Ia telah mendapatkan pengalaman yang baik selama zaman Belanda, pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan, bahwa adalah berbahaya berpihak pada salah satu partai. Penduduk kampung mengetahui dari pengalaman praktis, bahwa sementara kaum elite bertarung demi kekuasaan di tingkat puncak, rakyat kecil tergencet di antaranya sekalipun tidak ada kesalahan yang mereka lakukan.

Namun demikian, penduduk kampung mencintai Soekarno. Pada pertengahan tahun 1950-an banyak orang yang berjalan kaki dari rumah ke Lapangan Merdeka setiap Hari Kemerdekaan, untuk mendengarkan pidatonya. Orang-orang mengatakan bahwa dalam kesempatan semacam itu, angkutan cuma-cuma disediakan dari banyak daerah di Jawa. Suara-suara melalui pengeras suara memberitahukan adanya rapat umum, dan Jalan Thamrin penuh dengan para pejalan kaki yang menuju ke Lapangan Merdeka. Setelah sampai di sana, massa duduk di atas balok-balok kayu, sementara Soekarno berdiri dan berpidato tanpa teks selama berjam-jam. Ia berpidato mengenai kebesaran negara dan harkat kemanusiaan rakyat. Ia berpidato secara pribadi, sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya. Mereka tergetar dan bangga bahwa orang yang berpandangan luas dan cerdik semacam itu siap untuk berpidato dihadapan mereka. Meskipun para penduduk kampung hidup secara keras dan melakukan pekerjaan kasar, namun Soe-

---

33 Untuk jumlah partai lihat Kementerian Penerangan *Kota Pradja Djakarta Raya*, (Jakarta, 1952) hal. 115- 116; Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia*, (London, 1981) hal. 238.

karno membuat mereka merasa penting sebagai para anggota masyarakat baru. Ia berjalan di antara mereka dan melakukan perjalanan dalam arak-arakan terbuka dan mudah dicapai dan tidak dipagari oleh pengawal militer dan mobil-mobil antipeluru. Menjelang pidato-pidato hari kemerdekaan tahun 1950-an, sebagian penduduk kampung sudah tidak menyadari tentang Soekarno atau apa yang diartikan dengan istilah "Presiden."

Pemberontakan tahun 1965 menandai perubahan dramatis dalam politik nasional. Keseimbangan rapuh yang dicoba untuk dipertahankan Soekarno, dengan Tentara di sisi kanan dan PKI di sisi kiri telah hancur. Meskipun sampai hari ini, tidak ada laporan yang akurat dari rakyat dan motif-motif di balik terjadinya peristiwa yang menakutkan ini, enam jenderal dibunuh dan ratusan ribu anggota PKI disembelih secara sewenang-wenang selama enam bulan berikutnya. Pemerintahan yang didominasi militer sesudah itu mendapatkan kekuasaan mengutuk PKI karena melakukan pemberontakan, sedangkan para sarjana dan anggota PKI yang masih hidup menyatakan bahwa pemberontakan itu diprakarsai oleh bagian tentara yang membenarkan pelenyapan terhadap PKI.[34]

Meskipun kenyataannya pasukan-pasukan tentara telah berkumpul di Lapangan Merdeka, namun penduduk Kebun Kacang tidak berpikir mengenai apa yang sedang terjadi. Untuk melindungi diri terhadap penangkapan yang mungkin dilakukan terhadap mereka, maka sampai hari ini mereka pura-pura tidak mengetahui sesuatu. Mereka tetap meneruskan pekerjaan sehari-harinya misalnya menarik becak, sebagai pembantu rumah tangga, berdagang atau pekerjaan bangunan. Hanya ketika keadaan perang diumumkan dan para penduduk kampung diperingatkan oleh pimpinan mereka untuk tidak menghadiri pertemuan-pertemuan atau pergi ke jalan raya, baru mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang serius telah terjadi. Kemudian mereka mengurung diri di rumah mereka masing-masing, takut untuk berbicara dengan tetangga mereka atau keluar rumah.

Sebaliknya dari daerah pedesaan, Kebun Kacang tetap dalam keadaan yang tenang. Pada saat itu tak seorang pun yang ditangkap di daerah itu dan dikatakan bahwa pimpinan warga melindungi penduduk dari campur tangan pihak luar. Ketika ditanya

---

34 Crouch, H. *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca, 1978) hal. 97-157.

oleh pihak pemerintah maka pimpinan warga itu menegaskan, bahwa di daerah itu tidak ada orang-orang komunis. Namun dua tahun kemudian dua atau tiga orang penduduk kampung "dijemput" untuk diinterogasi dan kemudian dipenjarakan. Ada desas-desus bahwa mereka tidak bersalah, tetapi bos-bos mereka di kantor tempat mereka bekerja telah ditahan.

Bagi para penduduk kampung, penahanan merupakan tindakan sewenang-wenang dari para penguasa dan tindakan itu dilakukan tanpa sebab atau alasan. Kemudian, setelah ada pengaruh kuat dari propaganda pemerintah, para penduduk kampung mengecam "PKI" atau "orang merah." Siapa pun yang mengecam pemerintah segera dicap sebagai "PKI," berbahaya dan harus dihindari. Namun demikian, beberapa tahun kemudian saya mendengar seorang suami, kerabat dekat, teman atau tetangga desa yang telah ditahan atau dibunuh, meskipun hal ini merupakan rahasia yang harus dijaga secara berhati-hati. Beberapa perempuan, delapan atau sepuluh tahun kemudian menceritakan rahasianya bahwa suami mereka hilang pada saat terjadinya pemberontakan. Yang lainnya, mengakui bahwa suaminya berada dalam penjara. Tetapi ketika mereka berbicara, mereka tetap waspada kalau-kalau seseorang dari kampung mendengarkan pembicaraan itu. Memang merupakan hal yang berbahaya untuk mendiskusikan dan menuliskannya dan dengan demikian perasaan mereka yang sebenarnya akan tetap merupakan rahasia. Tetapi sekali lagi, pemberontakan itu menguatkan kepercayaan mereka bahwa memang berbahaya untuk berpihak.

Pada tahun 1966, kampung itu telah menjadi padat penduduk. Karena peningkatan penduduk, maka kualitas hidup tampak buruk. Sampah semakin menggunung, tetapi tidak ada sistem penampungan sampah. Sampah menumpuk di jalan-jalan kecil dan secara cepat menyumbat Kali Cideng. Kotoran itu meninggalkan bau busuk dalam keadaan panas maupun lembab. Sistem pembuangan kotoran manusia menimbulkan masalah besar. Komunitas itu membangun kakus-kakus di atas Kali Cideng. Paling tidak, kakus-kakus itu cukup efisien ketika air sungai mengalir, tetapi tidak efisien ketika musim panas atau air sungai meluap. Air sungai telah lama tercemar untuk diminum. Sejumlah sumur digali, tetapi airnya sangat kotor untuk dikonsumsi. Namun masih dapat digunakan untuk mencuci, meskipun orang harus antri cukup lama untuk memperoleh air. Air minum menjadi komoditi berharga.

Namun demikian, para penduduk kampung tidak tampak prihatin dengan lingkungan buruk itu. Kebutuhan-kebutuhan pokoknya untuk kerja, papan, pangan, dan sandang terpenuhi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya tidak terlalu banyak. Barang-barang konsumen seperti gunting, meja, tempat tidur atau kasur hanya sedikit dan jauh dari memadai. Para penduduk kampung mengatakan bahwa mereka sering memiliki uang, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa dibeli. Tidak ada pikiran untuk membeli barang-barang bergengsi seperti sepeda motor, lemari es, kompor gas atau mesin pencuci pakaian. Bahkan radio pun jarang terdapat. Masyarakat merasa tidak ada perbedaan ekonomi yang besar antara mereka sendiri, dan merasa bahwa bahkan orang kaya di Jakarta tidak memiliki kemudahan-kemudahan yang lebih besar.[35]

Zaman Pembangunan, 1965-1981

Dalam "Orde Baru" yang dipimpin Soeharto terjadi perubahan besar dari zaman Demokrasi Terpimpin Soekarno. Setelah delapan belas bulan masa ketidakpastian politik yang diikuti pemberontakan pada bulan September 1965, secara formal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno sebagai Presiden dan membentuk pemerintahan yang tersusun terutama dari kalangan militer dan teknokrat. Pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama. Politik dan partai-partai politik tidak memainkan peran. Investasi asing disambut dengan baik. Tahap awal menurunkan inflasi dari 600 persen pada tahun 1966 menjadi 10 persen pada tahun 1969.[36] Pada awal Rencana Pembanguan Lima Tahun Tahap I pada tahun 1969, pertumbuhan ekonomi luar biasa hingga mencapai 10,9 persen dan kemudian berlanjut pada tingkat rata-rata 7-8 persen per tahun selama dasawarsa itu.[37] Pertumbuhan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan harga minyak antara 1973-1975 dan sekali lagi antara tahun 1980-1982.

---

35 Sebaliknya, Papanek membuktikan bahwa ketidaksamaan meningkat besar selama kurun waktu ini dan kelas-kelas bawah di kota yang paling menderita. Lihat Papanek, G.F. "The Effect of Economic Growth and Inflation on Workers' Income" dalam Papanek, G.F. (ed.) *The Indonesian Economy*, (New York, 1980) hal. 97- 100, 109-110.

36 Grenville, S. "Monetary Policy and the Formal Financial Sector" dalam Booth McCawley *The Indonesian Economy* hal. 108.

37 Sundrum, R. dan Booth, *A Rapid Economic Growth in Indonesia: 1968-81.*

Jakarta merupakan penerima keuntungan yang pertama dari pembangunan ini. Pembagian yang tidak sepadan mengenai pendapatan dari luar negeri, domestik dan lokal diinvestasikan di kota itu. Kerangka beberapa bangunan yang belum selesai dan tersebar di sepanjang Jalan Thamrin menjadi bangunan kaca yang menjulang tinggi dan membentuk hutan beton. Sejauh mata memandang, terbentang blok-blok gedung perkantoran bertingkat tinggi, hotel-hotel dan kedutaan-kedutaan menggantikan kampung-kampung dan bengkel-bengkel pinggir jalan yang dulunya berjajar sepanjang jalan raya. Untuk sepuluh tahun pertama, di antara para penerima keuntungan langsung dari pembangunan ini adalah para warga Kebun Kacang, yang berada di tengah-tengah meledaknya pembangunan gedung ini.

Para penduduk kampung sangat takut untuk berbicara tentang politik dan merasa bingung apakah Soekarno telah memberikan kekuasaan kepada Soeharto, atau apakah kekuasaan itu telah direbut dari Soekarno. Soeharto tentu saja menggunakan pendekatan secara hati-hati untuk memberikan kesan bahwa Soekarno secara sukarela menyerahkan kekuasaan. Bagaimanapun juga, orang-orang kampung memandang bahwa kurun waktu antara tahun 1968-1975 sebagai kurun waktu kemakmuran ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak usaha kecil yang telah dimulai sejak kurun waktu Soekarno berhasil dengan baik. Para pekerja bangunan, pedagang kaki lima dan tukang becak berkerumun di sekitar tempat-tempat bangunan yang berjajar di Jalan Thamrin. Industri-industri rakyat dan pondokan-pondokan dibuat oleh penduduk pribumi. Mereka memproduksi es krim, es contong, membuat topi dan mendaur ulang aki mobil.

Berdagang kecil-kecilan adalah mata pencarian yang utama. Pada tahun 1981, lebih dari separuh rumah tangga di Kebun Kacang mendapat seluruh atau sebagian penghasilan sebagai pedagang kaki lima.[38] Dalam lingkungan Ibu Innah yang terdiri dari 77 rumah tangga, ada 89 orang pedagang kaki lima, yang sebagian besar menjual makanan matang. Rata-rata ada sebuah warung dalam setiap lima rumah. Lagi pula, ada banyak pedagang yang berpindah-pindah dalam menjajakan dagangannya di dalam dan di luar kampung itu.

---

38 DKI, data yang dikumpulkan oleh Kelurahan Kebun Kacang (tidak diterbitkan), (Jakarta, 1981).

Sebuah usaha kecil menciptakan lapangan kerja bagi yang lain. Para pekerja bangunan, pedagang kaki lima dan tukang becak membeli dan menjual barang-barang dan jasanya satu sama lain. Di kampung dapat memperoleh banyak pelayanan, barang-barang dan jasa dalam beberapa menit. Para penjahit baju, dukun, perempuan pencuci pakaian, tukang reparasi radio dan arloji berkembang subur. Bilamana sebelumnya Sumira melaksanakan semua perdagangan dan pekerjaan rumahnya sendiri, kini ia mengangkat orang lain untuk membantunya dalam memasak, membersihkan, mengangkut air dan berbelanja. Usaha-usaha kecil lainnya menyerap banyak tenaga kerja karena mereka merasa memiliki lebih banyak penghasilan dan tidak dapat mengatasi beban sendiri.

Semula, para pedagang dan usahawan tampaknya mendapatkan keuntungan banyak. Pada tahun 1972, beberapa pedagang yang berhasil memperoleh penghasilan lebih dari Rp 90.000,- (2.195 liter beras) sebulan. Bagaimanapun, rata-rata pedagang hanya dapat memperoleh sepersepuluh sampai seperempat dari jumlah ini. Mereka yang bekerja tetap, seperti pembersih atau pesuruh kantor beruntung mendapatkan Rp.10.000,- (244 liter beras) sebulan. Mereka merindukan kebebasan, kemerdekaan dan harapan pedagang kaki lima dan beberapa orang beralih ke kegiatan-kegiatan ini.

Sejak tahun 1973 para penduduk kampung mulai merenovasi rumah-rumah mereka. Pada tahun 1980, Kebun Kacang berubah sehingga tak dapat dikenali lagi. Kira-kira setengah dari jumlah rumah kini bertingkat. Atapnya yang terbuat dari jerami, kini diganti dengan genteng. Rumah-rumah dibangun kembali dengan bata merah dan kayu. Jendela-jendela yang semula ditutup dengan anyaman kawat diganti dengan kaca. Pintu-pintu yang terkunci rapat menggantikan pintu keluar masuk yang terbuka. Banyak rumah tangga menggali sumur mereka sendiri, sehingga para penghuninya dapat mencuci dalam suasana pribadi dan menyenangkan dalam rumah-rumah mereka sendiri. Pada tahun 1974, lampu petromak dianggap barang mewah, lima tahun sesudahnya 40% warga sudah memakai penerangan listrik. Di sana-sini, gubug-gubug reyot masih tetap berdiri sebagaimana keadaannya pada sepuluh atau bahkan dua puluh tahun sebelumnya. Tetapi bagi sebagian besar penduduk Kebun Kacang, awal tahun 1970-an

merupakan kurun waktu kemakmuran dan kesejahteraan.[39]

Barang-barang konsumen mulai bermunculan, pada awalnya sedikit, kemudian membanjir. Pada awal tahun 1970-an, para penduduk kampung membeli barang-barang pecah-belah, lampu petromak tekan, kasur dan perabotan rumah tangga. Kemudian pesawat televisi pertama muncul dan menarik perhatian masyarakat kampung. Pada tahun 1980 hampir setiap dua rumah memiliki satu pesawat televisi. Radio *portable, cassette recorder,* mesin jahit, kipas angin, lemari es dan sepeda motor diperoleh dalam jumlah yang semakin meningkat. Setiap rumah tangga paling tidak memiliki salah satu di antara barang-barang ini.[40]

Meskipun kemakmuran materi berkembang, namun masih tetap ada saja masalah-masalah pokok seperti penyediaan air, sanitasi dan pembuangan sampah. Masalah-masalah itu menjadi lebih buruk akibat pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1970-an, Kebun Kacang menjadi penuh sesak. Rata-rata setiap orang mendapat 3 meter persegi tanah.[41] Antara tahun 1930-1980 pertumbuhan penduduk tujuh puluh kali lipat, dari kurang lima puluh menjadi lebih dari 3500.[42] Pada saat yang sama, penduduk Jakarta telah tumbuh tiga belas kali lipat dari 500.000 menjadi 6.500.000. Meskipun terjadi pertumbuhan penduduk ini, namun para penduduk kampung tidak memiliki saluran pembuangan air limbah dan suplai air leding. Rumah-rumahnya masih tetap kecil dan tersusun rapat sebagaimana semula. Tetapi penduduk Kebun Kacang memiliki kebanggaan dengan rumah-rumah baru yang direnovasi dan barang-barang yang mereka baru peroleh. Mereka tidak menganggap lingkungan mereka sebagai perkampungan kumuh.

---

39 Kampung-kampung yang lain mengalami perbaikan serupa (Sunindyo "Kampung Sawah" hal. 119-122). Antara tahun 1970-1980 listrik diperluas dari 23 persen menjadi 50 persen dari rumah-rumah tangga perkotaan Jakarta. Lihat: Steer "Indonesian Urban Services" Annex 1. Tabel 5.4.

40 Pada tahun 1980 66,4 persen dari penduduk perkotaan Jakarta memiliki sebuah radio atau *cassette recorder* dan 47,3 persen memiliki sebuah televisi (Sterr "Indonesian Urban Services" Annex 1 Tabel 4.9.). Sebelum tahun 1975 kebanyakan barang-barang ini telah langka di sebagian besar wilayah kota (Krausse "The Kampungs of Jakarta," hal. 84).

41 Di Jakarta secara keseluruhan ada 120 meter persegi per orang. Bahkan daerah-daerah yang berpenduduk paling padat dikatakan memiliki 16,5 meter persegi per orang (Bianpoen "The Pattern of Settlement in Densely Populated Areas of Jakarta" (Jakarta, 1976).

42 DKI, data yang dikumpulkan oleh Kelurahan Kebun Kacang (Jakarta,1981).

Bagaimanapun, ketika aspirasi-aspirasi penduduk kampung timbul, mereka mulai merasakan pengaruh negatif dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Sejak pertengahan tahun 1970-an, para pedagang kaki lima, dan tukang becak merasa bahwa dirinya semakin disingkirkan dari jalan-jalan Jakarta Pusat. Jalan Thamrin, yang telah memberikan tempat utama bagi para penduduk kampung untuk mencari nafkah, tidak lagi terbuka bagi mereka. Lahan-lahan yang kosong yang telah digunakan sebagai jalan umum bagi pejalan kaki, lokasi-lokasi dagang atau tempat-tempat bagi gerobag-gerobag dagang, telah diambil alih oleh bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan jalan-jalan utama.

Kecenderungan-kecenderungan ini diperkuat oleh tekanan-tekanan ekonomi. Ada persaingan yang lebih ketat di antara para pedagang dan tukang becak untuk mengisi ruang yang terbatas persediaannya. Pengecer modern dan jaringan-jaringan transportasi yang timbul sebagai akibat dari ledakan ekonomi, semakin memangkas perdagangan mereka. Dengan munculnya kelas menengah yang kuat, selera konsumen berubah dari barang-barang komoditi kaki lima ke barang-barang yang diproduksi secara massal dan modern. Bangunan perkantoran menggantikan kampung-kampung yang padat sehingga selain harga tanah melonjak juga penduduk kampung terpaksa keluar pusat kota. Akibatnya pelanggan kaki lima menjadi berkurang. Lokasi pusat kota di Kebun Kacang yang dulu menguntungkan tiba-tiba menjadi tidak aman ketika para produsen kaki lima, pedagang dan tukang becak berjuang untuk mendapatkan tempat.

Pada tahun 1978, banyak penduduk kampung, khususnya mereka yang bekerja dalam kegiatan-kegiatan yang berskala kecil, mulai merasakan adanya tekanan. Pasang surut perekonomian penduduk telah dialami banyak pengusaha kecil di masa yang lampau, namun kemajuan ekonomi pada tahun 1970-an yang berpuncak pada kemakmuran yang tiba-tiba kemudian diikuti oleh kejatuhan menambah suasana lebih dramatis. Hal tersebut berbeda dari naik turunnya keberuntungan mereka yang berjalan lebih perlahan-lahan di masa lampau.

Akibat dari perubahan nasib mereka banyak keluarga kehilangan rumah dan harta benda. Para tetangga mengambil untung dari kemalangan yang menimpa pihak lainnya. Penduduk terpaksa menjual barang-barang seperti televisi dan lemari pakaian dengan harga murah. Tidak seorang pun dapat memastikan apa

yang akan terjadi pada hari depan mereka. Sebagian besar orang dalam lingkungan itu mempunyai utang yang cukup besar pada lintah darat yang tersebar luas sejak awal 1970-an. Mereka berkeliling dari rumah ke rumah dan memungut bunga yang tinggi. Sekali orang berada dalam genggaman mereka, maka sukar untuk melepaskan diri.

Dengan keadaan pasang-surut yang berbalik melawan mereka, maka para pedagang kecil mencoba untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tetap. Tetapi mereka menemukan banyak rintangan. Persaingan memang ketat terutama untuk beberapa posisi yang tersedia. Kontak-kontak pribadi tidak lagi mencukupi. Kualifikasi-kualifikasi pendidikan, surat-surat keterangan yang membuktikan tidak terlibat dalam G-30-S PKI, 1965, surat berkelakuan baik dan uang suap diperlukan. Berbeda sekali dengan tahun 1960-an ketika pekerjaan mudah didapat. Sebuah minoritas kaum muda penduduk kampung yang berpendidikan, memperoleh pekerjaan-pekerjaan yang terjamin dan prestisius di pabrik-pabrik multi nasional atau kantor-kantor pemerintah. Namun sebagian besar mereka yang cukup beruntung untuk memperoleh pekerjaan pada tahun 1979, terpaksa menerima jam-jam kerja yang panjang dengan upah yang rendah (Rp 20.000,--Rp 30.000,-) sebulan tanpa harapan ada perbaikan.

Zaman Kurang Ajar

Setelah tahun 1978, para penduduk kampung menyebut zaman itu Zaman Kurang Ajar. Tidak begitu jelas apa yang mereka maksudkan, namun mereka tampaknya mengaitkannya dengan frustrasi, yang disebabkan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka yang semakin meningkat, tidak adanya perhatian antarsesama pada umumnya serta bertambahnya ketidaksamaan. Kesadaran untuk saling memperhatikan serta bermasyarakat, yang menjadi ciri lingkungan Kebun Kacang telah merosot.

Ketika lebih banyak orang serta manusia memasuki kawasan tersebut, kehidupan mulai berubah dan tidak selalu menjadi lebih baik. Pendatang-pendatang baru memasuki wilayah tersebut dan mereka mengasingkan diri. Muncul suasana terpecah-pecah. Pekerjaan-pekerjaan baru timbul. Terdapat buruh upahan, tuan-tanah, banyak pedagang, pembantu rumahtangga dan sebagainya. Perbedaan kesejahteraan meningkat ketika beberapa orang berha-

sil, sedang yang lain terbelakang. Sementara penduduk asli Kebun Kacang mengalami penurunan dalam pemilikan tanah serta status sosial, beberapa pendatang dari Jawa Barat dan Jawa Tengah meningkat kesejahteraan mereka. Seseorang dapat menjumpai gubuk kecil reot tanpa air dan listrik, sebelah-menyebelah dengan gedung bertembok dengan almari es, kias listrik, televisi, sumur dan sepeda motor. Sampai dengan 1981, pendapatan bulanan rumah tangga di Kebun Kacang berkisar dari Rp 30.000,- hingga Rp 300.000,-

Kekayaan menimbulkan keretakan hubungan di antara rakyat. Dulu, ketika mereka masih hidup dengan cara sederhana tidak ada perbedaan yang besar antara si kaya dan si miskin. Mereka sudah puas dengan apa yang telah mereka miliki. Akhir tahun 1970-an timbul perbedaan yang besar di antara penduduk kampung. Satu keluarga mempunyai rumah bertembok dan bertingkat dengan lemari es, kipas angin, fasilitas air ledeng dan sepeda motor. Sedangkan tetangga di sebelahnya berada dalam kegelapan dan kumuh tanpa fasilitas apapun -- air atau listrik. Dari suasana ini timbul rasa iri hati, sikap tidak perduli dan mencoba untuk membuat jarak yang jauh antara si kaya dengan si miskin. Rumah yang dulu terbuka untuk siapa saja, sekarang tertutup rapat. Dulu, penduduk kampung masih dapat tukar menukar pikiran di sepanjang gang dan masih bisa mendengar orang berbicara di dalam rumah. Jika ada persoalan di dalam rumah, mereka masih mendengar dan segera memberikan pertolongan.

Pada permulaan tahun 1990-an, dinding rumah menjadi lebih tebal. Jangankan suara bisa masuk, angin pun tidak bisa masuk. Di dalam rumah itu mereka membuat dunia sendiri dengan cara mengisi dengan barang-barang dan menonton TV. Akibatnya mereka tidak perduli dengan lingkungan di luar rumah mereka. Bahkan dengan sengaja memisahkan diri, untuk menjaga agar mereka tidak diganggu dengan permintaan orang di sekitarnya. Malah yang paling mampu, sengaja keluar dari lingkungan itu untuk menjauhkan diri dari kesulitan orang kampung.

Pada awal 1980-an, pemerintah mulai ikut campur dalam semua kegiatan penduduk kampung. Kalau dulu, penduduk kampung bebas mengikuti saudara-saudaranya ke Jakarta dan menempati tanah kosong di pusat kota dan membangun pondok-pondok sederhana. Mereka dengan mudah bisa mencari pekerjaan, berdagang, kuli bangunan atau menjadi tukang becak.

Pada waktu itu tenaga mereka dibutuhkan untuk membantu pembangunan. Tetapi, sepuluh tahun kemudian, mereka dianggap sebagai penghalang pembangunan. Mereka dilarang berdagang di jalan-jalan utama yang dekat dengan kampung mereka. Rumah-rumah mereka dihancurkan untuk jalan raya dan gedung-gedung bertingkat. Akibatnya, mereka merasa tidak punya kekuasaan apa-apa. Hilangnya ikatan-ikatan antarrumah tangga yang dulu begitu banyak diberikan, merupakan faktor yang menyebabkan para penduduk kampung mempertanyakan dasar moral dari masyarakat mereka.

Dengan meningkatnya ketidakamanan ekonomi dan tiadanya arah moral, Islam tumbuh menjadi sesuatu yang penting. Pada akhir 1960 beberapa mubaligh Muslim masuk dalam lingkungan Ibu Cia dan Ibu Innah. Mereka melakukan perbaikan-perbaikan masjid dan ceramah-ceramah Islam. Tetapi hal itu tidak sampai akhir tahun 1970-an, pada saat Islam bangkit kembali mulai memperoleh tempat berpijak. Meskipun sebagian besar penduduk kampung masih menjalankan agamanya di dalam suasana keleluasaan pribadi di rumah-rumahnya sendiri, Islam merupakan kekuatan yang berkembang dan merupakan satu-satunya titik pusat kegiatan organisasi di dalam kampung.

Dalam pandangan para penduduk kampung, kekerasan dan ketertiban moral pada masa lalu telah memberikan jalan bagi kekayaan, aspirasi-aspirasi yang bangkit dan kebusukan moral. Zaman Normal pada kurun waktu Belanda telah memberikan jalan bagi sebuah zaman ketamakan dan kekacauan. Para penduduk kampung menghargai peluang-peluang baru, pemilikan-pemilikan, kesenangan-kesenangan, dan kenyamanan-kenyamanan tahun 1970-an tetapi menyesali kelemahan ikatan-ikatan sosial.

2

Jaringan Sosial: Hubungan Manusia dalam Suatu Kampung, 1971-1981

Kebun Kacang dapat menjadi kooperatif atau individualistik tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Sementara hubungan di dalam keluarga, khususnya antara suami dan isteri tampak lemah, hubungan antartetangga khususnya di kalangan perempuan adalah penting. Kerja sama masyarakat yang lebih luas jarang terjadi. Hubungan masyarakat tentu saja penting dan membantu mengatasi kemiskinan dan tiadanya jaminan kehidupan para penduduk kampung, tetapi pada akhirnya keberhasilan hidup mereka tergantung pada diri mereka sendiri di kota.

Kebun Kacang: sebuah kampung

Kampung ini secara keseluruhan berpenduduk 3.500 orang, terlalu besar bagi suatu organisasi formal. Penduduk tidak mengidentifikasi diri dengan kampung, tetapi lebih merasa sebagai kelompok-kelompok rumah yang berada di beberapa gang itu. Di tiap-tiap gang, para tetangga saling mengenal satu sama lain, baik rupanya, asal-usulnya, maupun pekerjaannya. Sebagian besar saling mengenal namanya. Setiap kali mereka berpapasan di gang-gang sempit, berbelanja di pasar yang sama, berlangganan di warung yang sama, menggunakan kakus yang sama, dan pada kesempatan khusus, menghadiri rumah-rumah ibadah yang sama pula. Sejumlah gang yang berjajar dan bersimpangan serta rumah-rumah yang berderetan di sisinya melukiskan sebuah lingkungan.

Fokusnya di sini pada lingkungan masyarakat, terdiri sekitar 77 rumah tangga yang mengelilingi rumah Ibu Innah. Semua rumah itu menghadap ke gang-gang bersimpangan yang sama. Secara sepintas tidak ada batas fisik yang nyata memisahkan

lingkungan 77 rumah ini dari rumah-rumah tangga yang lain di kampung itu. Rumah-rumah tangga itu bergabung dan berbatasan satu sama lain sejauh mata memandang. Hubungan sosial juga diperluas melampaui batas-batas lingkungan.

Seluruh anggota lingkungan itu berkumpul hanya pada saat-saat penting dan acara pesta. Namun demikian, rumah-rumah tangga itu terikat bersama dalam jaringan hubungan yang kompleks, bersilangan dan berubah-ubah yang secara bersama menguatkan eksistensi masyarakat itu. Hubungan ini didasarkan secara khusus pada pertalian ikatan yang diperkuat oleh ikatan keluarga dan/atau asal-usul bersama. Esensi dari semua hubungan ini adalah pertukaran timbal balik mengenai informasi, barang dan jasa antara para anggota rumah-rumah tangga yang berbeda. Kekuatan atau kelemahan hubungan ini ditunjukkan oleh seringnya serta berlanjutnya pertukaran-pertukaran itu. Hubungan sosial tergantung pada pasang surutnya hubungan ekonomi masyarakat itu. Jika seseorang memberi dan yang lain tidak membalas, maka akan terjadi perselisihan dan hubungan itu putus. Sementara hubungan sosial membantu melindungi para penduduk kampung terhadap keadaan luar yang tidak pasti, terutama tidak adanya pekerjaan yang pasti, perumahan serta kebutuhan dasar, maka tingkat perlindungan seringkali tidak memadai.

Rumah Tangga

Ketegangan antara stabilitas dan ketidaktertiban, kebersamaan dan keterpecahan, memang jelas terlihat pada kelompok-kelompok kecil di dalam Kampung, yaitu keluarga dan rumah tangga. Keluarga merupakan unit dasar, sementara rumah tangga merupakan tempat tinggal. Ada beragam rumah tangga di lingkungan Ibu Innah, tetapi kita dapat melihatnya dalam empat kategori dasar berikut. Ada keluarga inti yang terdiri dari Bapak, Ibu dan anak. Ada keluarga besar, yang terdiri dari Bapak, Ibu dan anak-anak yang sudah kawin. Dan ada keluarga yang tidak utuh, yang tidak ada Bapak atau Ibu, dan ada juga pondokan yang terdiri dari beberapa laki-laki atau beberapa perempuan yang meninggalkan keluarga mereka di desa untuk mencari nafkah di kota. Di dalam 77 rumah tangga itu ada kira-kira 140 keluarga atau kepala keluarga.[1] Pada tahun 1979, kira-kira 44% rumah tangga terdiri

1 N. Sullivan ("Master and Managers" hal. 152, 207a, 208) juga menemukan bahwa setiap rumah rata-rata terdiri dari dua rumah tangga atau le-

dari hanya sebuah keluarga inti, sementara rumah-rumah tangga yang lain terbagi atas keluarga-keluarga yang tidak utuh (*truncated families*) – hidup tanpa orang tua yang mencari nafkah – (17%), keluarga-keluarga besar (27%), dan rumah-rumah pondokan komunal (12%).

Empat kategori rumah tangga itu keadaannya sangat tidak tetap dan berubah, ketika keluarga-keluarga itu berkembang atau hubungan- hubungannya tidak erat lagi. Komposisi rumah tangga berubah begitu cepat, sehingga sulit bagi rumah-rumah tangga di lingkungan itu untuk mengawasi orang-orang yang datang dan pergi serta hubungan mereka satu sama lain.

Bahkan dalam rumah tangga tempat saya tinggal, saya merasa tidak mungkin untuk mencatat jumlahnya. Orang sudah terbiasa menemukan muka-muka baru dan menerima orang-orang baru untuk bermalam, sementara yang lain secara mendadak pergi. Orang-orang baru itu jarang merupakan sanak saudara sedarah. Pada tahun 1972-1973, Sumira memperkenalkan saya dengan Tati yang menjadi isteri kedua dari suami Sumira. Suami mereka sering pergi, tinggal dengan isterinya yang ketiga, Nani di desanya. Sumira sebetulnya mengangkat anak pertama yang dilahirkan dari isteri yang ketiga. Ibu dari Ibu Sumira yang sudah lanjut usia, yang telah menyewa rumah sebelah, pindah ke dalam rumah itu untuk membantu merawat anak yang baru itu. Tetangga Sumira, Mumu, ditinggalkan oleh suaminya dan disuruh tinggal bersama Sumira. Untuk menyumbangkan tenaganya, ia membantu kerja sehari-hari, seperti memotong-motong sayuran dan mencuci piring, pakaian dan mengepel lantai. Ketika warung jalan Sumira berkembang dengan baik, ia mempekerjakan beberapa laki-laki yang kuat dari desa istri ketiga. Karena mereka tidak punya tempat tinggal lainnya, mereka tinggal di rumah Sumira. Mereka datang, bekerja untuk satu, enam bulan atau setahun, dan kemudian pergi. Orang-orang lain datang dan menggantikan mereka. Dua orang anak yang dulu diangkat Sumira datang, dan tidak lama kemudian pergi lagi. Antara tahun 1975-1978, paling tidak sembilan orang menjadi anggota rumah tangga Sumira, dan

---

bih. Dalam sebuah survai di Jakarta, Noormohamed menemukan bahwa kira-kira setengah dari rumah-rumah tangga terdiri dari keluarga inti, sementara sisanya merupakan keluarga besar: Noormohamed, S. "Alternative Approach to Low-Income Housing: A Case Study of Jakarta," Ph.D. Thesis, ANU, 1981, hal. 16-17.

kemudian mereka pergi. Pada tahun 1978 perdagangan Sumira menurun dan rumahnya ditempati oleh Sumira sendiri, ibunya dan anak angkatnya. Karena cepatnya perubahan anggota keluarga yang keluar masuk, maka sulit untuk mengelompokkan rumah tangga itu, karena dalam beberapa tahun saja dari rumah tangga yang besar telah berubah menjadi rumah tangga yang tidak utuh.

Dalam kasus lain, ketika sebuah rumah tangga yang merupakan keluarga inti (bapak, ibu, dan anak) berubah menjadi rumah tangga yang tidak utuh (tanpa bapak), maka rumah tangga tersebut berubah menjadi rumah pondokan komunal untuk bermalam bagi orang lain. Beberapa saudaranya dari desa datang untuk tinggal dan bekerja di tempat bangunan di dekat tempat tinggalnya. Enam bulan kemudian ketika pekerjaan mereka selesai, mereka pergi dan rumah tangga itu kembali menjadi tidak utuh lagi. Kemudian, orang lain datang dan tinggal selama berbulan-bulan sehingga bentuk rumah tangga ini menjadi tidak jelas.

Hubungan

Pertalian antara suami dan isteri menunjukkan adanya ketidakharmonisan hubungan keluarga. Sebagian besar perempuan menikah paling sedikit tiga kali sementara sebagian besar laki- laki lebih sering menikah. Laki-laki dan perempuan yang menikah hanya sekali merupakan perkecualian. Kejadian ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Di desa pun Jay melihat tiadanya keakraban dan keharmonisan ikatan perkawinan di Jawa Timur pada tahun 1950-an.[2] Meskipun sampelnya terhadap dua puluh pasangan suami isteri menunjukkan sedikit bukti mengenai perceraian (yang menurut Jay mereka tidak terus terang dalam menjawab wawancara), tetapi jika dilihat data resmi yang ada di pedesaan Jawa ternyata ada satu dalam setiap dua pernikahan yang bercerai pada tahun 1953.

Meskipun kaum perempuan kampung menginginkan memiliki suami yang setia dan menyayangi, dan hidup bersama sepanjang masa, tetapi setengah darinya dalam kenyataannya sangat berbeda. Misalnya, Ibu Karsinah, memiliki tiga suami, tetapi ketiga-tiganya selalu membohonginya. Laki-laki yang menikahinya dengan mudahnya membohonginya, padahal sebenarnya laki-laki

2 Jay *Javanese Villagers*, hal. 62, 96-97.

tersebut telah menikahi perempuan-perempuan lain. Ia ditinggalkan sendiri untuk memelihara anak-anaknya. Sulit untuk memastikan bahwa itu adalah gambaran umum, tetapi sejumlah cerita kehidupan yang lain menjelaskannya seperti itu.

Sering terjadi kecurangan dan ketidakpercayaan antara para suami dan isteri. Seorang suami meninggalkan isterinya dan tanpa berunding dengan isterinya, ia menjual gubuknya untuk membiayai kehidupan isteri barunya. Ada juga suami lainnya mengambil uang dari kedai makanan isterinya yang baru untuk menghidupi isteri dan anak-anaknya yang terdahulu tanpa memberitahukan kepada isteri barunya itu. Jika saya dapat bicara secara mendalam dengan laki-laki, saya mungkin akan memperoleh gambaran mengenai ketidakjujuran dan kecurangan yang dilakukan oleh para isteri.

Karena ketidakharmonisan ikatan pernikahan maka para suami dan isteri sering menyimpan penghasilannya secara terpisah. Jika salah satu memberikan pinjaman kepada yang lain, maka ada perhitungan hati-hati didalamnya. Cara seperti ini merupakan strategi yang logis bagi pasangan suami isteri yang tidak pernah merasa pasti berapa lama mereka akan hidup bersama.

Ada sejumlah besar keluarga yang mempunyai satu orang tua. Dua belas orang perempuan hidup sendiri dengan anak-anaknya, sementara empat belas orang perempuan yang lain hidup di rumah-rumah keluarga besar. Namun tidak umum menemukan orang laki-laki yang hidup sendiri. Dua orang laki-laki hidup dengan kakak-kakak perempuannya dan hanya seorang lelaki hidup sendiri setelah bercerai beberapa kali. Sisanya adalah bujangan atau mereka yang untuk sementara waktu berpisah dari isteri-isteri mereka dan hidup di rumah-rumah pondokan. Sama dengan masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah di tempat lain, bahwa ibu sering menjadi kepala rumah tangga.[3] Tetapi ini tidak saja terjadi di daerah-daerah perkotaan atau keluarga-keluarga yang mempunyai satu orang tua. Di Jawa Timur, pada tahun 1950-an, Jay melihat bahwa meskipun dalam keluarga-keluarga yang masih utuh, kaum perempuan selalu pegang peranan besar di dalam rumah tangga.

---

3 N. Sullivan menemukan bahwa 30% dari rumah-rumah tangga yang dicontohkannya dipimpin oleh kaum wanita: Sullivan "Master and Managers," hal. 212-19, 228. Lihat juga Lewis "The Culture of Proverty," hal. 19-25. Lewis *Five Families*, Lomnitz *Networks and Marginality*, hal. 93-94.

Dalam lingkungan Ibu Innah, tidak mudah untuk memastikan apakah seseorang perempuan menjanda, ditinggalkan atau diceraikan suaminya atau apakah suaminya hanya datang dan pergi saja. Suami Emi berkunjung setiap beberapa minggu, kadang-kadang memberinya uang, tetapi biasanya untuk mengambil makanan dan meminjam uang dari Emi untuk keperluan isterinya yang lain. Suami Boto, yang tidak memberikan sesuatu apapun kepadanya atau enam orang anaknya selama lebih dari lima tahun, tiba-tiba mulai memberikan penghasilan tetap secara bulanan, meskipun ia hidup dengan isteri yang lain dan enam orang anaknya. Pada suatu kesempatan, seorang laki-laki mengambil isteri muda dan kemudian isteri muda itu secara tetap menyumbang uang bagi isteri yang lebih tua yang tinggal dalam kampung itu.

Laki-laki di kampung itu berupaya melindungi dirinya dengan memiliki banyak isteri agar mereka dapat bergantung pada saat-saat yang dibutuhkan, sungguh pun itu membahayakan keutuhan keluarganya. Sebaliknya jaminan hari tua kaum perempuan, ada pada anak-anaknya. Para ibu mengabdikan kehidupan mereka untuk memberikan kepada anak-anak mereka makanan, pakaian dan pendidikan secukupnya. Para ibu menurutkan kehendak anak-anaknya dan sebagian besar enggan untuk meminta penghasilan dari anak-anaknya ketika mereka mulai bekerja. Para ibu itu merasa bahwa anak-anak laki-lakinya, memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang baik sebelum mereka menikah dan memikul tanggung jawab yang baru. Sebaliknya, anak-anak perempuannya, diharapkan dapat membantu sejak usia kanak-kanak. Apabila anak laki-lakinya yang sudah dewasa ingin membantu untuk mengatasi kebutuhan konsumsi rumah tangga sehari-hari, biasanya disambut dengan baik. Tetapi jika tidak, maka suatu hari ia pun akan sadar. Sebagian besar ibu mengetahui bahwa masa depannya tergantung pada anaknya daripada suami mereka. Pada usia lanjut, para ibu sering tinggal bersama anak-anaknya, sedangkan para suami mereka meninggal dunia, atau mendapatkan isteri muda untuk menghidupi mereka.

Mengadopsi anak yang sering terjadi di dalam lingkungan itu, di satu sisi, tampak menggambarkan ketidakjelasan anggota rumah tangga, tetapi di sisi lain, sesungguhnya akan membantu ibu-ibu yang tidak mempunyai anak, di masa tuanya nanti. Di samping itu, sistem adopsi ini juga bermanfaat bagi anak yang diangkat maupun ibu kandungnya yang tidak dapat menghidupinya. Jika

seorang ibu memiliki anak lebih dari empat yang masih kecil, maka satu anak atau lebih sering diangkat oleh tetangga, biasanya sanak-saudara. Misalnya, dua dari enam orang anak Cici diangkat oleh kakaknya yang tinggal di sebelah rumah. Anak Isah yang kelima dibesarkan dan dididik oleh Omi, seorang bibi yang tinggal berjarak enam rumah dari tempatnya. Pola pengangkatan ini memang umum baik di kalangan pedesaan maupun perkotaan di Jawa.

Rumah-rumah tangga yang stabil juga dapat dijumpai. Dalam lingkungan Ibu Innah paling tidak 20 pasangan suami isteri yang mengumpulkan hasil pendapatan mereka dan bekerja sama sebagai tim. Beberapa orang menikah hanya satu kali. Namun sebelumnya sebagian besar memiliki pengalaman pernikahan dan perceraian, tetapi pada akhirnya mereka menemukan jodohnya. Pasangan-pasangan ini bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya dan memiliki hubungan yang hangat dan harmonis. Dan suami memberikan seluruh penghasilannya kepada isterinya.

Namun demikian, keanggotaan rumah tangga yang tidak stabil dan ikatan perkawinan yang tidak harmonis tampak dominan. Hal ini hanya dapat dilihat oleh pengamatan yang terus-menerus dan terinci. Apa yang semula dianggap sebagai keluarga inti, tetapi setelah berbicara banyak dengan mereka sering tersingkap sejarah yang panjang mengenai pernikahan, perceraian dan pengangkatan. Bila seseorang menggali kehidupan wanita secara perorangan, apakah mereka tinggal dalam rumah tangga besar, rumah tangga inti ataupun seorang diri, orang biasanya menemukan sederetan suami, baik yang hidup atau yang telah mati, serta anak-anak angkat serta banyak hubungan, yang dalam waktu pendek berkembang untuk kemudian menurun. Pada suatu saat kehidupan mereka tampak sangat mantap dan biasa, namun lain waktu kisah-kisah mereka mengungkapkan sebuah hikayat yang tiada henti mengenai hubungan-hubungan yang diperoleh dan hilang.

Keluarga Besar

Rumah tangga besar tampaknya timbul sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahan yang lemah, kurangnya akomodasi alternatif dan kurangnya sumber daya. Sebagaimana tradisi di Jawa, sebagian besar pasangan yang sudah nikah ingin mendirikan rumahnya sendiri, tetapi dengan kurangnya pertumbuhan peru-

mahan di kota, maka hal ini terasa semakin sulit. Tiga puluh tahun sebelumnya, Ibu Innah telah dapat menyediakan tempat tinggal sendiri-sendiri untuk setiap anaknya yang sudah nikah. Kini, sebagian besar pasangan yang sudah nikah harus pindah ke dalam rumah orang tuanya.

Keluarga besar memberikan tunjangan bagi anak-anak perempuannya yang hamil sebelum nikah. Sebagin besar pernikahan pertama terjadi setelah pengantin hamil. Kontrasepsi tidak digunakan secara luas di kampung itu maupun sebelum pernikahan. Gadis-gadis hamil menginjak usia empat belas tahun dan pernikahan biasanya dilakukan secara terburu-buru. Para suami biasanya menikah pada usia belasan tahun sampai kira-kira dua puluh tahun dan biasanya putus (cerai) pada tahun pertama mereka menikah. Laki-laki seperti itu tidak bertanggung jawab dan tidak dewasa, tetapi beberapa laki-laki yang lain merasa sangat malu karena tidak dapat memberikan nafkah secukupnya kepada isterinya. Para isteri mengomeli para suaminya karena tidak mampu menghidupinya. Akibatnya para suami melarikan diri. Bagaimanapun keadaan pernikahan, para suami yang masih muda jarang memiliki sumber pendapatan tetap dan beban untuk menghidupi para isteri dan anak-anak mereka ditanggung oleh orang tua mereka. Tambahan orang yang harus diberi makan dan kebutuhan akan tempat tinggal yang sudah berjejal itu sering menimbulkan kegetiran dan percekcokan.

Mereka yang sudah nikah yang tinggal berjejal bersama dengan orang tua dan adik laki-laki maupun perempuannya sering mencoba untuk pindah. Mereka pindah ke sanak saudara isteri atau suami yang lain dan tetap tinggal di situ sampai situasinya menjadi tidak betah. Seringkali mereka berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga mempengaruhi pasangan-pasangan muda yang baru menikah yang miskin dan mempunyai anak. "Orang yang lebih mampu" biasanya membeli atau menyewa tempat tinggal. Sedangkan mereka yang paling miskin tidak bisa pisah dari keluarga-keluarga besar, karena kemampuan ekonomi mereka yang sangat terbatas.

Salah satu contoh keluarga besar yang keadaannya lebih baik adalah rumah tangga Mandroppi. Pada tahun 1972, keluarga Mandroppi tinggal di gubug kecil yang hanya bisa menampung dua orang dewasa dan ketujuh anaknya. Selama pertengahan tahun 1970- an, tiga orang dari anak-anak perempuannya yang sudah be-

lasan tahun dipaksa nikah karena hamil dan mereka membawa suami- suaminya tinggal di rumah orang tuanya. Dengan tambahan suami dan anak-anak yang baru lahir, rumah tangga itu berkembang dari satu menjadi empat keluarga, sehingga seluruhnya berjumlah lima belas orang. Pada tahun 1977, mereka menambah tingkat rumahnya untuk menampung jumlah anggota keluarga yang besar ini. Untuk beberapa tahun pertama, para suami muda itu tidak menghidupi isteri-isteri mereka dan orang-orang tuanya dibiarkan untuk mengurusnya. Dua orang suami dan anak-anaknya menghilang selama berhari-hari dan yang ketiga juga pergi tidak kembali lagi. Beban untuk menanggung rumah tangga yang besar menjadi terlalu berat bagi orang tuanya dan pada akhirnya mereka meminta agar anak-anak perempuannya yang sudah nikah memenuhi kebutuhan makanan bagi anak-anak mereka sendiri. Untuk melakukan hal ini maka anak-anak perempuannya ini memasak dan menjual kue-kue di sepanjang gang-gang di kampung itu. Pada tahun 1980 anak-anak perempuannya mendapatkan pekerjaan di pabrik. Ibu-ibu mereka memelihara anak-anaknya setiap hari. Pada akhirnya, dua orang dari suami-suaminya mendapat pekerjaan tetap setelah mencoba sejumlah pekerjaan sementara dan mulai menghidupi isteri dan anak-anaknya.

Beberapa rumah tangga miskin tidak punya pilihan kecuali tetap membagi ruang kecil yang mereka miliki. Misalnya rumah tangga Peking, terdiri dari tiga belas orang dan setiap tiga tempat tidur yang terbuat dari kayu dimiliki oleh satu keluarga. Mereka yang tidak mendapatkan bangku, tidur di lantai. Karena kemiskinan mereka maka keluarga Peking tidak dapat memperluas rumah yang mereka miliki atau menyewakan rumah tambahan untuk anak-anak perempuannya yang baru saja nikah. Sebagaimana dengan keluarga Mandroppi, anak-anak perempuannya telah dinikahi suami-suami yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Isteri tidak mempunyai pilihan lain, kecuali tinggal dengan orang tuanya.

Rumah tangga yang besar biasanya membagi ruangan dan beberapa fasilitas lainnya tetapi bukan penghasilan atau makanan. Pemberian makanan dilakukan hanya untuk jangka waktu terbatas. Anak-anak yang sudah menikah meskipun mereka tanpa suami, didorong untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri. Biasanya setiap keluarga yang ada dalam rumah tangga

besar itu memasak sendiri-sendiri dan memakai fasilitas bersama. Hal ini untuk mengatasi terjadinya perselisihan mengenai berapa besar uang belanja yang dikeluarkan dalam setiap keluarga atau seberapa besar mereka mengkonsumsi makanan. Tetapi ada juga keluarga-keluarga yang tergabung dalam rumah tangga besar masing-masing memberikan uang belanja kepada orang tua yang akan mengaturnya sehingga mereka dapat makan secara bersama. Tetapi sistem ini, jarang terjadi di rumah-rumah tangga dari Jawa Barat yang telah tinggal lama di lingkungan itu.

Pondok Komunal

Meskipun keanggotaan pondok datang dan pergi, namun pondok itu merupakan sarana yang memadai bagi orang-orang desa untuk tempat tinggal sementara mencari nafkah di kota.[4] Pondok biasanya didasarkan pada ikatan asal-usul desa yang sama. Sementara isteri dan anak-anaknya ditinggalkan untuk mengurusi panen dan rumahnya di desa. Sering sekali, tergantung pada seberapa jauh mereka tinggal dan seberapa banyak mereka memperoleh penghasilan, mereka kembali ke desa untuk memberikan uang dan menengok keluarga mereka.[5] Kebanyakan para pencari

---

4. Meskipun beragam tipe kehidupan masyarakat tertata bagi para migran perkotaan yang berada di sebagian besar dunia ini, namun kekurangan informasi. Wilson dan Mafeje, Moyer, dan Reader menunjuk pada barak seperti akomodasi di antara para pekerja tambang di Afrika Selatan: Wilson, M. and Mafeje,A. *Langa: A Study of Social Groups in an African Towship*, (Cape Town, 1963) hal. 39, 47-55, 72-3; Mayer, P. *Townsmen or Tribesmen*, (Cape Town, 1961) hal. 79-80, 124-91, 209-10; Reader, D.R. *The Black Man's Portion. History, Demography and Living Conditions in the Native Location of East London Cape Province*, (Cape Town, 1961) hal. 124. Rumah kongsi bagi imigran tunggal Cina di Singapura jauh lebih formal daripada pondok. Lihat Tan Kim Swee "A Study of Kongsi Houses Housing Immigrant Men," (Singapore, 1963). Sesuatu yang paling dekat dengan pondok Indonesia adalah persahabatan erat India yang digambarkan oleh Bulsara tetapi khususnya pada buruh migran daripada pedagang kecil mandiri: Bulsara, J.F. *Patterns of Social Life in Metropolitan Areas-with particular reference to Greater Bombay*, (Bombay, 1970) hal. 283-92. Semua rumah pondok ini memberikan akomodasi dan tak satu pun mirip dengan usaha rumah pondok Indonesia (Jellinek "The Pondok System and Circular Migration," hal. 9-10, 15). Forbes mengidentifikasi pondok di antara para penarik becak di Ujungpandang, mereka kurang bersatu padu dalam organisasi sosial dari pondok Mus (Forbes D. "Development and the 'Informal' Sector: A Study of Pedlers and Trishaw Riders in Ujung Pandang, Indonesia," Ph.D Thesis, Monash University, 1979, hal. 230-32).

5 Dalam literatur, fenomena ini dikenal sebagai migrasi sirkuler. Lihat, contoh, Hugo "Population Mobility in West Java"; Jellinek "The Pondok System and Circular Migration" hal. 10-16.

nafkah ini tidak memiliki keberanian, keterampilan atau sumber daya untuk pergi ke kota tanpa ada pondok komunal atau kawan-kawan mereka di sana. Pondok komunal di lingkungan Ibu Innah selama sepuluh tahun jumlahnya berubah-ubah, kadang-kadang lima, kadang-kadang sembilan. Masing-masing menampung dua sampai lima belas orang.[6]

Para penduduk kampung merasakan adanya kebersamaan dan dukungan bersama yang diberikan oleh teman-teman mereka yang tinggal di pondok Mus. Luasnya kerja sama dan kebersamaan jauh melebihi ikatan mana pun lainnya dalam masyarakat. Para pencari nafkah ini yang berasal dari keluarga-keluarga yang berbeda, tidak hanya tinggal, tidur, dan makan bersama, tetapi mereka sering melakukan pekerjaan serupa. Sekalipun mereka bekerja secara sendiri-sendiri sebagai pedagang dan masing-masing harus membayar barang-barang yang mereka perlukan secara sendiri-sendiri, mereka juga membagi ruang kerja yang sempit, peralatan dagang, bahan-bahan baku, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Mereka, satu sama lain saling memberi saran mengenai rute perdagangan yang baik, harga-harga yang sedang berlaku dan bagaimana menghindari razia. Mereka saling meminjamkan uang dan jika mereka kembali ke desa biasanya membawa uang, barang-barang dan pesan-pesan untuk keluarga di desa dari mereka yang tetap tinggal di kota. Mereka yang setelah pulang ke desa dan kembali ke kota, membawa makanan, berita, dan pesan dari keluarga-keluarga di desa, dan mengabarkan kepada mereka yang di kota bilamana seseorang di desa sedang sakit, atau pertanian dalam masa membajak atau panen, atau pesta akan diselenggarakan. Seseorang yang jatuh sakit di kota dipulangkan kembali ke desa oleh kawannya di pondok untuk mendapat perawatan. Dalam suatu kesempatan ketika sebagian besar pendatang kembali ke desa, mereka bergotong-royong dalam acara sunatan, pernikahan atau kematian. Sekali dalam setahun, mereka membersihkan kuburan leluhur mereka.

Pada tahun 1970-an hanya rumah Mus yang dibangun kembali secara gotong-royong. Semua penghuni pondok Mus dan orang-

---

6 Di bagian lain dari kota, penulis menemukan rumah-rumah pondokan terdiri dari empat puluh sampai lima puluh orang. Meskipun tidak di Kebun Kacang, ada juga rumah-rumah pondokan yang berisi kaum perempuan yang telah ditinggalkan suami dan anak- anaknya di desa Jawa Tengah.

orang lain dari desa secara sukarela berkumpul di kota untuk membangun kembali rumah Mus. Ia menyediakan bahan bangunan dan makanan khusus untuk mereka yang bekerja, tetapi mereka tidak dibayar sepeser pun. Rumah itu selesai dibangun dalam beberapa hari dan berharga setengah dari harga rumah-rumah lainnya di daerah itu yang telah dibangun kembali oleh tenaga kerja yang dibayar. Banyak penduduk kampung memuji dan kagum terhadap semangat kerja sama penghuni pondok, karena hal itu memang luar biasa di kampung itu.

Para penghuni pondok Mus sependapat bahwa ikatan antara keluarga atau orang-orang dari desa yang sama dapat diperkuat oleh migrasi ke kota. Di desa, mereka hidup dan bercocok tanam di lahan-lahan yang terpisah, sedangkan di kota mereka tinggal, makan, tidur dan bekerja dalam keadaan sangat akrab satu sama lain, secara tetap satu sama lain saling membagi suka dan duka.

Sebagaimana dalam setiap rumah tangga, ada perselisihan di antara mereka mengenai pembagian kerja dan biaya. Beberapa orang yang tinggal di rumah Mus merasakan bahwa ia menjual terlalu mahal untuk bahan-bahan dagangan mereka. Beberapa yang lainnya merasa berat terhadap tugas-tugas kelompok dalam pondok itu seperti menyiapkan makanan, mengangkut air dengan gerobak, atau terlalu berat untuk membersihkan. Perselisihan pendapat di antara mereka itu mengakibatkan beberapa di antaranya meninggalkan pondok itu untuk mencari tempat lain. Untuk hidup terus secara bersama, banyak sekali yang harus dikorbankan dan diterima, terutama ketika pondok Mus telah penuh dan setiap orang hanya menempati ruang seluas tiga meter persegi.

Pondok komunal Jawa Barat dikelola secara lebih longgar daripada pondok Mus. Hal ini mungkin disebabkan oleh tradisi Jawa Tengah yang lebih kuat mengenai kebersamaan dan dukungan bersama atau karena asal-usul Mus (Klaten) lebih jauh dan para penghuni pondoknya berasal dari desa yang sama serta mempunyai pertalian dan kekeluargaan.[7] Tidak seperti pondok Mus, para penghuni pondok Bang Idi dan Burhanuddin tidak berhubungan dengan bos-bos mereka atau bukan merupakan wiraswasta yang

---

7 Semangat komunitas ditemukan dalam pondok Mus sama dengan tipe kerja sama yang digambarkan mengenai Yogyakarta oleh J. Sullivan "Rukun Kampung dan Kampung"; N. Sullivan "Master and Managers"; Guiness *Harmony and Hierarchy*.

bekerja sendiri. Mereka telah direkrut untuk datang ke kota untuk bekerja dan dibayar dengan sistem upah borongan dalam memproduksi topi-topi kain atau es contong. Bang Idi memberi fasilitas tempat tinggal kepada para pekerjanya, tetapi makanan dan minuman harus mereka penuhi sendiri dari kedai di dekatnya. Burhanuddin menyediakan segala kebutuhan pokok bagi para penghuni pondok dan mereka bekerja secara terus-menerus selama enam belas jam setiap hari sampai saatnya mereka kembali ke desa.

Kerja keras para penghuni pondok di kota dan rasa kebersamaan mereka menghalangi mereka berbaur secara sosial dengan para anggota lingkungan yang lain. Para pemilik pondok ini memiliki beberapa ikatan dengan lingkungan mereka kecuali Burhanuddin, yang keluarganya tinggal di daerah itu, kegiatan utama mereka adalah menghasilkan pendapatan secukupnya untuk dikirimkan kembali ke desa. Mus menanggung biaya hidup ibu dan anak perempuannya di desa, di samping rumah lain yang dibangun kembali. Keluarga Bang Idi jarang berkunjung ke kota, keluarganya hidup di desa dan Bang Idi banyak menanamkan uangnya di sana. Ikatan dan orientasi sosial para penghuni pondok adalah dengan desa tempat mereka berasal dan bukan dengan lingkungan perkotaan.

Hubungan Sosial

Prinsip dasar kehidupan kampung adalah menjaga hubungan baik dengan para tetangga terdekat. Apabila rumah tangga baru pindah ke dalam suatu lingkungan, maka yang bersangkutan biasanya menghantarkan makanan kepada tetangga-tetangga dekatnya untuk menjalin hubungan baik. Jika para tetangga yang dekat itu bukan kerabat, maka mereka bersikap merasa seolah-olah sebagai kerabat. Karena rapatnya rumah-rumah yang ada berarti bahwa masalah-masalah mengenai ruangan sempit, fasilitas, pemilikan, makanan, persoalan-persoalan hidup dan gosip akan dengan mudah menyebar di lingkungan itu. Dengan adanya sebuah rumah yang berbatasan langsung dengan yang lain, maka setiap gang seperti ruang tamu bersama yang panjang dan sempit. Sering terjadi bahwa pekerjaan yang dilakukan di sebuah rumah menyebar ke luar terdengar di sepanjang gang. Para ibu mencuci dan menyeterika pakaian atau mencuci peralatan dapur sambil mengobrol dengan tetangga. Meskipun seorang perempuan berada di dalam rumahnya, seorang tetangga akan melongokkan kepalanya me-

lalui pintu masuk yang terbuka dan berkata, "baunya sedap, apa yang sedang kau masak?" Apabila tetangga sedang melewati rumah tangga lain, maka sering terdengar sapaan dari dalam rumah untuk singgah, "masuklah, duduk dulu dan makanlah sebelum melanjutkan perjalanan." Meskipun sapaan untuk singgah ini dilakukan secara basa-basi namun merupakan tanda adanya sambutan dan keakraban bersama di antara mereka.

Sikap berbagi rasa terlihat dalam berbagai bentuk. Selama para tetangga enggan untuk pergi jauh dalam memperoleh kebutuhan pokoknya, mereka satu sama lain saling membeli dan menjual barang dan jasa. Jika sore dan malam hari udara terasa panas, mereka duduk bermalasan di ambang pintu dan mengobrol. Pada awal tahun 1970-an, ketika hanya beberapa rumah yang memiliki loteng sebagai tempat menghindarkan diri dari banjir, beberapa orang yang tidak mempunyai loteng diajak untuk tinggal di loteng, sambil menunggu air surut dan kepada mereka dibagikan sedikit makanan. Jika seorang tetangga tidak mempunyai cukup ruangan untuk para tamunya dari desa atau baru saja bertengkar dengan suaminya, maka yang bersangkutan boleh menempati ruangan sementara di rumah penduduk sebelahnya. Sebelum ada sumur di setiap rumah, para tetangga menggunakan bersama sumur yang ada untuk mencuci. Sembari antri untuk menggunakan kakus di atas sungai, mereka mengobrol dan bertukar pikiran. Sebelum tahun 1970-an penduduk di kampung itu berkumpul mengelilingi beberapa radio yang tersedia untuk mendengarkan legenda-legenda Mahabarata dan Ramayana. Pada kemudian hari mereka berkumpul mengelilingi beberapa pesawat televisi yang ada. Ketika ada perayaan, satu sama lain saling meminjami cangkir, piring dan kursi. Jika seseorang kembali dari desanya dengan membawa banyak makanan, ia wajib membagikan kepada para tetangganya. Memang dirasakan tidak sopan menyimpan rezeki *nomplok* semacam itu untuk dirinya sendiri. Demikian juga, jika seseorang tetangga mengalami kesulitan hidup dan dalam keadaan tanpa makanan, maka tetangga-tetangga yang berdekatan diharapkan mau menolong dengan memberikan sepiring nasi dan sayur-mayur. Karena setiap hari mereka bertemu sehingga menjadi sangat akrab, maka sulit bagi mereka untuk tidak saling menasehati satu sama lain tentang bagaimana cara berdagang atau mendidik anak-anak yang tidak patuh pada orang tuanya atau suami-suami yang

tidak setia.[8]

Di kampung, ikatan bertetangga tampaknya menjadi jauh lebih penting daripada ikatan kerabat.[9] Beberapa tahun setelah memasuki masyarakat itu, saya masih belum juga menyadari bahwa banyak rumah tangga sebetulnya bersaudara. Pengelompokan kekeluargaan tidak mudah dikenali karena rumah-rumah tangga itu beraktivitas sebagai unit-unit yang berdiri sendiri. Mereka hidup, mendapatkan penghasilan dan makan secara terpisah satu dari yang lain dan kelihatannya memiliki hubungan yang didasarkan pada dekatnya tempat tinggal dan penjualan barang dan jasa. Ada kalanya, ketika mereka saling menolong dan saling berbagi fasilitas, rezeki *nomplok*, dan tragedi, muncul anggapan bahwa ini merupakan ikatan tempat tinggal terdekat dan bukan kekerabatan. Alasan lain mengenai sulitnya memastikan siapa yang disebut saudara dan siapa yang bukan, karena di Indonesia adalah tidak sopan untuk tidak memperlakukan tetangga atau teman sebagai kerabat. Wanita yang lebih tua biasanya disebut Bu atau Ibu, laki-laki tua sebagai Pak atau Bapak, kenalan yang lebih tua seangkatan disebut Kak atau Kakak, sedang yang lebih muda disebut Dik atau Adik. Yang sebaya paman disebut Om (dari bahasa Belanda = paman) atau Paman, yang sebaya bibi disebut Tante (bahasa Belanda = bibi), dan wanita berusia sangat lanjut disebut Bah atau mBah (nenek). Hal ini berlawanan dengan penyebutan gaya Barat yang lebih tidak tertentu (Mr. Mrs) Tuan dan Nyonya, dan kadangkala menciptakan kesan yang keliru, bahwa tetangga atau kenalan tersebut adalah kerabat atau keluarga.

Hubungan darah atau perkawinan menjadi jelas ketika lingkungan itu digusur pada tahun 1981. Ketika mereka merasa terancam, rasa persatuan mereka semakin kuat. Meskipun mereka

---

8 N. Sullivan ("Masters and Managers" hal. 234-42) melukiskan gambaran interaksi sehari-hari yang sangat serupa di antara kelompok-kelompok kecil tetangga wanita. Bagaimanapun, banyak sekali terjadi pertukaran non-moneter dan pembagian setiap aspek kehidupan (misalnya berbelanja, distribusi makanan, mencuci, menyeterika, menjaga anak, pijat, gosip) daripada di Kebun Kacang.

9 N. Sullivan ("Masters and Managers" hal. 227, 258) juga menyatakan bahwa kedekatan tempat kediaman merupakan prinsip organisasi yang lebih penting daripada kekerabatan di Yogyakarta. Lihat juga Jay (*Javanese Villagers*, hal. 188-239) untuk Jawa Timur dan Sunindyo ("Kampung Sawah" hal. 150, 173, 182, 233) untuk Jakarta. Untuk penemuan-penemuan serupa di kota-kota Dunia Ketiga yang lain, lihat Lomnitz *Networks and Marginality*, hal 133-39, Lloyd *Slums of Hope*, hal. 167, Roberts *Organizing Strangers*.

datang dari berbagai daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang dan Madura, paling tidak terdapat dua belas kelompok yang bersaudara, empat di antaranya mempunyai lebih dari dua rumah tangga yang bersaudara.

Kelompok kerabat yang utama berada di lingkungan Ibu Inna, yang keluarganya merupakan salah satu dari keluarga pertama yang menetap di daerah itu. Pada tahun 1970-an sanak saudara Inna berjumlah dua puluh tiga rumah tangga yang berada di lingkungan itu. Ketika keluarga Ibu Innah berkembang, ia dan suaminya membagi-bagikan tanah kebun sayur untuk dijadikan kamar bagi keturunannya yang sudah menikah. Mereka pada gilirannya membagi rumahnya untuk dijadikan ruangan bagi generasi berikutnya. Proses yang sama mengenai pembagian terjadi untuk kelompok- kelompok kerabat yang lain di daerah itu.

Antara tahun 1930-an-1960-an, kerabat Innah dan Harja saling mengundang ke daerah itu. Mereka saling menolong satu sama lain dengan menyediakan tempat tinggal dan pekerjaan. Ketika mereka menanam sayur tidak lagi menguntungkan, mereka beli dari tempat lain, kerabat-kerabat Harja turut dalam berdagang sayur dan sebagian lagi mendapat pekerjaan sebagai pengumpul sampah bagi pemerintah kota Jakarta. Pada tahun 1970-an, ketika pertama kali saya datang ke masyarakat itu, sebagian besar keluarga menempati rumah-rumah yang terpisah dan bekerja dalam bidang kegiatan mereka sendiri-sendiri dan sulit untuk menelusuri kembali dari mana mereka berasal.

Setelah lima puluh tahun, keluarga Ibu Innah menjadi besar sehingga tidak dapat secara efektif berfungsi sebagai kelompok kekerabatan. Selama bertahun-tahun banyak terjadi pernikahan antarkeluarga terdekat dan ini merupakan hal yang wajar, sehingga terjadi penggabungan dengan rumah-rumah tangga di sekelilingnya. Berlainan dengan kelompok kerabat Innah, kelompok-kelompok kerabat lainnya yang lebih kecil terdiri dari dua atau tiga rumah tangga yang datang belakangan dari tempat yang lebih jauh, membentuk kelompok-kelompok yang lebih erat. Kelompok-kelompok yang kecil ini masih mempertahankan hubungan dengan desa asalnya. Sebaliknya, para anggota keluarga Innah tidak mempunyai hubungan dengan desa asalnya dan menganggap Kebun Kacang sebagai satu-satunya kampung halaman mereka.

Adakalanya keluarga Ibu Innah merupakan satu kesatuan. Karena jumlahnya yang lebih besar, mereka memastikan bahwa kepemimpinan lokal tetap berada di tangannya, melalui tiga generasi dari ayah ke anak. Mereka memelihara rumah ibadah, karena mereka merasa wajib untuk melakukan ibadah di tempat itu. Di kalangan mereka, mereka mengangkat anak. Tidak ada keluarga-keluarga di lingkungan itu, di mana anak angkat ditolak kehadirannya di tengah-tengah mereka. Karena lahan mereka dibagi-bagi maka mereka tinggal berdekatan satu sama lain. Dalam kegiatan sehari-hari kelompok kerabat Innah yang besar terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dengan interaksi yang lebih kuat di antara rumah-rumah tangga yang menjadi tetangga-tetangga terdekat.

Seperti halnya rumah Innah, rumah Neneng berada di antara lebih dari dua belas rumah tangga sesanak-saudara di mana sepuluh di antaranya berada di dalam lingkungan saya. Pada awal tahun 1970-an, mereka merupakan rumah-rumah tangga yang belum menyatu, yang masing-masing mencari mata pencariannya sendiri-sendiri. Meskipun saya sering melihat sanak-saudara Neneng mengunjungi rumahnya, saya menganggap mereka hanyalah tetangga. Namun ketika mereka pulang kembali ke desa kampung halamannya di dekat Bogor, saya baru mengetahui bahwa di antara mereka ada hubungan kekerabatan.

Suami Neneng, Gani, datang di daerah itu pada tahun 1940-an dan menyewa sebidang tanah dari Ibu Innah. Ia membangun sebuah rumah dan mengajak isterinya dari Bogor untuk mengikutinya. Keduanya mengajak saudara-saudara lelakinya ke daerah itu dan Gani memperkenalkan mereka dengan perdagangan loak. Setelah membantu Gani dengan perdagangan loak ini, mereka mendirikan kios-kios atau beralih ke pekerjaan lain sebagai supir taksi.

Rumah Gani dibagi-bagi menjadi beberapa kamar untuk para pendatang baru ini. Pada mulanya mereka menumpang di rumah Gani. Kemudian, ketika mereka merasa mampu, mereka disuruh menyewa kamar-kamar Gani dan pada akhirnya membelinya. Ketika Gani sakit, Neneng dengan sigapnya menjual bagian-bagian rumah kepada sanak-saudaranya, untuk membantu membayar biaya pengobatannya. Sanak saudara ini, yang semula telah ditolong oleh Gani, kemudian menolong Neneng dengan kadang-kala membayar makanan atau biaya pengobatan.

Setelah kematian Gani, saudara lelaki Gani yang tinggal di sebelah rumah memberi upah kepada Neneng sebagai imbalan mencuci pakaian mereka dan menyediakan makanan bagi mereka. Anak-anak Neneng yang sudah menikah tinggal dan menyumbang pada Neneng untuk biaya makan bersama, tetapi sebagian pendapatan mereka gunakan sendiri.

Dalam keadaan darurat, seperti sakit, kematian atau kebangkrutan, ikatan di antara rumah-rumah tangga itu menjadi nyata. Misalnya ketika adik laki-laki Gani meninggal dunia, maka anak-anaknya yang sudah nikah, yang tinggal di dekatnya dalam rumah yang terpisah, datang untuk memberi bantuan kepada ibu tirinya. Tetapi Anong (isteri adik Gani) tidak dapat mengandalkan pemberian untuk jangka waktu yang lama dari anak-anak tirinya yang sudah nikah, karena mereka harus menghidupi keluarga mereka sendiri. Ia mendirikan warung makanan dan empat anaknya melakukan pekerjaan tidak tetap sebagai penyemir sepatu dan menjual air. Meskipun ikatan kekerabatan dapat mengatasi penderitaan, pada akhirnya setiap keluarga harus menghidupi dirinya sendiri dan tidak dapat bergantung pada saudara-saudaranya yang juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Keluarga Juria kelihatannya tidak memiliki sanak-saudara yang lain di daerah itu. Beberapa tahun kemudian saya mengetahui bahwa suami Juria punya adik yang nikah dengan anak Anong. Pada mulanya saya mengira bahwa Juria telah diangkat oleh Gani yang biasa dipijatnya dan yang pertama kali disewa rumahnya, kemudian dibeli. Saya juga mengetahui bahwa Juria memiliki seorang saudara perempuan (Ani), yang tinggal di sebelah rumahnya, yang telah ditolongnya untuk menyewa dan kemudian membeli rumah itu dari Gani. Ani telah menolong memelihara delapan anak Juria, sementara ia bekerja sebagai pelayan di Menteng. Ketika Ani bekerja sebagai pelayan, kerja sama di antara kedua perempuan bersaudara itu menurun. Juria merasa bahwa dengan menolong satu sama lain maka dua keluarga itu akan lebih kuat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Ia percaya bahwa anak-anaknya akan membantu Ani dan Amat (suami Ani) pada hari tua. Namun Amat merasa terlalu miskin untuk dibebani dengan anak-anak Juria dan tidak menyukai isterinya menolong Juria.

Dua rumah tangga itu mulai retak, sehingga ketika saya datang di masyarakat itu, ikatan kekerabatan mereka tidak lagi tampak.

Satu-satunya bukti bahwa mereka bersaudara adalah kunjungan rutin anak-anak Juria ke rumah Ani. Mereka mungkin berharap menerima sepotong kue yang gurih dari bibinya, sementara ibunya pergi. Boleh jadi ada pertukaran makanan dan uang lainnya yang tidak saya ketahui, tetapi pada tahun 1970-an, masing-masing rumah tangga memandang yang lain sebagai unit yang terpisah. Lambat laun, sanak saudara yang sudah akrab, mulai retak. Perluasan keluarga dan masuknya pendatang baru melalui pernikahan, menyebabkan kepentingan-kepentingan kekerabatan yang umum sebelumnya menyimpang. Keluarga miskin yang bersanak-saudara sebagaimana keluarga Juria dan keluarga Ani mengalami kesulitan dalam memilih. Untuk mempertahankan hidup mereka perlu saling menolong satu sama lain dan dengan demikian sebetulnya mengorbankan sedikit apa yang mereka miliki. Semakin langkanya barang-barang dan perjuangan terus-menerus untuk mempertahankan hidup di dunia yang semakin bersifat komersial, menyebabkan nilai-nilai pembagian yang dulu pernah mereka yakini, kini hilang.

Rumah-rumah tangga seperti rumah tangga Sumira yang tidak mempunyai ikatan kekerabatan di daerah itu menciptakan ikatan baru dengan para tetangga terdekat. Sumira pada mulanya diperkenalkan dengan daerah itu oleh Citro. Sumira salah seorang di kampung itu yang punya televisi dan mengajak anak Ibu Citro untuk menonton televisi miliknya itu. Mus yang juga dari Jawa Tengah merupakan teman terdekat dan perempuan kepercayaannya. Mereka berdua pedagang makanan dan satu sama lain saling memberi makanan dan nasihat perkawinan. Keduanya memiliki suami yang mengawini isteri-isteri lainnya. Mus pertama kali menyewa setengah dari rumah Sumira. Kemudian ia membeli rumah yang disewanya itu dan membangunnya kembali menjadi rumah tersendiri. Sepuluh tahun kemudian, ibu Sumira menyewa sebuah kamar dari Mus untuk ibunya sendiri. Ibu Sumira memiliki hubungan khusus dengan Kuci yang tinggal di sebelah gang yang berseberangan. Kuci memiliki banyak anak kecil dan Ibu dari ibu Sumira membantu memeliharanya ketika Kuci sibuk mengurus warung makanan. Sebagai imbalannya, Kuci sering memberi Ibu dari ibu Sumira kue-kue. Cecep, yang merupakan anak tiri laki-laki Kuci menolong memasang listrik untuk Ibu Sumira, sebagai imbalan Sumira membayar iuran listrik Cecep setiap bulannya. Sanak-saudara Cecep menginginkan listrik, tetapi ia lebih suka me-

masangkannya untuk orang yang bukan kerabat seperti Sumira yang lebih mungkin membayar iuran bulanannya.

Pada waktu dagangan Sumira laku keras, ia mempekerjakan Mumu dan Badria di warungnya. Mumu ditinggalkan suaminya pergi dan akhirnya pindah ke rumah Sumira. Suami Badria meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil, sehingga Sumira membantu Badria dengan menyuruhnya melakukan pekerjaan sambilan seperti mengangkut air, membersihkan rumah dan membawa barang-barang miliknya ke pegadaian untuk digadaikan.

Ketika Sumira makmur, ia kelihatannya menjauhkan diri dari tetangganya. Beberapa orang menyebutnya sombong. Ketika warung dagangannya bangkrut dan ia mengalami masa-masa kesulitan, ikatan timbal balik yang dulu pernah ada muncul kembali. Anak ibu Citro memberinya bubur kacang hijau, serbet untuk membersihkan, dan obat nyamuk yang diperolehnya secara cuma-cuma dari rumah sakit tempat ia bekerja. Mus memberi sisa dari dagangannya yang tidak terjual. Kuci juga memberikan makanan sisa dari dagangannya. Dengan memberikan makanan ini kepada Sumira ketika ia dalam keadaan makmur mungkin ini dapat dianggapnya menghina, tetapi memberinya dalam keadaan kesulitan ekonomi ia dapat menerimanya dengan rasa terima kasih. Pemberian-pemberian ini tidak cukup untuk menghidupi keluarganya, namun paling tidak akan meringankan beban penderitaannya. Beberapa tetangga membeli barang-barang milik Sumira -- bupet, radio, pesawat televisi, barang-barang tembikar dan warung dagangannya -- atau membantu mencarikan orang-orang yang akan membeli barang-barang itu. Kini Sumira menonton pesawat televisi milik anak ibu Citro yang baru dibelinya dari Sumira.

Sumira sangat memperhatikan para tetangga, dan bukan sanak-saudara yang lebih jauh, yang memberinya bantuan pada saat dibutuhkan. Sumira dan ibunya melihat keadaan kerabatnya yang lebih kaya hanya sekali atau dua kali dalam setahun, yaitu selama Lebaran atau Idul Adha. Mereka malu akan kemiskinan mereka dan takut bahwa saudara-saudaranya akan menganggap bahwa mereka mengemis. Lebih lanjut, mereka merasa ada beban jika harus melakukan perjalanan melintasi kota untuk menengok sanak saudara mereka. Kaum perempuan lain di kampung itu mempunyai perasaan sama, segan, dengan saudara jauh yang lebih mampu. Seseorang bergantung pada para tetangga yang dekat untuk mempertahankan hidup dan bukan pada saudara-sauda-

ranya yang lebih kaya yang tinggal di tempat jauh. Kelangsungan ikatan sosial ini sangat banyak tergantung pada kedekatan rumah tangga secara fisik. Ikatan mereka didasarkan pada hubungan dan kebutuhan sehari-hari. Ikatan semacam ini membutuhkan waktu lama untuk berkembang dan para tetangga yang lebih lama tinggal bersama akan menjadi lebih dekat.

Karena perubahan yang terus-menerus dalam keanggotaan rumah tangga, maka ikatan di antara para tetangga yang bukan sanak- saudara, khususnya kaum perempuan kadang-kadang tampak lebih tahan lama daripada ikatan di antara para anggota dari satu rumah tangga. Karena muncul ketidakcocokan nilai-nilai antara tindakan yang bersifat timbal-balik dan yang ada hubungan dengan uang di kalangan rumah-rumah tangga yang bersaudara, maka hubungan di antara rumah-rumah tangga yang tidak ada hubungan saudara sering kelihatan lebih lancar. Sebagaimana akan jelas dalam bagian-bagian berikutnya, maka mereka yang termasuk dalam rumah-rumah tangga yang keadaannya lebih baik lebih suka menyendiri dan tidak banyak terlibat dengan rumah-rumah tangga yang lain dalam kampung itu.

Orang-orang Luar

Tidak semua rumah tangga yang berada dalam kampung itu memiliki ikatan yang kuat dengan para anggota lain dari masyarakat itu. Walaupun keakbrab merupakan syarat mutlak, hal itu tidak menjamin bahwa hubungan-hubungan sosial akan saling diakui. Di dalam lingkungan itu, biasanya kira-kira ada setengah lusin rumah tangga yang dapat dikelompokkan sebagai orang-orang luar. Jika di antara mereka ada hubungan dengan orang lain itu hanyalah hubungan ekonomi. Secara sosial mereka jarang bergaul dengan para tetangga dan jarang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampung. Orang disebut sebagai orang dalam atau orang luar ditentukan oleh sering atau tidaknya para ibu rumah tangga melakukan kegiatan di kampung itu.

John Sullivan mencoba memahami bagaimana orang dapat dianggap sebagai "orang dalam" atau "orang luar" di kampung di Yogyakarta. Ia menyimpulkan "... bahwa keanggotaan masyarakat tidak hanya merupakan soal pengenalan diri atau mempertahankan nilai-nilai dan sikap-sikap tertentu," tetapi membutuhkan "partisipasi" aktif (misalnya *sharing* dan "kerja sama dalam kam-

pung").[10] Ia berusaha mengenali sifat-sifat kelompok "bukan kampung." Ia menemukan "orang luar" adalah orang-orang yang lebih kaya, yang sangat miskin, yang tinggal di pinggiran yang menghadap ke jalan-jalan raya, berbeda dalam budaya, yang dari kelas-menengah atau orang-orang buangan dan mereka yang tinggal di daerah itu selama waktu pendek atau sementara. Namun setelah ia menemukan sifat-sifat itu, ia merasa kecewa, karena banyak kekecualian mengenai siapa "orang luar" dan siapa "orang dalam."

Di Kebun Kacang, rumah-rumah tangga yang muncul menjadi orang-orang luar, sesuai kelompok-kelompok yang dibuat John Sullivan. Lima kelompok yang paling cocok adalah: (1) orang makmur (misalnya "kelas menengah"), (2) orang yang sangat miskin, (3) orang yang hanya sementara di suatu daerah, (4) orang yang berasal dari daerah lain dan (5) orang buangan. Kalau kita bicara mengenai orang buangan, maka kita bicara mengenai pelacur, lebih bersifat individu bukan rumah tangga.[11] Kelompok-kelompok "orang miskin," "orang yang hanya sementara di suatu daerah," dan "orang yang berasal dari daerah lain" seringkali sifatnya sama.

"Orang-orang makmur" menurut mereka maupun orang-orang lain dari kampung itu dianggap sebagai orang-orang luar. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Sumira pada masa kemakmurannya menjauhkan diri dari para tetangganya. Yang lebih khas mengenai rumah-rumah tangga dalam keadaan makmur di Kebun Kacang adalah Nano. Ia selalu menutup pintu rumahnya yang berloteng dan anak-anaknya berada di dalamnya, jauh dari gangguan, bahaya, dan makanan yang dijajakan di gang-gang kampung itu. Meskipun rumah itu berhadapan langsung dengan gang kampung, namun begitu berada di dalamnya terasa seolah-olah semua pemandangan, suara, dan bau-bauan dunia kampung tidak ada lagi. Dinding-dinding bambu rumah yang keropos telah diganti dengan batu bata dan kaca.

Pada akhir tahun 1970-an, keluarga itu sama sekali tidak berhubungan dengan para tetangga kampungnya untuk kegiatan apa pun. Mereka memiliki air, listrik dan gas sendiri dan tidak menggunakan air lokal atau penjaja minyak tanah. Mereka memiliki fasilitasnya sendiri untuk mencuci dan kakus, dan dengan demikian

---

10 Sullivan "Back Alley Neigbourhood" hal. 13-4.

11 Secara mencolok beberapa pencuri itu tampaknya dibiarkan sepanjang perbuatannya dilakukan di tempat lain. Lihat juga Guiness *Harmony and Hierarchy*, hal. 93-5.

tidak perlu melewati gang-gang, sebagaimana lazimnya dilakukan para tetangganya untuk menuju sumur atau kakus umum. Mereka tidak perlu menggunakan jasa para pencuci pakaian, karena mereka memiliki mesin pencuci pakaian. Karena alasan-alasan pribadi, penghematan, dan kepercayaan, mereka lebih suka menggunakan pelayan muda dari desa kampung halamannya di Jawa Tengah daripada mempekerjakan seorang gadis dari lingkungan perkotaan tempat mereka tinggal. Mereka lebih suka membeli sebagian besar makanan mereka dalam jumlah yang banyak dengan harga yang memperoleh potongan dari luar kampung, daripada dari warung yang ada di lingkungan yang terdekat, karena lebih mahal.

Ketidaktergantungan ekonomi mereka dari masyarakat sekitarnya memperkuat ketidaktergantungan sosial mereka. Anak-anak dari rumah-rumah tangga itu, semua kebutuhan makanannya terpenuhi dari memasak di rumah mereka sendiri, dan tidak membeli di warung yang ada di sepanjang gang-gang di kampung itu. Mereka bersekolah di tempat yang jauh dan bukan sekolah yang dekat yang digunakan oleh sebagian besar anak-anak kampung. Anak-anak diantar ke sekolah dengan sepeda motor ayahnya dan tidak menggunakan becak atau berjalan sebagaimana lazimnya dilakukan anak-anak kampung lainnya. Mereka cenderung untuk bergaul dengan orang-orang di luar kampung dari tempat kerja mereka, sekolah atau desa asal mereka dan tidak terhalang oleh biaya transpor yang membatasi mobilitas dan jangkauan ke dunia luar.

Ketika pertama kali mereka membeli sebuah rumah di daerah itu pada awal tahun 1970-an, mereka ingin mendapatkan sambutan dari masyarakat setempat. Secara enggan mereka membiarkan para tetangganya menonton pesawat televisi mereka. Pada akhir tahun 1970-an, ketika di daerah itu sudah banyak orang memiliki pesawat televisi, mereka pindah ke ruangan yang lebih tersembunyi, sehingga tidak lagi diganggu oleh para tetangga yang melihat melalui jendela rumahnya. Untuk hiburan dan sedikit pendapatan tambahan, nenek Nano, yang tinggal di rumah tangga itu, memasak makanan yang kadang-kadang dikirimkan ke warung Acang untuk dijual kepada para tetangga. Pada tahun 1980-an, mereka membeli *video recorder* dan memungut biaya bagi anak-anak kampung yang ingin menontonnya. Setiap tahun dua kali keluarga itu merasa wajib untuk menyumbang uang dalam jumlah

besar untuk rumah ibadah. Namun demikian, walaupun mereka tidak terasing sepenuhnya dari lingkungan itu, hubungan mereka terbatas, hanya kadang-kadang, dan sebagian besar bersifat ekonomis. Setelah dua tahun, saudara perempuan Nano, tinggal dalam rumah itu, masih belum mengenal wajah-wajah atau nama-nama orang yang tinggal hanya beberapa rumah jauhnya. Ia tinggal dalam rumah tangga yang terasing, tertutup, kalangan kelas menengah, rumah perkampungan yang terbuka bagi siapa saja untuk berkumpul, mengobrol dan memperoleh kekerabatan di antara mereka.

Ketika mereka makmur, rumah-rumah tangga lainnya mulai mengikuti pola serupa untuk menjauhkan diri mereka dari orang-orang lainnya dalam masyarakat itu. Pada pertengahan tahun 1970-an Ici membangun rumah bertingkat yang terbuat dari batu bata dan kayu dan anak-anaknya jarang terlihat bermain-main di luar. Pada tahun 1980 sanak-saudaranya kehilangan pekerjaan dan berupaya meminjam uang, tetapi Ici menolaknya. Sanak-saudaranya itu terpaksa meminta bantuan tetangga yang lebih miskin yang bukan merupakan sanak-saudara. Kemakmuran memaksa Ici menjauhkan diri dari saudara dan tetangganya karena khawatir, bahwa mereka akan meminta bantuan uang atau material yang baru diperolehnya. Menjelang akhir dasa warsa itu dua atau tiga keluarga seperti halnya keluarga Ici meninggalkan kampung itu untuk mencari tempat yang lebih makmur dan lebih sehat di daerah pinggiran kota. Para tetangga dan mereka sendiri mengakui bahwa salah satu alasan utama atas kepindahannya adalah agar kekayaannya tidak diganggu.

Selanjutnya menjadi jelas bahwa jumlah rumah tangga yang dulunya menjadi bagian dari masyarakat itu kian banyak yang menjauhkan diri mereka sendiri, ketika mereka berhasil mengumpulkan kekayaan. Rumah tangga Burhanuddin pernah menjadi bagian dari masyarakat itu. Antara tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an, rumah tangga itu mengangkat para anggota keluarga Innah yang kurang beruntung. Burhanuddin memberikan tanah kepada Acang untuk mendirikan warung dagangan. Ia memberi pinjaman uang kepada anak laki-laki Mandroppi untuk membuka kursus-kursus renang. Uang itu tidak pernah dibayar kembali dan Burhanuddin merasa ditipu.

Meskipun Burhanuddin dan isterinya masih tetap memimpin pengajian untuk semua anggota lingkungan itu, namun pada akhir

tahun 1970-an, mereka membangun pagar tinggi di sekitar rumahnya. Hal ini jelas untuk menghalangi para tetangga yang suka mengintip dan saudara-saudaranya yang suka meminta-minta. Hanya sedikit penduduk kampung, bahkan mereka yang bersaudara, tidak berani masuk tanpa diundang. Ini berarti bahwa di satu sisi Burhanuddin mengajak para tetangganya mengaji, tetapi di sisi lain ia mengasingkan diri dari lingkungannya. Meningkatnya jumlah kekayaan beberapa anggota di dalam masyarakat itu selama tahun 1970-an, berarti bahwa mereka secara sadar menjauhkan diri dari para anggota lainnya, meskipun mereka bersaudara.

Sebagian besar rumah tangga yang miskin memiliki ikatan sosial dan ekonomi dengan rumah-rumah tangga yang "makmur" dalam lingkungan itu. Para isteri dan anak-anak perempuannya dari keluarga yang paling miskin mencuci dan menyeterika pakaian, mengangkut air, atau melakukan tugas-tugas sebagai pembantu rumah tangga untuk para tetangganya yang "makmur." Kegiatan untuk menghasilkan pendapatan ini memberinya peluang untuk masuk ke dalam rumah-rumah tangga "makmur" sehingga menimbulkan ikatan sosial maupun ekonomi.

Hanya sebuah rumah tangga yang diidentifikasikan sebagai "orang luar" semata-mata atas dasar kemiskinan yang parah. Rumah tangga Peking hanya memiliki seorang pencari nafkah yang bekerja sebagai penjaga dan penyapu diluar masyarakat itu. Isteri dan anak perempuannya sibuk mengatur anak-anaknya yang masih kecil dan tidak bekerja dalam lingkungan itu. Mereka membeli kebutuhan sehari-harinya secara kredit dari warung-warung setempat dan pada suatu kesempatan menggunakan sumur tetangga ketika sumurnya tidak berfungsi. Sebenarnya mereka mempunyai ikatan tetapi sangat lemah. Kalau mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, bagaimana mungkin mereka akan memberi kepada orang lain. Para tetangga merasakan mereka sebagai tanggungan dan sebuah warung pada akhirnya menarik kembali fasilitas-fasilitas kreditnya karena utang mereka terlalu banyak. Ketika tetangga yang semula membiarkan mereka menggunakan sumurnya tanpa menerima imbalan apapun, kini ia meminta mereka untuk memperbaiki sumurnya sendiri.

Rumah tangga Peking merasa sangat malu atas kemiskinannya dan enggan untuk berutang kepada siapa pun karena takut mereka tidak dapat melunasinya. Mereka tidak memiliki sanak-saudara di

daerah itu atau ikatan dengan orang-orang se daerah tempat asalnya. Mereka tidak pernah mengundang seseorang untuk bertamu ke rumahnya yang sempit dan tidak ada fasilitas tempat duduk yang memadai. Lagipula, mereka jarang memiliki makanan atau minuman yang pantas untuk disuguhkan atau piring-piring dan cangkir-cangkir untuk digunakan. Karena itu mereka tidak diundang atau mengundang tetangga-tetangga dekat. Paling *banter* meluaskan hubungannya dengan tetangga, ibu dan anak perempuannya yang sudah kawin duduk di gang depan rumahnya, mencuci pakaian atau menyusui bayinya sambil mengobrol dengan orang-orang yang lewat.

Karena kemiskinan dan kurangnya pemahaman mereka tentang agama, maka rumah tangga Peking tidak mampu memberi sumbangan kepada rumah ibadah setempat, sekalipun pada masa Lebaran. Mereka hanya menerima beberapa potong kecil daging kambing, pada hari raya Idul Adha. Tiadanya pakaian yang bagus dan uang yang cukup untuk memberikan hadiah atau sumbangan uang, membuatnya tidak menghadiri pesta-pesta dalam lingkungan kampung itu.

Beberapa rumah tangga orang luar yang lain "sangat miskin" dan merupakan "orang luar yang datang dan bermukim sementara di suatu daerah." Mereka berbeda dengan rumah tangga Peking, karena mereka hanyalah penduduk sementara dalam masyarakat itu. Hubungan sosial perlu waktu untuk berkembang dan perlu hidup menetap. Meskipun beberapa rumah tangga pemondok sementara yang masuk ke masyarakat itu melalui hubungan-hubungan kekerabatan dan pedesaan, namun tampaknya mereka terbatas. Para tetangga sangat enggan untuk membantu mereka yang kira-kira tidak mungkin membalas kembali kebaikan mereka ketika pada gilirannya mereka membutuhkan pertolongan. Kedua pihak mungkin telah merasakan tidak bermanfaat memberikan waktu, uang dan upaya dalam suatu hubungan yang tidak akan bertahan lama. Karena keberadaan mereka yang tidak terikat, maka tingkah laku mereka tidak dapat dikontrol sebagaimana mereka yang tinggal menetap, yang tidak luput dari gosip dan pengasingan pergaulan lingkungan itu. Para penduduk sementara ini lebih memungkinkan daripada penduduk permanen untuk meninggalkan lingkungan itu tanpa menanggung kewajiban sosial atau ekonomi, sehingga hal itu mengurangi kemauan para tetang-

ga lain untuk melibatkan mereka ke dalam kegiatan-kegiatan kampung.

Di Kebun Kacang, para penduduk sementara berdesakan karena tempat tinggalnya murah atau terdesak oleh kemiskinan, kurang terjaminnya pekerjaan atau kurangnya keinginan untuk menyewa tempat itu. Seorang janda miskin yang membutuhkan uang tunai secara mendadak mungkin akan membagi lagi rumahnya untuk disewakan sebagai rumah pemondokan sementara.

Jika ia sudah merasa tercukupi, mungkin ia menginginkan rumah itu tidak disewakan dan meminta kepada para penyewanya untuk pindah. Para pemondok sementara, karena itu, terpaksa pindah karena mereka tidak dapat menemukan tempat tinggal yang murah lainnya di daerah itu. Mereka mungkin hanya melihat bahwa lingkungan itu sebagai tempat perlindungan sementara sampai mereka dapat menetapkan dirinya di mana pun atau tempat tinggalnya mungkin hanya merupakan pemberhentian lain dalam perjalanannya dari satu tempat ke lain tempat.

Dua rumah tangga orang Padang dalam lingkungan itu terpisah dari rumah-rumah tangga lain di masyarakat itu, karena mereka menolak untuk ikut serta dalam kegiatan kampung. Meskipun "miskin" dan "sementara," mereka menganggap dirinya lebih baik dari anggota masyarakat yang lain di lingkungan itu dan menolak untuk berbaur, sama-sama menanggung, atau ikut serta ambil bagian dalam kegiatan kampung. Ketika anak-anaknya memperoleh mainan boneka baru mereka tidak bermain bersama-sama dengan anak-anak tetangga dekatnya. Perilaku ini menimbulkan perselisihan sehingga ibu-ibunya juga terlibat. Mereka tidak pernah membagikan makanan Padang kepada para tetangga yang akibatnya mereka dipandang sebagai antisosial, sombong, tinggi hati dan pelit. Menurut para penduduk kampung, mereka tidak memiliki sifat seperti orang Jawa yang ramah.

Tidak seperti keluarga-keluarga di daerah itu, rumah-rumah tangga orang Padang tidak memiliki ikatan kekerabatan atau desa asal dengan keluarga-keluarga lain dalam lingkungan itu dan semata-mata datang ke daerah itu untuk mencari tempat tinggal yang murah. Sebelum tiba di kampung itu, mereka telah mengalami masa-masa yang sulit dan lari dari kebangkrutan atau utang. Mereka memandang Kebun Kacang sebagai pengungsian sementara tempat mereka dapat tinggal secara murah, menabung dan mendapatkan kembali apa yang telah hilang dan kemudian pin-

dah. Mereka tidak tertarik untuk bergaul dengan masyarakat itu. Ikatannya dengan para tetangga hanya semata-mata ekonomis, yang didasarkan pada sewa kamar dan fasilitas-fasilitasnya.

Meskipun bukan rumah-rumah tangga yang sebenarnya, namun para anggota rumah tangga yang bujangan, beberapa pelacur juga dipandang dan memandang diri mereka sendiri sebagai "orang luar." Meskipun dua orang menyewa kamar di lingkungan tersebut dan dua orang lagi tinggal bersama keluarga-keluarga yang menjadi bagian masyarakat, mereka enggan bergaul dengan para tetangganya. Mereka tinggal di dalam rumah-rumah mereka sepanjang hari dan hampir tidak mau keluar. Mereka merasa para anggota masyarakat tidak memahami mereka. Sebaliknya, mereka memiliki perasaan lebih tinggi dari orang kampung yang agaknya sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih mampu atau lain adat. Melalui pekerjaannya dan sejumlah hubungan, mereka mempunyai impian menjadi kelas menengah yang merupakan tanggapan mereka. Mereka merasa tidak bermanfaat untuk menghiraukan para penduduk kampung yang dianggapnya tinggal dalam dunia yang tertutup, terasing, terkebelakang, tidak menyadari perubahan yang cepat dan peluang yang terjadi di dunia luar. Teman-teman mereka sebagian besar berasal dari perempuan-perempuan yang bekerja di bar-bar, restauran-restauran atau kafe-kafe. Meskipun mereka berpenghasilan baik dan menimbulkan iri bagi gadis-gadis kampung, mereka merasa dijauhkan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Gosip dan penelitian yang cermat menjengkelkan mereka, sehingga mereka suka menyendiri.

Ikatan Agama

Islam menjadi fokus utama bagi organisasi sosial yang lebih formal di Kebun Kacang. Musholla dalam lingkungan itu dibangun pada akhir tahun 1960-an. Pada tahun 1964 seorang Kyai dari Bogor telah pindah di sekitar Ibu Cia dan mencoba untuk menyebarkan ajaran Islam. Trauma pemberontakan PKI yang terjadi pada tahun berikutnya menjadikan penduduk lebih sadar akan Islam. Selama tahun 1970-an, kegiatan Islam di kampung itu semakin dikembangkan dengan baik. Hal ini mencapai puncaknya dalam membangun kembali ketiga rumah ibadah di kampung itu termasuk yang ada dalam lingkungan saya. Ini adalah pertama-tama dan satu-satunya bukti mengenai seluruh lingkungan yang bergabung dalam suatu usaha produktif. Semua anggota ling-

kungan itu dihimbau untuk menyumbang uang bagi pembelian material bangunan, tenaga kerja sukarela atau menyediakan makanan. Sebuah daftar disusun mengenai semua yang menyumbang, sehingga mereka yang tidak menyumbang akan merasa malu. Pada hari Minggu, sebagian besar penduduk kampung libur, sehingga banyak anggota masyarakat ikut bergabung untuk membantu. Beberapa orang mengangkut batu bata dan kayu, sementara yang lain mengaduk semen. Laki-laki yang lebih tua, terutama dari keluarga Ibu Innah, memandori orang-orang yang lebih miskin dan yang lebih muda. Para isteri menyajikan hidangan-hidangan yang lezat.

Setiap malam, lima belas sampai dua puluh orang laki-laki, terutama dari keluarga Ibu Innah yang berasal dari Jawa Barat, secara teratur berkumpul untuk bersembahyang.[12] Musa sebagai pengurus mesjid memanggil mereka melalui pengeras suara untuk bersembahyang . Sering ia duduk di depan pintu musholla dengan mata setengah tertutup dan kelihatannya dalam keadaan meditasi, tetapi sebenarnya mengawasi mereka yang datang. Dengan mengenakan kain sarung yang longgar yang diseterika licin, kemeja yang rapi dan kaki telanjang, orang-orang lelaki bersantai dalam musholla, duduk bersila di atas tikar dengan mengenakan peci beludru hitam. Dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang, mereka berbincang-bincang mengenai peristiwa-peristiwa sehari-hari atau hanya duduk menyendiri sambil berdzikir. Kemudian di antara mereka ada yang berdiri menyerukan iqamat sebagai tanda shalat secara berjamaah segera dimulai. Dengan itu, hubungan mereka hanya dengan Tuhan dan bukan dengan manusia lain.

Setelah pertengahan tahun 1970-an, Ibu Jum, anak perempuan dari pengurus mushollah, mengadakan perkumpulan kaum perempuan setiap hari Rabu sore. Perkumpulan ini dihadiri kaum perempuan setengah umur atau yang sudah tua dari keluarga Ibu Innah. Namun kaum perempuan tua dari Jawa Tengah seperti Ibu dari Sumira, Ibu Darmo dan Ibu Citro juga datang. Sebagian kaum

12 Kaum laki-laki yang berasal dari Jawa Tengah dalam lingkungan Ibu Innah dalam menjalankan praktek-praktek sembahyang ini tampaknya kurang tekun. Meskipun sebagian besar dari mereka menyatakan beragama Islam, namun mereka jarang menginjakkan kaki di mushollah. Abangan dan kepercayaan Kebatinan menyebar luas di antara mereka. Lihat Geertz (*The Religion of Java*, hal. 11-112, 309-34).

perempuan muda yang sudah beranak kelihatan tidak tertarik dengan perkumpulan itu. Kaum perempuan datang di mushollah dengan pakaian terbaik dan memakai kerudung berwarna menutupi sebagian kepalanya. Mereka berkumpul di luar atau di dalam menunggu datangnya pembicara tamu. Kemudian selama satu jam, mereka mendengarkan ceramah seorang perempuan dengan suara yang nyaring, yang membicarakan, bagaimana bersikap terhadap suami, para tetangga dan anak-anak mereka. Ia menekankan pentingnya kesucian dan hubungan mereka kepada Tuhan. Pada akhir setiap ceramah mereka disodori kotak amal yang secara sukarela mereka isi. Dalam kesempatan ini, Ibu Jum memanfaatkan dengan berjualan kerudung dan kebaya di antara para jamaah yang hadir di perkumpulan itu. Setiap saat mereka berkumpul, beberapa di antaranya membayar kepada Ibu Jum untuk barang-barang yang telah mereka beli darinya secara kredit. Tidak ada rasa malu dalam menggabungkan perdagangan dengan Islam.

Pada akhir tahun 1970-an, Ibu Jum mengadakan pengajian kaum perempuan dalam kelompok yang lebih kecil terdiri dari lima sampai sepuluh orang yang bertemu sekali seminggu di rumah para anggota secara bergantian. Mereka berpakaian bagus dan rapi duduk melingkar di atas tikar di lantai. Di sela-sela pembacaan kitab suci Al Qur'an, mereka mengobrol membicarakan persoalan-persoalan pribadi. Lingkaran pembacaan Al Qur'an ini memang sangat penting bagi orang-orang seperti Karsinah, yang tidak bercakap-cakap paling tidak dengan delapan orang dalam lingkungan tetangganya. Hanya di sana ia menjumpai orang-orang yang berbicara. Kalau tidak ia merasa sangat sendirian.

Bagaimanapun, Islam, terutama dipraktekkan secara sendirinya di dalam kebebasan pribadi di rumah mereka masing-masing. Untuk para penduduk kampung, terutama dikaitkan dengan hubungan setiap pribadi itu sendiri dengan Tuhan. Sumira, yang tidak pernah bersembahyang, ketika pertama kali saya datang di kampung itu pada awal tahun 1970-an, semakin rajin bersembahyang setelah usahanya yang kecil bangkrut. Lima kali sehari ia bersembahyang. Sembahyang ini bersifat pribadi dan merupakan pengalaman yang sangat pribadi antara dirinya dengan Tuhan.

Beberapa orang perempuan dalam lingkungan itu seperti halnya Mus, yang datang dari Jawa Tengah, dan Peking, yang tidak pernah diajari Islam, tidak bersembahyang. Meskipun kaum perempuan kampung yang lain menganggap Islam sebagai pilihan

pribadi, namun mereka terhina ketika disebut sebagai "orang merah," "abangan,"[13] "PKI," atau "orang bodoh yang tidak punya adat." Berbeda dengan orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah tampaknya memeluk Islam tidak *getol*, meskipun tidak semuanya demikian. Misalnya Karsinah, memang miskin, buta huruf dan orang Jawa Tengah, tetapi bersembahyang secara serius. Islam baginya, sebagaimana bagi Sumira setelah ia bangkrut, memberikan harapan dan ketenangan dalam dunia yang selalu berubah. Sebaliknya mereka yang sibuk berdagang setiap hari sebagaimana Mus, atau Sumira ketika ia sukses, tidak ada waktu untuk bersembahyang.

Perayaan Islam

Kerja sama dan keramahtamahan yang tulus tampak jelas sekali selama dua kali perayaan Islam, yakni Lebaran dan Idul Adha. Sesuai dengan adat setempat, setiap rumah tangga diharapkan untuk menyumbang dua setengah liter beras kepada rumah ibadah menjelang Lebaran. Ibu Jum pengurus Musholla bagian wanita, mengumpulkan uang selama setahun, yang kemudian digunakan untuk membeli baju- baju baru bagi para janda dan keluarga miskin dalam lingkungan itu selama Lebaran. Maksud dari kegiatan itu adalah bahwa orang kampung yang kaya wajib membagikan kekayaannya kepada orang kampung yang miskin paling tidak setahun sekali, sesuai dengan kewajiban orang muslim untuk memberikan zakat.

Para anggota keluarga Ibu Innah, menetapkan berapa liter beras yang harus dibagikan kepada kaum miskin. Para penduduk kampung curiga, bahwa jumlah yang tidak cukup diberikan kepada orang-orang yang paling miskin, dan bahkan mungkin tidak begitu miskin, namun anggota keluarga Ibu Innah diberi juga, Kuci, isteri Miskar pimpinan yang sudah meninggal, selalu menerima beras yang banyak meskipun ia menjajakan dagangannya yang maju. Ibu Innah menerima banyak beras, mungkin karena ia adalah orang yang paling tua dan perempuan yang paling dihormati di kampung itu, pendiri kampung itu dan seorang janda -- tetapi sama sekali bukan merupakan orang yang paling

13 Dalam bahasa Jawa abangan berarti "merah." Dengan demikian hal ini sama dengan orang merah di Indonesia, yang menyatakan bahwa seseorang bukan muslim yang saleh (yang dalam bahasa Jawa disebut putihan).

miskin. Mereka dengan keluarga-keluarga yang paling besar dan/atau paling miskin di luar keluarga Ibu Innah seperti halnya Juria, Amad, Boco, Bani atau Karsinah menerima sedikit atau tidak sama sekali.

Lebaran merupakan hari bahagia atau kemenangan, pada saat tetangga, teman-teman, para majikan dan pekerja, para patron dan klien saling memaafkan. Setiap rumah tangga merasa wajib untuk menyediakan beragam makanan bagi para tetangga. Pada pertengahan tahun 1970-an, Sumira menyisihkan pendapatan seminggu untuk membeli bahan-bahan makanan seperti ayam, daging sapi, ketan, daun-daun pisang, kelapa dan rempah-rempah. Kemudian ia dan orang-orang lain dalam rumah tangganya bekerja mempersiapkan makanan untuk dua hari raya lebaran. Pada tahun 1980-an persiapan membuat makanan ini tampak menurun dan para penduduk kampung hanya membeli sekaleng biskuit.

Pakaian-pakaian dan sepatu-sepatu baru, seharusnya dibeli untuk semua anggota keluarga. Beberapa keluarga mencari pinjaman uang untuk membeli barang-barang itu, sehingga anak-anaknya akan merasakan hari raya itu. Pada hari pertama Lebaran mereka memakai baju baru, dan di sepanjang gang-gang ketika para tetangga, teman-teman dan kenalan-kenalan lama bertemu, mereka berjabat tangan, menganggukkan kepala, minta maaf atas segala dosa yang dilakukan selama tahun itu, dan satu sama lain mengucapkan selamat hari raya. Para penduduk kampung pergi dari rumah ke rumah, saling mengunjungi. Di setiap rumah, meja penuh dengan makanan lezat yang dimasak beberapa hari sebelum nya. Tamu-tamu diundang untuk makan dan minum. Bingkisan-bingkisan kecil makanan dikirim ke rumah-rumah mereka karena seseorang memiliki hubungan khusus atau utang.

Pada setiap Lebaran, Sumira mengirim makanan ke Enji, dan mengatakan kepada saya bahwa ia merupakan teman khusus dari Semarang. Hanya beberapa waktu kemudian saya mengetahui bahwa Sumira meminjam banyak uang dari dia. Yang mengherankan dari wanita muda yang menarik ini yang sering mengunjungi penduduk, tetapi tidak tinggal di daerah itu, adalah rentenir. Pada Tahun Baru Cina ia memberi pakaian dan kueh-kueh kepada Sumira. Sumira juga memberikan makanan kepada Kinoi, Mus dan anak Citro dan orang-orang lain yang mempunyai hubungan khusus dengannya. Hal ini juga terjadi di antara para tetangga lainnya dalam kampung itu. Pada hari raya Idul Adha dilakukan

pemotongan hewan kambing sebagai kurban. Sebagaimana hari raya Lebaran, hal itu menekankan pada pemberian dari yang kaya kepada yang miskin. Biasanya sejumlah rumah tangga yang lebih kaya di lingkungan itu menyumbang uang untuk dibelikan kambing. Para penduduk kampung menyatakan, bahwa seseorang dapat menilai kemakmuran masyarakat atau keadaan perekonomian kampung melalui jumlah kambing yang dikurbankan. Beberapa rumah tangga yang lebih miskin yang mempunyai hajat khusus, dapat juga menyumbang uang untuk maksud ini. Satu atau dua tahun setelah perdagangan Sumira bangkrut, ia menyumbang cukup untuk membeli kaki kambing.

Massa anak-anak dan orang-orang dewasa menjerit kegirangan ketika kambing-kambing itu disembelih. Bedug di masjid dan musholla dipukul bertalu-talu dan anak-anak mengalunkan puji-pujian kepada Tuhan. Empat atau lima orang laki-laki dari keluarga Ibu Innah merupakan pelaksana penyembelihan hewan kurban. Pemimpin agama (Imam) menajamkan pisau dan berdoa ketika ia menggorok leher kambing. Massa yang berkerumun berteriak menyaksikan kambing yang menggeliat disembelih. Puji-pujian Islam berkumandang melalui pengeras suara. Peristiwa ini terjadi pula di berbagai daerah di Indonesia. Kambing-kambing digantung terbalik, dikuliti, dan dagingnya dibawa ke rumah ibadah, tempat daging itu akan dibagi-bagikan. Kemudian dibungkus ke dalam kantong-kantong plastik dan pada siang hari disalurkan dari rumah ke rumah. Sumira dan ibunya merasa cemas karena mereka hanya menerima daging sekantong plastik kecil, seperti setiap orang lainnya, dan bukan kaki dan pinggang sebagaimana yang telah mereka bayar. Keluarga Sumira merasa heran, bahwa setelah beberapa tahun, mereka masih tidak memahami cara bagaimana menyalurkan daging ini. Mereka mencurigai adanya permainan curang, dan menyatakan bahwa seseorang dari keluarga Innah telah mengantongi uang atau bagian kambing yang lebih banyak. Tentu saja, daging adalah suatu kemewahan bagi keluarga-keluarga yang miskin.

Arisan

Bentuk baru perkumpulan yang menjadi populer di kampung selama tahun 1970-an adalah arisan. Para penduduk kampung menyatakan bahwa kegiatan ini meniru dari kalangan kelas me-

nengah.[14] Arisan biasanya melibatkan sepuluh sampai dua puluh lima orang yang memberikan jumlah uang yang tetap setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan kepada pengurus yang dikelola oleh seorang perempuan kampung. Pengurus pada mulanya mengunjungi dari rumah ke rumah untuk menanyakan apakah mereka akan mengikuti arisan itu atau tidak . Biasanya ia memilih orang-orang yang tinggal berdekatan, yang merupakan teman-teman, dan punya kelebihan uang. Jumlah uang yang disumbangkan tergantung pada cara yang digunakan para peserta dan jarang-kerapnya sumbangan. Paling sedikit adalah Rp 50,- (0,5 liter beras pada tahun 1977) dan paling banyak Rp 10.000,- (100 liter beras). Jumlah orang yang menerima kembali tergantung pada jumlah orang yang ikut serta undian yang ditarik menetapkan urutan yang mana bagi setiap anggota yang akan mengumpulkan uang mereka. Sekali dalam seminggu atau sekali dalam sebulan ketika seseorang menarik uang itu, disediakan kopi dan biskuit. Sejumlah orang mengatakan bahwa mereka harus hati-hati ketika gilirannya memperoleh arisan karena sanak-saudara atau para tetangga yang melarat sering minta dipinjami. Setiap peserta dalam kumpulan itu menggunakan uang arisan itu sesukanya. Selain kopi dan biskuit, tidak pernah ada pengeluaran lain yang diambilkan dari iuran para peserta arisan. Untuk mereka yang mengurus kegiatan arisan itu biasanya menerima sedikit ongkos setiap kali uang itu ditarik. Ia harus menjamin bahwa tiap-tiap orang membayar pada waktu dan tempat tertentu, dan jika seseorang tidak dapat membayar, ia wajib membereskan selisihnya dan menyelesaikan utang orang yang melalaikan itu di kemudian hari.

Seperti halnya ikatan lain di kampung itu, keanggotaan arisan berubah-ubah. Arisan bubar setelah setiap anggota menerima bagian uang. Arisan kemudian dimulai lagi, tetapi dengan para anggota yang berbeda. Karena pendapatan para penduduk kampung tidak tetap, mereka merasa dapat membayar iuran untuk

14 Untuk meluasnya sifat arisan di tempat lain di Indonesia, lihat Geertz, C. "The Rotating Credit Association: A 'Middle Rung' in Development," *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 10, No. 3: 1962: 241-63; Dewey, A. *Peasant Marketing in Java*, (New York, 1962) hal. 100, Jay *Javanese Villagers*, hal. 203, 416-19; N. Sullivan "Masters and Managers," hal. 314-5; Guiness *Harmony and Hierarchy*, hal. 147-53, 161-4, Forbes "Development and the 'Informal' Sector," hal. 203-6.

satu tahun dan tidak untuk tahun berikutnya. Sebagai contoh, ketika perdagangan Sumira berjalan baik pada awal tahun 1970-an, ia ikut arisan Maryati maupun Tuti. Dalam arisan Maryati ia membayar iuran Rp 5.000,- (100 liter beras pada tahun 1973) sebulan, sementara dalam arisan Tuti ia membayar iuran Rp 1.000,- seminggu. Ketika gilirannya tiba untuk menarik dalam sepuluh bulan, ia memperoleh Rp 50.000,- dikurangi biaya administratif untuk arisan Maryati. Dari Tuti ia memperoleh hampir Rp 10.000,- dalam dua setengah bulan.

Ketika perdagangan Sumira merosot ia memutuskan untuk tidak mengikuti arisan itu, karena ia takut tidak dapat membayar jumlah uang yang ditentukan untuk setiap minggu atau setiap bulan. Para anggota masyarakat lainnya seperti Wakijo mengikuti arisan-arisan dengan teman-teman pada tempat kerjanya atau dengan para anggota dari kampung halamannya yang tinggal di mana saja. Para penduduk kampung sekaligus dapat mengikuti paling tidak empat atau lima arisan yang ada di kampung itu.

Kerja sama Penduduk Kampung

Di samping perayaan-perayaan Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha, hanya pada saat masyarakat terkena musibah (sakit, kematian atau banjir) mereka seluruh masyarakat dapat bersaatu. Terutama musibah kematian, persatuan ini tampak terlihat di antara mereka. Orang-orang tidak pernah dibiarkan sendirian pada saat-saat kebutuhan memaksa dan ketika orang meninggal dunia para tetangga membantu mencuci, membungkus dan mengubur jenazah. Ketika anak Bani meninggal pada saat kelahirannya, semua perempuan dalam lingkungan itu berderet melalui jenazah itu, memberikan uang dan pernyataan belasungkawa. Kursi-kursi dikumpulkan dari rumah-rumah yang berdekatan dan ditempatkan di sepanjang gang di depan rumah itu. Orang-orang lelaki dari rumah yang berdekatan duduk mengobrol sampai larut malam. Sebelumnya saya jarang melihat para tetangga menunjukkan simpati yang begitu besar kepada keluarga Bani, yang terdiri dari tiga orang bersaudara yang masih muda, satu orang di antaranya telah beristeri. Ayah mereka telah meninggalkannya untuk mengawini perempuan lain dan ibunya telah meninggal dunia. Anak-anak muda itu hidup dari menarik becak, menyemir sepatu dan menjual buah dingin yang masih segar. Pada suatu ketika, para tetangga me-ngatakan bahwa mereka adalah juga pencuri.

Mereka mencuri barang kecil, seperti ayam, dari daerah-daerah lain, bukan dari lingkungan mereka sendiri, sehingga para penduduk kampung itu membiarkannya. Dengan kematian anak pertamanya, bagaimanapun, semua orang memaafkan dan para penduduk kampung berkumpul untuk menyokongnya.

Meskipun saya tidak mempunyai catatan mengenai semua kematian dalam lingkungan selama dasawarsa itu, paling tidak seorang dewasa dan seorang anak meninggal dunia setiap tahun. Ini berarti bahwa sedikit-dikitnya dua kali setahun seluruh lingkungan itu menghimpun sumber daya dan simpati untuk menolong mengatasi dukacita keluarga lain. Karena tradisi, gang-gang yang sempit, ruang dan waktu yang terbatas, orang-orang datang dalam jumlah kecil ke rumah keluarga yang kehilangan agar dapat disesuaikan, sepanjang siang dan malam. Tidak ada upacara resmi saat semua anggota masyarakat berkumpul bersama pada tempat waktu yang sama.

Di samping sumbangan para tetangga kampung yang spontan, mereka pun juga menawarkan pengumpulan dana untuk pemakaman kepada mereka yang ingin menyumbang. Setiap bulan iuran (Rp. 200,-) dikumpulkan oleh ketua atau pembantunya untuk dana kematian. Dana ini membantu untuk membeli kain putih pembungkus mayat dan sejumlah upacara agama yang harus diselenggarakan untuk menjamin orang yang meninggal dunia melintas dengan selamat menuju dunia yang lain.

Pada saat-saat gembira ria dan pesta, para tetangga membantu memasak dan menyediakan ruang tambahan, tikar-tikar atau kursi dan barang-barang pecah belah. Selama khitanan dan perkawinan, dua puluh atau tiga puluh orang akan duduk bersama dengan kaki bersila di atas tikar di lantai sebuah kamar yang berukuran tidak lebih luas daripada 10 atau 15 m^2. Berbagai makanan -- gundukan nasi kuning yang berbentuk setengah bulatan, ayam goreng, sayur-mayur dan, semacam kerupuk udang dan sejumlah kueh tepung beras yang sedikit berwarna-warni terbungkus dalam daun pisang -- disuguhkan. Kadang-kadang kaum perempuan yang berdekatan atau sanak saudara membantu mempersiapkan makanan, tetapi sering makanan itu dibeli atau menggunakan tukang masak.

Pesta-pesta perkawinan menyatukan komunitas itu secara spontan tanpa rencana, sama dengan upacara kematian. Bedanya pada kesempatan perkawinan itu mereka bersuka ria dengan banyak sekali makanan. Sedikit-dikitnya ada dua atau tiga perka-

winan setiap tahun. Beberapa perkawinan diselenggarakan selama dua hari dua malam dipenuhi dengan hidangan makanan dan pengantin pria maupun wanita berganti-ganti pakaian. Kartu-kartu undangan yang dicetak bagus dikirimkan kepada setiap rumah tangga dalam lingkungan itu. Sebagaimana dengan kematian, semua tetangga tidak pergi ke pesta itu pada waktu yang sama. Menurut waktu dan pilihannya, mereka mengenakan pakaian pesta dan berderet memasuki rumah yang merayakan selama hari atau malam perkawinan. Mereka menyampaikan penghargaan dan secara rendah hati memberikan amplop yang berisi uang lewat telapak tangan ibu pengantin wanita, dan kemudian duduk mencicipi berbagai makanan yang terletak di depannya. Orang-orang berpapasan di sepanjang gang-gang pergi ke atau kembali dari pesta. .Banyak orang kasak-kusuk membicarakan tentang perkawinan, berapa biayanya, apakah makanannya enak, dan apakah pengantin perempuan telah hamil.

Menjelang akhir dasawarsa itu, para penduduk kampung dikejutkan karena menemukan potongan kertas koran bukannya uang tunai yang diselipkan ke dalam amplop yang diberikan kepada ibu pengantin wanita. Kecurangan ini dipandang oleh semua orang sebagai tanda kemerosotan moral. Mereka menyatakan bahwa hal itu tidak pernah terjadi pada masa lalu. Tidak jelas berapa kali praktek ini terjadi, tetapi para penduduk kampung percaya bahwa hal ini meningkat. Tekanan ekonomi terlalu besar dialami orang banyak. Mereka merasa tidak dapat membayar rumah, makanan, pakaian, dan biaya pendidikan sekolah anak-anaknya. Mereka merasa malu jika tidak menyampaikan pemberian dan mencoba untuk menutupinya dengan memberikan sumbangan palsu. Kepadatan kampung dan fakta bahwa banyak tetangga sebenarnya tidak mengenal dengan baik satu sama lain, meningkatkan godaan untuk mencurangi. Ketika Ibu Cum (isteri Burhanuddin) merayakan perkawinan anak perempuannya pada tahun 1981, ia segera membuka amplop-amplop untuk meyakinkan bahwa amplop-amplop itu berisi uang. Ia juga membuat daftar mengenai berapa banyak setiap orang menyumbang.

Demi hubungan yang berlanjut, maka keseimbangan untuk memberi dan menerima harus dipertahankan. Sumira menerangkan bahwa orang-orang secara tradisional telah menyimpan uang untuk disumbangkan kepada para tetangga kampung pada kesempatan pesta (khitanan, pesta-pesta kelahiran anak, perkawinan)

dan untuk selanjutnya diharapkan menerima jumlah yang sepadan sebagai balasannya. Beberapa orang bahkan merasa terdorong untuk menyelenggarakan pesta agar mendapatkan kembali semua sumbangan yang telah mereka berikan kepada para tetangga selama tahun-tahun yang lewat.

Kerja sama dan Persaingan

Hubungan sosial dalam lingkungan Ibu Innah tidak semata-mata kooperatif atau semata-mata individualistik. Hubungan itu dapat dikarakteristikan sebaik-baiknya disebut bersifat sebagai anarki yang ditertibkan. Ada sedikit organisasi sosial yang formal, sehingga individu-individu secara spontan berhubungan dan menolong satu sama lain. Pada tingkat yang paling rendah, hubungan antara para anggota rumah tangga yang sama atau keluarga tampak tidak terlalu erat. Ini berkaitan dengan ketidakamanan ikatan antara para anggota keluarga khususnya antara para suami dan para isteri, dan pergantian keanggotaan rumah tangga yang sering terjadi. Seolah-olah untuk mengimbangi ikatan keluarga yang tidak erat maka hubungan baik antara para tetangga untuk melindungi para penduduk kampung terhadap ketidakamanan kehidupan sehari-hari. Para tetangga secara perorangan menolong satu sama lain dengan memberi pekerjaan, perumahan, makan dan selama krisis seperti halnya sakit atau kematian. Meskipun para tetangga sering dikaitkan oleh tali perkawinan atau hubungan sedarah, namun kedekatan tempat kediaman tampaknya merupakan prinsip pengorganisasian yang utama daripada kekerabatan. Selain daripada membangun kembali rumah ibadah dan sekali-sekali diadakan perayaan Lebaran, Idul Adha, perkawinan dan kematian, bagaimanapun kerja sama antara penduduk yang lebih luas, hampir tidak pernah terjadi. Ketiadaan kerja sama komunitas yang lebih luas mungkin disebabkan oleh adanya ketidakstabilan masyarakat, tekanan kelangsung-an hidup sehari-hari, kurangnya nilai-nilai yang sama dan kepemimpinan.

Ironisnya ketidakamanan itulah yang menimbulkan jaringan sosial, juga ketidakamanan membuat rusaknya hubungan sosial. Jaringan-jaringan itu timbul terutama karena para individu kekurangan sumber daya dan harus menolong satu sama lain dalam perjuangan untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Jaringan-jaringan itu merupakan pertahanan terhadap kekerasan kehidupan perkotaan. Bagaimanapun, pada saat yang sama, jaringan-jaringan

ini sangat mudah diserang dan terancam oleh ketidakamanan ekonomi dan sosial. Para penduduk kampung cukup menyadari bahwa ikatan ini mudah pecah dan bahwa keseimbangan harus dipertahankan antara memberi dan menerima. Ikatan semacam itu bersifat timbal-balik dan bukan sumbangan sukarela. Pada akhirnya setiap keluarga harus menghidupi dirinya sendiri.

Meskipun para penduduk kampung menghargai hubungan yang harmonis, namun dalam lingkungan Ibu Innah, mereka meyakini bahwa ikatan sosial itu telah putus dalam lintasan waktu, penetrasi kekayaan dan perubahan sosial yang pesat. Mereka membuktikan bahwa dua puluh tahun sebelumnya, ketika masyarakat kurang padat dan lebih merata, lebih banyak terjadi tolong-menolong dan keprihatinan terhadap rekan senasib. Keramahtamahan yang baik berusaha mengejar kekurangan sumber daya. Akumulasi kekayaan yang mendadak dan dramatis yang dialami beberapa rumah tangga berarti, bahwa mereka mencoba menjauhkan diri mereka sendiri dari orang-orang lain untuk menghindarkan pemborosan kekayaan. Ada kekhawatiran antara kebutuhan untuk menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri dan keluarganya sendiri dan tradisi untuk menanggung bersama serta tukar menukar dengan para tetangga dan kaum kerabat.

3
Kegiatan Ekonomi yang Bersifat Sementara

Ketid kmenentuan hubungan masyarakat berjalan bersama dengan k :giatan mencari nafkah yang bersifat sementara. Literatur mengenai kaum miskin perkotaan menekankan kurangnya kepemilikan barang dan tidak mementingkan ketidakpastian penghasilan mereka. Tulisan ini menggambarkan dan menganalisa perubahan yang cepat rakyat kecil mencari nafkah di pusat kota antara tahun 1971-1981. Kurang dari dua puluh tahun, usaha rumah tangga (sektor informal) para penduduk kampung berkembang cepat dan kemudian merosot tajam, khususnya tukang becak, industri rumah tangga, perdagangan kecil-kecilan, pekerjaan bangunan dan pelayanan kampung secara kecil-kecilan. Ketika usaha-usaha di atas merosot, pada akhir tahun 1970-an, penduduk kampung mencoba mencari pekerjaan yang lebih tetap di kantor-kantor dan pabrik-pabrik, tetapi mereka sulit menembusnya.

Kebun Kacang merupakan contoh umum untuk kebanyakan kota di Dunia Ketiga, di mana sebagian besar penduduknya mencari nafkah di sektor informal. Ini tidak berarti bahwa mereka memperoleh penghasilan yang rendah. Misalnya, pada awal sampai pertengahan tahun 1970-an, mereka yang berdagang kecil-kecilan mencapai penghasilan lebih daripada yang mereka impikan. Mereka mampu membangun kembali rumah-rumah mereka dan mengisinya dengan barang-barang seperti pesawat televisi dan sofa. Pada akhir dasa warsa itu, mereka yang dulu maju begitu pesat tiba-tiba dagangannya tidak laku dan mereka tidak dapat menghidupi diri mereka lagi sehingga miliknya dijual habis. Masalah dasar dari kehidupan mereka bukan kemiskinan tetapi ketidakpastian penghasilan. Ini bukan hanya pasang surut usaha-usaha mereka -- misalnya tukang becak, pengusaha es, pedagang kaki lima -- karena ketidakmampuan mereka atau nasib

mereka, tetapi karena pengaruh-pengaruh ekonomi politik dari luar lingkungan mereka.

Sulit untuk menghitung berapa orang yang bekerja di sektor informal di Jakarta. Kira-kira 45%-65% tenaga kerja masuk sektor ini.[1] Menurut data resmi, pada tahun 1971, perkiraan tenaga kerja di Jakarta berjumlah hanya 1,4 juta merupakan keikutsertaan sangat rendah dari jumlah penduduk sebanyak 4,5 juta.[2] Mungkin banyak orang yang bekerja di sektor informal belum terhitung di situ. Para petugas sensus tidak mampu menghitung orang-orang yang bekerja di rumah atau di luar rumah. Sebagian besar ilmuwan setuju bahwa separuh tenaga kerja di Jakarta bekerja di sektor informal.[3] Ini benar tidak hanya untuk Jakarta, tetapi untuk semua kota di Indonesia dan di Dunia Ketiga.[4]

1 . Perkiraan Besaran Sektor Informal di Jakarta, tahun 1967-1971

Pekerjaan	*Jumlah Minimum*	*Jumlah Maksimum*	*Persentase Tenaga Kerja Kota (a)*
Tukang becak*	250.000	375.000 a.	18-25
Industri pondokan **	32.000		2
Pedagang kecil ***	100.000	500.000 b.	7-35
Pekerjaan bangunan**			
Jasa**	80.000	85.000	5-6
	145.000		10
	605.000	960.000	45-65

(a) Jumlah keseluruhan tenaga kerja Jakarta adalah 1,4 juta (sensus penduduk 1971).

a. Termasuk semua yang terlibat dalam profesi pengendaraan becak, membuat dan memperbaiki.

b. Angka ini mungkin juga termasuk industri pondokan dan jasa.

SUMBER:

* DKI *Penghapusan Becak di Jakarta* (Jakarta 1977) hal 12, Soedarno "Mobilitas Tenaga Kerja antara Desa dan Kota Studi Kasus: Pengemudi Becak di Jakarta Timur", (Jakarta, 1976), hal. 5- 6, Critchfield *Hello, Mister*, hal. 47

** Sethuraman *Urbanization and Employment* hal 7, 4.

*** McGee, T.G. dan Yeung, Y.M. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*, (Ottawa, 1977) hal. 33, Hugo "Population Mobility in West Java" hal. 521, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti "Ekonomi Abang Becak", *Tempo*, 29 Januari 1972.

2 Hugo "Pupulation Mobility in West Java" hal. 49.

3 Sethuraman *Urbanization and Employment* hal 7-5; Moir dan Wirosardjono *The Jakarta Informal Sector* hal. 125; Mazumdar, D. "The Urban Informal Sector", *World Development*, Vol. 4, No. 8 : 1976, hal. 658-9.

4 Forbes "Development and the 'Informal' Sector" hal. 188; Hidayat, "Sektor Informal dalam Struktur Ekonomi Indonesia" *Profil Indonesia*, (Jakarta, 1979)

Dalam lingkungan Ibu Innah pada akhir tahun 1970-an, usaha-usaha sektor informal jauh lebih penting daripada di seluruh Jakarta.[5] Meskipun di Jakarta sektor informal sebanyak 50%, tetapi di lingkungan Ibu Innah yang kerja separuh waktu atau sepenuh waktu di sektor informal adalah 75%.[6]

Tukang Becak

Di Kebun Kacang, pada tahun 1972, hanya ada 4 tukang becak yang masih bertahan di kampung saya yang terdiri dari 77 rumah tangga. Meskipun statistik tidak tersedia, namun jelas bahwa hal ini dulu merupakan pekerjaan yang sangat penting. Tahun 1950-an sebenarnya hampir setiap pemuda di kampung itu telah mencoba menarik becak. Pada tahun 1972, beberapa orang sakit-sakitan atau tua untuk menarik becak atau terkena razia pemerintah dan beralih ke pekerjan-pekerjaan lain seperti kerja bangunan atau perdagangan kecil-kecilan.

---

hal. 44-6; Herrle, P. "The Informal Sector : Survival Economy in Third World Metropolitan Cities", *Economics*, Vol. 26 : 1982 : hal. 114.

5 Klasifikasi Tenaga Kerja Menurut Kegiatan Mendapatkan Penghasil-an dalam Lingkungan Ibu Innah pada tahun 1979.

Pekerjaan	*Jumlah pekerja*	*Persentase*
Sektor Informal (total)	(153)	(76)
Tukang becak	4	10
Industri pondokan	20	33
Pedagang kecil *	67	5
Pekerjaan Bangunan	10	26
Jasa kampung (termasuk warung-warung) rumah tangga)*	52 (22)	(11)
Sektor formal (total)	(49)	(24)
Kantor pemerintah/swasta	37	18
Pabrik	12	6
	202	100

* Dua kategori ini dapat dikelompokkan ke dalam perdagangan kecil yang mencakup 44% tenaga kerja.

SUMBER: Kerja Lapangan 1975 - 1979.

6 Untuk laporan yang lebih terinci mengenai kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dari 77 rumah tangga lihat Jellinek, L. tidak diterbitkan, Tesis Monash University.

Menarik becak adalah contoh yang bagus untuk menggambarkan sifat sementara dari pekerjaan di sektor informal di pusat kota. Karena ini merupakan contoh yang bagus, saya mencari informasi lain di luar kampung saya untuk menggambarkan kehidupan tukang becak.

Becak berasal dari Singapura atau Hong Kong pada tahun 1930-an, tetapi hanya ada 100 becak di kota Jakarta sebelum Perang Dunia II.[7] Kendaraan ini selama pendudukan Jepang menggantikan delman.[8] Delman dianggap sebagai mengganggu kesehatan, karena mengotori jalan-jalan dan memerlukan tempat dan rumput untuk memeliharanya. Pada pertengahan sampai akhir tahun 1950-an ada kira-kira 25.000 sampai 30.000 becak di kota.[9] Tidak ada angka yang tepat, tetapi pada awal tahun 1970 ada lima kali lipat becak (100.000 sampai 150.000) yang beroperasi di kota dan sepuluh kali lipat jumlah tukang becak (250.000 sampai 350.000).[10] Pada tahun 1980, jumlah becak menurun, diperkirakan 55.000.[11]

Pada tahun 1950-an-1960-an, menarik becak merupakan pekerjaan yang mudah bagi mereka (laki-laki) yang baru datang ke kota. Tidak perlu modal, alat atau keterampilan yang khusus, yang dapat dipelajari dalam setengah jam. Persoalan yang ada adalah mencari becak yang sementara tidak dipakai. Biasanya teman atau saudara-saudara sedesanya yang secara tetap mengendarai becak membolehkan pendatang baru untuk menjalankannya sementara ia beristirahat. Kemungkinan lain, ketika seorang tukang becak yang tetap kembali ke desanya, ia membolehkan temannya untuk menjalankan becaknya sampai ia kembali lagi ke kota. Pendatang baru itu akan diperkenalkan dengan Tauke (majikan biasanya orang Cina) yang memiliki dan menyewakan becak-becak itu dan jika mereka sudah mendapatkan kepercayaan dari Tauke mereka akan dapat menjalankan becak itu secara tetap.

---

7 Menteri Penerangan, *Short Guide Djakarta-Bogor-Bandung*, (Djakarta, 1956) hal. 82.

8 Dick, H.W., "Urban Public Transport: Jakarta, Surabaya and Malang Part I and II", *Buletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 17, No. 1 dan 2 : 1981 : hal. 74-5.

9 Ministry of Information, *Short Guide*, hal. 82.

10 Critchfield, *Hello Mister!* hal. 47; Soedarno "Mobilitas Tenaga" hal. 5-6; DKI *Penghapusan Becak*, hal. 12.

11 *Jakarta Post*, 9 Sept. 1983.

Sebagian besar tukang becak itu sebelumnya bekerja sebagai buruh di perkotaan dan di pedesaan.[12] Ayah mereka jarang menjadi tukang becak. Sungguh pun kerja sebagai tukang becak berat, tetapi mereka mempunyai kebebasan waktu dan penghasilan yang lebih baik daripada buruh harian lepas. Pada tahun 1975, Soedarno memperkirakan, bahwa penghasilan tukang becak bisa lima kali lipat daripada mereka yang tinggal di desa sebagai buruh.[13] Para tukang becak menarik becak sesuka mereka dan kemudian menyerahkannya kepada pengendara yang lain. Mereka tidak dapat dipaksa untuk menjalankan oleh pemilik kendaraan itu. Pemilik becak hanya dapat memungut uang sewa hariannya sebanyak Rp 200,- (2 liter beras) pada tahun 1975/76. Sewa ini dapat dibayar sampai tiga hari dari waktu yang ditentukan. Jika tidak dibayar setelah jangka waktu tertentu, maka pemilik becak dapat menolak untuk menyewakan kendaraannya.

Yang paling penting, bekerja sebagai tukang becak memungkinkan adanya kebebasan bagi mereka untuk bekerja sebagai buruh atau petani di desa maupun tukang becak di kota.[14] Selama musim tanam atau musim panen, sebagian besar tukang becak kembali ke desa kampung halamannya (yang kebanyakan berasal dari pantai utara Jawa Tengah) di mana banyak pekerjaan akan dilakukan baik pada lahan mereka sendiri atau sebagai buruh bayaran yang mengerjakan lahan-lahan orang lain. Ketika pekerjaan itu selesai dan tidak ada kegiatan lain untuk mendapatkan penghasilan di desa, maka mereka kembali ke Jakarta untuk menarik becak lagi. Mala petaka di desa seperti kekeringan, banjir atau serangan hama yang menggagalkan panen, mendorong mereka pergi ke kota untuk menarik becak lagi. Dengan begitu, mereka pulang pergi dari desa ke kota tergantung peluang dan kesempatan untuk menghasilkan pendapatan yang paling baik. Karena penduduk desa yang lain melakukan penanaman atau me-

---

12 Soedarno "Mobilitas Tenaga" hal. 45-56; Sartono, K. *The Pedicab in Yogyakarta-A Study in Law Cost Transportation and Poverty Problems*, (Yogyakarta, 1981), hal.51.

13 Soedarno "Mobilitas Tenaga", hal. 50.

14 Untuk migrasi sirkuler di antara para tukang becak lihat Hugo ("Population Mobility in West Java") dan Soedarno ("Mobilitas Tenaga" hal. 4) untuk Jakarta, Sartono (*The Pedicab in Yogyakarta* hal. 59-60) untuk Yogyakarta, dan untuk Ujung Pandang lihat Forbes, D. "Urban-Rural Interdependence: The Trishaw Riders of Ujung Pandang" dalam Rimmer *Food, Shelter and Transport*, hal. 223-34.

manen hasil panenannya pada saat yang tidak sama, maka becak-becak di Jakarta tetap dijalankan oleh tukang-tukang becak yang lain.

Alasan khusus mengapa tukang becak ke kota, adalah karena kurang kesempatan kerja di desa dan karena ada kesempatan kerja untuk menarik becak di kota. Selama tahun 1950-an-1960-an di Jakarta, sistem transportasi umum di kota sangat terbatas, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang meningkat cepat. Pada tahun 1950-an trem tidak beroperasi lagi. Jumlah kendaraan pribadi yang terbatas dan 300 buah bis tidak dapat mengatasi permintaan dan sering mengalami kerusakan.[15] Meskipun mobil-mobil tua keluaran tahun 1930-an diubah menjadi opelet, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi permintaan transportasi umum yang meningkat cepat. Kurangnya onderdil dan bahan bakar khususnya antara tahun 1957 dan 1967 membuat mobil-mobil itu sulit dioperasikan di jalan-jalan. Becak-becak yang diproduksi secara lokal dan dapat dikendarai tanpa mesin, tidak mempunyai masalah. Becak-becak itu mengisi kekosongan transportasi dan menyediakan transpor bagi semua lapisan masyarakat di kota.

Orang kaya menggunakan tukang-tukang becak untuk mengantar anak-anaknya pergi ke dan pulang dari sekolah. Para pedagang menggunakan becak untuk mengangkut bahan-bahan mentah menuju ke dan kembali dari pasar. Ibu-ibu rumah tangga menggunakan becak untuk membawa mereka pergi ke dan pulang dari pasar setiap hari. Para pegawai kantor menggunakan becak untuk mengantar mereka ke tempat kerja. Becak dapat mengangkut semua perabot rumah tangga. Bahkan orang sakit yang menuju dan kembali dari rumah sakit dibawa dengan kendaraan ini. Becak memang sering merupakan satu-satunya jenis kendaraan selain daripada sepeda atau sepeda motor yang dapat memasuki gang-gang sempit di kampung. Tidak seperti kendaraan-kendaraan bermotor lainnya, becak tidak begitu terhalang oleh perbaikan jalan. Becak lebih mudah mengatur gerakannya untuk menghindari lubang-lubang di jalan daripada truk atau mobil yang bergerak cepat.

Para tukang becak ingat, bahwa hal itu mudah, ketika mereka dapat mengayuhnya ke sekeliling kota pada tahun 1950-an dan

---

15 Dick "Urban Public Transport" hal. 74, Johnson, R. et al, *Business Environment in an Emerging Nation;* (Evanston, 1966) hal. 226-9.

tahun 1960-an. Mereka membawa para penumpang dari Kebayoran Baru ke Tanah Abang atau dari Tanah Abang ke Senen. Tidak ada wilayah yang berada di luar jangkauannya. Mereka disebut sebagai "raja jalanan."

Antara 1940-an - 1960-an mereka lebih teratur dan tertib. Mereka ingat pernah memakai seragam putih, harus memiliki surat izin mengemudi dan harus diuji sebelum mengendarai becak, serta harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sebagaimana pekerjaan lain, mereka juga memasang tarif yang berbeda untuk si kaya dan si miskin dan di antara mereka mempunyai kode etik.[16]

Di kota, sebagian besar tukang becak tinggal dalam pondokan. Paling tidak, ada dua pondok semacam itu, yang masing-masing berisi 50 orang tukang becak, berada di dekat lingkungan saya di Kebun Kacang sampai pada awal tahun 1970-an, sebelum pemerintah melarang becak beroperasi di wilayah pusat kota. Meskipun pondok becak dekat Kebun Kacang tidak lagi ada, atau pindah ke pinggiran Jakarta pada pertengahan tahun 1970-an, namun kelompok-kelompok besar tukang becak lainnya tetap berada di berbagai wilayah Utara, Selatan, Timur dan Barat kota. Sejumlah studi mendapatkan bahwa lebih dari dua puluh tukang becak tinggal bersama dalam pondokan-pondokan.[17] Para tukang becak datang dari desa yang sama di pantai Utara Jawa Barat atau Jawa Tengah dan menyewa becaknya dari majikan yang sama. Fasilitas-fasilitas makanan dan mencuci juga disediakan. Pada awalnya beberapa tauke sebagai bapak angkat untuk kesejahteraan mereka, memberikan pinjaman ketika mereka sakit dan hadiah pakaian dan uang pada saat Lebaran. Mereka juga membantu perbaikan kendaraan.

Ketika pemerintah menjadi semakin bermusuhan terhadap para tukang becak selama tahun 1970-an, maka peternalisme berubah menjadi hubungan yang lebih komersial. Jika seorang tu-

---

16 Data ini sulit untuk dibenarkan bagi Jakarta, tetapi Frederick menggambarkan bagaimana Jepang pada tahun 1943 mencoba untuk mengorganisasikan para tukang becak Surabaya dengan mengajak mereka untuk bergabung dalam koperasi, memiliki kartu identitas, surat izin dan memakai pakaian seragam, makanan dan pelatihan: Frederick, W.H., "Indonesian Urban Society in Transition: Surabaya, 1926-1946" Ph. D. Thesis, University of Michigan, 1978, hal. 427-30.

17 Silaban, B. dan Djazuli, A. *Kelompok Migran Sirkuler Di DKI Jakarta*, (Jakarta, 1978) hal. 44-8.

kang becak tidak membayar sewa becaknya, maka kendaraan itu diambil alih dan diserahkan kepada tukang becak yang lain. Pemilik becak semakin jatuh dari tangan orang-orang Cina kepada tangan kelas menengah Indonesia yang baru timbul.[18]

Tidak ada tukang becak yang akan tetap bertahan dalam pekerjaan itu, jika pekerjaan yang sama atau lebih produktif lainya tersedia. Pengendaraan becak dianggap sebagai pekerjaan rendahan, berat dan tidak ada harapan untuk maju. Pada tahun 1970-an, banyak pejabat pemerintah memandang para tukang becak sebagai penjahat daripada "raja jalanan." Empat tukang becak yang menetap di Kebun Kacang terus mengayuh becaknya karena mereka merasa tidak memiliki pilihan lain. Tidak seperti sebagian besar tukang becak, mereka merupakan penduduk tetap di Jakarta, bukan penduduk sementara yang dapat kembali ke desa dan mencoba untuk menunjang penghidupan mereka. Mereka kurang memiliki keterampilan untuk pekerjaan lain dalam bangunan atau perdagangan. Pada pertengahan sampai akhir tahun 1970-an, pekerjaan bangunan dan perdagangan ini juga mengalami kesulitan di pusat kota. Mereka masih terus mengendarai becak meskipun ada ancaman yang semakin besar terhadap kelangsungan hidup mereka.

Dengan masuknya bemo pada 1960-an dan masuknya *helicak* pada tahun 1970-an menjadikan tukang becak mengalami kesulitan. Becak dipandang sebagai sesuatu yang memalukan dan kuno. Becak dianggap sebagai gambaran keterbelakangan Indonesia. Becak disalahkan karena mengganggu ketertiban lalu-lintas. Becak bergerak hanya dengan kecepatan 15 km per jam, sedangkan kendaraan bermotor lainnya bergerak dua atau tiga kali kecepatan itu. Banyak tukang becak tidak memahami peraturan-peraturan jalan dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Banyak tukang becak yang hanya membeli surat-surat izinnya dari tukang-tukang becak yang lain atau pemilik becak dan dengan demikian tidak lulus ujian di jalanan. Banyak tukang becak yang tetap tidak terdaftar.[19]

Antara tahun 1970-1972 pemerintah kota mengeluarkan sejumlah peraturan yang bertujuan membatasi operasi becak di kota.

---

18 Untuk bukti mengenai proses serupa di Malang dan Surabaya lihat Dick "Urban Public Transport" hal. 76-82.

19 DKI *Penghapusan Becak* hal. 13; lihat juga Sartono *The Pedicab in Yogyakarta* hal. 36, 42.

Pada tahun 1970, produksi becak baru dilarang. Surat-surat izin baru untuk pengendaraan becak tidak dikeluarkan dan semua tukang-becak yang ada harus memiliki surat izin.[20] Para tukang becak dilarang untuk beroperasi di bagian-bagian tertentu dari wilayah pusat kota. Jam-jam operasinya di jalan-jalan utama Jakarta dibatasi antara sesudah jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jika sebuah kendaraan ditilang, denda dikenakan Rp 15.000 (366 liter beras) harus dibayar atau becak itu disita.[21] Becak-becak dioperasikan secara bergantian yaitu pada malam hari dan pada siang hari untuk membatasi jumlah becak yang menggunakan jalan-jalan pada satu saat. Lagipula becak-becak di wilayah utara Jakarta tidak dapat melintas ke wilayah pusat atau selatan Jakarta, di mana hanya becak-becak dengan warna tertentu yang dibolehkan beroperasi.

Selain adanya kebijakan-kebijakan ini juga semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang mengakibatkan jumlah dan pendapatan tukang-tukang becak menurun antara tahun 1970 dan tahun 1972.[22] Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor secara drastis ini berarti bahwa banyak orang yang dulunya menggunakan becak pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an, kini pergi dengan menggunakan mobil. Sementara itu orang miskin di kampung yang ingin menggunakan becak, masih merasakan lebih ekonomis untuk berjalan saja atau bepergian dengan menggunakan bis. Para penduduk kampung yang mampu membayar becak sering merasa bahwa kendaraan ini tidak dibolehkan untuk beroperasi ke mana mereka ingin pergi.

Maksud yang dikemukakan oleh pemerintah kota adalah untuk membantu para tukang becak beralih ke kendaraan bermotor. Kira-kira ada 10.000 *minicar* (yang terdiri dari *bajaj, helicak, minicar*) diharapkan dapat menggantikan 150.000 becak pada tahun 1980.[23] Kendaraan-kendaraan baru ini cukup berisik dan mahal bagi penumpang dan meningkatkan biaya pengeluaran supirnya untuk bensin, pemeliharaan dan sewa. Namun demikian, sebagian besar tukang becak ingin menjadi supir kendaraan semacam itu jika

---

20 Dick "Urban Public Transport" hal. 76; Hugo "Population Mobility in West Java" hal. 521-2.

21 *Kompas*, 30 Maret 1973.

22 Papanek "The Poor of Jakarta" hal. 9-12.

23 Dick "Urban Public Transport" hal. 76.

mereka memiliki peluang. Program pelatihan pemerintah bagi para tukang becak, kurang memperhatikan permasalahan hidup mereka. Mereka buta huruf sehingga tidak dapat membaca surat kabar yang memberitakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan program pelatihan untuk mereka. Meskipun mereka diberi tahu tetapi mereka tidak tahu harus melamar ke mana untuk mengikuti program itu, banyak persoalan praktis yang menghadang mereka. Sebagian besar keluarga butuh makan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mereka tidak bisa berhenti bekerja, jika mereka harus mengikuti program pelatihan itu. Hanya beberapa dari mereka memiliki uang Rp. 35.000,- untuk membayar biaya kursus itu. Mereka beruntung bisa memiliki uang Rp. 1.000,- untuk menghidupi istri dan anak-anaknya sehari-hari. Jika mereka harus mengikuti kursus, siapa yang harus menghidupi keluarga mereka. Berapa mereka harus membayar sewa *minicar* dan ongkos bensinnya? Mereka merasa bahwa pemerintah telah gagal menyediakan alternatif transportasi pengganti becak.

Meskipun permusuhan pemerintah dan persaingan dari angkutan motor makin hebat, namun tukang-tukang becak baru masih terus memasuki kota. Khususnya antara tahun 1977-1981, ketika Tjokropranolo menjadi gubernur, ia menyadari bahwa para tukang becak tidak mempunyai kesempatan lain kecuali menjadi tukang becak. Hal ini mengakibatkan adanya arus tukang becak yang mengalir ke pusat kota sehingga pendapatan relatif baik untuk jangka waktu singkat.[24] Kelas menengah Jakarta tidak menyetujui kebijakan ini, mereka ingat pada masa gubernur Ali Sadikin (1966-1977) sebagai masa pemerintahan yang disiplin, bersih dan tertib. Sebaliknya para penduduk kampung yang miskin, menghargai kebijakan pendekatan Gubernur Tjokropranolo yang lebih manusiawi, dengan memberikan waktu dan kesempatan yang lebih banyak untuk mencari penghidupan.

Harga becak jatuh antara tahun 1970-1977 karena banyak pemilik becak mencoba untuk keluar dari usaha itu, dan memungkinkan beberapa tukang becak dapat membeli kendaraannya sendiri. Tidak seperti tukang becak, pemilik becak sudah mengetahui kapan masa depan becak itu akan suram. Secara lihai, mereka menjual kendaraannya dengan murah kepada para pembeli yang menginginkannya. Para penduduk kampung menjadi pemilik be-

24 *Kompas*, 9 September 1977, 3 Desember 1977, 2 Maret 1978.

cak pada waktu yang tidak tepat. Gubernur Jakarta yang baru Suprapto, mengeluarkan keputusan bahwa becak akan dihapuskan dari kota pada tahun 1985. Program penghapusan ini, tidak hanya Jakarta Pusat saja tetapi di semua wilayah kota. Banyak tukang becak kehilangan kendaraannya dan menjadi miskin. Beberapa tukang becak mengayuh kendaraannya kembali ke desa-desanya untuk melihat kemungkinan mereka dapat memperoleh penghidupan dari menarik becak di sana. Dilaporkan bahwa Bogor tiba-tiba padat dengan becak.[25] Sebagian besar tukang becak yang tinggal di Jakarta secara cepat pindah ke pinggiran kota. Beberapa tukang becak baru mencoba untuk beroperasi di pusat kota untuk sementara tanpa menyadari apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap mereka. Setelah mereka menderita akibat program penghapusan becak, mereka juga pindah ke pinggiran, pekerjaan yang lain atau kembali ke desa.

Memang sulit untuk mengetahui apa yang terjadi dengan para tukang becak yang kehilangan pekerjaan. Agaknya sebagian besar beralih ke pekerjaan lain seperti bangunan, buruh kasar atau perdagangan kecil-kecilan. Tetapi sektor-sektor pekerjaan ini telah jenuh pada pertengahan tahun 1970-an. Meskipun sulit untuk membuktikan tetapi rupanya ada hubungan erat antara tukang becak dengan usaha-usaha kecil lainnya. Dorodjatun membuktikan bahwa penghapusan 200.000 tukang becak dari Jakarta akan merugikan penghidupan 400.000 pedagang kecil-kecilan, yang mengandalkan mereka sebagai pelanggan.[26]

---

25 Sebagaimana para tukang becak dipaksa keluar dari Jakarta, maka kota-kota seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya dan Cirebon mulai merasakan pengaruh kuat dari kebijakan itu. Dari awal sampai pertengahan tahun 1970-an, kota-kota ini mengikuti contoh Jakarta, memperkenalkan *minicar* yang dimotorisasikan dan melarang atau membatasi becak-becak untuk daerah tertentu. Lihat *Kompas*, 25 Juni 1973, 1 Oktober 1973, 26 Juli 1974, 8 Oktober 1974, 9 November 1977, 26 November 1977, 27 Maret 1978, 12 Mei 1978, *Jakarta Post*, 22 Juli 1983, untuk Surabaya dan Malang lihat Dick "Urban Public Transport", untuk Magelang lihat Surachman Samiun "Perantau Pengemudi Becak dan Gambaran Masa Depan Mereka: Kasus di Kota Magelang", (Yogyakarta, 1978 hal. 6-10, untuk Bandung lihat Hidayat et al. (eds) *Penelitian Sosial Ekonomi Golongan Usaha Kecil di Sektor Informal Kotamadya Bandung*, (Bandung, 1978) hal. 153, 235, untuk peninjauan secara luas lihat Sartono *The Pedicab in Yogyakarta* hal. 34.

26 Dorodjatun "Ekonomi Abang Becak" hal. 50.

Empat tukang becak yang menetap dalam lingkungan Ibu Innah pada tahun 1970-an, berkumpul didekat pasar kecil di jalanan yang melewati kampung itu. Setiap hari dan sering sampai larut malam mereka dapat dijumpai di sana, duduk di becaknya untuk menunggu pelanggan. Sebagian besar tukang becak memiliki pelanggan kampung yang tetap, yang menghendaki anak-anaknya diantar ke sekolah atau orang tua anak-anak itu diantar ke pasar, Jalan Thamrin atau poliklinik. Ketika mereka tidak menarik becak, mereka tidur di becaknya, duduk didekat kedai-kedai untuk minum dan merokok atau berbicara dengan para pedagang atau dengan tukang-tukang becak lainnya. Kelompok tetap tukang becak bertemu di lokasi ini setiap hari dan masing-masing mengenal yang lain dari namanya. Jika saya sedang mencari Bani atau Salim dua tukang becak dari lingkungan saya, maka para pedagang lain atau tukang-tukang becak dapat mengatakan kepada saya di mana mereka berada atau membawa pesan untuk mereka.

Kadang-kadang para tukang becak berani menarik becak sampai di jalan utama, jika mereka benar-benar membutuhkan pendapatan yang lebih besar. Jalan-jalan utama dan pusat-pusat keramaian memang sangat menguntungkan mereka. Tukang becak selalu harus menghadapi razia antibecak yang dilakukan pemerintah. Pada akhir tahun 1970-an, beberapa tukang becak seperti Salim, setelah 20 tahun, dapat membeli becak. Salim tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari akan memiliki kendaraan ini. Namun demikian pada tahun 1979, ia dan isterinya mengumpulkan penghasilan untuk modal seperlunya. Kegembiraannya dalam memiliki becak dan tidak harus membayar sewa sehari-hari tidak bisa bertahan lama. Pada tahun 1982 ia ditangkap dalam razia antibecak dan kendaraannya disita.

Sampai pada waktu itu, Salim selalu hati-hati untuk menghindarkan diri dari usaha pembersihan. Setelah ia dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, ia tidak keluar rumah jika tidak dianggap perlu. Pada waktu ia ditangkap, ia tidak sedang membawa atau mencari penumpang, tetapi hanya sedang kembali ke rumah setelah becaknya diperbaiki. Kalau ia punya cukup uang Rp 15.000 (60 liter beras) ia akan menyuap petugas ketika ia ditangkap agar becaknya tidak disita. Setelah kendaraan itu disita maka ia memerlukan uang lebih banyak untuk menebus becaknya. Para pemilik becak, dulu dapat menolong tukang becak untuk

mendapatkan kembali becaknya yang disita, tetapi kini Salim mengoperasikan miliknya sendiri. Dalam dunia yang semakin sulit, ia sangat menyadari bahwa becak merupakan alat yang istimewa dan merupakan satu-satunya alat bagi kelangsungan hidupnya itu telah dihancurkan.

Salim hanya mengetahui ada tiga cara untuk menghidupi keluarganya yaitu bertani, menjual arang kayu dan menarik becak. Ia buta huruf, takut, tua dan miskin. Selama Perang Dunia II semua bebek dan harta milik ayahnya di Parung hilang dan sebagai anak yatim, Salim mengadu nasibnya ke Jakarta. Di sana ia mendapatkan pekerjaan dari seorang pedagang Cina, untuk menyalurkan arang kayu dari rumah ke rumah. Pada tahun 1957 ia diperkenalkan dengan pekerjaan sebagai penarik becak dan melanjutkan pekerjaan ini sampai becaknya disita pada tahun 1982.

Selama Salim sebagai tukang becak, keluarganya mengalami sedikit peningkatan. Pada awal tahun 1960-an, mereka berhasil membeli rumah seluas 21 m^2 yang disewanya dari Gani. Isteri Salim, Juria, menyatakan bahwa sebagian besar uang yang berhasil dikumpulkan itu berasal dari pembuatan dan perbaikan pakaian dan tidak dari usaha menarik becak Salim. Pendapatan Salim rata-rata sehari-hari Rp 1.000,- – Rp 2.000,- (6-12 liter beras pada tahun 1979) tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Sementara Juria mendapatkan penghasilan tambahan yang dibutuhkan untuk membeli rumah dan mendidik delapan anaknya.

Salim merasa bahwa Juria memboroskan uang dan usaha dalam mendidik anak-anaknya. Ia tidak dapat membayangkan mereka akan memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Selama lebih dari 20 tahun, ia menganggap tidak ada pilihan lain kecuali sebagai buruh kasar dalam menghasilkan pendapatan. Salim cemberut, diam dan sulit untuk berbicara dengannya. Ia memiliki pengetahuan yang terbatas dan juga sedikit harapan.

Satu-satunya harapan itu adalah ia dapat memperoleh becak. Meskipun begitu Juria berpegang teguh pada harapan untuk memperbaiki nasib anak-anaknya, Salim sudah merasa putus asa.

Industri Rakyat

Secara luas industri rakyat melakukan kegiatannya di dalam rumah, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan menghitung-

nya. Biasanya satu atau dua anggota keluarga ikut dalam industri rakyat ini selain mereka bekerja di tempat lain untuk mendapatkan penghasilan. Di Jakarta, usaha kecil dan pedagang kecil sulit dipisahkan khususnya untuk makanan matang. Mereka yang dipekerjakan dalam industri rakyat adalah para pendatang sementara di kota.

Selama pertengahan tahun 1950-an, Heeren melakukan survai urbanisasi terhadap 11.700 kepala rumah tangga di Jakarta yang mengatakan ada peledakan pembangunan industri rakyat.[27] Hampir separuh informannya adalah orang yang bekerja di bidang industri, termasuk yang bekerja untuk angkutan umum selain daripada tukang becak.[28] Mereka ini dipekerjakan di sektor "industri" berskala kecil.[29] Penelitian itu mengatakan bahwa, "Jakarta bukan merupakan kota industri, meskipun hampir setiap orang di beberapa kampung bekerja dalam industri."[30] Penelitian itu menggambarkan banyak sekali industri kecil dan bengkel-bengkel perbaikan di sepanjang Menteng dan Kebayoran."[31] Selama Orde Lama hanya sedikit sekali informasi tentang industri kecil di Jakarta, tetapi ada ledakan perkembangan industri kecil di seluruh Indonesia selama tahun 1950-an, permulaan 1960-an.[32]

---

27 Heeren "The Urbanization of Jakarta" hal. 706-8.

28 *Ibid*, hal. 728.

29 Wertheim, W. "Urban Characteristics in Indonesia" dalam *East West Parallels: Sociological Approaches to Modern Asia*, (The Hague, 1964) hal. 170.

30 Heeren "The Urbanization of Djakarta" hal. 707.

31 *Ibid*, hal. 699.

32 Swianieswicz menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan manufaktur berskala kecil di Indonesia meningkat. Swianieswicz, S: "Tendencies to Development and Stagnation in Indonesian Economy", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 11, No. 1 dan 6: 1958: hal. 96, 99. Sadli dan Ibrahim menyatakan bahwa di bawah Soekarno, ada "pasar 'penjual'" bagi pabrik berskala kecil: Sadli, Moh "Indonesia's Experience with the Application of Technology and its Employment Effects" *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 21, No. 3: 1973: 147-60; Ibrahim, M.A. "The Growth of Indonesian Industry: A Sectoral View", *Prisma*, No. 6, Juni: 1977: hal. 30-1: Palmer membuktikan bahwa, karena tiadanya kompetisi dari perusahaan-perusahaan besar dan produk-produk yang diimpor, di daerah-daerah pedesaan, industri pondokan mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1960-an: Palmer, *The Indonesian Economy Since 1965: A Case Study of Political Economy*, (London, 1978) hal. 119-20. Sundrum juga menemukan kenaikan dalam pekerjaan di bidang industri pedesaan antara 1961 dan 1971: Sundrum, R. "Manufacturing Employment 1961-1971", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 9, No. 1: 1975: 58 -65.

Survai-survai yang dilaksanakan di Jakarta pada awal sampai pertengahan tahun 1970-an menyatakan bahwa industri-industri rakyat tidak merupakan majikan utama bagi kaum buruh. Menurut statistik resmi, pada tahun 1967 diperkirakan ada 32.000 penduduk (7% tenaga kerja sektor informal Jakarta) yang bekerja di sektor produksi berskala kecil. Antara tahun 1961-1971 jumlah pekerja yang bekerja di pabrik menurun dari 147.000 menjadi 110.000, jumlah ini tidak jelas apakah usaha-usaha berskala besar atau kecil.[33] Pada tahun 1975 survai yang dilakukan ILO terhadap sektor informal mengatakan bahwa kira-kira 6% usaha sektor ini dalam produksi kecil.[34] Survai pemerintah Jakarta pada tahun 1983 mendapatkan bahwa industri-industri kecil yang terdaftar pada tahun 1974 hanya 21,02 % atau 417 yang bertahan pada tahun 1979.[35] Tetapi usaha-usaha kecil lainnya yang tidak terekam dalam survai itu mungkin dapat bertahan pada waktu itu.

Sulit untuk mengenali kecenderungan industri rakyat di Kebun Kacang antara akhir tahun 1960-an dan tahun 1970-an. Sungguh pun, begitu penduduk kampung lebih banyak menggunakan kompor minyak tanah, lampu, kasur, tikar, mebel, tas kulit dan peralatan dapur. Pada waktu yang sama, awal tahun 1970-an, sejumlah bengkel mobil, becak, dan reparasi radio di dalam dan di luar lingkungan Ibu Innah, sudah tidak ada lagi.[36] Mereka menderita karena barang-barang impor dan persaingan yang ketat de-

33. Sethuraman *Urbanization and Employment* 2, 9, 2-16.

34. Moir dan Wirosardjono *The Jakarta Informal Sector* hal. 7, 74.

35. DKI *Hasil Survey Tenaga Kerja Sub-Sektor Industri Kecil DKI - Jakarta 1979 - 1980*, (Jakarta, 1980) hal. 9, 42.

36. Perkiraan Awal Kemunculan dan Menurunnya Industri Rakyat di Kebun Kacang

Industri Rakyat	*Awal Kemunculan*	*Menurunnya*
Perbaikan mobil	1950-an	1968-->
Pembuatan dan perbaikan becak	1950-an	
Perbaikan radio	1950-an	1970-->
Pendaurulangan aki	1968	1972-->
Pembuatan es krim	1968	1978-->
Pembuatan es contong	1968	1978-->
Pembuatan kompor minyak tanah	1972	1980-->
Pembuatan topi kain	1972	--

SUMBER : Kerja lapangan 1972 -1981

ngan pabrik-pabrik besar.[37]

Sepanjang akhir tahun 1950-an--1960-an sejumlah rumah tangga memiliki usaha menguntungkan dalam memperbaiki mobil-mobil tua. Mereka masih bekerja sebagai montir mobil dan beberapa bengkel perbaikan mobil masih tetap buka yang berada di sepanjang bagian barat kampung itu. Namun para montirnya mengeluh bahwa pekerjaan mereka berkurang secara drastis sejak adanya impor mobil-mobil baru, pada tahun 1967. Kejadian serupa juga dialami oleh mereka yang bekerja dalam pembuatan dan perbaikan becak. Pada akhir 1960-an diperkirakan 75.000 penduduk di Jakarta bekerja di sektor kegiatan ini, tetapi setelah adanya larangan produksi becak, kegiatan ini menurun.[38]

Beberapa di antara mereka yang bekerja di bengkel mobil, dan becak dipaksa pindah ke pekerjaan pendaur ulangan aki, yang berkembang pesat dalam lingkungan Ibu Innah antara tahun 1968-1978. Pada pertengahan 1970-an paling tidak 90 orang terlibat dalam kegiatan ini. Yusuf, yang memperkenalkan pendauran

---

37 Moir dan Wirosardjono (*The Jakarta Informal Sector* hal. 84, 109) menemukan bahwa industri rakyat kecil lebih banyak daripada kegiatan sektor informal lainnya di Jakarta yang menderita karena persaingan dengan barang-barang standar, murah, kualitasnya lebih tinggi, diimpor atau dibuat secara lokal dari sektor formal. Bukti mengenai Jakarta, bagaimanapun, langka. Karamoy, A. dan Sablie, A. "The Communication Aspect and Its Impact on the Youth of Poor Kampungs in the City of Jakarta", *Prisma*, No. 1, Mei : 1975 : hal. 63 dan Ibrahim "The Growth of Indonesian Industry" hal. 31-2. Hidayat (*Penelitian Sosial Ekonomi* hal. 233-4) menyatakan bahwa persaingan dengan perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi *Coca Cola, Seven-Up*, Cokelat *Van Houten* dan lain sebagainya, menyebabkan banyak industri rakyat dalam bidang makanan dan minuman di Bandung lenyap dalam enam tahun. Hill dan Mubyarto menemukan adanya penurunan dalam industri rakyat antara 1970 - 1976, khususnya di Yogyakarta perkotaan : Hill, H. dan Mubyarto" Economic Change in Yogyakarta", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 14, No. 1 : 1978 : hal. 31-2. Forbes mengidentifikasi fenomena serupa di Ujung Pandang dalam hal pembuatan es krim dengan tangan dan mesin : Forbes, D. "Development and the Informal Sector" hal. 20, 143-58, 191-2 ; "Production, Reproduction and Underdevelopment : Petty Commodity Producers in Ujung Pandang", hal. 11, Sritua Arief (*Indonesia* hal. 126) menemukan penurunan dalam pabrik berskala kecil di seluruh Indonesia. Setelah tahun 1971, McGee menyatakan bahwa di Hong Kong industri-industri rakyat dihancurkan oleh sektor modern pada tahap yang lebih awal daripada perdagangan kecil : McGee, T.G. *Hawkers in Hong Kong : A Study of Planning and Policy in A Third World City* (Hong Kong, 1973) hal. 27.

38 DKI *Penghapusan Becak* hal. 12.

ulang aki di daerah itu, asalnya adalah tukang becak. Pada tahun 1968 selama mengangkat aki-aki dengan becak ke suatu tempat di mana mereka mendaur ulang, ia mulai tertarik dan memulai belajar bagaimana mendaur ulang aki-aki itu. Antara tahun 1970-1978 ia menjalankan usaha pendaur ulangan aki yang berkembang pesat dan mempekerjakan banyak orang. Beberapa dari pekerjanya memi-sahkan diri untuk memulai usaha-usaha sendiri. Setiap pendaur ulang mencari aki-aki bekas di berbagai tempat dan membawanya pulang untuk dibongkar. Pelat timah dicabut dan dibersihkan dan kotak akinya diperbaiki jika masih dalam kondisi bagus. Usaha itu berkembang sedemikian rupa sehingga pada pertengahan tahun 1970-an Kebun Kacang dikenal sebagai salah satu dari pusat-pusat pendaurulangan aki bekas yang besar di seluruh Indonesia. Truk-truk yang bermuatan aki dikirim ke sana dari tempat yang jauh seperti Surabaya dan Palembang.

Pada tahun 1978 usaha ini mengalami kesulitan. Para pendaur ulang aki membentuk kelompok-kelompok dan di antara mereka terjadi persaingan. Para pengusaha Cina mendirikan pabrik-pabrik besar untuk memproduksi aki dengan kualitas yang lebih baik dan harga bersaing. Kalangan kelas menengah lebih suka membeli aki baru daripada membeli aki bekas dengan harga yang sama. Dulu, waktu kekurangan timah, ada keuntungan besar untuk mengambilnya dari aki mobil tua, tetapi setelah tahun 1978 usaha ini kurang menguntungkan karena impor timah dari Singapura dilakukan secara besar-besaran. Pada tahun 1980, kira-kira 50% rumah tangga perkotaan di Jakarta telah berlistrik, sehingga aki semakin sedikit dibutuhkan untuk menghidupkan pesawat televisi.[39]

Dalam lingkungan Ibu Innah, usaha reparasi radio mengalami hal serupa. Pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, suami Sumira, Janto telah dapat menghidupi keluarganya dari usaha memperbaiki radio. Ia merupakan salah satu penduduk kampung itu yang mengetahui pekerjaan tersebut. Penduduk kampung dari dalam atau luar kampung itu membawa radio-radionya ke bengkel reparasi. Sebelum membuka usaha reparasi radio ia membuka usaha bengkel sepeda dan becak yang berada sepanjang Jalan Thamrin dan sepanjang Jalan Kebun Kacang XI. Dari awal tahun 1970-an ia mengeluh usahanya rusak karena adanya persaingan dengan radio-radio transistor buatan Jepang yang diimpor secara

39 Steer "Indonesian Urban Services Sector Report" hal. 34-5.

murah. Penduduk kampung tidak lagi menggunakan radio-radio tua yang sering mengalami kerusakan, tetapi membeli radio-radio baru dari toko-toko yang dapat dipercaya serta memberi jaminan mutu radio itu.

Pada saat saya datang di lingkungan Ibu Innah, ada empat usaha rakyat yang dapat menyerap kira-kira 10 persen tenaga kerja. Usaha-usaha kecil ini kebanyakan adalah pembuatan makanan. Sulit membedakan antara usaha-usaha kecil ini dengan perdagangan kecil. Pada tahun 1968 sebelum Mus mendirikan usaha pembuatan eskrim hanya ada sedikit orang yang membuka usaha ini di daerah itu. Pondok-pondok di Kebun Kacang dan di Mangga Besar dikenal sebagai pembuat es krim yang istimewa. Mutu harus tetap terjaga. Es krim dibuat dari anggur, telur, santan kelapa dan banyak buah segar dan gula tebu. Jika pembuat es krim tidak dapat mempertahankan mutu, ia diminta untuk tidak membuatnya, agar tidak merusak nama baik perusahaan. Setiap usaha es krim memiliki peti-peti pengangkut yang diwarnai secara khusus sehingga mudah dikenali. Para pelanggan es krim adalah semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang kaya. Meskipun harga telah ditentukan, namun ada harga untuk orang kaya dan harga untuk orang miskin.

Seorang penjual es krim mengikuti penjual es krim yang lain untuk menjajakan dagangannya ke dalam kota hingga tiba di beberapa pondok komunal yang terdiri dari 40 atau 50 orang. Seorang penduduk desa mengajari yang lain bagaimana membuat dan menjual es krim dan dengan begitu mereka saling membagi keterampilan. Sebagaimana dengan becak, peralatan itu disewa dari tauke Cina yang juga menyediakan bahan baku, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan. Pada akhir tahun 1960-an beberapa penduduk kampung mulai meniru usaha orang-orang Cina itu dan mendirikan pondoknya sendiri.

Mus mengamati orang-orang Cina dalam mengelola usaha pemondokan dan memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri. Ia menganjurkan sanak-saudara yang tadinya tinggal dan bekerja pada orang Cina untuk pindah ke pondoknya dalam lingkungan Ibu Innah. Antara tahun 1975-1978 ketika usaha Mus mencapai puncaknya, yang tinggal di situ ada sepuluh penjual es krim dan para pedagang lainnya.[40]

---

40 Jellinek "Circular Migration and The Pondok Dwelling System;" "The Pondok System and Circular Migration".

Setiap penjual eskrim membuat dan menjual eskrimnya sendiri. Meskipun mereka bergantung pada Mus dalam hal tempat tinggal, peralatan dan bahan baku, namun masing-masing bekerja mandiri. Selain dari tempat tinggal yang bebas, mereka membayar kepada Mus untuk apa pun yang mereka terima, dan mau bekerja selama mereka sukai. Mereka adalah para pendatang sementara dari Klaten, Jawa Tengah, dan menganggap tempat tinggalnya di kota sebagai sarana untuk memperbaiki pendapatannya. Setiap tiga atau empat bulan, apabila mereka telah cukup mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka untuk beberapa bulan, mereka kembali ke kampung halaman mereka. Selama waktu tersebut, sanak saudara yang lain dapat menggantikan tempatnya di pondok Mus dan menggunakan peralatan dagangnya. Sebagaimana halnya dengan becak, dengan mempergunakan kembali sumber daya yang langka -- tempat tinggal di perkotaan, hubungan-hubungan pribadi dan peralatan dagang -- maka dua orang dan bukan satu orang dapat memperoleh penghidupan di kota.

Mus menyiapkan kelapa, sagu, buah alpukat, cokelat, susu bubuk, gula, garam dan es untuk para penjual es krim. Ia membeli bahan-bahan ini dalam jumlah besar di pasar pada malam hari atau pada jam 4.00 atau jam 5.00 pagi. Suaminya membantu mengangkat balok-balok es ke rumahnya. Antara jam 6.00-jam 7.00 pagi para penjual es, yang tidur di loteng, menuruni anak tangga untuk mencuci dan mulai mempersiapkan es krimnya. Selama kira-kira dua sampai tiga jam mereka memutar-mutar dan mengaduk-aduk beberapa ember santan kelapa dan gula dalam peti logam bundar yang lebih besar berisikan garam dan es. Setiap penjual es-krim menambahkan rasa buah-buahan yang khusus menurut seleranya sendiri, cokelat, atau vanili. Jika mereka sudah selesai membuat es krim, mereka mencuci, berganti pakaian, sarapan dan masing-masing membayar kepada Mus Rp 100,- (1 liter beras pada tahun 1976). Kemudian satu sama lain saling membantu mengangkatkan ember es krim yang berat ke dalam kereta dorong. Satu per satu penjual es krim ke luar rumah Mus untuk menjajakan dagangannya. Di kampung mereka terpaksa menjual es krim dalam jumlah kecil dengan harga yang rendah. Mereka lebih suka menjajakan dagangannya ke daerah-daerah orang kaya di Menteng, di mana mereka dapat menjual dalam jumlah yang lebih besar dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian besar dari mereka mengikuti rute

yang ditetapkan, berhenti di depan sekolah-sekolah atau di dekat taman-taman dan di arena pekan raya tempat anak-anak berlangganan membeli es krim. Biasanya para penjual kembali pada malam hari dan membayar kepada Mus untuk bahan-bahan baku, makanan, dan perlengkapan yang disediakan. Pada tahun 1976 pembayaran ini berjumlah kira-kira Rp 1.000,- (10 liter beras) meskipun berbeda-beda tergantung pada jumlah dan jenis bahan-bahan yang digunakan masing-masing pedagang. Setiap hari mereka mendapatkan keuntungan rata-rata Rp 500,- sampai Rp 1.500,-, tetapi ini tergantung dari keberuntungan dan keterampilan masing-masing pedagang. Seorang pedagang mendapatkan keuntungan setiap hari rata-rata Rp 2.000,- sampai Rp 3.000,- karena rasa alpukat dan cokelat yang istimewa dalam eskrimnya untuk para pelanggan kelas menengah yang tetap. Pengantin musim juga menimbulkan akibat pada penjualan eskrim. Selama musim hujan para pembeli hanya sedikit dan sebagian besar para penjual eskrim kembali ke desa untuk bercocok-tanam. Para penjual es krim akan kembali lagi ke kota pada musim panas dan musim pesta.

Makin banyak pedagang eskrim Mus yang berjualan, makin banyak pula contong es-krim yang dibutuhkan dari Burhanuddin yang memiliki usaha pembuatan contong, yang bertempat tinggal lima rumah dari pondok Mus. Tidak seperti penghuni pondok Mus yang bekerja mandiri, Burhanuddin mempekerjakan empat sampai delapan orang pekerja untuk membuat contong-contong eskrim. Dari jam 7.00 pagi sampai jam 10.00 malam, mereka bekerja dengan kompor yang panas di dapur Burhanuddin. Pekerjaan ini begitu melelahkan sehingga mereka hanya dapat bertahan kerja selama dua minggu. Kemudian mereka kembali ke desanya di dekat Bogor dan para tetangga di desanya datang untuk menggantikan mereka. Mereka dibayar sesuai dengan jumlah contong yang mereka hasilkan. Pada tahun 1979 mereka dapat memperoleh dari Rp 500,- sampai Rp 1.000,- (3-6 liter beras) sehari di luar tempat tinggal dan makanan. Karena jam kerjanya padat mereka hampir tidak pernah terlihat di gang-gang di kampung itu. Saya memerlukan beberapa tahun untuk menyadari bahwa Burhanuddin memiliki industri rakyat di dapurnya.

Antara tahun 1978-1980, para penjual eskrim mulai mengeluh karena adanya persaingan dengan produksi besar, harga-harga yang meningkat, kurangnya air bersih dan kurang memadainya

tempat berdagang. Eskrim yang diproduksi secara besar -besaran dapat dibeli di kedai-kedai kecil dan toko-toko di seluruh kota. Hal ini mempengaruhi penjualan contong eskrim Burhanuddin. Kira-kira empat sampai lima tahun sebelumnya terjadi perbedaan harga yang besar antara eskrim yang dibuat dengan tangan dan yang diproduksi secara besar-besaran. Para produsen kecil menjual setiap contongnya antara Rp 15,-- Rp 25,- sementara yang diproduksi secara besar dijual antara Rp. 100,--Rp 200,- (1,5 sampai 3 liter beras). Perbedaan harga ini semakin berkurang ketika para pedagang kecil menaikkan harganya antara Rp 75,--Rp 175,- yang disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran, sementara para pengusaha besar, karena perekonomiannya yang stabil dapat mempertahankan harga semula. Para penjual eskrim mengeluh tentang cepatnya kenaikan harga bahan baku pada pertengahan tahun 1970-an, dan membandingkan kenaikan ini dengan harga yang stabil selama empat tahun antara 1969-1972. Lagi pula, mereka dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan untuk memperoleh air bersih dan ruang untuk berdagang. Dengan semakin banyak jumlah kendaraan yang memadati Jalan Thamrin, mereka merasa semakin sulit untuk menyeberangi jalan itu.

Banyaknya produsen kecil yang masuk ke pasar menyebabkan mutu eskrim tangan menurun, selain diakibatkan oleh banyaknya iklan dan kebijakan pemerintah mengenai pentingnya menjaga kesehatan dari makanan yang dijual di sembarang tempat. Para produsen kecil itu sendiri mengaku bahwa daripada menggunakan bahan-bahan asli alami, lebih baik mereka menggunakan rasa tiruan, dan zat pewarna lainnya. Para pelanggannya tidak gampang ditipu dan menyadari bahwa untuk membeli eskrim dengan mutu yang bagus, mereka harus membayarnya dengan harga sedikit lebih mahal. Iklan dan anjuran pemerintah selalu mengatakan agar berhati-hati terhadap produksi eskrim tangan dan ini menghancurkan usaha mereka. Para pedagang eskrim merasakan dirinya dilarang memasuki daerah di mana mereka sebelumnya pernah menjajakan dagangannya di Jakarta Pusat. Sebagai pengganti kereta dorong, kini di sana ada kulkas-kulkas dan kios-kios yang menjual produk-produk merek-merek internasional.

Berbeda dengan pedagang makanan dan minuman, pedagang topi tidak punya persaingan besar dengan perusahaan-perusahaan lokal yang besar atau asing ataupun perusahaan-perusahaan berskala kecil. Mesin jahit yang mahal, keterampilan lebih tinggi

dalam membuat topi dan kebutuhan untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan sektor-sektor modern telah mencegah industri-industri pondokan yang lain untuk membanjiri pasar. Perusahaan besar tidak dapat membuat topi dengan mutu yang bagus atau murah seperti yang diproduksi oleh Nanak atau Idi. Tidak seperti perusahaan-perusahaan yang lebih besar, Nanak dan Idi beroperasi dengan tenaga kerja yang terampil dalam ruang terbatas dan pengeluaran yang rendah. Antara tahun 1972-1981, mereka dapat memperluas jaringannya dengan perekonomian modern. Kelas menengah yang berkembang – para pemilik sepeda motor, kaum birokrat, anak-anak sekolah, klub-klub atletik dan kelompok-kelompok pemuda – merupakan pelanggan potensial.

Tanpa uang sepersen pun, Idi telah tiba di Kebun Kacang pada tahun 1972 dari desa dekat Bandung. Ia mengangkut topi-topi kain dengan bis dari Bandung dan menjualnya di sepanjang Jalan Thamrin. Pada tahun 1973 ia menyewa ruangan kecil seluas 4 m^2 di Kebun Kacang. Ia meminjam dua mesin jahit dari sanak saudara dan mulai memproduksi topi. Dalam satu tahun ia telah mampu membeli mesin-mesin jahit itu dan menambah dua mesin jahit lagi untuk usahanya. Bersama-sama dengan para pekerjanya, ia berjuang keras untuk hidup. Dari jam 7.00 pagi-jam 11.00 malam, sementara para pekerjanya menjahit, Idi memotong bahan-bahan untuk topi dan menghiasi, memeriksa dan membungkus topi-topi yang sudah selesai. Pada malam hari mesin-mesin jahit dan bahan-bahan digeser ke samping agar memungkinkan ruang itu untuk tidur. Satu atau dua orang pekerja tidur di atas meja, sementara yang lainnya tidur di lantai di antara topi-topi dan bahan-bahan. Kamar itu sempit sehingga menyulitkan untuk kerja.

Pada pertengahan tahun 1970-an, usaha Idi memberikan pendapatan bagi sekurang-kurangnya 20 orang lain di kampung itu. Mereka memasak makanan, mencuci pakaian, serta disediakan tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas untuk mencuci. Kira-kira sepuluh orang dari desa di dekat Bandung menjual topi-topi bikinan Idi di sepanjang jalan raya di Jakarta dan mereka juga menyewa tempat dan membeli makanan dan fasilitas-fasilitas lain dari tetangga Ibu Innah.

Idi dan para pekerjanya adalah penduduk sementara di Jakarta. Dua sampai tiga bulan sekali para penjahit dan penjual peci ini pulang kampung, karena mereka telah cukup menghasilkan uang selain karena kondisi perusahaan Idi kurang menyenangkan.

Idi juga kembali ke desa untuk merekrut lebih banyak penjahit topi untuk menggantikan mereka. Pada awalnya Idi mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan pekerja yang telah direkrutnya itu. Permintaan topi bersifat musiman, dan ada usaha lain di Bandung dan Jakarta di mana keadaan kondisi kerjanya lebih baik. Antara tahun 1977-1978, Idi mencoba mengalihkan usahanya ke desa di mana banyak tersedia buruh secara tetap, tetapi menghadapi masalah di bidang pemasaran dan persediaan bahan baku. Akhirnya Idi mengalami nasib baik, yaitu dia memperoleh pekerja tetap yang secara bergantian mau bekerja di kota dan di desa.

Idi merupakan salah satu tipe pengusaha di Kebun Kacang yang mampu menyesuaikan usahanya dengan perekonomian modern, yang meluas serta birokrasi, dan bahkan mengalami kemajuan pada tahun 1980-an . Tidak seperti kebanyakan pengusaha kecil di Kebun Kacang, Idi mampu mengatasi gangguan terusmenerus ooleh polisi dengan memindahkan penjualan peci-pecinya dari penjualan jalanan menjadi penjualan langsung ke toko atau kantor-kantor pemerintah yang memerlukan peci untuk seragam. Ia menerima kredit dari pemilik toko-toko Cina di pasar Tanah Abang dan Kebayoran yang memberikan pesanan borongan. Ia mendapatkan kain bahan topi dengan kredit secara tetap dari pedagang tekstil Cina, yang tinggal di dekatnya. Kalau dulu permintaan pasar untuk topi tidak tetap, lama-kelamaan ia sering kewalahan dalam memenuhi permintaan borongan dalam jumlah besar.

Ipar laki-laki Idi, Nanak telah mendirikan usaha serupa. Ia mempekerjakan 4 penjahit dan ada kalanya para anggota keluarga tanpa dibayar, dan pada tahun 1970-an telah memanfaatkan jasa para penjual dari Idi, untuk menjual topi-topinya di sepanjang jalan-jalan raya. Pada tahun 1980-an ketika Idi tidak dapat memenuhi pesanan-pesanan borongan dari toko-toko dan departemen pemerintah, maka Nanak membantu untuk memenuhi pesanan-pesanan tersebut.

Pedagang Kecil

Gerakan penduduk kampung ke bidang perdagangan sudah ada sejak zaman pendudukan Jepang dan Revolusi. Karena kesulitan pekerjaan dalam pertanian dan sedikitnya barang-barang impor dan produksi lokal maka penjualan barang berskala kecil sempat meningkat. Ketika toko-toko pengecer Belanda dan Cina

diganggu oleh pendudukan Jepang, maka para produsen dan pedagang kecil pribumi mulai menggantikan tempatnya. Sebagian besar pedagang kecil itu belajar keterampilan dari orang Cina seperti halnya para pembuat dan penjual es krim, para penjual sopmi dan bakso pada tahun 1940-1950-an. Baik melalui hu-bungan langsung dengan orang Cina atau melalui sanak-saudara di desanya, mereka datang untuk tinggal dalam pondok komunal di Jakarta, tempat barang diproduksi dan dijual. Tahun 1957 toko-toko dan perusahaan- perusahaan besar milik Belanda ditutup dan Belanda dipaksa untuk meninggalkan. Permintaan barang-barang serta jasa oleh penduduk perkotaan yang meluas dengan cepat, semakin meningkat, sedang kurangnya pekerjaan dalam industri tempat mereka dapat beralih, berarti bahwa semakin banyak orang memasuki perdagangan kecil tersebut.[41]

Di Jakarta, jumlah pedagang kecil meningkat secara cepat pada akhir tahun 1950-an, mencapai puncaknya di daerah pusat kota pada akhir tahun 1960-an sampai pertengahan tahun 1970-an. Perkiraan mengenai jumlah keseluruhan pedagang kecil di Jakarta sangat beragam. Ada yang menghitung hanya 17.500 pedagang kecil.[42] Sementara yang lain menemukan jumlah 500.000.[43] Namun sebagian besar orang menyetujui bahwa jumlah pedagang kecil antara 100.000[44]-400.000.[45] Survai sektor informal ILO menemukan bahwa 65 persen usaha-usaha berskala kecil adalah perdagangan kecil.[46] Pedagang makanan berjumlah tiga perempat dari semua usaha perdagangan.[47]

Dalam lingkungan Ibu Innah, pada tahun 1970 perdagangan kecil merupakan kegiatan penting untuk mencari penghidupan. Dari sekitar 200 pencari nafkah, 33 persen di antaranya bekerja dalam sektor perdagangan kecil, menjual barang dagangannya kepada orang-orang di luar kampung. 11 persen lainnya bekerja di sektor pelayanan kampung dengan menjual barang-barang dari

---

41 Lihat juga Swasono *Entrepreneurship in Indonesia* hal. 24, 62-5; McGee *Hawkers in Hong Kong* hal. 171.

42 Atma Jaya *Hawkers in Jakarta*, (Jakarta, 1973) hal. 123 - 71.

43 Hugo "Population Mobility in West Java" hal. 521.

44 McGee dan Young *Hawkers in Southeast Asian Cities* hal. 33, 112.

45 Dorodjatun "Ekonomi Abang Becak" hal. 50.

46 Moir & Wirosardjono *The Jakarta Informal Sector* hal. 74.

47 DKI *Kaki Lama - Hasil Pencacahan Pedagang Kaki Lima di DKI*, (Jakarta, 1978) hal. 37.

kedai-kedai rumah tangga di kampung itu. Perkiraan resmi untuk Kebun Kacang, bahwa 50 persen tenaga kerja bekerja di sektor perdagangan kecil.[48]

Sebagian besar pedagang kecil dalam lingkungan Innah mengkaitkan keberhasilan perdagangannya dengan semakin menjamurnya pembangunan gedung-gedung bertingkat yang terjadi di sekeliling tempat-tempat mereka. Para pedagang kecil berada di sekitar bangunan-bangunan itu untuk melayani kebutuhan para pekerja bangunan yang letih dan lapar yang sering berada dekat tanpa keluarga mereka. Dengan semakin luasnya pembangunan gedung-gedung perkantoran itu, maka semakin banyak pula para pelanggan pedagang kecil itu.

Penduduk kampung yang bekerja sebagai kuli kasar atau penyapu/pesuruh di kantor berusaha dengan berbagai cara untuk mengumpulkan modal untuk berdagang. Bagi mereka perdagangan ini merupakan pekerjaan yang paling baik untuk memperbaiki nasib. Namun pada akhir tahun 1970-an, terjadi keadaan yang sebaliknya, yaitu para pedagang kecil dengan berbagai cara berusaha masuk ke pekerjaan-pekerjaan kantor yang lebih aman atau sebagai pembantu rumah tangga, karena lebih aman daripada berdagang di pinggir jalan yang penuh risiko.

Lingkungan Ibu Innah dihuni oleh banyak pedagang seperti tempat-tempat lain di Jakarta. Sebagian besar adalah para pedagang makanan matang yang mendorong gerobak menyusuri kampung-kampung dan menyusuri jalan-jalan besar memasuki daerah orang kaya. Beberapa pedagang menempatkan gerobaknya di satu tempat tertentu sepanjang siang atau malam, sementara yang lain terus menerus mendorongnya atau mengangkut barang-barang dagangannya dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya, makin sedikit jumlah barang yang dijual, semakin sering mereka berpindah tempat. Para pedagang laki-laki menjajakan buah-buahan segar atau sayur-sayuran dari rumah ke rumah. Para pedagang perempuan menjajakan kue-kue atau makanan-makanan kecil. Para pedagang besar membuka kedai-kedai di sepanjang jalan utama di kampung itu dan menjual barang-barang seperti beras, ikan asin, sabun, pakaian dan obat nyamuk, dan lain-lain.

Jika kita mengamati usaha Ibu Sumira antara tahun 1967-1980, usahanya mengalami evolusi dari kegiatan kecil yang berpindah-

48 DKI, data dikumpulkan oleh Kelurahan Kebun Kacang, (Jakarta, 1981).

runan yang mendadak pula, ini merupakan ciri khas dari banyak pedagang di kota. Kebangkitan dan kejatuhan usahanya merupakan contoh baik mengenai dinamika perdagangan kecil. Dalam kurun waktu hanya sepuluh tahun (1968-1978), ia menjadi salah satu pedagang makanan yang berhasil di lingkungan Ibu Innah, namun berakhir dengan kebangkrutan. Pada tahun 1967, Sumira mengalami keberhasilan dalam berdagang kue di sekitar tempat-tempat bangunan sepanjang Jalan Thamrin, sehingga dia dapat membuka kedai makanan matang. Suami Sumira memperbaiki gerobak dagangan Sumira dengan alat-alat yang tersisa dari usaha perbaikan becak dan sepedanya yang mengalami penurunan. Sumira menjual makanan matangnya di depan toko serba ada Sarinah, tepat berada di seberang jalan Kebun Kacang, tempat ia menyimpan gerobaknya di atas tanah kosong. Namun setelah tahun 1971, ia terpaksa pindah dari tempat itu menghindari razia. Untuk meng-hindari razia itu, ia mengubah jadwal berdagang makanan menjadi malam hari (dari jam 5.00 sore sampai jam 4.00 pagi) untuk konsumsi para satpam penjaga malam di gedung-gedung perkantoran dan bank. Ia beruntung memiliki para pelanggan ini, karena mereka tidak hanya akan memberi kode akan ada razia, tetapi mereka juga melindungi jika ia ditangkap. Sebagaimana polisi dan tentara termasuk kelas menegah Jakarta yang baru muncul, mereka ingin hidup sejahtera. Meskipun hanya ada sedikit tempat penjualan makanan, tetapi Sumira berhasil memenuhi kebutuhan mereka, dengan menyediakan ikan segar, ayam, daging sapi, rupa-rupa sayur pedas, telur, pisang, kue-kue, air jeruk panas, bir, kacang goreng dan banyak makanan lezat lainnya. Para pelanggan Sumira merasa senang dengan makanan yang disediakannya secara murah, cocok dan bermutu baik. Sering ia mendapatkan pelanggan sampai seratus orang semalam.

Seperti halnya usaha-usaha kecil lainnya, usaha dagang Sumira semakin besar ketika ia mempekerjakan semakin banyak orang untuk membantu pekerjaannya dan usaha ini mempunyai akibat luas di luar usaha itu sendiri. Pada tahun 1974/1975 ia menggunakan lima orang untuk membantu kedainya. Satu orang membantunya berbelanja, dua orang lainnya mengolah makanan dan mendorong gerobak menuju lokasi dagangnya. Sementara yang lainnya membantu memasak dan menjual sepanjang malam.

Kemakmuran Sumira memungkinkannya untuk membangun kembali rumahnya oleh dua pekerja bangunan tetangganya. Ia

menyuruh orang menjahitkan pakaiannya dan membawakan air minumnya ke dapan pintunya. Ia melengkapi segala kebutuhan hidupnya dengan membeli barang-barang konsumtif dan pokok. Ia mempekerjakan seorang perempuan untuk merapikan rumahnya dan mencuci pakaiannya. Daripada berjalan, ia berlanganan tukang becak untuk mengantarnya pulang-pergi dari rumah ke pasar dan ke lokasi tempat ia berjualan setiap malam. Sebagai imbalan untuk pelayanan ini, ia memberikan uang dan makanan kepada tukang becak itu.

Namun setelah tahun 1975/1976 nasib baik Sumira mulai berubah. Razia pedagang jalanan semakin gencar dan Sumira sering dinasehati oleh para pelanggan warung makanannya untuk tinggal di rumah saja. Pada tahun 1974 ia digusur dari Jalan Thamrin dan disuruh pindah ke jalan di belakangnya. Ia belakangan diberitahu bahwa sebagian besar pelanggannya dan depo tentara akan pindah ke pinggir kota, karena jalan tempat para pedagang mangkal akan dijadikan jalan raya baru. Meskipun demikian muncul kantin resmi yang bersaing dengan kedai Sumira. Pada tahun 1976, jumlah pelanggan Sumira menurun. Staf baru depo itu menimbulkan persoalan bagi Sumira dan ia diminta untuk meninggalkan tempat dagang, karena memang tempat itu akan digunakan sebagai tempat parkir mobil.

Sumira harus menghadapi semakin banyak masalah. Pada tahun 1974, tanah kosong di Jalan Thamrin yang biasa dia gunakan untuk menyimpan gerobaknya, diambil alih untuk pembangunan gedung bertingkat banyak. Jembatan penyeberangan sungai Cideng yang biasa digunakan Sumira dan para pedagang lainnya untuk menuju ke Jalan Thamrin dan daerah pusat kota dirobohkan. Kini mereka harus berjalan lebih jauh, untuk mencapai tempat dagang mereka. Angkutan umum menjadi lebih sulit dan lebih mahal karena terhapusnya becak dari pusat kota. Para pedagang kecil sebagaimana halnya Sumira tergantung pada becak untuk mengangkut belanjaan pergi dan pulang dari rumah ke pasar dan lokasi-lokasi perdagangannya.[49] Kini mereka harus mengangkut barang-barangnya dengan berjalan kaki atau menyewa *minicar*

49 Lihat juga Collyer, L.G. "Report on the Food Markets-Fruit and Vegetables, Meat and Rice", (Jakarta, 1972) hal. 5 ; Forbes "Development and the 'Informal' Sector" hal. 113, 156, 165 ; Hugo, "Population Mobility in West Java" hal. 560.

yang lebih mahal.[50] Sementara perjalanan pendek, mereka lakukan dengan *helicak* atau *bajaj* pada tahun 1978 dengan ongkos Rp 150,- sampai Rp 200,- (1,3-1,7 liter beras), sedangkan ongkos naik becak Rp 100,- (0,91).[51]

Pada tahun 1977, Sumira terpaksa pindah lokasi perdagangannya dari pusat kota. Dengan seorang pembantu ia mendorong gerobak besar di sepanjang jalan berdebu dan di bawah terik matahari untuk mencari tempat dagang yang baru. Tetapi tak satu tempat pun yang dia dapatkan. Semua lokasi di pusat kota pun telah ditempati para pedagang lain. Pada titik ini, Sumira beruntung memperoleh sepuluh pelanggan sehari. Setelah sebulan dia berjalan mencari tempat menetap untuk berdagang dan terkadang terpaksa tidur di pinggir jalan menjaga gerobaknya dari razia Polisi, akhirnya dia menyerah.

Sumira menjadi semakin frustrasi dan segala keputusannya ternyata salah. Ia terjebak dalam lingkaran permasalahan yang rumit dan sulit untuk melepaskan diri. Ia hidup dari penjualan barang miliknya yang telah dikumpulkannya selama masa keberhasilannya. Para tetangganya membujuk agar dia mau menjual gerobaknya sebab kalau gerobak tidak dijual akan menghalangi mobilitas dia dan menghabiskan uang untuk membayar penyimpanan gerobak. Ia juga harus membiayai rumah dan menghidupi pembantu yang mendorong gerobak dagangannya.

Setelah dalam beberapa waktu tidak berdagang, Sumira memperoleh kembali sebagian kekuatannya, setelah istirahat dan memperoleh simpati para tetangganya. Akhirnya Sumira menjadi pedagang keliling, mengangkut barang dagangannya dengan gendongan. Tidak mudah mencari tempat berdagang yang aman dan menguntungkan di pusat kota. Ia menggelar dagangannya di pinggir jalan dekat Hotel Indonesia atau Hotel Asoka. Ketika ada tamu negara menginap di hotel-hotel itu, mereka diusir dari jalan-jalan

---

50 Meskipun pada tahun 1977/78 ongkos becak lebih mahal (Rp 100/1 liter beras) daripada bus, bemo, atau opelet (Rp 50,-/0,5 liter beras) untuk perjalanan jarak jauh (2 km atau lebih), namun becak merupakan sarana yang paling murah dan paling menyenangkan untuk mengangkut barang-barang dari pasar dalam jarak dekat lewat jalan belakang.

51 Dick "Urban Public Transport" Bag. I hal. 71-2, Bag II hal. 73 ; Hidayat, "The Urban Informal Sector Survey of Java : Some Preliminary Findings", Seminar mengenai Hubungan Pedesaan - Perkotaan dan Perencanaan Pembangunan di Asia, (Japan, 1977).

itu. Karena seringnya diusir dan berarti tempatnya berpindah-pindah, Sumira merasa kesulitan memperoleh pelanggan tetap. Pada pagi hari Sumira menjual makanan-makanan kecil untuk sopir *helicak* dan *minicar*, tetapi mereka sering berutang sehingga dia sering harus menunggu sampai tengah hari untuk menerima bayaran, ketika mereka berhasil mengumpulkan penghasilannya. Pada saat-saat seperti itulah polisi datang untuk mengusirnya. Maka dari itu, Sumira beruntung mendapatkan penghasilan cukup untuk menghidupi ibu, anak perempuannya dan dirinya sendiri. Selama enam tahun pendapatannya sehari-hari telah menurun dari Rp 4.000,-- menjadi Rp 1.000,-- (dari 100 liter menjadi 9 liter beras).

Akhirnya, Sumira memutuskan untuk menjadi pembantu rumah tangga daripada pedagang kecil. Ia sebenarnya mencintai kebebasan, mandiri dan mempunyai harapan sebagai pedagang kecil tetapi repot dalam menghadapi penertiban pedagang kecil oleh aparat negara.[52] Ia benci akan status yang rendah sebagai pembantu rumah tangga, tetapi ia merasa cukup dapat memperoleh penghasilan paling tidak Rp 30.000,-- (200 liter beras) sebulan dan tidak harus menanggung ketakutan dikejar-kejar petugas. Pada tahun 1979, dengan bantuan saya, ia menjadi tukang masak untuk rumah tangga orang asing. Banyak pedagang kecil dalam lingkungan Ibu Innah ingin mengikuti jejaknya tetapi mereka tidak mampu.

Sumira tidak sendirian dalam menjalani pengalaman ini. Tetangganya, Karsinah telah berkembang dari usaha warung rokok kecil di depan Hotel Indonesia selama pertengahan sampai akhir tahun 1960-an beralih usaha membuka kedai makanan matang yang menetap di samping Pertamina, dekat Kebun Kacang. Antara tahun 1970-1973, dagangannya laku keras, melayani para pekerja bangunan yang bekerja pada tempat bangunan itu. Ia mendapatkan penghasilan Rp 1.000,-- sampai Rp 2.000,-- (20 liter sampai 40 liter beras) sehari. Ketika bangunan itu selesai dan para pekerja bangunan meninggalkannya, maka perdagangannya mulai

---

52 Mintz menyatakan bahwa di bagian-bagian Afrika dan Karibia perkotaan, pertumbuhan ekonomi telah memaksa kaum perempuan keluar dari perdagangan kecil dan masuk ke dalam pekerjaan berupah yang tidak menggunakan keterampilan seperti halnya pembantu rumah tangga, yang menyebabkan menurunnya status sosial, kebebasan finansial dan mobilitas, Mintz S.W. "Men, Women and Trade", *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 13: 1971 : hal. 247-69.

menurun. Pada tahun 1975, ia kembali ke perdagangan yang dapat berpindah-pindah dan menjual sayur-sayuran di sepanjang gang-gang di kampung itu. Ia beruntung dapat menghasilkan Rp 500,-- (6 liter beras) sehari, yang tidak cukup untuk menghidupi dirinya dan anak perempuannya. Pada tahun 1978, ia kehilangan pekerjaan. Seorang tetangga menawarkan lowongan pekerjaan kepada Karsinah. Pada tahun 1979, ia memperoleh penghasilan Rp 18.000,-- sebulan, atau jika diukur dengan beras, kurang dari seperlima yang dihasilkan ketika ia bekerja tujuh tahun sebelumnya.

Tidak hanya Sumira saja yang merasakan akibat kebijakan-kebijakan pemerintah. Koran-koran memberitakan pemindahan ribuan pedagang di pusat kota. Mereka diusir dari tempat-tempat pasar utama di Tanah Abang dan Senen ketika pasar-pasar ini direnovasi dan ada pelebaran jalan di pasar-pasar itu. Ribuan pedagang kehilangan tempat berjualan ketika terminal bis pusat di Lapangan Banteng diubah menjadi taman.[53] Sebuah penelitian mengenai para pedagang jalanan Jakarta pada tahun 1976 menemukan bahwa 66% merasakan bahwa persoalan utama mereka adalah kurangnya lokasi dagang yang aman dan strategis yang terutama akibat usikan yang dilakukan oleh pemerintah.[54]

Pemerintahan kota berupaya memindahkan sebagian besar pedagang dari jalanan di Jakarta ke tempat-tempat pasar baru yang bertingkat banyak yang telah dibangun. Tetapi para pedagang seperti Sumira dan Karsinah tidak mampu membayar biaya yang mahal untuk fasilitas-fasilitas baru ini. Para pedagang membayar rendah untuk tempat-tempat jualan mereka di jalanan daripada yang diharapkan pemerintah untuk membayar di pasar-pasar resmi yang baru. Sebagian besar pedagang, seperti Sumira, membayar pungutan liar secara berkala atau pajak ilegal kepada petugas resmi yang berpatroli di daerah itu, tempat mereka berdagang; pada tahun 1978 pungutan ini berkisar antara Rp 50,-- sampai Rp 200,-- (0,4-1,7 liter beras) per hari.[55] Sebaliknya sewa di pasar-pasar resmi paling tidak lima kali lipat dan mungkin seba-

---

53 *Kompas*, 21 Oktober 1977, 27 November 1977, 18 Februari 1978, 21 Juni 1978 ; *Jakarta Post*, 27 April 1983, 3 Juni 1983, 10 April 1983.

54 Universitas Indonesia *Laporan Hasil Survey Profile Pedagang Kaki Lima di DKI Jaya* (Jakarta, 1976) hal. 26-8, lihat juga Hidayat *Penelitian Sosial Ekonomi* hal. 153, 235.

55 DKI *Kaki Lima*, hal. 30-3.

nyak tiga puluh kali lipat pengeluaran Sumira per hari di jalanan.[56]

Tidak hanya kios-kios itu terlalu mahal bagi sebagian besar pedagang kecil tetapi juga didisain dengan jelek. Para pembeli enggan untuk membeli di kios-kios itu. Meskipun pemerintah menawarkan kios-kios itu dengan harga sewa yang sangat rendah, yaitu Rp 200,-- per hari, tetap saja para pedagang tidak berminat.

Dalam beberapa kasus itu, pada beberapa pasar yang didisain secara khusus untuk para pedagang lemah, maka timbul lebih banyak pemohon daripada kios-kios yang tersedia. Pada tahun 1978, di pasar Senen yang bertingkat satu dan baru direnovasi, ada 6843 pemohon untuk kios-kios yang hanya berjumlah 1.576 buah.[57]

Para pedagang menghadapi banyak rintangan birokratis untuk masuk ke dalam pasar-pasar resmi. Untuk memesan kios, para pedagang harus mempunyai sejumlah informasi tertentu, melek huruf dan rasa yakin, yang sebagian besar pedagang kurang memilikinya. Untuk mendapatkan jatah sebuah kios seseorang perlu mengadakan kontak dengan administrasi pasar. Berbagai dokumen diperlukan, paling tidak harus tingal selama lebih dari 5 tahun di Jakarta, seseorang pedagang dan ber-KTP Jakarta yang masih berlaku. Juga perlu untuk menjadi anggota Asosiasi Pedagang Kota, hal ini perlu ongkos tambahan. Pengutan-pungutan liar tumbuh subur untuk memudahkan masuknya seseorang pedagang ke dalam kios yang terletak secara strategis. Para pedagang memerlukan waktu -- mungkin berbulan-bulan -- untuk menunggu proses renovasi pasar dan alokasi kios. Sebagian besar pedagang kecil tidak dapat menghentikan kegiatan karena mereka tidak memiliki cadangan dana dan harus menghidupi keluarganya setiap hari.

Sebagai akibat dari masalah-masalah finansial, birokratis dan disain, maka lebih dari 40% kios-kios di pasar-pasar Jakarta yang baru direnovasi tetap kosong selama beberapa tahun setelah penyelesaian. Dilaporkan bahwa "sekitar 23.600 kios pasar yang

---

56 Pada akhir tahun 1970-an, sewa tahunan di pasar-pasar resmi berkisar antara minimum Rp 150.000,- (1304 liter beras) untuk kios di tingkat kedua seluas 1 x 2,5 m sampai Rp 2.000.000,- (17.391 liter beras) untuk kios di lantai dasar seluas 5 x 2,5 m (*Kompas*, 22 Juni 1978, *Jakarta Post*, 27 Januari 1983). Biaya tambahan sehari-hari untuk administrasi pasar, pengumpulan sampah dan keamanan malam hari berjumlah Rp 500,- - Rp 700,- (4 - 6 liter beras). Lihat juga Forbes "Development and the 'Informal' Sector" hal. 106-11.

57 Tomasoa, 1978 : pers. com.

menempati 148 pasar ditangani oleh Pasar Jaya, yang memiliki otoritas pasar di kota, masih tetap kosong yang menimbulkan suasana kota mati bagi beberapa pasar Jakarta ... para pedagang merasakan (pasar-pasar ini) kira-kira sama sepinya dengan kuburan."[58] Sebagaimana halnya para produsen es krim dan contong, para pedagang kecil mengeluh tentang naiknya biaya-biaya transpor, pasar dan makanan selama pertengahan tahun 1970-an. Harga-harga bahan pokok makanan naik kira-kira lima kali lipat antara tahun 1972-1981.[59] Renovasi sebagian besar pasar pusat kota Jakarta selama pertengahan tahun 1970-an dan relokasi pasar buah-buahan dan sayur mayur utama dari Tanah Abang dan Senen ke Pasar Induk di Jakarta Selatan lebih lanjut menambah kenaikan harga.[60]

Pada pertengahan tahun 1970-an sebagian besar pedagang kecil tergencet dalam tekanan harga pokok. Sementara harga-harga bahan baku tetap naik, jumlah pelanggan makin berkurang atau para pelanggan yang dimilikinya hanyalah orang-orang miskin. Terbatasnya segala sarana bagi masyarakat miskin mengakibatkan mereka tetap melakukan pembelian sehari-hari dalam jumlah yang kecil dari pedagang kecil, tetapi mereka tidak mampu membayar harga-harga yang lebih tinggi. Sementara itu, kelas menengah yang dulunya menjadi langganan para pedagang kecil lebih tertarik dengan restauran-restauran, toko-toko, kafe-kafe dan supermarket baru. Selain gengsi dalam membeli bahan-bahan makanan baru ini, barang-barang yang diproduksi oleh toko-toko pengecer baru ini

---

58 *Jakarta Post*, 6 Januari 1986. Lihat juga Krausse "The Kampungs of Jakarta" hal. 58 ; Universitas Indonesia *Laporan Hasil Survey* hal. 28 ; Forbes "Development and the 'Informal' Sector" hal. 106-11 ; Praginanto "Pak Parto Pengusaha Warung Tegal", *Galang*, Vol. 1, No. 1 : 1983 : hal. 45.

59 *BPS, Indikator Ekonomi*, 1983.

60 Lihat Mintz untuk Karibia dan Afrika dan Moser untuk Bogota mengenai kenaikan harga-harga dan kemandegan atau penurunan posisi para pedagang kecil, khususnya kaum perempuan, sebagai konsekuensi, modernisasi dan mengefisienkan dan mengefektifkan pemasaran di perkotaan: Mintz, S.W. "The Role of the Middleman in the Internal Distribution System of a Caribbean Peasant Economy", *Human Organization*, Vol. 15, No. 2: 1956: hal. 21-2; Mintz, S.W. "Internal Market Systems as Mechanisms of Social Articulation" dalam *Proceeding of the 1959 Annual Spring Meetings of the American Ethnological Society*, (Seattle, 1959), hal. 24-5; Mintz "Men, Women and Trade", Moser C. "The Dual Economy and Marginality Debate and Contribution of Micro Analysis : Market Sellers in Bogot", *Development and Change*, Vol. 8 No. 4 : 1977 : hal. 479-87.

sering lebih higienis, terbungkus dengan bagus dan kualitasnya lebih baik. Sebagaimana terlihat, tidak ada perbedaan harga di antara para pedagang kecil dan toko pengecer yang lebih besar. Karena adanya penghematan, karena pembelian berskala besar, maka perusahaan-perusahaan yang lebih besar dapat menekan pembiayaan, sementara biaya ruangan, bahan baku, peralatan dan tenaga kerja meningkat bagi pedagang di pusat kota.[61]

Kebijakan pemerintah memperkuat tekanan harga ini, mengakibatkan para pedagang kecil ini semakin tersingkir dari jalanan di pusat Jakarta, sebagai lokasi perdagangannya yang paling menguntungkan. Sekali mereka kehilangan tempat-tempat perdagangan mereka, maka sulit untuk menemukan lokasi-lokasi perdagangan lainnya, karena jumlah pedagang kecil makin berkembang dan kompetitif untuk mendapatkan tempat-tempat berizin yang semakin terbatas. Tim pembersihan Jakarta terus menerus melakukan tugasnya.

Menghadapi kesulitan-kesulitan semacam itu, para pedagang kecil mempunyai tiga pilihan. *Pertama*, meskipun ada rintangan-rintangan besar, mereka dapat mencoba untuk meneruskan berdagang di pusat kota. *Kedua*, mereka dapat meneruskan berdagang tetapi pindah ke pinggiran kota, ke kota yang lebih kecil, atau ke desa. *Ketiga*, mereka dapat mencoba beralih ke pekerjaan lain. Menjelang akhir tahun 1970-an, beberapa pedagang seperti Sumira dan Karsinah berupaya beralih ke dalam pekerjaan di sektor jasa seperti pembantu rumah tangga dan pekerjaan binatu, tetapi jumlah mereka yang pindah dari perdagangan kecil ke bidang jasa sulit untuk diperkirakan. Tanpa koneksi dan surat-surat rekomendasi,

---

61 Ada ketidaksepakatan dalam literatur tentang pengaruh eceran modern dan timbulnya kelas menengah pada perdagangan kecil. Sementara Moser ("The Dual Economy and Marginality Debate" hal. 473, 478, 486) untuk Bogota, dan McGee (Hawkers in Hong Kong hal. 171, 185-86) untuk Hong Kong, telah mendukung penemuan-penemuan saya, Tokeman untuk Santiago dan Waworoentoe untuk Bandung membuktikan bahwa para pedagang kecil tetap hidup terus menghadapi persaingan sektor formal. Tokeman, VE. "Competition Between the Informal and Formal Sectors, Retailing: The Case of Santiago", World Development, Vol. 6, 9 dan 10: 1978: 1187-1198; Waworoentoe, W. *Hawkers and Vendors in Bandung*, (Bandung 1974) hal. 27. Forbes menyatakan bahwa beberapa pedagang kecil "diawetkan" sementara para pedagang lainnya "dihancurkan" tergantung pada sifat barang-barang yang dijual: Forbes, D. "Petty Commodity Production and Underdevelopment and The Case of Pedlar and Trishaw Riders in Ujung Pandang, Indonesia" dalam Diamond, D. dan Mc Loughlin, J.B. (eds), *Progress in Planning*, Vol. 16, No. 2 : 1981 : hal. 107-78.

terasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan tetap di sektor jasa seperti yang dialami sepuluh sampai dua puluh tahun sebelumnya. Selanjutnya para penduduk kampung yang telah menjadi pedagang kecil merasakan bahwa kegiatan di sektor jasa semacam itu bersifat membatasi dan merendahkan sekalipun berisiko kecil. Beberapa perempuan muda yang ibunya telah menjadi pedagang, pembantu rumah tangga atau bekerja sebagai binatu, lebih suka menjadi pelacur. Profesi ini dirasakan lebih mudah dan lebih mempesonakan, meskipun dalam cara mendapatkan penghasilan tidak disukai. Paling tidak, profesi ini menghubungkan mereka dengan sektor modern yang memberinya rezeki *nomplok*.[62]

Pekerjaan Bangunan

Tidak seperti pekerjaan menarik becak, industri rakyat atau perdagangan kecil, pekerjaan bangunan ini selama tahun 1960-an-1970-an lebih menunjukkan pasang surut yang berulang-ulang dalam permintaan, dibanding satu fase puncak dan penurunan. *Boom* pekerjaan bangunan yang pertama terjadi antara tahun 1960-1965 ketika Soekarno mengembangkan bangunan hotel-hotel yang bertingkat, kompleks-kompleks olahraga dan monumen-monumen. *Boom* pekerjaan bangunan yang kedua terjadi selama ekonomi Indonesia pulih kembali antara tahun 1968-1975, ketika sepanjang Jalan Thamrin berdiri berjajar bangunan pencakar langit. Mungkin ada kenaikan yang lebih kecil dalam pekerjaan bangunan setelah tahun 1978, ketika pemerintah diuntungkan oleh kenaikan yang kedua dalam harga minyak.

Antara tahun 1961-1967 timbul sedikit perubahan dalam jumlah total pekerja bangunan di Jakarta. Dari kira-kira 80.000 pekerja, 85% di antara mereka bekerja di "sektor informal."[63] Setelah tahun 1968, jumlah mereka yang bekerja dalam pekerjaan bangunan meningkat cepat. Menurut angka sensus, dalam pekerjaan bangunan di tahun 1971 dan 1980 diperkirakan 7% dari tenaga kerja atau secara berturut-turut kira-kira 130.000 (pada 1970) dan 190.000 (pada 1980) orang. Tetapi perkiraan jumlah orang yang bekerja di

---

62 Untuk gadis kampung yang muda, menarik dan pintar, pelacuran merupakan jalan yang paling mudah, paling tidak secara temporer ke dalam sektor formal. Sebagian besar pelacur mandiri dan pekerjaannya tidak bisa diramalkan, tetapi mereka dengan cepat mendapatkan uang. Namun para gadis ini secara cepat pula kehilangan kemakmurannya dan merosot kembali dalam kemiskinan.

63 Sethuraman *Urbanization and Employment*, 2.8, 7.4, 7.10.

sektor bangunan boleh jadi tidak akurat. Bahkan selama *boom* bangunan, permintaan mengenai para pekerja bangunan berubah-ubah. Sebagian besar buruh bekerja rata-rata hanya 6 bulan dalam setahun.[64] Lebih lanjut, banyak buruh bangunan yang merupakan migran sirkuler tidak diperhitungkan.

Dalam lingkungan Ibu Innah, tidak pernah ada lebih dari sepuluh pekerja bangunan selama tahun 1970-an. Namun sebelumnya banyak pencari nafkah laki-laki telah bekerja sebagai kuli bangunan atau pelebaran Jalan Thamrin dan bangunan-bangunan bertingkat di sepanjang kiri kanan jalan itu. Hampir tidak ada satu orang pun dalam lingkungan itu yang tidak mencoba pekerjaan bangunan. Sebagaimana halnya pengendaraan becak, pekerjaan tersebut mudah dilakukan dan menjadi sarana untuk memasuki kota. Beberapa orang yang bekerja sebagai tukang becak dan tukang reparasi, tukang batu/kayu atau pedagang kecil beralih ke pekerjaan bangunan selama *boom* pembangunan.

Pada tahun 1960-an, departemen yang melakukan perekrutan buruh bangunan, terletak berhadapan dengan Kebun Kacang. Pada waktu itu, ada persoalan untuk merekrut orang-orang secukupnya untuk menyelesaikan banyak bangunan setengah jadi yang berjajar di sepanjang Jalan Thamrin. Kaum laki-laki muda diundang oleh sanak saudaranya atau teman-teman untuk bergabung dalam rombongan buruh. Mereka memulai dengan pekerjaan-pekerjaan sederhana yang kemudian berkembang menjadi pekerjaan yang lebih terampil seperti tukang kayu, tukang batu atau tukang cat. Seseorang dengan keberanian, kontak-kontak, keterampilan organisasional dan inisiatif untuk memenangkan kontrak bagi pekerjaan bangunan dapat menjadi mandor. Mista, misalnya, berupaya beralih dari pekerjaan bangunan yang tidak berketerampilan menjadi mandor hanya dalam waktu lima tahun. Ia kemudian merekrut para pekerja bangunan yang berketerampilan dan para magang yang tidak berketerampilan untuk melakukan pekerjaan dan mengorganisasikan pembayarannya. Telah ditetapkan bahwa mandor akan menerima pendapatan yang lebih tinggi daripada semua pekerja. Para pekerja lainnya dibayar dengan tarif yang sesuai dengan keterampilannya. Pada proyek bangunan berikut-

64 Lihat juga Hidayat (*Penelitian Sosial Ekonomi*, hal. 96, 235) dan Sannen untuk ketidaktetapan pekerjaan bangunan di Bandung. Sannen, Ad. M.H. "Mandur and Tukang : The Functioning of Informal Subcontractors and Building Workers in the Construction Sector of Bandung" dalam *The Indonesian City*, hal. 220, 227. 90% dari para pekerja bangunan memiliki pekerjaan tidak tetap.

nya, orang yang menduduki jabatan mandor dapat menjadi pekerja berketerampilan jika orang lain itu memenangkan kontrak. Dengan demikian, ada unsur-unsur hirarkis dan egaliter dalam organisasi pekerjaan bangunan berskala kecil dan seorang pekerja berketerampilan dapat menjadi pengawas pada satu proyek dan menjadi buruh bawahan pada proyek selanjutnya. Pada proyek besar ada banyak kelompok buruh yang masing-masing bekerja di bawah mandornya sendiri-sendiri, dan mengkhususkan dalam pekerjaan kayu, pekerjaan mematerí dan memasang pipa-pipa air leding, listrik, pemasangan ubin, pengecatan atau pekerjaan-pekerjaan berketerampilan lain. Bilamana pekerjaan itu selesai, kelompok itu bubar dan setiap orang mencari pekerjaan baru di tempat lain.

Sekitar pertengahan tahun 1970-an, untuk tukang bangunan di Kebun Kacang, sifat pekerjaan bangunan berubah. Mereka pindah dari pekerjaan terutama pada bangunan-bangunan besar yang bertingkat di sepanjang Jalan Thamrin ke rumah-rumah kampung yang dibangun kembali.[65] Untuk ini, mereka harus menjadi orang serba bisa. Sementara para penduduk kampung masuk dan tinggal di dalam, mereka membongkar rumah, mendisain dan membangun kembali. Mereka harus dapat mengerjakan pekerjaan kayu, batu, ubin dan memasang kaca jendela. Karena membangun rumah kampung hanya makan waktu kira-kira tiga minggu, mereka menerima upah harian yang lebih tinggi daripada jika mereka bekerja untuk jangka waktu yang lebih lama (2-3 tahun) di tempat bangunan yang lebih besar. Jika diukur dengan beras, pendapatan mereka berkisar antara 8 sampai 12 liter per hari selama sepuluh tahun, dan ketika terjadi kemerosotan pada pertengahan tahun 1970-an mereka menerima kira-kira setengah jumlah ini. Mereka juga menerima rokok, kopi dan makanan.

Selama kemerosotan pekerjaan bangunan dari tahun 1975 - 1978, terjadi perubahan dalam pengerahan pekerja bangunan untuk bangunan-bangunan besar. Sebelumnya, para pekerja terutama

---

65 Menurut Padco, 90% perumahan dibangun oleh penduduk sendiri, tidak oleh pemerintah atau perusahaan- perusahaa swasta besar. Bagaimanapun sulit menentukan apakah sebagian besar perumahan ini dibangun oleh pemilik rumah atau rombongan kecil pekerja bangunan lokal, karena para penduduk kampung cenderung untuk mengatakan bahwa mereka membangun rumah-rumahnya sendiri bahkan ketika mereka menggunakan pemborong: Padco, "Perumnas Policy Review and Background Materials for Pelita III Planning", *Consultants Report World Banks* Vol. 2, (Washington DC, 1977) hal. 41.

direkrut dari dalam kota. Pada pertengahan sampai akhir tahun 1970-an, rombongan-rombongan buruh dari Jawa Timur dan Jawa Tengah direkrut oleh para kontraktor buruh untuk bekerja pada bangunan-bangunan yang lebih besar. Para pekerja dari tempat yang lebih jauh menerima upah yang lebih rendah, kondisi-kondisi kerja yang lebih buruk dan lebih rajin. Mandornya bertindak sewenang-wenang. Apabila para pekerja tidak diperlukan lagi mereka dipulangkan. Perjalanan mereka ke dan dari Jakarta diongkosi oleh mandornya. Transpor yang bertambah baik dan murah menjadikan hal ini dapat dikerjakan dengan mudah. Sistem pengerahan buruh ini bukan baru, dan sudah ada di Indonesia selama lebih dari seratus tahun.[66]

Boco telah bekerja paling tidak dalam enam jenis pekerjaan sebelum menjadi pekerja bangunan. Selama sembilan tahun dari tahun 1962 - 1971, ia telah bekerja sebagai tukang becak. Sebelum dan selama waktu itu, ia telah bekerja sebagai pesuruh, buruh harian, tukang reparasi becak, penjual rokok dan penjual ikan segar. Pada awal tahun 1970-an ia menderita sakit TBC dan terpaksa menghentikan pekerjaannya selama setahun. Isterinya, Tuti, yang sebelumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, membuka kedai sayuran di depan rumah di kampungnya dan sebagai penyanggah utama ekonomi keluarganya. Sebagai pembantu rumah tangga, upahnya per hari (Rp 166,-- atau 3 liter beras), ia tidak dapat menghidupi keluarganya.

Dengan berkembangnya kemakmuran pada awal tahun 1970-an, permintaan meningkat bagi buruh bangunan dalam lingkungan. Ibu Innah dan kaum buruh yang tidak tetap sebagaimana Boco beralih untuk membangun kembali rumah-rumah di kampung daripada bekerja di sepanjang jalan raya utama. Boco untuk sementara, memperoleh banyak pekerjaan. Ia mengundang ayahnya dari Bogor, yang juga tukang bangunan dan beberapa orang pekerja lain dari lingkungan itu untuk membantunya. Mereka dapat menyelesaikan sebuah rumah di kampung dalam satu bulan.

Pada tahun 1970-an ada dua sampai tiga rombongan pekerja bangunan dalam lingkungan itu masing-masing terdiri dari dua sampai tiga orang. Boco, orang Jawa Barat, diminta untuk membangun kembali rumah-rumah di daerah sekitarnya yang berde-

66 Suryo D. "Social and Economic Life in Rural Semarang under Colonial Rule in the Later 19th Century", Ph.D., Thesis, Monash University, 1982, hal. 135-58.

katan, terutama rumah-rumah orang Jawa Barat. Parnen, anak ipar Ibu Citro, orang Jawa Tengah, dipekerjakan untuk memba-ngun kembali sebagian besar rumah di sekitar rumahnya yang terutama dimiliki oleh orang Jawa Tengah. Namun pembagian kerja ini luwes dan ada kalanya Boco dan Parnen bekerja pada bangunan yang sama. Para anggota satu rombongan bekerja bersama pada satu tempat dan kemudian pindah ke dalam rombongan buruh lain ketika peluang baru timbul. Setiap pemborong harus memastikan bahwa ia memiliki jangkauan hubungan yang luas, sehingga ketika satu pekerjaan sudah diselesaikan, ia akan diminta untuk mengerjakan pekerjaan yang lain dengan kelompok yang sama atau berbeda. Pekerjaan ini diperoleh dari mulut ke mulut. Namun sering terjadi "istirahat" panjang, menganggur di antara dua pekerjaan.

Keluarga pekerja bangunan harus memiliki sumber-sumber pendapatan alternatif untuk menghidupi keluarga jika pekerjaan bangunan tidak ada. Selama satu atau dua bulan pekerja bangunan bekerja keras dan mendapatkan penghasilan yang secara relatif baik. Kemudian, selama dua sampai tiga bulan berikutnya boleh jadi ia menganggur. Para pekerja bangunan dalam lingkungan Ibu Innah, melakukan banyak pekerjaan sambilan seperti menjual soto mi dan bakso, perdagangan onderdil mobil, memperbaiki sepeda atau mengecat rumah, jika pekerjaan bangunan tidak ada.

Ketika Boco tidak punya pekerjaan bangunan, ia melakukan pekerjaan sambilan di sekitar kampung itu. Ia mengumpulkan uang sedikit dari mengajar mengaji bagi anak-anak muda di lingkungan itu. Ia dibayar karena membantu menyelesaikan rumah ibadah setempat yang sebagian telah dibangun oleh pekerja lokal secara sukarela. Selama Lebaran ia membantu membagikan fitrah (sumbangan beras yang diwajibkan) dan menyalurkannya dari rumah ke rumah. Selama Idul Adha ia mengumpulkan uang dari rumah-rumah tangga yang berdekatan untuk membeli kambing-kambing. Kemudian ia membeli kambing-kambing itu dan memeliharanya sampai disembelih. Ia juga membantu membagikan daging dan menyalurkannya kepada setiap rumah. Memang sulit menentukan apa yang diterima untuk kegiatan-kegiatan ini - mungkin sedikit beras, daging atau bahkan uang.

Tanpa Tuti berdagang, asap dapur rumah tangga itu tidak *ngepul*. Dagangan sayuran yang tersisa hari itu dapat dimasak untuk keperluan makan keluarga pada hari berikutnya. Ibu Tuti bukan merupakan pedagang yang berhasil dan sering kekurangan

modal. Antara tahun 1975 - 1981, perdagangan Tuti mengalami kebangkrutan beberapa kali, tetapi bagaimanapun ia dapat mengumpulkan modal untuk berusaha lagi. Ia sering meminjam uang dari rentenir yang sering berkeliling di sekitar kampung dan memungut suku bunga yang terlalu tinggi yakni 28% per bulan. Ia sering bersusah-payah untuk mengembalikan uang itu dan berhutang kepada sejumlah orang dalam lingkungan itu. Bagaimanapun, keluarga itu bertahan terus.

Dari tahun 1978 dan seterusnya, Boco dan para pekerja bangunan yang lain seringkali pergi, jauh dari Kebun Kacang untuk mencari pekerjaan bangunan di pinggiran kota atau bahkan sampai sejauh Bogor. Pusat *boom* pekerjaan bangunan tampaknya mulai bergerak keluar dari kota, ke kawasan perumahan baru dan kawasan industri, sehingga para pekerja bangunan kampung terpaksa mengikuti jika mereka ingin mendapatkan pekerjaan. Sementara Tuti dengan anak-anaknya tetap menjalankan perdagangan di kampung, Boco selama beberapa minggu tinggal di tempat pekerjaan bangunan di mana saja.

Pelayanan Kampung

Seperti halnya pekerjaan pembangunan kampung, pelayanan berskala kecil berkembang sebagai akibat meningkatnya kemakmuran para penduduk kampung yang bekerja di luar kampung. Ketika seorang pegawai kantor atau pedagang menjadi makmur, maka ia akan mempekerjakan tetangganya untuk mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah. Walaupun mereka dapat menjahit baju sendiri, mereka pergi ke tukang jahit wanita. Daripada mengangkut berember-ember air atau bahan mentah dari pasar, mereka menyuruh tetangga yang menganggur untuk membawanya.

Meskipun banyak, tetapi tidak semua pelayanan ini dilakukan oleh penduduk kampung yang miskin. Biasanya mereka adalah kaum perempuan yang suaminya mendapatkan penghasilan rendah atau yang diceraikan ditinggal pergi atau menjanda. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berketerampilan, seperti binatu, pembantu rumah tangga dan angkut-mengangkut. Mereka berpindah-pindah pekerjaan tergantung pada apa yang diperlukan para tetangganya. Isteri-isteri yang keadaannya makmur kadang-kadang melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan yang lebih berketerampilan seperti menjahit, mengobati, perdagangan perantara

dan sebagai dukun beranak, sebagai pekerjaan sampingan.

Pada tahun 1970-an, kemakmuran beberapa penduduk kampung meningkat dan permintaan untuk semua jenis pelayanan kampung meningkat pula, sehingga penduduk yang miskin merasakan pemerataan kemakmuran dari penduduk yang kaya.

Meskipun pada awal tahun 1970-an jumlah orang yang bekerja dalam pelayanan berskala kecil berkembang pesat di Jakarta, namun masih kurang dari mereka yang bekerja di bidang perdagangan kecil dan pengendaraan becak. Pada tahun 1967, kira-kira 145.000 orang bekerja di sektor informal di kota.[67] Telah dinyatakan bahwa pelayanan merupakan sektor pekerjaan yang paling penting dan cepat berkembang dan diperkirakan 30% dari tenaga kerja sektor informal di Jakarta.[68] Sebaliknya, survai ILO menemukan, bahwa pelayanan berskala kecil sebagai penyerap tenaga kerja kedua setelah perdagangan kecil dan dalam contoh penelitian diperkirakan 18% dari jumlah pekerjaan.[69]

Di lingkungan Ibu Innah pada tahun 1979, kira-kira 30 orang atau 15% dari tenaga kerja bekerja di sektor pelayanan ini. Ini bisa ditambah dengan 22 kedai rumah tangga (11% tenaga kerja) yang menyediakan bahan-bahan pokok seperti makanan mentah, ikan asin, sabun, korek api dan obat nyamuk yang diperlukan penduduk.[70]

Permintaan mengenai pelayanan kampung lebih tidak pasti, daripada kerja bangunan yang dilakukan beberapa kali dalam

---

67 Komposisi kategori ini tidak jelas. Memang tidak termasuk warung-warung rumah tangga (Sethuraman *Urbanization and Employment* 7-4).

68 Sethuraman *Urbanization and Employment* 2.8-2.9, 7.5, 7.21.

69 Moir & Wirosardjono *The Jakarta Informal Sector* hal. 7.

70 **Tipe dan Jumlah Jasa dalam Lingkungan Ibu Innah, Tahun 1979**

Tipe Jasa	*Jumlah*
Jasa tak berketerampilan	
Warung-warung rumah tangga	22
Penjual air	4
Binatu	7
Pembantu rumah tangga	7
Jasa berketerampilan	
Penjahit pakaian	5
Tukang pijat dan dukun	5
Dukun beranak	2
Jumlah	52

SUMBER: *Sebagaimana tabel 3.*

Warung masuk kategori perdagangan kecil, dengan demikian menambah jumlah pedagang kecil dalam lingkungan itu menjadi 89 dari jumlah sebelumnya, yaitu 67.

setiap seminggu atau setiap bulan. Ketika seseorang penduduk kampung yang sedang berduit, ia membayar orang untuk melayani segala keperluan rumah tangga, seperti mencuci, memasak, mengangkut barang, tetapi pada saat ia tidak mempunyai uang ia melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk orang lain.

Tingkat perekonomian terendah di kampung itu adalah warung rumah tangga. Meskipun keadaannya lebih makmur daripada tukang binatu dan pelayan rumah tangga, wanita-wanita tersebut kurang memiliki keterampilan, hanya memiliki modal terbatas dan terikat tanggung jawab pada anak-anaknya. Dari tahun 1975-1981, sekitar 15 sampai 22 orang perempuan atau 11% dari rumah tangga menjalankan warung rumah tangga atau menyiapkan makanan bagi mereka. Beberapa saja yang dapat berlangsung terus. Mereka mula-mula jaya tetapi kemudian berjatuhan. Keadaan ini lebih banyak dilakukan kaum perempuan yang berdagang sampai habis modal dan kemudian memulainya lagi ketika ia memperoleh sejumlah uang dari tetangganya, rentenir atau suaminya atau dari kegiatan sambilan lainnya, seperti pijat, binatu atau menyewakan kamar.

Pada tahun 1970-an setiap warung rumah tangga dikelola oleh kira-kira lima sampai sepuluh rumah tangga yang tinggal sebelah menyebelah. Mereka berbelanja di warung dekat rumahnya, tetapi jika barang yang dimaksud tidak tersedia, atau terlalu mahal, mereka pergi ke warung lainnya. Warung-warung yang berada di kampung sangat membantu mereka karena selain letaknya sangat strategis juga menjual barang-barang yang dapat dikreditkan. Setiap pemilik warung menetapkan batas kredit kira-kira seperempat dari pendapatan rumah tangga miskin per bulannya. Jika pembeli telah mencapai batas kredit yang telah ditetapkan pada satu warung, maka ia pergi ke warung lain. Faktor sosial lebih banyak mempengaruhi penduduk kampung dalam berbelanja, daripada faktor ekonomi.

Warung-warung itu sangat bervariasi dalam menjual dagangannya. Ada warung soto mi, nasi, gado-gado, bubur, sementara Ibu Innah menjual kue-kue. Masing-masing dagangan dijual pada jam-jam tertentu.

Anak-anak diperkenalkan dengan penganan pada usia dini. Ini dimaksudkan agar mereka tinggal dalam lingkungan yang penuh dengan pedagang dan sedikit ruang bermain. Seorang ibu yang tidak mengizinkan anaknya membeli penganan dianggap pelit.

Para pedagang yang menjual penganan kepada anak-anak kecil sering mendapat dampratan. Anak-anak sering tidak mempunyai uang dan selalu jajan, tak terkecuali anak-anak para pedagang sendiri. Beberapa ibu berdagang terutama untuk menyediakan penganan bagi anak-anaknya. Pembuatan makanan setiap hari selain untuk dijual juga untuk anak-anaknya. Hal ini untuk mencegah agar anak-anak mereka tidak jajan di warung tetangganya. Dagangan yang tidak laku akan dimakan oleh seluruh anggota keluarga.

Karena sebagian besar anggaran rumah tangga dan warung bercampur jadi satu, maka sulit untuk memperkirakan jumlah modal yang ditanam atau pendapatan yang diperoleh. Para pedagang jarang menyimpan uang tunai. Uang apa pun yang masuk ke dalam usaha itu segera diinvestasikan kembali. Lebih cepat keluar masuk uang, lebih baik perdagangan itu. Pedagang rumah tangga yang berhasil adalah mereka yang mampu mengatur uang untuk menghidupi keluarganya dari hasil berdagang. Pedagang yang kurang berhasil adalah mereka yang memberikan penganan kepada anak-anaknya dan terpaksa mencari penghasilan lain di luar dagang untuk menghadapi keluarganya. Keuntungan utama dari perdagangan makanan ini adalah bahwa keluarga itu dapat memperoleh makanan dari warungnya sendiri meskipun mereka hanya memiliki sedikit uang tunai.

Berbeda dengan kelas menengah, sebagian besar penduduk kampung tidak mengatur anggaran belanja, tetapi menggunakan uang apa pun yang ada di tangannya setiap hari. Namun menjelang akhir dasawarsa, dengan meningkatnya biaya hidup, meningkatnya keinginan terhadap barang-barang konsumtif dan biaya pendidikan yang lebih tinggi, serta munculnya kelas menengah dari dalam kampung, menimbulkan kesadaran untuk menyusun anggaran belanja. Mereka yang mampu dan punya mobilitas membeli makanan dalam jumlah besar di tempat yang lebih jauh atau pada toko-toko koperasi yang baru di tempat kerjanya. Mereka yang miskin, tidak mampu membeli barang-barang di toko-toko semacam itu.

Pada paruh pertama tahun 1970-an, penjual air utama di kampung itu, selain Satria juga para penduduk lainnya sebagai usaha sambilan. Satria juga bekerja sebagai pengumpul sampah bagi pemerintah kota Jakarta pada pagi hari. Setiap sore ia melewati kampung menjajakan air dalam kaleng-kaleng berisi 40 liter yang di-

pikul di atas pundaknya. Dari pekerjaan tersebut ia memperoleh penghasilan Rp 15.000,- sampai Rp 30.000,- (150 sampai 300 liter beras) sebulan, tergantung pada musim hujan atau musim panas. Ia mengantarkan air ke rumah-rumah yang keadaannya makmur tetapi penghuninya sibuk, malas, malu untuk mengangkut air sendiri, atau tidak ingin berjalan jauh dan antri lama untuk mendapatkan air.

Mengangkut air dipandang sebagai pekerjaan rendahan dan ketika mereka memiliki uang lebih, mereka membayar pedagang air untuk mengantarkannya. Perdagangan air minum merupakan kebutuhan paling penting selama awal sampai pertengahan tahun 1970-an, pada waktu air minum yang bersih sulit diperoleh di kampung karena ledeng-ledeng air sudah rusak dan sumur-sumur semakin tercemari. Air telah lama tercemari.

Amat juga beralih berdagang air setelah perdagangan sayurannya menurun pada pertengahan 1970-an. Air pipa yang diangkut Amat dianggap lebih bersih daripada air bor yang diangkut Satria dan dengan demikian Amat mengambil alih banyak pelanggan Satria. Masuknya instalasi air ledeng ke rumah-rumah orang kaya di kampung itu, mengganggu perdagangan air eceran yang sudah ada. Rumah-rumah tangga kaya ini menjual airnya langsung kepada para penduduk kampung lainnya seharga Rp 1,- per liter dan bukan Rp 2,50 per liter dan dengan begitu memotong jasa Satria dan Amat.

Mencuci dan menyeterika pakaian merupakan pekerjaan penting, walaupun pekerjaan rendahan. Paling tidak ada tujuh orang pencuci di kampung itu. Tiga orang pencuci yang lain di kampung itu bekerja sebagai pencuci tetap bagi rumah-rumah tangga atau lembaga-lembaga di luar daerah ini. Sulit untuk mengetahui siapa tukang binatu yang dibayar dan siapa yang tidak, karena setiap dua hari sekali mereka mencuci pakaiannya sendiri atau pakaian orang lain.

Badria bekerja sebagai tukang cuci dan binatu. Suami dan dua anaknya tidak pernah membantunya. Adakalanya suaminya melakukan pekerjaan bangunan atau membantu kepala kampung lokal, tetapi sebagian besar ia *nongkrong* di sekitar kampung, bermain kartu, berjudi atau tidur. Badriah mencuci pakaian dari rumah ke rumah di kampung itu dan pada tahun 1979 memperoleh penghasilan antara Rp 8.000,- sampai Rp 15.000,- (53-100 liter beras) per bulan. Ia dibayar Rp 25,- (0,16 liter) per lembar baju oleh

sebuah keluarga dan sekaligus Rp 8.000,- per bulan oleh keluarga yang lain. Keluarga yang lebih kaya dengan pendapatan per bulan melebihi Rp 100.000,- (666 liter beras) atau kaum bujangan memanfaatkan pelayanannya. Setiap perempuan pencuci bekerja pada keluarga tertentu atau kelompok keluarga. Karena pendapatannya tidak bisa diandalkan dan tidak mencukupi, Badria terpaksa mencari pekerjaan lain. Ia mengangkut air minum, mengangkut barang-barang dari pasar, membantu memasak membawa barang untuk penduduk kampung ke rumah gadai. Ia membawa barang-barang berharga dari para penduduk kampung ke rumah gadai dan menebusnya pada kemudian hari, dengan demikian para pemilik barang itu dapat menyembunyikan rasa malunya pada tetangganya jika terlihat menggadaikan barang-barang miliknya. Untuk setiap pekerjaan ini Badria menerima Rp 100,- (0,7 liter beras) sehingga penghasilan total per bulannya antara Rp 11.000,-- Rp 18.000 (73-120 liter beras).

Menjadi pembantu rumah tangga merupakan pengakuan terbuka mengenai kemiskinan. Sebagaimana halnya mencuci pakaian, maka pembantu rumah tangga di pandang sebagai pekerjaan yang dibayar paling rendah dan kurang bergengsi. Hanya tiga orang penduduk di kampung itu bekerja secara tetap sebagai pembantu rumah tangga, sedangkan empat orang pembantu lainnya yang berada di kampung itu berasal dari luar. Ani, isteri penjual air Amat, bekerja pada salah satu keluarga yang paling kaya dalam lingkungan, – Warung Kakah. Majikannya memiliki kedai makanan yang besar terletak di jalan dekat kampung itu. Pekerjaan Ani adalah membeli dan menyiapkan makanan bagi majikannya dan memelihara rumah itu tetap rapi. Untuk pekerjaan ini ia menerima imbalan Rp 8.000,- (53 liter beras) per bulan ditambah dua atau tiga kali makan setiap hari (sama dengan Rp 6.000,-/40 liter beras per bulan). Dengan demikian pada tahun 1979, pendapatan totalnya per bulan adalah Rp. 14.000,- (93 liter beras). Sebelum bekerja di kampung, ia telah bekerja pada sejumlah keluarga kelas menengah yang lebih kaya di Menteng. Selain bekerja sebagai pembantu rumah tangga, ia tidak memiliki pengalaman lain. Bahkan ia juga tidak memiliki modal untuk mendirikan kedai makanan rumah tangga.

Meskipun kampung itu memiliki lima penjahit pakaian, namun hanya seorang yang bekerja secara penuh. Pesanan utama untuk pakaian baru datang selama Lebaran sehingga para penjahit

pakaian tidak dapat memenuhi permintaan itu. Pada saat lainnya dalam tahun itu, sebagian besar penjahit pakaian kampung berdagang makanan matang sebagai usaha sambilan. Ibu Boto, misalnya, menyiapkan kue-kue dan penganan pada pagi hari dan adakalanya hanya menjahit pada sore hari. Pada tahun 1981, ia memperoleh penghasilan dari Rp 1.000,-- Rp 2.000,- (4,8 liter sampai 9,5 liter beras) untuk setiap baju dan hanya mendapatkan dua atau tiga pesanan dalam seminggu. Para penjahit pakaian memiliki pelanggan tetap yang tinggal di kampung itu juga. Para pelanggan mengantarkan bahan untuk penjahit pakaian dan setelah menyetujui disainnya, maka pakaian itu akan diselesaikan dalam beberapa hari. Pada tahun 1980, pakaian-pakaian yang sudah jadi dijual di pasar-pasar dan toko-toko dengan harga lebih murah daripada pakaian yang dibuat berdasarkan pesanan di kampung, dan para penduduk kampung mulai membeli pakaian jadi dengan merk-merk internasional terkenal (kebanyakan palsu).

Pelayanan berketerampilan lainnya di kampung itu adalah dukun beranak, pengobatan secara tradisional, pijat dan penyiapan dekorasi bagi perayaan perkawinan. Semua pelayanan tergantung permintaan dan kaum perempuan yang melakukannya memiliki kegiatan yang menghasilkan pendapatan lainnya. Kaum perempuan yang bekerja dalam perkerjaan ini belum tentu dari golongan yang paling miskin. Ibu Innah dengan bantuan Ibu Umi, seorang tetangga, telah membidani hampir semua anak di kampung itu. Meskipun Innah berusia lanjut (hampir delapan puluh tahun) para ibu di kampung itu lebih menyukainya dalam membantu kelahiran, daripada dokter. Ia memberikan pelayanan yang bersifat pribadi dan berbiaya murah. Ia memasang tarif Rp 6.000,- (40 liter beras) untuk setiap kali kelahiran, sementara Rp 30.000,- (200 liter beras) jika melahirkan di rumah sakit dengan bantuan dokter. Ibu Innah juga bersedia dipanggil ke rumah orang yang akan melahirkan. Namun karena perkembangan pengobatan modern memasuki kampung itu, banyak ibu muda mulai beralih ke rumah bersalin setempat.

Meskipun kampung itu memiliki lima dukun tradisional, namun tak satu pun yang bekerja secara penuh. Keterampilan mereka biasanya diwariskan, termasuk dalam praktek pijat serta mantera-mantera. Jika para penduduk kampung merasa kurang sehat, mereka memanggil dukun tradisional ke rumahnya. Mengenai pembayaran bisa dikompromikan. Pada tahun 1979, para pen-

duduk kampung yang memanfaatkan jasa ini membayar antara Rp 300,-- Rp 500,- (2-3 liter beras) dan jika mereka kekurangan uang, mereka dapat membayar seadanya atau dijanjikan kemudian hari. Jika para pasien itu tidak dapat disembuhkan, biasanya mereka memanggil dukun-dukun yang lain. Namun menjelang akhir dasawarsa, para penduduk kampung mulai beralih ke poliklinik pemerintah atau dokter-dokter swasta. Dengan demikian para dukun mulai kehilangan sebagian pelanggan mereka.

Setiap dukun memiliki kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan. Tina, misalnya, selain berprofesi dukun juga menyewakan gaun-gaun pengantin dan dekorasi bagi perkawinan di kampung. Ia bertindak sebagai perantara antara pengusaha toko yang memiliki gaun-gaun dan para penduduk kampung yang ingin menyewanya. Fatma, anak perempuan Innah dan pemijat yang paling terkenal dalam lingkungan itu, membuka kedai bubur. Para pelanggan pijatnya tidak hanya di kampung itu, tetapi di luar kampung itu, yaitu orang-orang kaya di Menteng. Ia dapat menghasilkan lima sampai sepuluh kali lebih banyak per pijat (Rp 5.000/33 liter beras) dari pelanggan-pelanggannya di Menteng daripada dari para penduduk kampung (antara Rp 500 dan Rp 1.000,-). Di samping perdagangan kecil dan kegiatan peminjaman uang, Mus dan Ibu Citro juga bertindak sebagai dukun-dukun tradisional.

Menjelang akhir tahun 1970-an dengan meningkatnya kemakmuran beberapa penduduk kampung, berubahnya selera konsumsi berkembangnya sentralisasi pelayanan dan efisiensi pemerintah, telah mengakibatkan berkurangnya permintaan mengenai pelayanan kampung. Beberapa rumah tangga kini mampu memiliki mesin cuci sendiri, air dan sambungan listrik. Mereka mulai mengatur anggaran belanja dengan berbelanja dari koperasi di tempat kerjanya daripada memanfaatkan warung setempat atau pedagang keliling. Mereka membeli baju dari pasar-pasar resmi atau toko-toko serba ada di pusat kota daripada penjahit wanita setempat. Mereka semakin memanfaatkan obat-obatan dari luar negeri dan perawatan dokter daripada dukun. Daripada mempekerjakan kaum perempuan dari kampung itu sebagai pembantu rumah tangga, mereka memasukan orang-orang dari desa yang dapat mereka kendalikan serta bisa dibayar murah. Survai ILO menemukan hal serupa bahwa dalam hal tertentu, kemakmuran yang tumbuh di lapisan kelas menengah tidak menguntungkan

sektor berskala kecil, karena golongan kaya telah beralih langganan ke tempat lain.[71]

Sektor Formal

Berbeda dengan sektor informal, sektor formal telah digambarkan sebagai skala lebih besar, padat modal, diorganisasikan secara birokratis dengan jam-jam kerja yang tetap dan gaji tertentu. Secara formal pula, sektor ini dikelola pemerintah dan memiliki jaringan-jaringan tetap dengan institusi-institusi seperti bank. Sektor formal terdiri dari orang-orang yang dipekerjakan pada kantor-kantor pemerintah atau swasta, toko-toko, rumah-rumah sakit, hotel-hotel dan pabrik berskala menengah atau besar.

Di mana pun juga, tidak ada jumlah pekerja yang jelas mengenai sektor formal Jakarta. Pada tahun 1974, Sethuraman memperkirakan bahwa sektor itu menyerap setengah lebih sedikit daripada seluruh tenaga kerja di Jakarta, yakni antara 500.000 dan 800.000. Meskipun angka-angka itu kurang akurat, namun ada bukti bahwa selama *boom* ekonomi pada tahun 1970-an peluang-peluang kerja di dalam sektor formal meluas. Lebih banyak lowongan tersedia dalam perusahaan-perusahaan berskala besar dan menengah, kantor-kantor pemerintah dan swasta dan sektor perdagangan. Sementara jumlah pekerja upahan meningkat, jumlah kaum wiraswasta mandiri, perusahaan-perusahaan keluarga dan para pekerja keluarga yang tidak dibayar menurun sebagai proporsi tenaga kerja.[72] Pada tahun 1982 di akhir *boom* ekonomi, sektor formal diperkirakan menyerap 73% dari tenaga kerja seluruhnya di kota atau kira-kira 1.500.000 pekerja.[73] Jika perkiraan Sethuraman dan BPS dibandingkan, maka sektor formal meningkat khususnya tenaga kerja, kira-kira 50%. Sebaliknya, jumlah tenaga kerja di sektor informal menurun, sementara masih konstan di sektor lainnya.

Antara tahun 1970-1981, peningkatan di sektor formal dan penurunan di sektor informal juga terlihat di Kebun Kacang. Sedangkan pada tahun 1970 tidak ada pekerja pabrik dan para penduduk kampung tidak pernah mendengar tentang istilah pabrik, namun pada tahun 1979 paling tidak 12 orang bekerja di pabrik.

---

71 Moir dan Wirosardjono *The Jakarta Informal Sector* hal. 106.

72 DKI *Hasil Survai Sosial Ekonomi DKI*, (Jakarta, 1981).

73 BPS, Indikator Ekonomi, Pekerja Sektor Informal di Indonesia, 1986, hal. 28, 31.

Pada tahun 1960-an-awal tahun 1970-an hanya ada 16 pekerja yang bergaji, namun pada tahun 1980 hampir ada 40 pekerja. Pada tahun 1979, seperempat tenaga kerja kampung memiliki pekerjaan bergaji.

Di bawah Demokrasi Terpimpin pada awal sampai pertengahan tahun 1960-an, ketika pekerjaan sektor publik berkembang dengan cepat, kira-kira lima belas pencari nafkah dalam lingkungan Ibu Innah bekerja di kantor. Ada empat orang pekerja pelabuhan, empat orang pesuruh dan satpam bank, enam orang pengumpul sampah kotapraja dan satu orang yang bekerja pada Departemen Kehakiman. Pekerjaan-pekerjaan semacam itu biasanya diperoleh melalui kontak-kontak pribadi dan bukan melalui keterampilan. Para majikan sering meminta para pekerjanya untuk mendapatkan calon-calon baru. Mereka yang berasal dari kelompok kekerabatan atau lingkungan yang sama, karena itu cenderung untuk berkumpul dalam pekerjaan yang sama. Mereka senang menerima pekerjaan kantor terutama karena mereka mendapat jatah beras secara tetap dan jaminan hari tua.[74] Dalam lingkungan Ibu Innah, mereka yang tinggal paling lama di kota, terutama orang Jawa Barat, tampaknya paling mungkin mendapat pekerjaan tetap, meskipun ini sulit dibuktikan. Mereka mungkin memiliki kontak-kontak yang lebih banyak dan lebih luas di seluruh kota atau tertarik oleh kerja yang lebih ringan, jaminan dan status sosial yang lebih besar daripada kerja di jalanan.

Pada tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an, sebagian besar penduduk kampung enggan untuk mengisi posisi-posisi ini ketika gaji sangat rendah. Pada tahun 1972, pengumpul sampah untuk pemerintah kota Jakarta menerima penghasilan hanya Rp 7.000,- per bulan dari rumah-rumah tangga orang kaya di Menteng, sementara isterinya mencuci pakaian dan memasak penganan di kampung. Burhanuddin bekerja sebagai akuntan di Departemen Kehakiman dan menjalankan usaha pembuatan es contong di rumahnya, sementara isterinya bekerja sebagai guru agama Islam dan menjual perkakas dapur secara kredit.

---

74 Pada tahun 1961, pembayaran gaji dalam bentuk beras, gula, ikan, minyak goreng, minyak tanah, sabun, transpor, perumahan dan lainnya untuk mengganti kerugian, karena pembekuan upah yang berupa uang, diperkirakan mencapai 66% - 87% dari penghasilan total para pekerja pemerintah (Johnson) *Business Environment in an Emerging Nation* hal. 93- 5.

Namun pada tahun 1978, pekerjaan sektor publik menjadi lebih menarik. Dengan kenaikan harga minyak OPEC yang kedua dan kenaikan yang diakibatkan dalam pendapatan pemerintah, maka gaji dan kondisi-kondisi kerja pegawai negeri mengalami perbaikan yang mencolok. Pekerjaan kantor yang kasar atau yang tidak berketerampilan, antara awal tahun 1960-an sampai pertengahan tahun 1970-an dianggap tidak menarik, kini mulai mendapat perhatian. Sementara para pedagang kecil, industri pondokan dan tukang becak mengalami kesulitan besar, maka mereka beralih ke pekerjaan kantor dengan pendapatan yang stabil atau meningkat. Pada tahun 1978 tingkat upah minimum untuk pekerjaan kantor ditetapkan oleh Undang-undang. Menurut Manning, "seluruh gaji pokok pemerintah telah meningkat sepuluh kali lipat dari tahun 1969."[75] Banyak fasilitas diberikan jika bekerja pada pemerintah, yaitu perawatan bebas atau perawatan dokter murah dan makan siang, pakaian seragam, barang-barang murah dapat kredit dari toko-toko koperasi, cuti bersalin, bonus lebaran, pensiun, perumahan yang disubsidi.[76]

Ketika sektor publik menjadi lebih populer, maka menjadi lebih sulit untuk dimasuki. Seorang pengumpul sampah dalam lingkungan Ibu Innah menginginkan agar anak laki-lakinya yang tak berpendidikan dan menganggur mengambil alih posisinya ketika ia berhenti, tetapi kenyataannya ia harus membayar atasannya uang suap kira-kira Rp 150.000,- tiga kali lipat upah bulanannya. Di kampung, hanya ada lima pemuda berpendidikan dengan ijazah SMA, dapat memperoleh pekerjaan pemerintah pada akhir tahun 1970-an dan semua menyatakan bahwa hal ini hanya mungkin karena di samping lulus ujian, mereka memiliki koneksi orang dalam.

Sampai pertengahan tahun 1970-an, para penduduk kampung kurang menyukai pekerjaan pabrik. Empat atau lima tahun kemudian, ketika perusahaan-perusahaan multinasional modern didirikan di pinggiran kota, sebagian besar penduduk kampung

---

75 Lihat juga Manning, C. "Pockets of Privilege Amidst Mass Poverty: Wages and Working Condition in Indonesian Industry" dalam Jellinek, L., Manning, C. dan Jones, G. *The Life of the Poor in Indonesian Cities*, (Melbourne, 1978). hal. 17-31.

76 Meskipun dibuatkan undang-undang, tidak semua manfaat ini diterima oleh pegawai-pegawai pada tingkat yang lebih rendah, seperti para tukang sapu, pembersih, penjaga dan lain-lain.

merasa bahwa hanya para anggota kelas menengah dapat memasuki perusahaan-perusahaan itu. Ijazah sekolah menengah atas, kontak-kontak dan pengetahuan tentang bagaimana melamar memang diperlukan.

Untuk masuk ke dalam pabrik-pabrik multinasional tampaknya hanya mungkin bagi para pemuda yang berpendidikan. Pada tahun 1980, tiga orang pemuda tamatan sekolah menengah atas memperoleh fasilitas bekerja di perusahaan tekstil baru kepunyaan orang asing di luar Jakarta, Tangerang. Pendapatan mereka mulai Rp 50.000,- per bulan, dengan prospek peningkatan gaji setiap tahun. Mereka mendapat fasilitas-fasilitas pengobatan, makanan, pakai-an seragam, cuti bersalin ditambah pensiun.[77] Kaum pekerja takut kehilangan pekerjaannya karena mereka tahu bahwa akan sulit untuk memperoleh pekerjaan serupa di tempat lain.

Sebaliknya pekerjaan di pabrik-pabrik yang berukuran menengah di kota Jakarta, dibayar rendah dan tidak terjamin. Kondisi-kondisi kerjanya jelek, upah tidak naik dan tak ada satu pun manfaat yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pada tahun 1979, hanya Rp 20.000,- (133 liter beras), atau lebih sedikit dari upah pelayan rumah tangga, dibayarkan per bulan dan setengahnya habis untuk ongkos transportasi. Sebagian besar penduduk kampung tidak mau bekerja dengan sistem pengupahan seperti itu. Dalam lingkungan Ibu Innah, enam orang gadis belasan tahun yang belum nikah, yang telah keluar dari sekolah, bresedia untuk menerima pekerjaan di pabrik pena dan pabrik minuman. Penghasilan mereka hanya cukup untuk membeli panganan, rias muka, pakaian dan ada kalanya diberikan kepada orang tua mereka. Pergantian tenaga kerja di pabrik itu sangat cepat, karena setelah satu atau dua tahun, gadis-gadis pekerja ini meninggalkan pabrik untuk nikah atau pindah ke pabrik lainnya.

Pada akhir tahun 1970-an, anak-anak yang orang tuanya telah tiba di kota itu pada tahun 1950-an - 1960-an dan mendapatkan pekerjaan dalam sektor informal, tidak ingin mengikuti langkah-langkah orang tua mereka. Mereka dibesarkan untuk percaya bahwa kehidupan mereka akan lebih baik dari kehidupan orang tuanya. Mereka menginginkan pekerjaan yang terjamin dan dibayar lebih baik di kantor-kantor pemerintah atau swasta atau

77 Lihat juga Manning "Pockets of Privilage" hal. 17- 31.

pabrik-pabrik, daripada pekerjaan yang keras, sukar dan tidak terjamin di jalanan. Tetapi kemungkinan untuk bekerja di industri tetap terbatas.

Dalam lingkungan Ibu Innah pada akhir tahun 1970-an, timbul kecenderungan untuk masuk ke pekerjaan sektor formal. Para penduduk kampung yang lebih berpendidikan dapat memperoleh pekerjaan di kantor-kantor dan pabrik-pabrik. Namun demikian, hal ini hanya merupakan fase yang melintas. Sebagian besar penduduk kampung hanya dapat pindah ke dalam pabrik-pabrik berskala menengah yang memberikan upah rendah dan kondisi-kondisi kerja yang buruk. Pabrik-pabrik itu tidak memberikan lebih banyak keamanan daripada pekerjaan di sektor berskala kecil.[78]

Pada tahun 1980-an, pekerjaan sektor formal modern terbatas untuk anak-anak kelas menengah yang memiliki tidak hanya pendidikan tetapi juga kontak-kontak dan uang. Dari bukti yang terbatas ini disimpulkan bahwa Jakarta mungkin meniru pengalaman Amerika Latin pada tahun 1960-an. Di sana, pertumbuhan sektor formal hanya menguntungkan kelas menengah yang terbatas sekalipun diperluas. Hanya ada sedikit mobilitas permanen bergeser dari sektor berskala kecil dan padat karya terhadap sektor-sektor padat modal berskala besar dalam perekonomian perkotaan.[79]

Alasan Mengapa Kegiatan-kegiatan Usaha Kecil Timbul Tenggelam

Perubahan hubungan antara sektor formal dan informal dapat terlihat dalam tiga tahap. Dari akhir tahun 1950-an sampai pertengahan tahun 1960-an, sektor modern menurun, sementara sektor berskala kecil terus berkembang, sebagian besar ada lowongan di bi-

---

78 Pinches ("Anak-Pawis", hal. 252-54) menulis tentang Filipina, menekankan ketidakamanan dalam pekerjaan berupah, bahkan dalam perusahaan-perusahaan multi nasional berskala besar. "Hampir setengah dari sampelnya yang pada tahun 1979 memiliki pekerjaan penuh waktu (terutama dalam perusahaan-perusahaan besar) mengalami tanpa pekerjaan tetap", pada tahun 1982.

79 Cole, W.E. dan Sanders, P.D. "A Modified Dualism Model for Latin America", *Journal of Developing Areas*, Vol. 6, No. 2: 1972: hal. 185-98 ; Moser "The Dual Economy and Marginality Debate".

dang produksi, perdagangan eceran dan transportasi. Baik sektor formal maupun informal sektor ekonomi mengalami kemajuan pesat selama lima-sepuluh tahun awal pemerintahan Orde Baru 1965/1968-1975/1978. Setelah pertengahan tahun 1970-an, pertumbuhan yang sebenarnya dalam sektor ekonomi berskala besar menghasilkan perubahan-perubahan struktural dan tata kota khususnya di pusat kota, sehingga menghancurkan sektor informal.

Tingkat pertumbuhan yang beragam dan berlain-lainan antara sektor formal dan sektor informal sebagian dapat dijelaskan dengan adanya perubahan-perubahan dalam permintaan barang dan jasa. Selama tahun-tahun 1950-an-1960-an dan khususnya antara tahun 1957-1965, baik sektor pemerintah maupun swasta berskala besar tidak dapat berfungsi dengan baik. Badan-badan pemerintah tidak efektif dan efisien karena terlalu banyaknya pegawai, staf yang bermutu rendah, peraturan dan ketetapan tidak sesuai, gaji sangat rendah dan korupsi. Perusahaan-perusahaan swasta jatuh ketika Belanda dipaksa untuk pergi pada tahun 1957 dan ada diskriminasi terhadap orang Cina, khususnya setelah tahun 1960. Ketika sektor formal tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar penduduk, penduduk Jakarta perlu sektor informal. Pada saat itulah selama akhir tahun 1950-an-tahun 1960-an, Gani membuka usaha dagang onderdil mobil, Yusuf mulai usaha mengolah ulang aki bekas dan Janto memperbaiki radio, Salim mulai menarik becak dan Mus dan Sumira berdagang kecil-kecilan.

Perbaikan fasilitas-fasilitas pemerintah pada akhir tahun 1970-an mendorong perusahaan swasta berskala besar melakukan sentralisasi dan efisiensi terhadap makanan, transportasi, listrik, gas, air, sambungan telepon. Kemajuan dalam sektor formal mengganti kedudukan sektor informal. Baterai-baterai yang dikerjakan Yusuf digantikan oleh listrik dan becak yang dikendarai Salim digantikan oleh kendaraan bermotor. Para pelanggan kelas menengah lebih suka memakai air leding, listrik dan gas daripada membeli air dan minyak tanah dari pedagang eceran dengan harga yang lebih mahal.

Kenaikan pendapatan selama tahun 1970-an mengakibatkan kelas menengah yang berkembang mengubah pola-pola konsumsinya.[80] Mereka membeli barang-barang mahal, seperti mobil, le-

---

80 Dick, H.W. "The Rise of a Miccle Class and the Changing Concept of Equity in Indonesia : An Interpretation", *Indonesia* (Ithaca, April, 1985) No. 39 hal. 71-92.

mari es dan rumah yang besar. Antara tahun 1970-1980 di Jakarta jumlah kendaraan bermotor meningkat tiga kali lipat dari 200.000 menjadi 600.000.[81] Para tukang becak kehilangan pelanggan kelas menengah yang biasa berkendaraan pergi ke toko-toko atau supermarket untuk berbelanja daripada menunggu dan membeli kebutuhan sehari-hari dari pedagang keliling. Mereka membeli lemari es dan memperluas dapur, ini mengakibatkan para ibu rumah tangga lebih suka membeli banyak makanan dalam jumlah besar dari koperasi-koperasi atau supermarket daripada berbelanja di warung-warung kecil di pinggir jalan. Mereka lebih suka membeli barang-barang dengan merk-merk yang terkenal atau pergi ke toko, kafe atau restauran daripada membeli makanan dari pedagang kecil di pinggir jalan. Para pelanggan Sumira yang dulu dari kalangan tentara lebih suka membeli makanan dari kantin di tempat kerjanya atau pergi ke restauran Madura, Padang atau Cina. Para penjual es krim, Mus merasakan bahwa banyak pelanggan mereka dari kalangan kelas menengah kini lebih suka membeli es krim dengan kualitas yang lebih bagus.

Perubahan selera konsumen ini menyebabkan produk-produk tertentu tidak laku. Pada akhir tahun 1970-an, banyak barang yang dihasilkan oleh para produsen dan dijual pedagang kecil diambil alih oleh para produsen besar. Daun-daun pisang, misalnya yang digunakan untuk membungkus makanan telah digantikan oleh kantung-kantung plastik. Barang-barang tembikar, batok-batok kelapa dan kotak-kotak kaleng yang telah digunakan sebagai peralatan memasak, digantikan oleh barang-barang porselin yang diimpor. Keset tenunan yang terbuat dari alang-alang yang tumbuh setempat, telah digantikan oleh bahan-bahan plastik yang beraneka warna. Kasur yang dibuat dari kapuk digantikan oleh bahan karet. Meja, kursi dan mebel rotan digantikan dengan kursi tangan yang dilapisi dengan vinyl dan meja plastik atau kaca. Buah segar alpukat, mangga dan saribuah nenas digantikan oleh Teh Botol yang diproduksi secara massal, *Coca Cola, Seven Up* dan *Green Spot*. Kue beras dan penganan singkong digantikan oleh roti, biskuit, *hamburger* dan *hotdog*. Sebagian besar produk ini didisain secara

81 DKI, *Penghapusan Becak di Jakarta* (Jakarta, 1977), Mimeo hal. 59; DKI, *Gita Jaya* (Jakarta, 1977), hal. 241; Soekotjo, R. "Beberapa Masalah Angkutan Kota - Suatu Kasus Transportasi di Kota Padat Penduduk", *Prisma*, (Jakarta, April, 1974) hal. 59.

seragam dan dibuat dari bahan-bahan yang diimpor daripada bahan-bahan lokal. Produk itu dapat dibuat oleh perusahaan-perusahaan berskala lebih besar daripada aneka ragam kegiatan padat karya berskala kecil di kampung.

Pada akhir 1970-an, kebanyakan kegiatan sektor informal menurun tetapi muncul peluang-peluang baru. Sebagian pedagang buku dan majalah, boneka plastik, jas hujan, peralatan dapur, es krim bikinan pabrik besar masih menjajakan dagangannya di jalanan. Sebagian pedagang lainnya memperbaiki *minicar*, membuat mebel vinyl atau menyewakan *cassette video*. Sulit untuk menentukan berapa banyak orang kampung, dan bagian masyarakat kampung mana yang mendapatkan peluang-peluang baru ini. Beberapa orang kampung yang keadaannya makmur, seperti Idi, Burhanuddin dan Nano, dapat mengambil keuntungan dari pasar-pasar baru pemerintah, pusat-pusat pertokoan, kredit berbunga rendah dan kendaraan bermotor. Pada tahun 1980-an, mereka keluar dari kampung dan masuk ke dalam kalangan kelas menengah. Anak-anak mereka yang telah selesai sekolah menengah atas mungkin tidak dapat masuk ke sektor formal tetapi mungkin berpindah ke sektor informal yang baru timbul.

Ada tiga sebab utama mengapa usaha-usaha kecil timbul tenggelam di Jakarta Pusat. *Pertama*, Jakarta, khususnya daerah perdagangan, paling beruntung di antara semua daerah lain dari pembangunan ekonomi nasional yaitu menerima paling besar penanaman modal asing serta dalam negeri dan paling banyak uang dibelanjakan.[82] Paling tidak 50% uang negara beredar di Jakarta,[83] yang penduduknya hanya 4% dari seluruh penduduk Indonesia. *Kedua*, perubahan fisik pusat kota, mulanya meningkatkan, lalu kemudian menurut jumlah penduduk di sana. Dan *ketiga*, kebijakan-kebijakan pemerintah memperkuat pembangunan ini dan menimbulkan akibat langsung di pusat Kota.

---

82 Sethuraman, S.V. *Urbanization and Employment in Jakarta*, World Employment Programme, ILO, (Geneva, 1974) hal. 1.3 ; PCD (Planned Community Development Ltd), *Kampung Improvement Programme, Jakarta, Indonesia*, (Washington DC., 1973) hal. 3 Tabel VII, VIII.

83 Critchfield, R. "Desperation grows in Jakarta Slum" *The Christian Science Monitor* (12 September 1973) hal. 9 ; Sritua Arief, *Indonesia : Growth, Income Disparity and Mass Proverty*, (Jakarta, 1977) hal. 31 ; *The National Times*, Weekly, (Sydney, 4-9 June 1973) hal. 47.

Pertumbuhan ekonomi menghasilkan perubahan tata kota khususnya di pusat kota, di dekat Kebun Kacang. Antara 1950-an-pertengahan 1970-an pusat kegiatan Jakarta pindah ke Kebun Kacang sehingga penduduk yang berada di dalamnya merasakan adanya pembangunan besar-besaran. Banyaknya buruh bangunan mendorong permintaan pelayanan para pedagang makanan yang membuka warung-warungnya di sekitar bangunan-bangunan itu. Para pedagang ini membutuhkan jasa angkutan para tukang becak, yang kemudian menjadi pelanggan tukang dagang tersebut. Bertambahnya penduduk Jakarta dan munculnya kelas menengah ter-nyata belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dari sektor modern yang baru muncul. Mereka yang berpendapatan tetap namun masih kecil bekerja di sektor formal terpaksa berlangganan dengan para pedagang kecil dan tukang becak. Semua sektor masyarakat memerlukan jasa penyucian, pembersihan, pengobatan, penjahitan dan pembangunan dari penduduk kampung. Mata rantai pembelian dan penjualan ini mengakibatkan rakyat kecil memperoleh keuntungan.

Keuntungan yang mereka peroleh itu berasal dari warung-warung makanan yang mereka dirikan di sekitar bangunan-bangunan hotel dan perkantoran. Mereka menjadi rugi ketika bangunan-bangunan itu selesai, para buruh kembali ke kampungnya. Pada akhir tahun 1970-an sebagian besar hotel dan perkantoran di pusat kota merupakan satu kesatuan yang mampu mencukupi keperluannya sendiri. Bangunan-bangunan hotel dan perkantoran itu dikelilingi pagar-pagar tinggi agar penduduk kampung tidak masuk ke dalamnya. Bangunan-bangunan itu dijaga oleh sejumlah satpam (satuan pengaman). Penduduk kampung di sekitarnya merasa terancam dan percaya bahwa bangunan-bangunan baru ini hanya untuk orang-orang asing dan kelompok elite Jakarta. Orang-orang seperti Sumira, Mus, dan Salim merasa terasing di kotanya sendiri. Gang-gang dan tempat-tempat untuk mereka berdagang ditutup.

Tanah-tanah tempat berdiri perusahaan-perusahaan besar, kantor-kantor pemerintah, kedutaan-kedutaan dan rumah-rumah orang kaya harganya melonjak cepat. Kampung-kampung berpenduduk padat seperti Kebun Kacang, yang telah menyediakan tempat bermukim murah bagi golongan miskin yang bekerja di dalam perusahaan-perusahaan kecil, digusur untuk pembangunan. Perusahaan-perusahaan besar ingin dekat dengan pemerintah. Ti-

dak seperti penduduk kampung, mereka memiliki modal besar, dan koneksi kuat untuk mempertahankan kedudukan mereka di pusat kota. Orang-orang seperti Sumira atau Mus tidak mampu membangun warung atau rumah yang mempunyai izin sah di pusat kota. Mereka tidak memiliki biaya, hubungan-hubungan atau pengetahuan mengenai persyaratan-persyaratan sah mendirikan bangunan. Mereka merasa ditakut-takuti oleh peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur sah. Lingkungan tempat berdirinya kantor-kantor serba lengkap, kedutaan-kedutaan, hotel-hotel dan rumah-rumah orang kaya membuat usaha sektor informal tidak dapat hidup.

Penggusuran kampung yang berpenduduk padat untuk keperluan pembangunan jalan bagi gedung-gedung perkantoran, kedutaan, pelebaran jalan, pasar dan daerah perumahan mewah mengakibatkan penduduk jadi berkurang dan akibatnya usaha kecil menjadi mati karena tidak punya pelanggan. Untuk melangsungkan hidup diperlukan keterlibatan besar para penduduk golongan miskin. Antara tahun 1971-1980 penduduk Jakarta yang terdaftar menurun sampai 3% dan banyak penduduk yang tidak terdaftar dipastikan meninggalkan daerah itu. Penduduk Tanah Abang yang terdaftar, tempat Kebun Kacang berada turun 6%. Golongan miskin yang bermukim di kota terpaksa pindah ke pinggiran kota atau kembali ke desa asalnya. Empat rumah tangga yang makmur dalam lingkungan Ibu Innah pindah ke daerah pinggiran kota yang lebih nyaman dan segar.[84]

Sampai tahun 1970, pemerintahan kota gagal menertibkan sektor informal. Selama tahun 1950-an-1960-an, pemerintah kota lemah dan sibuk dengan urusan sehari-hari sehingga tidak bisa menahan arus migrasi ke kota. Pemerintah gagal untuk menertibkan

84 Pertumbuhan Penduduk di Jakarta Berdasarkan Daerah yang Menunjukkan Penurunan.

Daerah	*1971*	*1980*	*Persentase*
Pusat	1.275.436	1.236.876	- 3,02
Tanah Abang	253.809	239.904	- 5,8
Utara	616.777	976.045	+ 36,8
Barat	828.179	1.231.188	+ 32,7
Selatan	1.951.843	1.579.795	+ 33,41
Timur	801.021	1.456.750	+ 45
Jumlah	4.574.056	6.480.654	+ 29,42

pedagang kaki lima dan tukang becak di pusat kota. Para penduduk kampung merasa bebas pergi ke mana-mana di kota. Para tukang becak seperti Salim dan Yusuf dipandang sebagai "raja jalanan" dan para pedagang seperti Sumira dan Mus merasa bebas untuk menjual sesuka hati mereka.

Namun setelah tahun 1970, pemerintah kota memberlakukan peraturan terhadap tukang becak, pedagang kecil dan pendatang yang datang di kota. Ini langkah awal pemerintah untuk menggusur mereka dari daerah pusat kota. Para perencana kota memandang sektor informal sebagai penghambat perubahan Jakarta menjadi kota metropolis modern. Para pedagang jalanan dipaksa masuk berjualan di dalam pasar-pasar modern, para tukang becak harus beralih ke kendaraan angkutan umum bermotor. Para pedagang seperti Sumira, dan para tukang becak seperti Salim, tidak mampu membeli peralatan itu dan mereka tetap bertahan dengan pekerjaannya semula.

Pada akhir tahun 1970-an, sebagian besar penduduk Kebun Kacang menghadapi kesulitan memilih apakah mereka akan bekerja di sektor formal di pusat kota atau pindah ke daerah pinggiran dan tetap bekerja di sektor informal. Meskipun demikian sebagian besar mereka tidak punya kesempatan untuk masuk ke sektor formal. Pada pertengahan tahun 1970-an, ketika mereka menghasilkan pendapatan yang tinggi, mereka telah menggunakannya untuk konsumsi dengan segera. Karena mereka tidak berpendidikan dan tidak punya hubungan, maka lowongan kerja yang ada hanya menggaji lebih rendah. Oleh karenanya sektor informal, merupakan sarana bagi kelangsungan hidup mereka, tetapi justru ketidakamanan itulah sebenarnya yang membuat jebakan kemiskinan.

4
Penetrasi Pemerintah

Meskipun Kebun Kacang berada di jantung Jakarta, tetapi sampai tahun 1970, tampaknya pemerintah hampir tidak pernah hadir di sana. Departemen Dalam Negeri dan instansi pemerintahan kota, yang seharusnya mengontrol dan menertibkan kehidupan semua warga, namun berada di dalam jarak yang tidak jauh. Pada tahun 1970-an, seseorang dapat tinggal dalam lingkungan itu selama berbulan-bulan tanpa menyadari pemerintah ada didekatnya. Penduduk kampung memenuhi kebutuhan pokok mereka sendiri mengenai perumahan, pekerjaan dan berbagai keperluan menurut cara mereka sendiri. Tetapi baru setelah pertengahan tahun 1970-an, program kesejahteraan pemerintah mulai berpengaruh.

Peduduk kampung, sebaliknya tidak memiliki harapan positif terhadap pemerintah. Pengalaman pahit telah mengajarkannya untuk tidak mempercayai program pemerintah. Sebagian besar penduduk kampung tidak pernah diberi tahu mengenai program-program kesejahteraan pemerintah atau memahami bagaimana mereka dapat memanfaatkannya. Sebagian besar kebijakan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dirasakan dekat dengan kehidupan mereka seperti penerimaan becak, pedagang dan penggusuran kampung, telah melukai hati mereka.

Sampai tahun 1920, kampung perkotaan tetap berada di luar bidang administrasi perkotaan dan mengatur dirinya sendiri di bawah hukum adat dan Peraturan Pemerintah tahun 1851.[1] Selama dua dasawarsa pertama Politik Etis, kira-kira tahun 1900, yang

1 Krausse "*The Kampungs of Jakarta*" hal. 35.

berkaitan dengan kesejahteraan penduduk pribumi, telah mendorong perluasan kebijakan pemerintah ke dalam urusan-urusan desa, maka kampung perkotaan sama sekali diabaikan. Pada tahun 1920-an, undang-undang mengenai pengalihan pengawasan urusan-urusan kampung secara internal kepada pemerintah daerah diberlakukan.[2] Pemilihan waktu mengenai undang-undang ini tampaknya selalu dihubungkan dengan berkembangnya ketakutan di kalangan elite Eropa terhadap berjangkitnya penyakit. Pertumbuhan penduduk yang cepat di kota telah mengakibatkan daerah-daerah pinggiran kota yang baru untuk orang Eropa, seperti halnya Menteng, menjadi lebih dekat dengan kampung orang Indonesia yang padat dan tak memenuhi syarat kesehatan.[3]

Pada tahun 1920, digariskan Program Perbaikan Kampung di kota-kota besar di Jawa. Rencana itu diilhami oleh para insinyur yang ingin melaksanakan perbaikan-perbaikan fisik serupa dengan yang diterapkan di pusat-pusat kota Eropa yang padat penduduknya pada akhir abad sembilan belas. Tugas yang penting adalah untuk membangun saluran air minum yang tidak tercemar oleh kotoran. Tetapi akibat kesalahan pengelolaan, kekurangan dana, akibat zaman Malaise dan kelambatan-kelambatan, maka pengaruh perbaikan kampung mengecewakan.[4] Kebun Kacang kemudian masih merupakan kantung pemasaran perkebunan sayur-mayur, tampaknya beruntung dengan adanya persediaan sumur yang besar.[5]

---

2 Frederick "Indonesian Urban Society" hal. 91-2, 236-42; Cobban "The City on Java" hal. 139.

3 Sebagaimana Catatan Krausse ("The Kampungs of Jakarta" dalam Wertheim *The Indonesian Town* hal. 35), "... kondisi sosial dan kesehatan di Jakarta dan kota-kota lainnya menimbulkan perhatian para penguasa melalui laporan Tillema, Westerveld, dan Karsten." Lihat juga Boggers, E. dan de Ruijter, P. "Ir. Thomas Karsten and Indonesian Town Planning" dalam Nas *The Indonesian City* hal. 74.

4 Untuk Perbaikan Kampung di Jakarta pada tahun 1920-an lihat Wertheim, *The Indonesian Town* hal XI,XV, 20 dan Abeyasekere, *Jakarta* hal. 121-22. Lihat juga Cobban, J.L. "Uncontrolled Urban Settlement: The Kampung Question in Semarang (1905-1940)," *Bidjragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde*, Vol. 130, No. 4: 1974: 403-27 untuk Semarang; lihat Frederick "Indonesian Urban Society" hal. 88-90 untuk Surabaya; lihat Polle' & Hofstee "Urban Kampung Improvement" hal. 117-19 untuk sebuah tinjauan singkat.

5 Ada bukti bahwa Perbaikan Kampung direncanakan di Kebun Kacang pada tahun 1929 (Gemeente Batavia rec'd f66,187). Lihat *25 Jaren Decentralisatie 1905-1930*, hal. 173.

Antara tahun 1942 sampai 1945 orang-orang Jepang merasa kecewa, karena kekurangan kontrolnya terhadap penduduk kampung dan apa yang bagi mereka tampak tidak disiplin dan kacau. Mereka memperkenalkan sistem administratif lingkungan perkotaan, *Tonarigumi*, yang sebagian besar pakar memandang sebagai jaringan administratif utama yang ditopang secara resmi pada tingkat kampung.[6] Berdasarkan pada organisasi lingkungan perkotaan di Jepang, maka orang-orang Jepang mencoba untuk mendirikan unit-unit yang dimaksudkan untuk mendaftar dan mengontrol semua penduduk dalam lingkungan itu dan digunakan sebagai korps keamanan.[7] Unit-unit ini tidak dibentuk di semua daerah dan banyak penduduk kampung tetap tidak tahu sama sekali. Pada tahun 1970, penduduk kampung di lingkungan Ibu Innah, tidak dapat mengingat *Tonarigumi*, dan hanya secara samar-samar mengingat *Gunicho*, kepala *Tonarigumi*.

Dalam jangka empat tahun antara penyerahan Jepang dan pengakuan Belanda mengenai Kemerdekaan Indonesia pada bulan Desember 1949, tampaknya kontrol kota terhadap urusan kampung menjadi tidak efektif. Sampai aksi militer Belanda yang pertama pada bulan Juli 1947, Balai Agung Republik menyatakan telah mampu mengendalikan urusan-urusan kota penduduk Indonesia. Sesudah itu, kontrol simbolis dipertahankan dari Rumah Sakit Umum Republik di Salemba dan setelah bulan Agustus 1948, juga dilakukan di klinik kesehatan masyarakat yang informal di Menteng dan beberapa sekolah Republik tidak resmi.[8] Meskipun informasi tidak cukup mengenai apa yang terjadi pada penduduk kampung selama tahun-tahun ini, tampaknya mungkin mereka dibiarkan untuk berbuat sesuka hatinya. Setelah, migrasi keluar

---

6 Milone, P.D. *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts*, (Berkeley, 1966) hal. 36-7; Cobban "Uncontrolled Urban Settlement"; Krausse "The Kampungs of Jakarta" hal. 36; Logsdon, M. "Leaders and Followers in Urban Neighbourhoods: An Exploratory Study of Djakarta Indonesia," Ph.D. Thesis, Harvard University, 1975, hal. 56; Abeyasekere *Jakarta* hal. 142 menurut Frederick, pada tahun 1931 di Surabaya, Belanda telah mencoba namun tidak berhasil untuk memaksakan sistem daerah (*wijk*) disamping perkumpulan gotong-royong kampung yang ada (*Sinoman*).

7 Menurut Frederick ("Indonesian Urban Society" hal. 91-94, 236- 42,431-39), bagaimanapun, di Surabaya kampung-kampung masih terus mempertahankan otonominya dan menolak pembebanan administratif baru ini.

8 Cribb "The Nationalist World of Occupied Jakarta" hal. 96-7.

secara besar-besaran dari kota selama kekacauan dan kerusuhan pada tahun 1946 ketika Belanda mencengkeramkan kembali kekuasaanya, maka pemukiman lahan di dalam kota berlanjut dengan cepat. Pendudukan lahan oleh para pendatang baru telah dipercepat selama pendudukan Jepang ketika penduduk kampung didorong untuk bertanam di lahan perkotaan yang kosong untuk mengatasi kekurangan pangan. Pemukiman lahan di dalam kota selanjutnya didorong oleh kaum Republik untuk menghalangi masuknya Belanda ke daerah-daerah ini.[9]

Selama hampir satu dasawarsa setelah Kemerdekaan, pada tahun 1949, pemerintahan kota menemui kesulitan untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan lahan di pusat kota. Pada awal tahun 1950-an pendudukan lahan oleh penduduk kampung antara Jakarta dan Kebayoran Baru daerah pinggiran kota satelit baru, menghalangi penyelesaian Jalan Thamrin, jalan raya enam jalur. Peraturan dan ketetapan yang mengatur pemilikan tanah dan registrasi tetap membingungkan penduduk kampung. Mereka tidak menyadari tentang tingkat hak milik legal atas tanah. Maka suatu pemerintah yang mendukung hak azasi manusia, penentuan nasib sendiri dan kebebasan tidak dapat semata-mata mengambil alih rumah-rumah warga negaranya yang kebanyakan baru saja berjuang dalam perang kemerdekaan demi kepentingan bangsanya. Lebih lanjut, pemerintah banyak dibebani oleh tugas-tugas lain mengenai administrasi sehari-hari dan kekurangan sumber daya untuk mengembangkan lahan semacam itu. Memang diwajibkan untuk menyediakan lahan alternatif dan bantuan kepada mereka yang dipaksa meninggalkannya. Pelaksanaan perpindahan tempat tinggal memakan waktu, tidak praktis dan mahal.

Hanya selama tahun 1950-an kepentingan penduduk kampung dipertahankan oleh dewan kota yang vokal, meskipun tidak mewakili, namun mendukung pandangan mereka.[10] Selama pemilihan umum pada tahun 1955 dan tahun 1957, partai-partai politik, serikat-serikat buruh dan kelompok-kelompok wanita membujuk para pemberi suara. Penduduk kampung memiliki saluran yang dapat menampung keluhan-keluhan mereka. Pada tahun 1956, dewan kota, memberlakukan peraturan pembatasan terhadap kegiatan para pedagang kecil, yang dipandang sebagai "mengacaukan

9 Abeyasekere, *Jakarta*, hal. 197-205; DKI *Karya Jaya* hal. 107.
10 Abeyasekere, *Jakarta* hal. 204-5.

jalanan dan mengotori suasana kota." Namun demikian, dewan itu tidak ingin membolehkan para pedagang itu dibersihkan dari jalanan, sampai lokasi-lokasi dagang alternatif disediakan.[11]

Setelah tahun 1959, dengan kembali ke Undang-undang Dasar 1945, telah menempatkan banyak kekuasaan yang lebih besar di tangan Presiden Soekarno, -- yang berpendidikan Insinyur Sipil -- memimpikan Jakarta akan menjadi salah satu kota terbesar di dunia, merasa tidak sabar degan kemajuan yang lambat pada tahun 1950-an. Pada tahun 1960, ia meningkatkan kekuasaan wali kota, diberikan haknya kembali sebagai gubernur, yang melepaskannya dari otoritas dewan kota dan menjadikannya bertanggung jawab langsung kepada presiden. Namun demikian, Rencana Induk Jakarta, selesai pada tahun 1960 dan memusatkan pada persoalan-persoalan besar, misalnya transportasi, pemasokan air, industri dan daerah penghijauan agar dimungkinkan terlewati. Malahan tenaga manusia dan sumber daya dialihkan untuk menyelesaikan berbagai proyek bergengsi pada saat menyongsong Asian Games pada tahun 1962. Para perencana kota kini dapat membersihkan kampung-kampung tanpa khawatir terhadap oposisi. Kekuasaan mereka telah diperkuat melalui Penerapan Undang-undang darurat pada tahun 1957. Untuk memindahkan 47.000 orang penduduk hanya memakan waktu dua tahun untuk pembuatan Kompleks Asian Games. Padahal pada awal 50-an untuk memindahkan 500 orang penduduk dari gang di Jalan Thamrin makan waktu setengah dasawarsa pada awal tahun 1950-an, namun meskipun Rencana Induk dan Soekarno telah mengusulkan pembersihan perkampungan kumuh dan bangunan rumah-rumah susun, tidak ada usaha kearah proyek semacam itu.[12]

Penduduk dari lingkungan Ibu Innah tidak mengetahui apa-apa tentang Rencana Induk atau impian Soekarno mengenai pembersihan perkampungan kumuh. Mereka bahkan tidak membedakan antara periode Demokrasi Parlementer yang dulu dan lebih lunak (1949-1959) dengan periode Demokrasi Terpimpin yang lebih otoriter (1959-1965). Dalam anggapan mereka, pemerintah telah meninggalkan mereka sendirian, yang memungkinkan mereka mendirikan rumah-rumah mereka di atas tanah yang kosong di pusat kota dan bekerja dalam kegiatan-kegiatan untuk menda-

11 Abeyasekere, *Jakarta* hal. 198-9; DKI *Karya Jaya* hal.41,73,91.
12 Abeyasekere, *Jakarta* hal. 198, 201-7.

patkan penghasilan berskala kecil. Jika pemerintah menggusur rumah mereka untuk memenuhi rencana Soekarno yang agung, mereka dengan mudah dapat pindah ke tempat lain, dan masih tetap dekat dengan pusat kota. Tempat di pusat kota masih banyak, sedangkan milik penduduk kampung hanya sedikit, dan rumah-rumah yang sederhana terbuat dari bambu dengan mudah dapat dibangun kembali. Kebanyakan dari mereka yang telah datang di Kebun Kacang pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, sebelumnya tinggal di tempat-tempat lain yang berdekatan.

Selama pemerintahan Soekarno, penduduk kampung hanya dapat mengingat program-program pemberantasan buta huruf dan kooperasi. Mereka ingat bahwa kursus-kursus pemberantasan buta huruf secara informal diselenggarakan di rumah-rumah ibadah atau di mana pun ada ruangan. Sebagian besar penduduk kampung pada mulanya enggan menghadiri kelas-kelas ini, karena mereka merasa begitu tua, malu atau malas. Bagaimanapun, ketika orang yang hadir bertambah, pimpinan lokal dalam lingkungan Ibu Innah memungut bayaran untuk program itu yang seharusnya bebas. Dengan segera jumlah yang menghadiri kursus itu menurun. Namun demikian, di kota secara keseluruhan diperkirakan tingkat melek huruf meningkat dari 12% pada tahun 1930 menjadi 64% pada tahun 1961.[13]

Sesuai dengan rencana koperasi pemerintah yang dilembagakan pada tahun 1959, maka toko-toko yang diawasi pemerintah dan koperasi-koperasi kampung seharusnya menyediakan komoditi-komoditi pokok seperti beras, minyak goreng, gula, garam, dan teh dengan harga mati kepada semua pemegang kartu jatah. Program itu didesain untuk menerobos toko-toko eceran Cina yang dituduh menaikkan harga yang tidak wajar.[14] Dalam ligkungan Ibu Innah, pengelola koperasinya menghilang bersama barang-barang dan iuran uang penduduk kampung. Namun demikian, melalui sistem ini, beberapa penduduk kampung mampu mengumpulkan beras dan tekstil yang kemudian mereka jual di pasar gelap. Bagaimanapun secara resmi diakui, bahwa kurangnya modal, staf yang

13 *Ibid.*, Jakarta, hal. 179.

14 Tan, TK. (ed.,) *Sukarno's Guided Democracy*, (Brisbane, 1967); Mackie *Problems of the Indonesian Inflation*; Johnson *Business Environment*.

berpengalaman dan sistem pengantaran yang tidak memadai, telah menyebabkan program tadi sulit dijalankan.

Gubernur Ali Sadikin

Pada tahun 1966, setelah pemberontakan PKI tahun 1965, Ali Sadikin, mantan komandan Korps Komando Operasi AL dan Menteri Perhubungan Laut yang dinamis diangkat sebagai Gubernur Jakarta oleh Soekarno. Pada posisi itu, ia mengemban impian Soekarno, tetapi ia juga muncul sebagai lambang efisiensi administratif Orde Baru. Ia menghadapi persoalan-persoalan besar. Infrastruktur kota, yang didesain untuk melayani setengah juta penduduk pada tahun 1930-an, dalam keadaan sedemikian buruk, tetapi kini harus menanggulangi jumlah penduduk sedikitnya sepuluh kali lebih besar. Tetapi perbaikan yang perlu sekali dalam bidang perumahan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas kesehatan hanya akan menyebabkan berlanjutnya arus masuk pendatang baru. Dengan demikian sebelum perbaikan berlangsung migrasi harus dibatasi.

Ali Sadikin tampaknya memiliki pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah-masalah ini. Sistem administratif kampung diperkuat kembali, yang diikuti oleh registrasi semua penduduk kota dan membatasi masuknya para pendatang baru. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat mandiri dan yang tak diatur seperti halnya pedagang kaki lima dan pengendaraan becak dilarang masuk ke jalan-jalan besar di Jakarta, sehingga membuat kota itu kurang menarik bagi para calon migran dan memaksa mereka yang sudah tinggal di kota secara ilegal kembali ke kampung halaman. Hanya setelah pertumbuhan penduduk di kota berada di bawah pengawasan, maka program-program kesejahteraan memiliki manfaat yang besar.

Pada tahun 1966-67 Ali Sadikin mencoba untuk memperkuat sistem administratif kampung. Para gubernur sebelumnya, misalnya Sudiro pada tahun 1954, telah mencoba namun tidak berhasil membangun kembali sistem yang ditegakkan oleh Jepang.[15] Menurut Logsdon, sistem kepemimpinan lokal seharusnya melakukan hubungan antara penduduk kampung dan pemerintah. Informasi

---

15 Sistem itu didasarkan pada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK), RK kemudian dinamakan Rukun Warga (RW) (*Majalah Kotapraja*, 30 April, 1955).

disampaikan melalui kesatuan lokal dari pemerintah kepada rakyat dan kembali ke pemerintah lagi. Kampung-kampung harus membentuk pertahanan sipilnya sendiri, kesejahteraan sosial (misalnya pengumpulan dana bagi orang miskin, anak yatim dan kematian), pembangunan rumah ibadah, kebersihan, kesehatan dan gotong-royong.

Agar dapat mengurangi beban keuangan dan administratif pemerintah, maka Ali Sadikin mencoba merangsang pembangunan masyarakat dari bawah. Ia mendorong perlombaan antara satu RT dengan RT lain seperti yang sudah terjadi antardesa di daerah pedesaan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan harus diberi penghargaan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, seperti dengan nama Siaga bagi pemula akan diberikan urutan, Swadaya sampai Swasembada. Semua kegiatan ini akan dikoordinasikan oleh Lembaga Kerja Pembangunan Masyarakat Desa Khusus Ibu Kota (LKPMDK).

Namun dalam kenyataannya, Rukun Tetangga, Rukun Warga atau LKPMDK tidak berfungsi sebagaimana diharapkan. LKPMDK tidak dikenal oleh para warga lingkungan Innah atau penduduk Jakarta pada umumnya.[16] Sistem RT dan RW tetap diorganisasikan kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk dan sedikit dimanfaatkan. Pada tahun 1970-an sistem itu masih gagal untuk menyediakan sarana komunikasi antara pemerintah dan rakyat, dalam sebagian besar kasus, kebijakan yang diisyaratkan oleh pemerintah tidak disampaikan oleh kepala kampung kepada penduduk kampung. Bahkan jarang sekali keinginan-keinginan penduduk kampung disampaikan melalui kepala kampung dan lurah kepada pemerintah.

Sampai tahun 1968, orang-orang yang datang di Jakarta memerlukan bukti diri dan surat perjalanan, meskipun surat ini tidak diperiksa dengan teliti. Tetapi setelah tahun 1968, setiap warga negara yang datang ke kota harus mendapatkan dan memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Pendaftaran penduduk yang diwajibkan berkaitan erat dengan keputusan pemerintah pada tahun 1970 untuk menutup kota bagi sebagian besar pendatang baru. Secara resmi tidak satu orang pun akan tinggal di kota tanpa ada pekerjaan yang tetap, akomodasi yang pasti dan KTP

16 Logsdon "Leaders and Followers in Urban Neigbourhoods" hal. 56,67,192-3.

Jakarta.[17] Dalam praktek kebijakan ini kelihatan tidak mungkin dilaksanakan.

Kesulitan untuk menerapkan kebijakan kota yang tertutup tergambar dengan jelas dalam lingkungan Ibu Innah. Kepala kampung terus melanjutkan untuk menyewakan kamar-kamar kepada orang pendatang sementara dari desa tanpa pekerjaan tertentu, tempat tinggal atau KTP. Ia mengabaikan kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan KTP kepada para pendatang baru yang ingin bertempat tinggal. Cemoohan kepala kampung terhadap peraturan-peraturan itu berarti bahwa penduduk kampung merasa bebas untuk menyewakan kamar-kamar kepada teman-teman dan sanak saudara dari desa mereka.

Karena menyadari bahwa membanjirnya migran ke Jakarta tidak dapat hanya dihentikan dengan dekrit administratif, maka pada tahun 1971 Gubernur Ali Sadikin mulai membatasi pekerjaan-pekerjaan utama yang didapatkan oleh para migran temporer, khususnya penarik becak dan pedagang kecil. Kedua jenis pekerjaan itu telah lama merepotkan para perencana kota, karena merusak pemandangan dan penyebab kemacetan lalu-lintas, yang kini menjadi gawat. Tujuannya bukan hanya memaksa para migran temporer kembali ke desa, tetapi dengan membuat kehidupan sulit bagi mereka di kota, maka Ali Sadikin berharap bahwa berita itu akan tersiar kembali ke desa, sehingga menghalangi migrasi selanjutnya.

Kecuali mengenai gerakan antibecak, lingkungan Ibu Innah tidak merasakan pengaruh yang kuat dari kebijakan kota tertutup sampai pertengahan tahun 1970-an. Pada tahun 1972, hanya tinggal empat tukang becak. Meskipun ada peraturan antipedagang kecil, namun sampai akhir tahun 1975 para pedagang kecil masih maju pesat. Karena itu, peraturan itu mulai dilaksanakan di daerah pusat kota dengan konsekuensi yang mendatangkan malapetaka bagi mata pencarian para pedagang dalam lingkungan Ibu Innah.

Bersamaan dengan meluasnya kontrol terhadap penduduk kota pada tahun 1969 pemerintahan Jakarta memprakarsai Pro-

---

17 Untuk perundang-undangan lihat *Lembaran Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta*, 1970, No. 35. Untuk acuan-acuan yang lebih jauh terhadap penutupan kota, lihat Critchfield, R. "The Plight of the Cities: Djakarta-The First to 'Close'," *Columbia Journal of World Business*, Juli/August: 1971: 89-93; William J.B. "Sadikin Closes Jakarta," *Insight*, Feb. 1973: 16-20; Cohen "Poverty and Development in Jakarta" hal. 26-7, 34; Krausse "The Kampungs of Jakarta" hal. 92.

gram Perbaikan Kampung. Ini diikuti oleh program keluarga berencana pada awal 1970-an, yang melibatkan pembentukan banyak klinik kesehatan. Pembangunan sekolah-sekolah menjadi prioritas utama. Pada pertengahan tahun 1970-an, rencana kredit dengan suku bunga rendah dilancarkan. Keprihatinan mengenai kesejahteraan tampaknya menjadi bagian dari dasar pemikiran bagi kebijakan kota tertutup. Keprihatinan ini diperlihatkan dalam keadaan baru yang mendesak oleh huru-hara Malari di Jakarta pada bulan Januari 1974. Jika ditinjau secara luas kejadian Malari merupakan perselisihan antara golongan elite yang berebut kekuasaan dan memanipulasikan golongan miskin perkotaan untuk kepentingan mereka sendiri. Para pejabat pemerintah tiba-tiba menjadi sangat sadar akan terjadinya kesenjangan yang tajam antara golongan kaya dan miskin di kota. Pada saat itu terjadi penyerangan terhadap toko-toko Cina, pembakaran dan perampokan toko-toko dan supermarket dan penghancuran mobil-mobil Jepang. Sebagian sebagai reaksi terhadap hal ini, maka Rencana Pembangunan Lima Tahun kedua (1974-1979) menekankan pemerataan dan promosi usaha pribumi. Pada pertengahan tahun 1970-an badan-badan internasional seperti Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ILO juga mendorong pemerintah untuk memperhatikan penderitaan golongan miskin perkotaan.

Perbaikan Kampung

Program perbaikan kampung dilancarkan pada tahun 1969, sebetulnya bukan merupakan konsep baru tetapi menghidupkan kembali program serupa pada zaman akhir kolonial. Kedua program diarahkan untuk perbaikan prasarana fisik kampung padahal tujuan program aslinya dikonsentrasikan pada kebutuhan pokok mengenai air minum dan sanitasi, namun program baru difokuskan pada gang-gang dan saluran-saluran. Perubahan ini ditekankan sebagian besar karena alasan-alasan praktis. Peningkatan kepadatan perumahan kampung berarti bahwa pemasangan pipa-pipa air dan saluran akan menjadi sulit secara teknis dan sangat mahal, sementara gang-gang dan saluran-saluran memiliki daya tarik yang nyata bagi para perencana karena prasarana itu sangat tampak jelas.

Program perbaikan kampung mencapai Kebun Kacang pada tahun 1977-1978. Kepala kampung menentang program itu atas

dasar bahwa program itu akan menghancurkan kamar-kamar tambahannya dan sebuah kakus yang melanggar batas gang. Sebagian besar penduduk kampung tidak menyadari mengenai program itu, dan penolakan kepala kampung terhadap program itu. Beberapa orang yang menanyakan tentang itu diberi tahu bahwa pemerintah akan membongkar bagian-bagian dari rumah mereka untuk membuat gang baru, tanpa membayar ganti-rugi. Pada akhirnya gang-gang dan saluran-saluran baru, dibangun dalam kawasan yang lebih kaya di dekatnya yang beberapa anggotanya sejak awal telah meminta program itu. Sementara hanya lima rumah dalam lingkungan Innah yang secara langsung kena pengaruhnya.

Gang itu dibangun satu meter di atas jalan yang sudah ada, sehingga mempersulit penduduk kampung untuk keluar-masuk dari dan ke rumah-rumahnya. Secara jelas hal itu mencerminkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Para penjaga keamanan harus mencegah penduduk yang membangkang dan merintangi pembuatan gang itu. Ketika gang itu dilebarkan maka lingkungan itu telah kehilangan satu-satunya daerah terbuka yang tersedia. Beberapa rumah dibongkar untuk melapangkan gang itu. Para pemiliknya yang tidak menerima ganti-rugi diberitahu bahwa mereka hendaknya memberikan pengorbanan yang berharga bagi seluruh masyarakat. Rumah-rumah yang berbatasan dengan gang yang baru diperbaiki terpaksa membuat tangga untuk keluar masuk dari rumah mereka. Ada alasan yang kuat bagi pembangunan gang itu lebih tinggi dari jalan yang ada, karena daerah itu setiap tahun dilanda banjir. Akibat dari pembangunan gang maka sekarang banjir pindah dari gang ke dalam rumah. Walaupun penduduk kampung menderita banjir masuk ke dalam rumah, namun mereka bangga mempunyai jalan yang tidak becek lagi. Namun, tak seorang pun dari mereka percaya bahwa pemerintah telah membangun gang itu demi kemanfaatan mereka. Mereka percaya bahwa orang-orang tertentu yang memiliki wewenang dan kontraktor bangunan telah berkolusi untuk menarik keuntungan dari pembangunan gang itu.

Kesehatan dan Keluarga Berencana

Di antara kebutuhan-kebutuhan pokok penduduk kampung, pemerintahan kota memberikan prioritas perhatian pada kesehatan dan keluarga berencana. Pelayanan kesehatan bukan merupakan program baru. Selama tahun 1950-an, pemerintah telah

menjalankan kebijakan pelayanan kesehatan umum yang sangat baik dengan mendirikan rumah-rumah sakit dan klinik-klinik, melaksanakan vaksinasi massal untuk memberantas cacar dan inokulasi untuk memberantas tetanus dan tipus, dan penyemprotan DDT untuk memberantas malaria. Sebagai akibatnya tingkat kematian kota telah menurun dari kira-kira 20 per seribu pada tahun 1935/1937 menjadi 14 per seribu pada tahun 1955.[18] Namun keluarga berencana merupakan sesuatu hal baru. Program itu telah diperkenalkan pada tingkat nasional pada tahun 1967 dan wilayah DKI Jakarta, di bawah pemerintahan Ali Sadikin merupakan pelopor pertama yang melaksanakan hal tersebut.[19] Baik program kesehatan maupun keluarga berencana menekankan pembangunan klinik-klinik. Tetapi klinik-klinik ini tidak lazim bagi penduduk kampung, dan memerlukan waktu beberapa tahun untuk dapat diterima.

Pada pertengahan tahun 1970-an, sebagian besar anggota lingkungan Innah masih tidak menyadari atau takut terhadap obat-obatan modern, meskipun dalam kenyataan sedikitnya ada tiga poliklinik yang bisa ditempuh dengan jalan kaki selama dua puluh menit. Ketakutan ini terutama didasarkan pada desas-desus dan ketidaktahuan mereka belaka. Para ibu mengancam anak-anaknya dengan suntikan jika mereka bersikap tidak pantas. Karena sebagian besar kaum perempuan hampir tidak dapat meninggalkan lingkungan itu, maka perjalanan dua puluh menit dengan membawa anak yang sakit dan kemudian antri beberapa jam di klinik itu, tampaknya lama dan menyusahkan. Mereka takut akan biayanya. Sebagian besar tidak menyadari bahwa mereka dapat memperoleh perawatan dokter secara cuma-cuma jika mereka memiliki surat keterangan dari kepala kampung yang membuktikan ketidakmampuan mereka untuk membayar. Tetapi mereka yang mengetahui memang menyadari bahwa surat keterangan dari kepala kampung memerlukan biaya sebanyak yang harus mereka bayarkan kepada klinik jika tanpa keterangan itu. Beberapa penduduk kampung menyatakan bahwa obat-obat yang digunakan sudah lama dan tidak diinginkan lagi. Penduduk lainnya takut akan sifat perawat dan dokter klinik yang tidak memberi perhatian

18 Abeyasekere *Jakarta* hal.180-1.

19 Hull, T.H. dan Mantra, I.B. "Indonesia's Changing Population" dalam Booth dan Mc Cowley *The Indonesian Economy* hal. 270.

khusus, tetapi memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama dan cepat yaitu dengan suntikan. Mereka lebih menyukai dukun tradisional yang lebih akrab dan luwes. Ketika mereka pada akhirnya terpaksa masuk ke dalam rumah sakit pemerintah karena penyakitnya sangat parah dan mereka kebanyakan meninggal dunia, sehingga hanya menguatkan kecurigaan yang paling buruk mengenai obat-obatan model Barat.

Sepanjang tahun 1970-an, kepala kampung gagal mempromosikan program keluarga berencana bagi penduduk kampung. Meskipun pada permulaan ia telah diberi penerangan mengenai program itu oleh pemerintahan daerah, namun ia tetap gagal meneruskan informasi tadi. Isterinya yang keenam terus saja hamil sampai enam kali, dan setelah anak yang keenam lahir, baru ia mengikuti program itu hanya ketika semua isteri kepala kampung diperintahkan untuk memberikan contoh yang baik. Namun demikian sebagian besar tetangganya tetap tidak menyadari, takut, atau tidak tertarik dengan program itu.[20]

Pendidikan

Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintahan Jakarta juga memberikan prioritas yang tinggi pada pendidikan. Sebagaimana halnya dengan kesehatan masyarakat, maka pendidikan juga dijalankan secara besar-besaran di Jakarta setelah Kemerdekaan. Menurut angka-angka sensus, tingkat melek huruf bagi penduduk yang berusia di atas sepuluh tahun meningkat dari 12 persen pada tahun 1930 menjadi 64 persen pada tahun 1961.[21] Berbeda dengan tahun 1950-an, pada waktu pemerintah memberikan kesempatan pendidikan informal kepada semua orang, sekarang mereka menentingkan sekolah pemerintah untuk pendidikan anak-anak, dalam hal ini diutamakan bangunannya seperti bangunan sekolah sama dengan poliklinik. Bagi kebanyakan penduduk, biaya dan prosedur pendaftaran yang rumit juga menghalangi mereka untuk masuk sekolah.

Dalam lingkungan Innah pada awal tahun 1970-an, pendidikan yang diterima di sekolah lebih dari dua sampai tiga tahun pertama

---

20 Logsdon ("Leaders and Followers in Urban Neighbourhoods" hal. 151) menemukan bahwa RT-RT memberikan informasi terutama apabila mereka diminta oleh penduduk kampung.

21 Abeyasekere, Jakarta, hal. 179.

masih dipandang sebagai barang mewah yang hanya dapat dibiayai oleh sedikit penduduk kampung. Mereka berharap agar anak-anak mereka menjadi tukang atau pedagang kecil dan bila perlu mereka segera mempelajari keterampilan-keterampilan dasar dalam membaca dan berhitung, maka pendidikan selanjutnya kurang berguna. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendidikan dasar yang gratis, namun sebagian besar keluarga dalam lingkungan itu tetap mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah lokal yang bercorak Islami, yang mereka anggap memberikan pendidikan lebih baik dan lebih murah. Di sekolah-sekolah pemerintah, pendaftarannya lama, bisa sampai satu tahun baru masuk sekolah. Pada tahun 1978 banyak yang tidak punya akte kelahiran yang diperlukan dan biaya pendaftaran mencapai Rp 30.000,- (260 liter beras), kalau anak-anak mereka tidak ikut sekolah taman kanak-kanak, maka mereka tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah dasar. Untuk mendaftarkan pada taman kanak-kanak biayanya Rp 25.000,- (217 liter beras), dan kemudian dikenakan biaya bulanan tambahan. Sekolah Islam, sebaliknya, tampak secara aktif menampung anak-anak kampung dan tidak ada biaya pendaftaran pada permulaannya.[22]

Kredit Berskala Kecil

Barangkali contoh yang paling baik mengenai kesenjangan antara maksud-maksud baik pemerintah dan realitas kehidupan kampung, adalah kredit berskala kecil. Rencana pertama, Kredit Investasi Kecil (KIK) dilancarkan pada tahun 1974 setelah huruhara Malari untuk mendorong para wiraswasta lokal dan untuk memutuskan kekuatan yang mencekik dari kalangan swasta dan lintah darat Cina yang menguasai perdagangan.[23] Pada tahun 1978, sebuah laporan menyatakan bahwa karena pinjaman minimum yang besar dan persyaratan-persyaratan agunan maka kurang dari 0,1% dari para pedagang kecil di Jakarta yang menggunakan fasili-

22 Angka-angka ini tidak didasarkan pada skala yang resmi mengenai biaya dari Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, tetapi dari catatan lapangan yang dikumpulkan antara tahun 1978 dan 1980.

23 World Bank *Indonesia: Appraisal of Small Enterprise Development Project*, (Washington D.C., 1978) hal. 9-14; World Bank *The Urban Poor in Jakarta-Strategies* for Integrating World Bank Projects, (Washington D.C., 1977) Annex 1, 4.

tas-fasilitas kredit kota yang resmi.[24] Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini, pada tahun 1977 pemerintah memperkenalkan Kredit Candak Kulak yang menyediakan pinjaman di bawah Rp 50.000 (500 liter beras) tanpa persyaratan agunan. Tetapi hanya beberapa penduduk kampung yang tahu tentang program itu.

Dalam lingkungan Innah, hanya tiga penduduk kampung yang menggunakan Kredit Candak Kulak itu, yang didirikan di sekolah lokal dalam perjalanan kurang lima menit dari rumah mereka, sebagian besar penghuni tidak mengetahui fasilitas semacam itu. Bagi mereka yang mengetahui tentang itu, rencana kredit bunga yang rendah (12% per tahun) merasa bahwa prosedur-prosedur pinjaman memang kompleks dan tidak praktis. Formulir-formulir harus diisi untuk membuktikan identitas, status penduduk, dan penggunaan produktif terhadap uang yang dipinjam itu. Formulir-formulir itu harus dikumpulkan di kantor Kredit Candak Kulak dan kemudian ditandatangani oleh kepala kampung. Pengambilan tandatangan dari kepala kampung memerlukan pengeluaran tidak saja waktu tetapi juga uang. Para penduduk kampung tidak mau menggunakan banyak waktu mengisi formulir dan berunding dengan para pejabat mengenai suatu pinjaman. Kebanyakan penduduk yang sangat membutuhkan uang untuk membayar utang, obat-obatan, biaya sekolah atau perdagangan, tidak dapat menunggu dua sampai tiga minggu untuk memperoleh pinjaman. Tetapi pinjaman pemerintah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak produktif semacam itu. Kantor itu hanya buka pada jam-jam tertentu dalam seminggu dan diurus oleh staf yang tidak peduli dengan kesulitan mereka, yang biasanya hanya mengeluarkan pinjaman setengah bahkan kurang dari apa yang dibutuhkan oleh penduduk kampung (misalnya Rp 5000,- atau Rp 10.000,- padahal seharusnya Rp 15.000,- atau Rp 25.000,-).

Para lintah darat swasta lebih cocok bagi penduduk kampung, sekalipun mereka dikenakan suku bunga yang terlalu tinggi sekitar 300% per tahun. Mereka mendatangi rumah seseorang atas dasar permintaan. Mereka tinggal dalam komunitas itu atau berkunjung dari rumah ke rumah setiap hari. Tidak perlu agunan, atau bukti berupa KTP Jakarta atau jaminan mengenai penggunaan uang. Uang itu dikeluarkan sehari setelah pinjaman diajukan. Hanya yang diperlukan untuk diketahui oleh pemberi pinjaman

24 DKI *Kaki Lima* hal. 28.

adalah bahwa orang yang meminjam uang itu benar-benar tinggal di daerah itu dan tidak akan melarikan diri. Lintah darat itu secara pribadi dikenal oleh peminjam. Bukti tertulis tidak penting. Pengutang hanya menerima kwitansi untuk setiap pembayaran kembali. Pengutang bisa mengatakan kepada kreditornya bahwa ia ingin menunda pembayaran kembali jika ia merasa tidak dapat membayar untuk jangka waktu satu atau dua hari. Meskipun para penduduk kampung membayar bunga yang tinggi untuk jasa pinjaman uang ini, keluwesannya, kemudahannya, dari rumah ke rumah dan gaya yang akrab sangat cocok bagi mereka.

Kepemimpinan Lokal

Lurah sebagai pejabat paling bawah dari hirarki administratif yang digaji pemerintah, seharusnya menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada para penduduk kampung dan menyalurkan kembali pandangan-pandangan penduduk kampung kepada pemerintah. *Lurah* Kebun Kacang, jarang menemui ketua RT setempat atau penduduk di lingkungan Ibu Innah. Biasanya *lurah* dipindahkan ke posisi baru setiap beberapa tahun. *Lurah* Kebun Kacang adalah orang dari kalangan militer yang diangkat pada tahun 1980, rupanya belum pernah menginjakkan kakinya di daerah Kebun Kacang. *Lurah* sebelumnya diceritakan pernah memasuki lingkungan Ibu Cia untuk menghadiri pasar malam.[25]

Meskipun *lurah* pada akhirnya bertanggung jawab mengenai pendaftaran dan kesejahteraan penduduk kampung, ia menerima gaji dan promosi dari pemerintahan yang lebih tinggi dan dengan demikian mengarahkan perhatiannya dan sebagian besar waktunya untuk menemui para pejabat yang lebih tinggi. Bawahannya diserahi pekerjaan untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah dengan para kepala kampung lokal. Bahkan para pejabat yang lebih rendah ini menemui para kepala kampung lokal hanya sekali atau dua kali setahun, sebagian besar pertemuan-pertemuan di kantor kelurahan. Pertemuan-pertemuan ini dimaksudkan untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah kepada para kepala kampung, yang kemudian dimak-

25 Dari deskripsi Logsdon ("Leaders and Followers in Urban Neighbourhoods" hal. 113-28, 151, 163-70, 180-91, 197-9, 247-9) peran Lurah tampaknya mendua. Ia merupakan penghubung antara pemerintah dan rakyat, namun jauh dari rakyat dan pimpinan lokalnya.

sudkan pula untuk menyampaikannya kepada penduduk kampung. Pegawai kelurahan yang kurang berpendidikan, berpenghasilan rendah dan kurang motivasi tidak mampu untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada para kepala kampung. Para pemimpim pada setiap tingkatan menyetujui tanpa bantahan dengan bersikap diam atas instruksi-instruksi dari atas, yang sering tidak mereka pahami, walaupun mereka tidak setuju tetapi tetap saja mereka manggut-manggut meskipun mereka tidak akan melaksanakan. Sebagai akibatnya, ketika kebijakan disampaikan melalui hirarki administratif, kebijakan tadi menyimpang dan berubah pada setiap tingkatan.

Kepala kampung merupakan pekerjaan *sambilan* yang tidak dibayar dan dipilih berdasarkan kesepakatan para kepala rumah tangga untuk mewakili sebuah lingkungan yang terdiri antara 40 dan 60 rumah tangga. Ia merupakan penghubung yang penting antara administrasi pemerintah dan penduduk kampung, yang membantu lurah dan sekaligus diharapkan untuk melindungi rakyat yang telah memilihnya. Jika kebijakan-kebijakan pemerintah merugikan para pemilihnya, ia diharapkan dapat melindungi mereka dari kebijakan-kebijakan semacam itu. Sebagian besar kepala kampung melakukan hal ini bila mereka tidak memperoleh keuntungan dalam menerapkan kebijakan pemerintah. Tetapi jika pemerintah memutuskan kebijakan tadi dengan memberikan insentif-insentif keuangan dan keuntungan-keuntungan lain, maka mereka akan membantu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu.

Dalam lingkungan Ibu Innah, posisi kepala kampung tampaknya telah diwariskan dari ayah kepada anak. Pemilihan hanya merupakan kegiatan formalitas. Sejak kepemimpinan selama tahun 1940-an dan tahun 1950-an, kelompok kerabat Innah telah memonopoli posisi itu. Miskar (1960-an-1977), dan kemudian Cecep (1977-1981) mewarisi jabatan itu. Seorang calon saingannya diajukan oleh beberapa orang Jawa Tengah dalam lingkungan sebagai pengganti Miskar pada tahun 1977, tetapi ia kalah dari kelompok kerabat Innah.

Miskar, yang sedikit saja melek huruf tetapi telah digunakan sebagai tukang pukul atau polisi di bawah kekuasaan Belanda dan Jepang, dipandang pantas untuk pekerjaan itu. Ia tidak dapat diintimidasi oleh para pejabat pemerintah. Ia memiliki kualitas *jagoan* yang diperlukan untuk kepemimpinan. Ini terbukti ketika Miskar mencegah tentara yang mencari kaum komunis dalam lingkungan

Innah pada tahun 1965. Penolakannya untuk mengindahkan "kebijakan-kebijakan kota yang tertutup" memungkinkan penduduk kampung melanjutkan untuk mengundang sanak-saudara di desanya ke lingkungan itu. Tetapi sikap yang sangat berani dan keras kepala yang memungkinkannya untuk menutup mata terhadap instruksi-instruksi pemerintah juga digunakan untuk memperlemah program-program seperti halnya kesehatan, keluarga berencana dan perbaikan kampung.

Pekerjaan Miskar sebagai kepala kampung lokal yang tanpa gaji resmi, telah memaksanya untuk memungut biaya dari penduduk kampung untuk pelayanan yang ia berikan. Ada prosedur yang ditegakkan dengan kuat dan sebagian besar penduduk kampung diharuskan membayar biaya dari Rp 200,- sampai Rp 500,- (2-5 liter beras pada tahun 1977).[26] Bagi sebagian besar kepala kampung di Jakarta, pekerjaan dan penghasilan semacam itu hanya merupakan kegiatan sampingan. Mereka melaksanakan kegiatan lain untuk menghasilkan pendapatan sepanjang hari dan mereka hanya menjalankan tanggung jawab RT pada malam hari, pada hari minggu, atau sebelum barangkat kerja pada pagi hari.[27] Namun bagi Miskar, pekerjaan ini merupakan kegiatan utama dan sumber mata pencarian.

Miskar menjalankan fungsi yang beragam. Fungsinya yang paling penting adalah mengorganisasi jadwal petugas keamanan malam. Setiap laki-laki muda yang sudah dewasa diharuskan menyisihkan waktunya beberapa malam untuk menjaga kampung. Miskar menarik iuran bulanan Rp 200,- (2 liter) dari setiap rumah tangga untuk membayar kopi, pakaian seragam, dan honorarium para peronda (Rp 1.000,-/10 liter) beras bagi setiap penjaga per minggu. Para penduduk kampung yang ingin melepaskan tugas jaga malam harus membayar uang ekstra. Miskar mendaftar para

---

26 Sebagaimana dinyatakan Logsdon ("Leaders and Followers in Urban Neigbourhoods" hal. 172-4), para pemimpin lokal bayaran hampir tidak menerima upah untuk menutup biaya tinta dan kertas yang mereka gunakan. Bagaimanapun, saya menemukan bahwa para pemimpin lokal sering tidak memberikan pelayanan jika pembayaran tidak disediakan.

27 Logsdon ("Leaders and Followers in Urban Neighbourhoods" hal. 64) menemukan bahwa meskipun RT-RT ingin mencurahkan sepenuh waktunya di kelurahan, namun kenyataannya mereka hanya bekerja rata-rata 7 sampai 8 jam dalam seminggu karena mereka harus memanfaatkan sisa waktunya untuk mencari penghasilan lain.

pendatang baru dan menerima uang rokok dari mereka yang tidak ingin didaftar. Ia menjual KTP Jakarta bagi yang menginginkannya, sekalipun pemerintah telah melarang pengeluarannya bagi para pendatang baru. Ia diberi tahu setiap kelahiran anak, kematian atau perkawinan, dan memungut biaya untuk mengeluarkan surat-surat keterangan yang diperlukan. Ia memberikan izin membangun bagi penduduk kampung yang ingin memperluas rumah-rumah mereka di atas tanah garapan. Ia bertindak sebagai perantara dalam pembelian dan penjualan rumah-rumah di lingkungan itu, dengan menerima komisi. Meskipun mengadakan segala transaksi dan dokumentasi ini, namun catatan-catatan resmi Miskar mengenai yang tinggal dalam lingkungan itu sangat tidak dapat dipercaya. Banyak urusan dengan para penduduk tidak dimasukkan dalam catatan-catatan resmi, secara lihai dia memperingatkan penduduk bahwa kalau mereka mau lebih resmi harus keluar lebih banyak uang. Kebanyakan penduduk tidak mau repot-repot ke atas, cukup diselesaikan di kampung saja.

Setelah kematian ayahnya, Cecep mewarisi posisi kepemimpinannya. Di mata penduduk kampung, Cecep memang perkasa seperti ayahnya. Kepercayaan semacam itu dipandang berguna untuk kepemimpinan. Ia telah memimpin gerombolan-gerombolan jalanan pada masa mudanya dan tidak takut kepada siapa pun. Tetapi, permintaan utamanya adalah bahwa ia tidak akan banyak mencampuri dalam lingkungan itu. Cecep tidak peduli dengan urusan penduduk kampung dan malahan itu yang disukai oleh penduduk kampung. Ia memiliki waktu sedikit untuk lingkungan itu dan menegaskan bahwa kepemimpinan itu dipaksakan untuk dipikulnya dan tidak diberi upah.[28] Tidak seperti ayahnya, yang telah bertahan hidup dengan uang yang diperolehnya ketika menjadi kepala kampung dan menyewakan beberapa kamar dan kakus, Cecep mendapatkan sebagian besar penghasilannya di luar komunitas itu. Ia bekerja sebagai montir listrik pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) selama seharian dan diluar jam-jam kerja ia sebagai montir listrik swasta. Karena itu, hampir tidak pernah ada di rumah. Pada malam hari, sering isterinya harus mengatakan

28 Logsdon (Leaders and Followers in Urban Neighbourdoods" hal. 77-8) menyatakan bahwa daya tarik kepemimpinan lokal tidak hanya uang tetapi juga status sosial dan prestise.

kepada penduduk kampung bahwa Cecep sedang pergi. Memang tidak pernah jelas apakah ia melakukan tugas malam atau memiliki istri simpanan, namun penduduk kampung mencurigai hal terakhir.

Karena Cecep hampir tidak pernah berada dalam lingkungan itu dan tidak dapat diganggu dengan tugas-tugas kepemimpinan sehari-hari yang membosankan, ia menyerahkan pekerjaan itu kepada dua orang muda yang setengah buta huruf dan menganggur. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan iuran administratif bulanan sebesar Rp 500,- (5 liter beras pada tahun 1977) dari setiap rumah tangga. Beberapa penduduk kampung merasa enggan untuk membayar iuran itu karena mereka tidak tahu untuk apa iuran itu. Seolah-olah iuran itu digunakan untuk pengumpulan sampah, keamanan, penguburan dan administrasi.

Sampai akhir tahun 1970-an tidak ada sistem pengumpulan sampah yang nyata dalam kampung itu. Sepanjang tahun 1970-an, penduduk kampung masih terus membuang sampahnya ke dalam kali Cideng, meskipun mereka telah diberi tahu untuk tidak melakukan hal itu oleh para pejabat pemerintah ketika kali itu dikeruk pada tahun 1974. Beberapa rumah tangga yang tinggal paling dekat dengan kali yang berbau busuk itu, mengambil inisiatif sendiri untuk menjaga supaya para penduduk kampung tidak membuang sampah ke dalam kali. Tetapi selalu ada saja orang-orang yang dengan sembunyi-sembunyi masih terus membuang sampahnya dalam kali itu. Setelah timbul kekecewaan dan kejengkelan yang luar biasa, akhirnya Cecep menyewa dua orang dengan kereta dorong untuk mengumpulkan sampah setiap hari dan membayarnya dengan sebagian besar uang yang dikumpulkan untuk kepentingan ini. Sulit untuk mengatakan peran apa yang dimainkan pemerintah dalam mengorganisasi sistem baru ini. Sebagian besar jasa atau perbaikan di kampung itu dibuat oleh rumah tangga secara individual.[29]

Pekerja Suka Rela

Untuk menjembatani kesenjangan antara penduduk kampung dan negara memang sulit. Ibu Ros -- seorang Minangkabau berpendidikan Belanda, berasal dari kelas menengah bawah yang

29 Selama akhir 1975, Krausse ("The Kampungs of Jakarta" hal. 77-8) menemukan bahwa 80% penduduk Jakarta hidup di luar jangkauan pelayanan umum yang pokok.

tinggal dalam komunitas berbatasan yang lebih maju, mendorong dirinya sendiri untuk "mengangkat" penduduk kampung dalam lingkungan Ibu Innah. Suaminya mempunyai pendapatan cukup dari perdagangan tekstil di pasar Tanah Abang, dengan demikian ia memiliki waktu dan sumber daya secukupnya untuk mengabdikan diri pada pekerjaan suka rela. Tidak jelas mengapa ia termotivasi seperti itu. Ia dinyatakan gila oleh teman-teman dan sanak-saudaranya yang lebih kaya. Ia tampaknya didorong baik oleh keinginan individual untuk menolong orang miskin maupun keinginan untuk mendapatkan penghargaan masyarakat.

Pada pertengahan sampai akhir tahun 1960-an, rumah ibadah merupakan fokus dari kegiatan organisasi Ibu Ros. Sebelumnya rumah ibadah itu hanya berupa gubug yang terhimpit di antara gubug-gubug yang hampir tidak ada orang pernah mengunjunginya. Ibu Ros mendorong kaum perempuan kampung untuk membersihkan dan mendirikan jemaah pengajian wanita mushollah dengan mengundang penceramah dari luar. Bersama dengan kaum perempuan kelas menengah lainnya ia mendirikan sekolah, di sebuah bangunan kosong di dekat rumahnya untuk anak-anak yang paling miskin dalam lingkungan itu. Ia dapat menolong dan mendorong beberapa orang tua yang miskin seperti Acang, Tuti, Juria dan Karsinah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Keyakinan, pendidikan, dan kontak-kontaknya memungkinkan untuk mengatur biaya pendaftaran pada sekolah-sekolah negeri bagi anak-anak yang pintar setelah dilepas dan menyelesaikan sekolah dasarnya, karena orang-orang tuanya tidak mampu membayar.

Pada pertengahan tahun 1970-an, kegiatan Ibu Ros diakui oleh Departemen Kesejahteraan Sosial. Ia diberi kompor minyak tanah dan mesin jahit untuk disalurkan kepada keluarga-keluarga miskin dalam lingkungan Ibu Innah. Seperti halnya Peking, Juria dan Karsinah, yang menerima pemberian ini tergetar hatinya, tetapi mereka yang tidak menerima merasa iri hati dan menuduh Ibu Ros bersikap pilih-kasih. Dengan demikian, sumber daya dan penghargaan yang meningkat atas kerja sosial Ibu Ros yang diberikan oleh penguasa telah meningkatkan ketegangan di dalam lingkungan Ibu Innah.

Selama sepuluh tahun hubungan Ibu Ros dengan Departemen Kesejahteraan Sosial berkembang, para penduduk kampung semakin menganggapnya lebih mewakili kepentingan pemerintah dari pada dirinya sendiri. Ia adalah salah satu dari tokoh-tokoh ter-

kemuka di daerah itu yang telah berperan dalam perbaikan kampung untuk mengatasi kesulitan-kesulitan bagi mereka yang kurang mampu dalam komunitas itu, dan mereka yang terpaksa membangun kembali rumahnya setingkat dengan jalan gang yang baru. Ia mendorong kaum perempuan kampung untuk menghadiri klinik keluarga berencana tetapi karena tingkah lakunya yang kasar telah mengasingkan mereka. Ia mendatangi rumah-rumah mereka dan menganjurkan mereka menggunakan kontrasepsi meskipun mereka tidak punya anak, karena terlalu tua atau sudah melewati usia untuk mampu beranak. Kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa kursus-kursus memasak, menjahit dan merias yang diselenggarakan Ibu Ros, adalah hanya untuk kelas menengah berduit dan waktu luang dan tidak untuk para penduduk kampung miskin yang terlalu banyak bekerja seperti diri mereka sendiri. Mereka merasa bahwa Ibu Ros memaksakan program-program yang tidak cocok dengan kebutuhan mereka. Maka hanya ada satu atau dua orang yang mengikuti kursus Ibu Ros. Secara pribadi ia menceritakan rahasianya bahwa kaum perempuan kampung kekurangan motivasi, ketekunan atau kemajuan untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Penghargaan negara atas kerja kesejahteraan Ibu Ros semakin meningkat, sebaliknya dari kampung tampaknya malah menimbulkan keretakan antara dia dan penduduk kampung. Karena kesibukan duniawinya yang lain di sekitar kota, maka ia dituduh melalaikan rumah ibadah. Ibu Cum, isteri Burhanuddin, seorang anggota keluarga Innah, mengambil alih peran Ibu Ros sebagai kepala perkumpulan kaum perempuan Islam. Para anggota kelompok kerabat Innah, terutama ketua RT, menuduh Ibu Ros berhubungan dengan orang-orang Kristen. Mereka mungkin merasa bahwa kegiatan-kegiatan duniawinya mengancam landasan kekuasaan dalam lingkungan itu. Mereka menuduhnya sebagai kaki tangan pemerintah dan secara sembunyi-sembunyi memaksakan nilai-nilai non-Islami, keluarga berencana, pendidikan kaum perempuan dan anak-anak kampung.

Desas-desus permusuhan beredar tentang Ibu Ros. Diceritakan bahwa dua orang anak perempuannya telah hamil sebelum menikah sementara anak laki-lakinya pecandu obat bius. Ia dianggap tidak pantas menasehati penduduk kampung jika ia tidak dapat mendidik anak-anaknya sendiri. Ibu Ros mengatakan kepada saya bahwa pengabdiannya kepada masyarakat kampung telah men-

datangkan keruntuhan bagi anak-anaknya, bukan mengangkat para penduduk kampung. Anak-anaknya telah terseret ke dalam kehinaan oleh lingkungan kampung. Pernyataan tanpa bukti lainnya adalah bahwa guru jarang menghadiri sekolah yang telah diorganisasikan Ibu Ros, dengan begitu anak orang miskin hanya menjalankan tugas-tugas rumah tangga Ibu Ros, bukannya pekerjaan sekolah. Ia dituduh mengantongi dana dari Departemen Kesejahteraan Sosial yang seharusnya untuk masyarakat. Tetapi seharusnya diperhatikan bahwa Ibu Ros hidup secara hemat dan tidak ada bukti tentang hal di atas.

Karena dikecewakan oleh penduduk kampung dan merasa senang atas penghargaan yang diperoleh dari penguasa kota untuk hasil kerjanya, Ibu Ros terdorong lebih jauh dan lebih jauh lagi dari penduduk di situ yang semula ingin ditolongnya. Pada tahun 1980-an, ia menggunakan waktu yang lebih banyak untuk pertemuan-pertemuan sosial dengan isteri-isteri lurah, wali kota dan gubernur daripada dengan para penduduk kampung. Seperti halnya Octavia Hill di London, pada akhir tahun 1800-an, ia menyalahkan orang miskin atas kemiskinan mereka sendiri.[30] Ia telah mencoba untuk mendidik kembali mereka tetapi gagal karena ia tidak sepenuhnya menyadari ketidakmenentuan basis eknomi kehidupan mereka.

Meskipun Ibu Ros kelihatannya gagal untuk memperbarui lingkungan itu, tetapi ia telah memainkan peran tertentu dalam mengubah persepsi para penduduk kampung tentang pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 1980 ia telah mempertunjukkan sebuah film mengenai proses kehamilan dan kelahiran anak yang memiliki pengaruh besar pada kaum perempuan kampung, meskipun sebelumnya banyak di antara mereka yang tidak memahami proses itu. Upaya saya sendiri untuk mengantar para penduduk kampung ke poliklinik mungkin membuka jalan bagi yang lain untuk mengikuti. Setelah satu orang menerima pengobatan yang murah dan berhasil, pesan itu menyebar dari rumah ke rumah sehingga penduduk yang lain pun segera mengikuti.

Kepemimpinan dalam Lingkungan yang Berbatasan

Masalah kepemimpinan dan organisasi di lingkungan Ibu Innah dapat disoroti melalui perbandingan dengan situasi yang sa-

30 Stedman-Jones *Outcast* London.

ngat berbeda dalam lingkungan Ibu Cia yang berbatasan. Di tempat itu dua orang yang relatif kaya, berpendidikan dan taat beragama lebih berhasil daripada Ibu Ros ataupun Cecep dalam mengorganisasi dan memimpin penduduk kampung. Sejak pertengahan tahun 1960-an, Haji Endi dan kemudian anaknya, Haji Eddy, mencoba untuk memperbarui lingkungan orang miskin. Meskipun sebenarnya mereka mampu untuk tinggal di pinggiran kota untuk kelas menengah yang lebih kaya, namun mereka dengan sadar memilih tinggal di kampung karena mereka menghargai keakrabannya dan sikap-sikap penduduknya yang sama dengan di desa. Dibandingkan dengan para penduduk kampung lainnya, mereka relatif merupakan tuan tanah yang lebih makmur dari Bogor. Mereka ingin menyebarkan ajaran Islam dan seperti Ibu Ros yang memulai dengan memperbaiki tempat ibadah dan mendirikan kelompok pengajian Qur'an dari kalangan pria dan wanita pada akhir tahun 1960-an.

Para tetangga miskin segera mulai meminta nasehat dan bantuan dan Haji Endi dipilih untuk bertindak sebagai ketua RW dan Haji Eddy sebagai ketua RT. Mereka memberi pinjaman uang dan pelayanan administratif secara cuma-cuma dan sering menolak pembayaran jika ditawarkan.[31] Untuk menolong mengatasi krisis-krisis secara periodik yang menimpa rumah tangga dalam lingkungan itu, mereka mendirikan lembaga kredit yang berputar sehingga semua orang dapat menyumbang. Selain itu, lima orang anggota yang lebih kaya di kampung dikerahkan untuk mencari sumbangan dari luar daerah, untuk orang miskin dalam lingkungan itu. Ketika sebuah rumah tangga mengalami kesulitan sungguh-sungguh, mereka dapat meminjam dana dari dana umum ini tanpa membayar bunga. Juga di kumpulkan dana untuk anak-anak yatim dan janda-janda, sehingga setiap tahun, pada saat Lebaran, mereka menerima hadiah makanan, uang dan pakaian. Terkadang, barangkali banyak sekali dalam setahun, anak-anak diajak rekreasi ke Bogor tempat tinggal Haji Endi. Sebagian besar anak-anak belum pernah pergi ke luar kota oleh karena itu bergetar hati

31 Ini sesuai dengan penemuan-penemuan Logsdon ("Leaders and Followers in Urban Neighbourhoods" hal. 172-3) bahwa daerah pinggiran yang lebih kaya di mana RT dan RW merasa malu untuk menerima pembayaran dari pelayanan administratif. Meskipun beberapa rumah tangga dalam lingkungan Ibu Cia lebih kaya daripada dalam lingkungan Ibu Innah, namun rumah-rumah tangga yang lain kebanyakan lebih miskin.

mereka dengan pengalaman semacam itu. Dana dikumpulkan untuk membeli barang tembikar dan kursi untuk pesta-pesta yang kemudian dapat digunakan oleh para anggota masyarakat ketika diperlukan. Bazar diselenggarakan untuk merayakan tahun baru dan memamerkan berbagai keterampilan dari para pengrajin lingkungan itu. Beberapa orang memasak makanan istimewa, yang lain menganyam keranjang, membuat lemari kayu atau menjahit baju. Barang-barang kerajinan dipajang untuk dijual di sepanjang gang utama yang membentang di depan rumah Haji Endi dan *lurah* diundang untuk menghadiri.

Ketika kaum muda dalam komunitas itu mulai minum-minuman keras, mencuri, dan membuat kegaduhan pada tengah malam, Haji Endi membentuk organisasi kaum muda. Ia mengangkat orang yang telah melakukan kejahatan sebagai pemimpin, dengan mengatakan bahwa ia hanya akan belajar dengan diberikan tanggung jawab. Untuk mengisi kesibukan pemuda dan mengajari mereka untuk berkendaraan, maka sebuah mobil bekas disediakan oleh salah satu penyokong yang kaya dalam komunitas itu. Bagaimanapun, mobil itu segera mengalami kerusakan, dan kaum pemuda kembali menjadi gangguan.

Pada awal sampai pertengahan tahun 1970-an, perjudian menjadi kegemaran. Banyak orang secara bebas mengakui bahwa mereka menghamburkan pendapatan sehari-harinya dengan harapan untuk memperoleh rezeki *nomplok* secara tiba-tiba. Jika mereka berhasil mendapatkan uang itu, maka segera dibelikan minuman dan makanan untuk teman-temannya. Yang paling mengejutkan penduduk kampung adalah anjuran Haji Endi, bahwa pemimpin komplotan penjudi akan menggantikannya sebagai kepala kampung. Sekali lagi, dasar pemikirannya adalah bahwa hanya dengan memberikan posisi tanggung jawab kepada tokoh yang telah melakukan kejahatan, ia dapat berhati-hati untuk membatasi dan menghentikan dirinya dan orang lain untuk berjudi. Pendekatan ini dapat berjalan baik.

Informasi saya tentang upaya kepemimpinan Haji Endi dan Haji Eddy dan organisasi komunitas sebagian besar berasal dari diri mereka sendiri atau teman dekat mereka dan mungkin memberikan gambaran yang terlampau bagus mengenai apa yang sebenarnya telah mereka capai. Para pemuda, para janda dan anak-anak yatim, yang tinggal di dekat rumah Haji Endi dan Haji Eddy, merasa telah banyak ditolong dalam mengatasi berbagai kesulitan.

Bagaimanapun, bagi penduduk yang lebih jauh dari rumah itu, upaya mereka kurang dirasakan. Dalam jarak kurang dari 100 m, Endi dan Eddy hampir tidak dikenal, kecuali ketika mereka kembali dari perjalanan haji ke Mekah dan setiap orang melintasi gang itu untuk menyampaikan selamat datang kepada mereka.

Kastranadi, seorang penjudi yang telah diangkat menjadi kepala kampung melaksanakan pekerjaannya dengan cukup baik dan mendapatkan penghormatan dari masyarakatnya. Secara tetap ia menyediakan berbagai kebutuhan para tetangganya karena ia mendapatkan mata pencariannya dari sebuah warung yang diusahakan di sekitar tempat itu. Ia dapat mengetik dan membuat karya tulis yang diperlukan, karena pengalaman kerja sebelumnya di Departemen Tenaga Kerja. Bersama Haji Endi, ia semakin melibatkan diri dalam rumah ibadah dan membantu untuk mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat itu. Tetapi ada percobaan yang terbukti di atas keberanian setelah itu, kemampuan-kemampuan intelektual dan kepemimpinannya.

Tanda-tanda Perubahan

Sejak dahulu para anggota lingkungan Ibu Innah merasa senang berjauhan dengan pemerintah. Mereka memilih para pemimpin berdasarkan kemampuan mereka untuk menjauhkan masyarakat dari pemerintah. Namun selama tahun 1970-an, isolasi tadi dapat dibuka. Kekuasaan negara menjadi lebih nyata dan makin menembus lebih jauh ke dalam kehidupan penduduk kampung. Mereka semakin merasakan ketidakberdayaan untuk menahan penetrasi ini. Upaya-upaya pemerintah untuk menutup kota bagi para pendatang baru dan untuk membatasi pedagang kaki lima di pinggiran jalanan, membuat kehidupan mereka lebih sulit dan tidak aman. Hanya menjelang akhir tahun 1970-an para penduduk kampung mulai memahami beberapa manfaat program semacam itu seperti perbaikan kampung, kesehatan dan pendidikan.

Program-program pembangunan kampung, di lingkungan Innah baru tercapai ketika pimpinan lokal dilangkahi. Setelah tahun 1978, pemerintah mulai menggunakan radio dan televisi sebagai saluran alternatif untuk menyampaikan informasi tentang program kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1978 ada tanda-tanda bahwa sikap penduduk kampung berubah, terutama berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Kalau sebelumnya berkonsultasi ke

dukun tradisional, maka kemudian berobat di poliklinik pemerintah yang murah menjadi suatu norma. Kalau sebelumnya masuk ke sekolah Islam, maka tiba-tiba sekolah negeri dipandang lebih bagus, karena memiliki standar yang lebih tinggi dan bayarannya lebih murah. Sebagian besar penduduk kampung kini memandang pendidikan sekolah sebagai kebutuhan pokok, bukan lagi kemewahan. Pada tahun 1980, bahkan keluarga yang paling miskin ditetapkan untuk memberikan pendidikan paling tidak untuk beberapa anaknya. Sebagian besar orang tua mencoba untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah negeri dan jika gagal baru masuk ke sekolah swasta atau sekolah Islam.

Penyebab utama pergeseran sikap penduduk kampung yang mendadak ini adalah televisi. Pada tahun 1978, iklan komersial yang mendominasi televisi Indonesia dilarang dan ada upaya menyajikan program-program yang lebih mengandung pendidikan. Pemerintah menggunakan media itu untuk mempromosikan pengendalian kelahiran, kesehatan dan perbaikan kampung dan program-program lain. Hal ini menyadarkan para penduduk kampung terhadap pentingnya melek-huruf dan terhadap adanya pekerjaan yang tidak pernah mereka impikan. Para penduduk kampung tidak hanya memperoleh informasi-informasi dari pemerintah tetapi juga berita-berita dari luar negeri. Mereka akhirnya mampu membangun konsepsi yang lebih jelas mengenai Indonesia dan dunia yang tersusun dari berbagai negara yang beraneka ragam. Mereka mempelajari berita-berita itu dan melihat perbedaan di antaranya. Meskipun mereka tetap ragu-ragu dan mencurigai pemerintah, namun lambat laun mereka mulai mempelajari pelayanan yang diberikan pemerintah, bahkan kepada para penduduk kampung seperti diri mereka sendiri.

Para pemimpin informal juga membantu menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada rakyat, tetapi dalam lingkungan Ibu Innah, upaya seorang pekerja sukarela untuk kesejahteraan masih dihalangi oleh para pemimpin lokal. Selanjutnya, dari sudut pandangan penduduk kampung, ketika Ibu Ros menjadi semakin memihak pada pejabat, tidak sepenuhnya jelas bahwa dalam hatinya masih peduli terhadap rakyat kecil. Sebaliknya, kerja sama antara kepemimpinan yang dipilih secara formal dan kepemimpinan informal dalam lingkungan Ibu Cia menghasilkan organisasi atau tindakan komunitas yang lebih efektif. Hal ini khususnya

tampak jelas dalam pengelolaan berbagai dana untuk menolong orang miskin dan kegiatan-kegiatan keislaman dan tempat ibadah.

Jika penduduk kampung ingin memanfaatkan program-program pemerintah dan ingin mengurangi rasa ketidakamanannya, maka mereka memerlukan kepemimpinan lokal yang efektif. Tetapi kepemimpinan lokal yang secara sosial sadar, prihatin dan aktif sebagaimana yang timbul dalam lingkungan Ibu Cia memang tidak lazim. Bahkan secara sinis seorang pemimpin mempertunjukkan kemurahan hati, keprihatinan dan tanggung jawab untuk kepentingan umum, namun penduduk kampung masih selalu mencurigai motif-motifnya. Mereka tidak mempercayai para pemimpinnya dan sebagian besar menganggap bahwa mereka didorong oleh kemajuan untuk membesarkan kekuasaan dan keuntungan untuk diri sendiri.

Tanpa para pemimpin yang dipercaya serta dinamis, maka penduduk kampung merasa sangat sulit untuk bekerja sama di antara mereka sendiri. Mereka dibingungkan oleh sistem politik dan tidak tahu ke mana mereka mengadukan keluhan-keluhannya, kepada departemen pemerintahan atau pejabat yang mana dapat dihubungi untuk mengungkapkan masalah-masalah mereka. Mereka kekurangan contoh yang diperlukan di instansi-instansi yang tinggi yang dapat memprakarsai, mengimplementasikan atau mengubah kebijakan. Hal ini menjadi jelas pada tahun 1981, ketika komunitas itu terancam oleh penggusuran. Sikap-sikap seperti penjahat yang kejam, mementingkan diri sendiri dan rakus semacam Cecep mengalahkan kejujuran dan keberanian moral yang dicontohkan oleh orang-orang seperti Haji Endi dan anaknya. Sebagaimana akan kita lihat, meskipun ada beberapa pemimpin yang memikirkan kepentingan umum, namun ketika tiba saatnya untuk membuat keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi kehidupan dan kematian komunitas itu, hanya para *bajingan*lah yang dapat menguasai.

5
Penggusuran (1981)

Penetrasi pemerintah berpuncak pada lenyapnya Kebun Kacang sebagai sebuah kampung. Pada tahun 1981 lingkungan Ibu Innah dan Ibu Cia, yang terdiri dari 736 rumah tangga dan 3.500 penduduk, digusur. Untuk pertama kali penduduk yang bermukim di daerah itu bersama-sama berjuang melawan kehancuran yang akan menimpa kediaman mereka, benteng keamanan yang terakhir melawan pihak yang memusuhi dan keadaan yang cepat berubah. Karena ketidakpercayaan yang kuat dan lemahnya kepemimpinan dan organisasi, maka kesatuan ini tidak bertahan lama. Pada akhirnya, komunitas itu digusur sesuai dengan perencanaan pemerintah walaupun ada perlawanan dari penduduk kampung.

Proyek pemukiman kembali merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memecahkan masalah besar mengenai "perkampungan kumuh." Pertanyaan mendasar yang muncul adalah seberapa besar pemerintah campur tangan dalam penyediaan perumahan bagi golongan miskin. Di satu pihak, pemerintah dituduh tidak terlalu banyak berbuat dan mengabaikan orang miskin. Di pihak lain, pemerintah diserang karena campur tangannya yang keliru, akibatnya biaya hidup meningkat dan prakarsa penduduk dihancurkan. Para perencana kota, yang melihat kota dari perspektif penampilan fisik, terganggu oleh pemandangan perkampungan kumuh. Mereka melihatnya sebagai wilayah yang tak tertata, tidak sedap dipandang dan tidak ada fasilitas-fasilitas pendukung. Jawabannya adalah meratakan perkampungan kumuh dan menggantikannya dengan perumahan yang berstandar lebih tinggi. Tetapi penggusuran komunitas-komunitas perkampungan kumuh

itu meskipun diganti dengan flat-flat, sering tidak memadai dan semata-mata memindahkan masalah perumahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Penduduk yang lebih kaya cenderung pindah ke apartemen-apartemen baru, sementara kelompok orang miskin pindah ke kantong-kantong perkampungan kumuh di dalam kota yang masih tersisa, atau menciptakan wilayah kota gubug baru di pinggiran kota.

Para perencana dan insinyur kota memiliki perspektif yang sangat berbeda mengenai perkampungan-perkampungan kumuh dari komunitas yang tinggal di dalamnya. Bagi perencana kota, perkampungan kumuh adalah perangkap kemiskinan, sementara bagi penduduk kampung, perkampungan kumuh adalah tempat-tempat yang mengandung harapan. Para perencana itu memandang komunitas ini sebagai perusak pemandangan. Mereka, terutama, terganggu oleh kontras antara kota modern yang bertingkat tinggi dan rumah-rumah yang rendah, tidak teratur, dan penuh sesak. Golongan miskin di perkotaan sebaliknya memandang lingkungannya sebagai kampung halaman. Mereka telah mendiami selama bertahun-tahun dengan membangun dan memperbaiki rumah mereka secara berhati-hati dari bahan-bahan apapun yang dapat mereka peroleh di tempat sampah atau dibeli. Kampung halaman mereka adalah tempat perlindungan dari sebuah dunia yang cepat berubah dan selalu mengancam. Mereka menghargai tidak hanya kampung halamannya, tetapi juga jaringan sosial yang secara berangsur-angsur berkembang. Bagi kebanyakan penduduk kampung, peluang untuk memperoleh penghasilan dalam lingkungan itu merupakan satu-satunya, meskipun tidak menjamin, namun merupakan sumber mata pencarian.

Keputusan para perencana kota Jakarta untuk meratakan Kebun Kacang didasarkan pada persepsi mereka mengenai "perkampungan kumuh." Para perencana itu pura-pura menginginkan penduduk kampung yang miskin dipindahkan ke dalam flat-flat yang sepenuhnya tercukupi di pusat kota dekat tempat kerja mereka. Ternyata proyek itu mengakibatkan kehancuran kampung halaman dan penggantian kerugian mereka dengan flat-flat yang kurang dari seperempat jumlah penduduk kampung merasa mampu untuk membayar. Sisanya yang lebih miskin, pindah ke pinggiran kota, jauh dari kampung halaman mereka dulu. Proyek itu menggambarkan ketidakcocokan antara maksud-maksud baik dari kebijakan dan dampak terakhirnya.

Evolusi Kebijakan Perumahan

Program Perbaikan Kampung yang diprakarsai pemerintah kota Jakarta pada tahun 1969 merupakan upaya pertama sejak kemerdekaan yang berurusan dengan masalah yang mengagumkan yaitu memperbaiki lingkungan golongan yang paling miskin di Jakarta dan daerah-daerah yang paling padat penduduknya. Penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang lebih baik kadang-kadang diikuti oleh masuknya investasi swasta dalam perbaikan rumah. Meskipun sudah diberikan penerangan, program itu memiliki banyak kekurangan dan tidak mampu memperbaiki rumah-rumah kecil yang penuh sesak atau menyediakan fasilitas-fasilitas yang lebih baik. Program itu lebih banyak memperbaiki jalan di gang-gang dan saluran-saluran daripada rumah-rumah penduduk kampung atau kebutuhan-kebutuhan mereka yang paling mendesak, yaitu air bersih dan sanitasi.

Pada tahun 1974 pemerintah Indonesia mendirikan Perumnas untuk menolong menyediakan perumahan berbiaya rendah di seluruh Indonesia.[1] Dari pertengahan tahun 1970-an, Perumnas memulai program pembangunan rumah-rumah "inti." Ini merupakan rumah seluas 21 sampai 36 m^2 di atas tanah 90 m^2, yang masing-masing disediakan air, sanitasi dan listrik. Di Jakarta unit-unit itu didirikan di pinggiran kota dan terutama dicadangkan untuk pegawai pemerintah dan militer. Beberapa unit kemudian ditawarkan kepada masyarakat umum, tetapi karena terletak jauh dari tempat-tempat kerja, maka rumah-rumah itu memiliki daya tarik terbatas bagi kelompok-kelompok berpendapatan rendah, yang tujuannya semula diperuntukkan bagi mereka. Dari tahun 1979 pemerintahan kota Jakarta, dan kemudian Perumnas, mulai menyelidiki pilihan-pilihan lain. Pada bulan Februari tahun 1981 Perumnas menyelesaikan bangunan 960 flat di daerah Tanah Abang Jakarta. Harga flat-flat ini dapat diperoleh hanya oleh keluarga-keluarga dengan penghasilan rata-rata di atas Rp 100.000,- (480 liter beras) per bulan, sedang paling sedikit 80% dari penduduk kota tidak termasuk di dalamnya.

---

1 *Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional*. Perusahaan ini ditunjuk oleh World Bank sebagai National Urban Development Corporation (NUDC). (World Bank) Fourth Urban Development Project, Indonesia, Staff Appraisal Report (Washington D. C., 1981) hal. 23-5.

Sesuai dengan Instruksi Presiden, pada bulan Maret tahun 1981 Perumnas diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum untuk memulai program baru yang akan memenuhi kelompok berpendapatan rendah di kota.[2] Rencana yang dimaksud adalah memukimkan kembali komunitas kampung yang miskin di pusat kota ke dalam flat-flat di atas lahan tempat mereka sudah mendiaminya, dekat dengan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Kebun Kacang dipilih sebagai tempat untuk proyek percobaan itu.

Kebun Kacang ditetapkan sebagai daerah berpendapatan rendah. Daerah itu tidak memiliki fasilitas air atau tempat pembuangan kotoran dan tempat pembuangan sampah. Daerah itu menjadi sasaran banjir selama musim hujan, dan merupakan salah satu dari beberapa daerah di pusat kota yang tidak diuntungkan dengan adanya Program Perbaikan Kampung. Rumah-rumah yang ada tersusun terlalu padat dan salah satu Program Perbaikan Kampung yaitu pelebaran jalan di gang itu akan menggusur banyak rumah disekitarnya. Dengan perbaikan kampung ada jaminan sepuluh tahun tidak dibongkar, tetapi daerah itu tidak memperoleh jaminan tersebut, walaupun daerah itu perlu diperbaiki. Hanya 12% rumah yang memiliki hak legal.[3]

Pembenaran resmi mengenai program itu adalah bahwa daerah kumuh yang tidak sehat dan mudah terbakar akan digantikan oleh perumahan dan fasilitas yang jauh lebih baik. Program itu akan meningkatkan standar penghidupan penduduk dan mengurangi ketidakmerataan sebagaimana digariskan dalam Instruksi Presiden untuk Repelita III (1979-1982). Tetapi mungkin alasan yang paling mendesak untuk memilih Kebun Kacang, adalah bahwa daerah itu sangat mengganggu pemandangan. Gedung-gedung perkantoran, kedutaan-kedutaan dan hotel-hotel yang berada di sepanjang jalan utama Jalan Thamrin, semuanya memandang rendah terhadap daerah itu. Para perencana merasa malu

---

2 Komunikasi secara lisan dengan para pejabat Ibu Kota Jakarta. Para pejabat DKI dan Perumnas diperintahkan untuk menyelesaikan flat-flat sebelum pemilihan Presiden bulan Mei 1982.

3 Data diberikan Lurah Kebun Kacang kepada Gubernur Jakarta dan diteruskan ke Perumnas (Data Wilayah RW 01 dan RW 03 Kelurahan Kebun Kacang, untuk Rencana Pengembangan Flat Perumnas tanggal 11 dan 25 April 1981). Catatan pemerintahan daerah dianggap tidak akurat. Pola-pola kedudukan tetap atas tanah begitu rumit sehingga sulit untuk menetapkan hak dari penduduk kampung.

oleh ketidaksesuaian ketinggian dan penampilan antara rumah-rumah kumuh di kampung itu dan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi di sekitarnya. Disamping itu, program perbaikan lokasi seperti itu akan membantu menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Indonesia seperti halnya Hong Kong dan Singapura, peduli terhadap golongan miskin di perkotaan.

Para perencana kota percaya bahwa lahan di pusat kota yang mahal itu tidak akan lebih lama dapat diduduki oleh "perkampungan kumuh." Pada masa lampau, Kebun Kacang diabaikan oleh pemerintah karena terletak di atas lahan rawa-rawa yang membentang rendah dan sering banjir. Namun dengan semakin berkurangnya dan mahalnya ruang di pusat kota, daerah itu mulai dipandang sebagai lokasi utama. Para pejabat merasa bahwa dengan membangun flat-flat yang bertingkat banyak, lahan itu akan digunakan secara lebih efisien dan memungkinkan bagi kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Dengan perumahan di dalam kota yang lebih padat, pengurangan jumlah penduduk pusat kota, melintang-pukangnya daerah pinggiran kota maka kemacetan lalulintas yang ditimbulkan oleh penduduk yang pulang pergi kerja setiap hari akan berkurang.

Pelaksanaan Program

Penduduk kampung pertama kali mendengar program itu pada bulan Mei 1981, ketika ada desas-desus bahwa Kebun Kacang terancam penggusuran. Tak seorang pun mengetahui dari mana informasi itu datang atau apakah harus mempercayainya. Desas-desus itu beredar selama bertahun-tahun di sekitar komunitas itu. Sebagian besar penduduk kampung telah lama mengetahui bahwa suatu saat lingkungannya akan ditimpa nasib serupa dengan komunitas-komunitas lain didekatnya yang dipaksa untuk memberikan jalan bagi pembangunan gedung-gedung perkantoran bertingkat banyak. Tetapi penduduk kampung membuang spekulasi semacam itu dari pikirannya. Kemudian pada bulan Juli tahun 1981, hari demi hari, sebuah helikopter terlihat melayang-layang di atas daerah itu. Penduduk kampung menganggap ada pembuatan film untuk televisi. Mereka tidak menyadari bahwa kampung halaman mereka sedang difoto dan dipeta untuk program pemukiman kembali oleh pemerintah.

Pada bulan Agustus tahun 1981, semua penduduk kampung diminta untuk menghadiri pertemuan massal dalam lingkungannya dan diberi penerangan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Direktur Jenderal Perumahan, Walikota Jakarta Pusat dan para pejabat tinggi dari pemerintah Kota Jakarta dan Perumnas, mengenai rencana pemerintah untuk menggusur kampung halaman mereka dan membangun flat-flat. Para pejabat itu membentangkan peta-peta, diagram-diagram dan model-model mengenai unit-unit yang diusulkan. Mereka menegaskan bahwa hal itu bukan merupakan program penggusuran tetapi "peremajaan" sebuah kata yang tidak dikenal para penduduk. Mereka diberi tahu bahwa semua penduduk kampung yang kehilangan kampung halaman mereka akan berhak atas lantai dasar atau unit lantai pertama. Flat-flat itu akan terdiri dari empat tingkat dan berukuran 18 sampai 36 m^2. Mereka akan sepenuhnya dilengkapi dengan air ledeng, listrik, gas dan pembuangan kotoran. Para pejabat tidak menyebutkan besarnya angsuran bulanan, tetapi memberi syarat bahwa angsuran itu akan sama dengan angsuran di flat-flat Tanah Abang. Uang muka memang harus dibayarkan paling sedikit 5% dari seluruh biaya flat itu. Unit-unit yang tidak diambil oleh penduduk kampung dapat disewakan kepada para mahasiswa untuk membantu menutupi biaya.

Setelah pertemuan itu, teror dan panik segera merebak ke seluruh kampung itu. Meskipun para pembuat kebijakan menjanjikan bahwa mereka akan dimukimkan kembali, namun penduduk kampung menyadari arti penggusuran itu. Mereka menyangsikan maksud baik pemerintah dan yakin bahwa berbicara tentang flat-flat hanyalah cara untuk menyenangkan mereka agar keluar dari daerah itu. Mereka mengetahui bahwa program-program pemerintah pada masa lampau selalu berada diluar kemampuan keuangan mereka dan terutama dimaksudkan untuk orang kaya dan kelas menengah. Jika proyek ini benar-benar dimaksudkan untuk mereka, mengapa para mahasiswa disebut-sebut sebagai penyewa di kemudian hari?

Meskipun ada penjelasan-penjelasan resmi, namun sebagian besar penduduk kampung tidak berhasil memahami sifat flat-flat itu. Sebagian besar mereka sangat takut atau terlalu sibuk untuk menghadiri pertemuan massal. Beberapa pemimpin lokal gagal untuk memberitahukan penduduk kampungnya bahwa pertemuan akan diselenggarakan. Kebanyakan dari mereka yang meng-

hadiri pertemuan itu sangat enggan untuk mendekati grafik-grafik, model-model dan peta-peta yang digelar di hadapan mereka. Mereka memperhatikan dan mempelajarinya secara terbalik atau kesamping. Mereka sebelumnya tidak pernah menghadiri suatu pertemuan massal yang diartikan sebagai cara untuk menyampaikan informasi secara langsung yang mempengaruhi nasib mereka, atau tidak pernah melihat ataupun menginterpretasikan diagram-diagram semacam itu. Dengan diliputi oleh rasa takut yang dalam, mereka merasa diri tidak dapat berkonsentrasi. Setelah pertemuan itu, mereka mempercayakan kepada tetangga yang kurang paham untuk menjelaskan apa yang telah dikatakan, dan informasi itu menyimpang, karena telah melewati dari mulut ke mulut. Kebanyakan mereka duduk di rumah mereka, lumpuh, tidak mengetahui apa yang akan diperbuat, kepada siapa bertanya, atau apa yang harus dipikirkan.

Seandainya mereka ditanya, penduduk kampung akan menjelaskan bahwa perumahan bukan merupakan masalah utama mereka. Sebagian besar dari mereka sudah memiliki rumah di pusat kota dan selain dari perawatan atau perbaikan yang kadang-kadang dilakukan, mereka tidak harus membelanjakan uang untuk akomodasi. Selama bertahun-tahun, sebagian besar penduduk telah memperbaiki rumah-rumah mereka sendiri. Bahkan di antara mereka yang menyewa, sebagian besar telah membayar harga sewa tetap selama lebih dari dua puluh tahun dan biaya ini kurang dari 5% dari pendapatan bulanannya. Penduduk kampung tidak terlalu khawatir akan standar rumah-rumah mereka yang rendah atau kurang fasilitas. Meskipun fasilitas mereka terbatas dan mereka harus mengangkut atau membayar seseorang untuk mengantarkan air, minyak tanah atau apa saja yang mereka butuhkan ke rumah setiap hari namun fleksibilitas sistem ini memungkinkan mereka untuk mengurangi pengeluaran, kapan pun mereka kehabisan uang. Mereka hanya membeli sedikit air atau minyak tanah, atau menunda pembayaran sampai tanggal berikutnya. Sebagian besar penduduk tidak memiliki air ledeng, gas atau kakus di dalam rumah dan tidak menghargai hal-hal yang menyenangkan hidup mereka. Mereka khawatir mengenai biaya tambahan untuk fasilitas-fasilitas ini.

Ketiadaan pekerjaan yang terjamin dan pendapatan memadai sangat mengkhawatirkan penduduk kampung. Dari satu bulan ke bulan berikutnya, mereka tidak tahu apakah pekerjaan mereka

masih akan tetap berlangsung. Dari hari ke hari berikutnya mereka tidak tahu seberapa banyak upah yang akan mereka terima. Mereka tidak akan pernah memastikan jumlah pendapatan tertentu untuk satu bulan di muka. Kini mereka diminta untuk memastikan pembayaran bagi perumahan dan fasilitas-fasilitas yang dapat mencapai 50% atau bahkan lebih dari pendapatannya yang sekarang, untuk dua puluh tahun kemudian. Mereka juga tidak pernah membayangkan untuk membayar sedemikian banyak.

Penduduk kampung juga khawatir tentang bentuk flat yang diusulkan dan peraturan penggunaannya. Mereka curiga, bahwa sekali flat-flat itu dibangun, pemerintah akan melarang mereka mengoperasikan industri rumah tangga dan perdagangan di rumah. Mereka tidak akan lagi memiliki pekerjaan dan penghasilan yang sementara, yang mereka lakukan di kampung. Tanpa penghasilan yang memadai untuk makan, mereka akan merasakan banyak kesulitan untuk membayar flat. Ketika meminta angsuran flat secara bulanan para petugas pemerintah tidak akan peduli dengan kesulitan mereka. Jika sebuah rumah tangga tidak dapat membayar maka dapat diusir dari unit itu.

Jika rakyat berpikir tentang rumah, mereka berpikir tentang berapa luasnya rumah yang mereka punyai. Mereka lebih menyukai ruang tinggal lebih luas daripada fasilitas yang lebih bagus. Ukuran flat-flat yang diusulkan seluas 18 m^2 lebih kecil daripada 70% rumah-rumah kampung yang ada.[4] Dalam rumah-rumah tangga yang berisi sampai 15 orang, di mana anak-anak yang sudah nikah dan sanak saudara dari desa sering datang untuk tinggal, flat-flat ini memungkinkan per orang menempati ruang kurang dari 1,5 m^2. Akomodasi tidak akan lagi tersedia bagi keluarga-keluarga yang banyak atau tamu-tamu dari desa.

Penduduk kampung memiliki banyak keprihatinan lain. Mereka yang sakit dan tua khawatir bagaimana mereka akan berjalan menaiki tangga tinggi untuk mencapai unit-unit di atasnya, yang paling murah yang ditempatkan pada lantai paling tinggi. Apa yang akan mereka perbuat, dengan perabot rumah kampung yang berat yang tidak mungkin diletakkan dalam flat-flat itu? Ba-

---

4 Data mengenai ukuran dan jumlah bangunan di Kebun Kacang diperoleh dari "Data perencanaan Lingkungan Kebun Kacang" Direktorat Agraria, Jakarta Pusat dan Kelurahan Kebun Kacang dan dihimpun oleh Direktorat IV, Pembangunan, DKI September 1981.

gaimana jika mereka akan menyelenggarakan pesta-pesta di mana banyak tetangga dan sanak saudara yang harus diundang ke rumah-rumah mereka? Bagaimana mereka akan menjemur cucian atau mencegah terjadinya ledakan gas? Mereka bahkan khawatir tentang penggunaan pancuran mandi kakus gaya Barat yang tidak dikenal.

Tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi rasa takut penduduk kampung. Para petugas tidak pernah menanyakan kebutuhan-kebutuhan penduduk kampung atau untuk meyakinkan bahwa mereka memiliki sumber-sumber daya secukupnya untuk flat-flat yang diusulkan. Kebanyakan masalah yang berkenaan dengan penduduk kampung diajukan dalam tiga laporan resmi mengenai masalah perumahan flat di Indonesia, tetapi tidak dibaca atau diperhatikan secara serius oleh mereka yang merencanakan proyek.[5] Beberapa petugas dari pemerintah Kota Jakarta yang dilibatkan untuk menghimpun laporan-laporan ini sadar akan rasa permusuhan penduduk kampung terhadap sistem flat ini tetapi merasa tidak berdaya untuk menentang Presiden, Menteri Perumahan atau Perumnas.

Perumnas kenyataannya menambah rasa takut penduduk kampung dengan dikeluarkannya dokumen yang menyatakan bahwa siapa pun yang tidak memiliki dana cukup untuk membayar flat akan dipindahkan ke pinggiran kota. Dokumen itu juga menyatakan berbagai pilihan perumahan dalam jargon yang tidak lazim.[6] Penduduk kampung ditawari untuk pindah ke dalam flat-flat Tanah Abang yang baru saja selesai dibangun dengan harga antara Rp 5.000.000,- dan Rp 8.000.000,- (24.000-38.000 liter beras).

---

5 Sebuah studi resmi menemukan bahwa hanya 4,5% penduduk dari sampel 500 yang memilih tinggal di flat-flat: DKI *Masalah Perumahan di DKI* Jakarta, (Jakarta, 1979) hal 28-9 dan 41. Studi ini menjelaskan mengapa hanya sedikit yang memohon flat. Informasi ini dimasukkan dalam sebuah dokumen resmi yang menguraikan kebijakan-kebijakan perumahan Pemerintahan Kota Jakarta (DKI *Kebijaksanaan Pembangunan* hal. 20-2). Studi yang lain dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung yang be-kerja sama dengan pemerintah DKI memperkuat penemuan-penemuan ini: DKI *Studi Pengembangan Lingkungan Perumahan Flat di DKI-Jakarta*, (Jakarta, 1981).

6 Dokumen ini (Penyediaan Rumah Bagi Penduduk yang Terkena Peremajaan Kota Lokasi Kebun Kacang Jakarta Pusat) mengenai "Rumah Inti" "Rumah Sub Inti" "Rumah Susun" (flat-flat) "KPR/BTN- Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara," "Pembayaran diatur secara tunai "Perjanjian Pendahuluan Jual Beli," "Angsuran Uang Muka."

Kemungkinan lain, mereka dapat pindah ke pinggiran Jakarta, di mana tersedia tanah kosong berukuran 21 m^2 dan 90 m^2 dengan harga antara Rp 1.500.000,--Rp 2.000.000,- (7.100-9.500 liter beras). Atau mereka dapat sama sekali meninggalkan proyek, mengambil ganti rugi dan memukimkan kembali sesuka mereka. Tidak ada sertifikat/surat yang menyatakan bahwa flat-flat Kebun Kacang nyata dibangun di atas tanah mereka untuk keuntungan mereka. Pada akhirnya dan yang sangat penting dokumen itu menasehati mereka yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap tidak perlu mengambil flat-flat di Tanah Abang.[7]

Pamflet itu secara langsung menyangkal apa yang telah diumumkan para pembuat kebijakan pada pertemuan massal pertama. Pamflet itu digunakan untuk menambah rasa takut yang mengerikan penduduk kampung bahwa mereka sedang dipaksa keluar dari rumahnya di pusat kota. Dokumen itu kelihatannya telah disiapkan untuk proyek Tanah Abang dan para pejabat rendah yang melaksaanakan proyek itu hanya mengubah beberapa kata dan mengedarkannya kembali di Kebun Kacang, dengan menganggap bahwa dua proyek itu identik. Mereka kelihatannya tidak menyadari bahwa proyek yang dimaksudkan untuk Kebun Kacang adalah rencana pemukiman kembali, khusus bagi penduduk kampung yang paling miskin dan bukan perumahan komersial bagi kelas menengah.

Laporan pers yang pertama mengenai proyek itu menyatakan bahwa, menurut direktur Perumnas tentang perumahan,[8] 75% dari penduduk kampung ingin menerima flat itu. Pers gagal untuk memberikan ulasan mengenai kekhawatiran dan ketakutan penduduk kampung. Laporan-laporannya tidak mengungkapkan kontradiksi-kontradiksi yang timbul antara pernyataan para pembuat kebijakan dan tindakan-tindakan mereka yang melaksanakan proyek itu. Tidak hanya ada perbedaan-perbedaan antara para pejabat kunci di pemerintahan Kota Jakarta dan Perumnas, tetapi para pembuat kebijakan telah gagal untuk menyampaikan rencana-rencananya kepada para pejabat pada tingkat lebih rendah dari birokrasi itu.

---

7 Sebagian besar penduduk kampung tidak dapat membuat perbedaan yang jelas antara flat-flat Tanah Abang atau Kebun Kacang.

8 *Berita dan Daerah*, tanggal 9 September 1981; *Berita Buana*, tanggal 10 September 1981.

Dihadapkan pada ancaman bagi kelangsungan hidup mereka di kota, penduduk kampung mulai berorganisasi. Sebelumnya, setiap lingkungan yang terdiri dari kira-kira 40 rumah tangga tidak punya rasa memiliki terhadap daerah yang lebih luas meliputi 16 lingkungan dan yang akan dikenakan penggusuran. Sebagian besar penduduk kampung mengupayakan kehidupan sehari-hari mereka dengan cara mereka sendiri tanpa ada waktu, kecenderungan atau enerji untuk menghiraukan peristiwa-peristiwa di luar lingkungan mereka yang paling dekat. Pengajian-pengajian telah menimbulkan kebersamaan di antara beberapa anggotanya, meskipun hanya pada sejumlah individu yang kecil dan tidak bersangkutan antara kelompok pengajian yang satu dengan kelompok pengajian yang lain.

Tiga rumah ibadah yang digunakan untuk tujuan-tujuan peribadatan Islam saja telah diubah menjadi ruang pertemuan untuk mendiskusikan penggusuran itu. Enam belas pimpinan lokal dan sembilan belas lainnya yang secara politik lebih menyadari atau para anggota yang berpendidikan di daerah itu memimpin pertemuan- pertemuan dan dipilih untuk bertindak sebagai wakil-wakil komunitas itu, dalam menghadapi pemerintah.[9] Sebuah delegasi dari kampung itu mencoba untuk melakukan pendekatan kepada *lurah* untuk memperoleh keterangan tentang ganti rugi tanah dan rumah. Namun *lurah* menolak untuk menemui mereka, dengan mengatakan bahwa ia tidak memiliki informasi lebih jauh mengenai proyek itu. Meskipun ada perlawanan dari penduduk kampung mengenai flat-flat, mereka membolehkan para pejabat dari Departemen Pertanahan Pemerintahan Kota Jakarta untuk memasuki komunitas itu dan mengukur tanah dan rumah-rumah mereka.

Sehari atau dua hari sebelum pertemuan massal kedua pada pertengahan bulan September, sebuah dokumen rahasia pemerintah mengenai ganti rugi bocor menyebar ke kampung oleh seseorang yang bekerja pada administrasi kota.[10] Dokumen itu

---

9 Sebuah surat (Laporan pembentukan panitia peremajaan wilayah RW 01/RW 03) dikirim ke Lurah Kebun Kacang pada tanggal 18 Agustus 1981, yang menunjukkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 1981 sebuah komite yang terdiri dari 35 anggota telah dibentuk.

10 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 903, tahun 1981 tentang Pengukuhan Besarnya Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Benda Lain yang ada diatasnya yang terkena proyek pembangunan rumah susun Perum Perumnas di wilayah Jakarta Pusat, 3 September 1981.

ditandatangani oleh Gubernur, yang menyatakan bahwa mereka dengan hak ("Hak Pakai") akan dibayar Rp 60.000 per m^2. Mereka dengan hak lain atas tanah akan dibayar berdasarkan persentase Hak Milik sesuai dengan keputusan Gubernur tahun 1972.[11] Dalam keputusan itu, tujuh hak legal yang berbeda-beda diuraikan dan ini lebih lanjut terbagi lagi ke dalam 12 kategori.

Diperkirakan 88% komunitas hanya memiliki "hak garap" dan dengan demikian hanya dapat berharap untuk dibayar dengan harga paling rendah Rp 25.000,- per m^2 atau 25% dari mereka dengan hak milik penuh.

Pada pertemuan massal kedua tanggal 15 September para pejabat membacakan dokumen yang dibocorkan. Mereka membacakan daftar yang tak habis-habisnya mengenai berbagai harga ganti rugi untuk tanah dari hak-hak legal yang berlain-lainan, rumah-rumah dari bata merah, kayu atau bambu, pagar, teras, pohon, telepon, izin usaha, listrik, saluran air dan pompa air. Meskipun para juru bicara kampung dapat memahami dokumen yang bocor itu, namun sebagian besar penduduk kampung tidak. Dengan demikian terminologi legal dan cepatnya penyampaian dokumen hanya membingungkan mereka. Setelah penyampaian secara lisan, mereka hampir tidak menjadi lebih pintar daripada sebelumnya, namun masih belum mengerti berapa ganti rugi yang akan diterimanya. Harga yang diusulkan untuk flat, tempat-tempat dan unit-unit pelayanan, telah diuraikan secara jelas oleh para pejabat. Setiap peduduk kampung memegang secarik kertas di mana harga-harga itu tercantum.[12] Flat-flat Tanah Abang berharga kira-kira Rp 6.000.000,- (29.000 liter beras), sementara tempat-tempat dan unit-unit pelayanan berharga mulai Rp 1.500.000,- (7.100 liter). Namun penduduk kampung tetap tidak mengetahui secara tepat berapa yang akan mereka terima, tetapi merasa bahwa mereka akan harus membayar dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jangkauan mereka untuk mendapatkan rumah pilihan.

Pada akhir pertemuan kedua dengan staf pegawai, hanya enam bulan setelah proyek itu mulai direncanakan, tanda perlawanan

---

11 Lembaran Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta, 1972 Nomor 18 No. DA II/3/14/1972 SK Gubernur Pedoman Penetapan Besarnya Penaksiran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Beserta Benda-Benda yang ada diatasnya dalam wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta hal. 4.

12 "Program Peremajaan Kota" 1198081/TSG/Tsb.

penduduk kampung diungkapkan secara terbuka oleh seorang juru bicara kampung. Syarifuddin, berdiri dan berkata kepada para pejabat bahwa penduduk kampung tidak akan dapat digertak untuk mematuhi. Ia mengatakan bahwa penduduk kampung menolak, baik mengenai ganti rugi maupun flat. Mereka keberatan terhadap cara otoriter pemerintah yang memaksakan program tanpa konsultasi lebih dulu. Penduduk kampung tidak menentang rencana memperindah kota, tetapi mereka tidak menginginkan hal itu menjadi beban mereka. Mereka hanya meminta uang ganti rugi sehingga mereka dapat memukimkan kembali diri mereka secara memadai di mana saja. Mereka tidak ingin memikirkan, apa lagi mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan pemukiman kembali sebagai alternatif jika mereka tidak mengetahui bagaimana ganti rugi itu akan mereka terima atau dirasakan tidak memadai. Para juru bicara kampung mengemukakan dokumen yang menyatakan bahwa penduduk kampung akan menerima tidak lebih dari Rp 250.000,- (1.200 liter beras) per m^2 bagi semua anggota komunitas terlepas dari kedudukan tetap secara legal.[13]

Para pejabat tinggi dikejutkan oleh kata-kata yang secara agresif dilontarkan oleh juru bicara itu dan diikuti oleh sorak-sorai penduduk kampung yang merasa kagum dan bergembira.

Para pejabat kelihatannya tidak ingin menggantisipasi permusuhan semacam itu terhadap "program pemukiman kembali yang sejahtera." Ketika merencanakan proyek lima bulan yang silam, para pejabat itu menerima jaminan dari *lurah* bahwa ia telah memberi penerangan kepada penduduk kampung dan di sana tidak ada yang menentang proyek itu.[14]

Sementara para pejabat dan penduduk kampung berselisih selama bulan September dan Oktober, lima dari sebagian besar juru bicara kampung itu melancarkan kampanye pers yang canggih untuk menampilkan perspektif penduduk kampung. Mereka menyatakan bahwa *lurah* telah mengintimidasi mereka untuk me-

---

13 "Aspirasi Warga RW 01 dan sebagian RW 03 Kelurahan Kebun Kacang sehubungan dengan Program Peremajaan Kota oleh Pemerintah DKI Jaya di daerah Kebun Kacang," 15 September hal. 2.

14 Setiap dua minggu dari bulan Mei sampai November 1981 pertemuan-pertemuan diselenggarakan di Perumnas dan laporan itu dicatat dalam "Risalah Rapat Temu Teknis Rumah Susun (flat) dalam Rangka Peremajaan Kota DKI Jakarta," Perum Perumnas, Jakarta. Lihat Risalah Rapat Team Teknis 20 Agustus hal. 2 juga *Berita Buana*, 10 September 1981; *Berita dan Daerah*, 9 September 1981.

nyetujui proyek itu dan bahwa *lurah* beserta Perumnas telah memaksa mereka untuk mengambil tempat dan unit-unit pelayanan di pinggiran kota jika mereka tidak mau menerima flat-flat itu. Para juru bicara kampung mengacu pada surat keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1975, yang menetapkan bahwa semua pemerintah daerah harus merundingkan pengambilalihan tanah dengan penduduk yang bersangkutan.[15] Mereka menegaskan bahwa kompensasi yang mereka tuntut Rp 250.000,- per m^2 adalah masuk akal, dengan pertimbangan bahwa Kebun Kacang berada di lokasi strategis dan kenyataannya bahwa lahan yang terdaftar resmi di sebelah mereka pada pinggir jalan Thamrin berharga Rp 350.000,- sampai Rp 500.000,- per m^2.[16] Mereka mengutarakan kesulitan penduduk kampung yang kehilangan rumah, pekerjaan, jarak yang dekat dengan pusat kota, ikatan sosial dan terganggu pendidikan sekolah anak-anaknya. Mereka mengatakan bahwa tidak ada perlunya membicarakan akomodasi alternatif kalau isu ganti rugi belum pasti. Mereka mengirim utusan-utusan ke Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan DPR meminta agar keputusan Gubernur mengenai ganti rugi direvisi. Mereka juga mengirim delegasi ke Lembaga Bantuan Hukum.

Para pejabat pemerintah menenangkan dan menyalahkan penduduk kampung. Pemerintah menjanjikan kepada penduduk kampung bahwa mereka akan dimukimkan kembali di flat-flat sesuai dengan kemampuan keuangannya. Berkali-kali pemerintah menekankan bahwa hal ini bukan merupakan rencana "penggusuran" tetapi sebuah proyek pemukiman kembali penduduk kampung yang tidak akan menyakitkan hati mereka. Kelonggaran-kelonggaran akan membuat perdagangan di flat dan mengatasi persoalan-persoalan lain yang tampak di program itu. Mereka yang tidak mampu membayar angsuran itu diperkenankan menyewa flat dengan harga murah.[17]

Namun, para pejabat pemerintah, menuduh penduduk kampung menolak proyek itu semata-mata ingin memperoleh ganti rugi.[18] Penduduk kampung dicerca karena berpandangan sempit,

---

15 *Terbit*, 18 September 1981; *Berita Buana*, 1 Oktober 1981, *Pelita*, 2 Januari 1981.

16 *Sinar Harapan*, 18 September 1981; *Kompas*, 26 September 1981.

17 *Sinar Harapan*, 23 September; *Suara Karya*, 28 September 1981; *Pelita*, 28 September 1981; *Berita Buana*, 28 September 1981.

18 *Terbit*, 22 September 1981, 29 September 1981; *Sinar Harapan*, 29 September 1981.

mementingkan diri sendiri dan menghalangi rencana pemerintah yang begitu bagus. Walikota Jakarta Pusat dan Wakil Gubernur menduga bahwa penentangan terhadap proyek itu dan penuntutan ganti rugi yang lebih tinggi berasal dari orang-orang yang tidak tinggal di daerah itu. Orang-orang luar yang licik ini, sebagaimana dinyatakannya, hanya ingin menarik keuntungan dari proyek itu dengan cara membantu penduduk kampung memperoleh ganti rugi yang lebih tinggi sebagai pengganti komisi.[19] Namun sebenarnya, beberapa orang yang berpendidikan dan berani melakukan tuntutan ini membuktikan bahwa tidak ada orang luar yang terlibat. *Lurah* menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan kualitas lahan penduduk kampung, tuntutan mereka untuk ganti rugi yang lebih tinggi adalah tidak mungkin.[20] Gubernur meminta penduduk kampung untuk berterima kasih bahwa pemerintah ingin memperbaiki nasib mereka.[21] Wakil Walikota Jakarta Pusat mengatakan bahwa "jika rumah direnovasi maka saya tidak hanya harus membayar untuk itu, tetapi juga saya harus berterima kasih."[22]

Ketika jalan buntu berlanjut sampai akhir Oktober, sebagian besar penduduk kampung masih tidak memahami rincian-rincian proyek itu dan tidak dapat mempercayai pemerintah. Sebaliknya pejabat pemerintah tidak dapat memahami mengapa penduduk kampung menentang proyek yang bermaksud baik. Pejabat lainnya, yakin bahwa penduduk kampung harus mau menerima kebijakan mereka yang lebih besar dan beberapa penduduk kampung harus mau berkorban demi kebaikan bersama. Dalam keadaan frustrasi, saya mencari para direktur program itu untuk mencoba dan menjelaskan posisi penduduk kampung. Saya membujuk pimpinan Perencanaan Perumnas dan Seksi Kelayakan untuk meninjau daerah dan melihat sendiri mengapa penduduk kampung berkeberatan terhadap proyek itu.[23] Sampai saat itu, tidak ada

---

19 *Pos Kota*, 2 Oktober 1981; *Merdeka*, 3 Oktober 1981; *Berita Buana*, 3 Oktober 1981.

20 *Pos Kota*, 9 Oktober 1981.

21 *Terbit*, 29 September 1981; *Sinar Harapan*, 29 September 1981.

22 *Suara Karya*, 2 November 1981.

23 Duddy Soegoto, pimpinan Perencanaan Perumnas dan Seksi Kelayakan, adalah insinyur pemerintah yang sensitif dan senantiasa mengetahui kebenaran. Ia ingin mengetahui secara sesungguhnya mengapa penduduk kampung berkeberatan terhadap proyek itu.

seorang pejabat pun menghiraukan untuk menyelidiki secara langsung kondisi kehidupan atau keinginan penduduk kampung.

Ketika memasuki Kebun Kacang, perencana (Duddy Soegoto) kagum akan kualitas yang bagus dari rumah-rumah di kampung itu. Ia melihat banyak rumah telah direnovasi. Ia tidak menyadari bahwa lebih dari 50% penduduk menggunakan rumah-rumahnya sebagai tempat kerja. Ia pun tidak menyadari ada perbedaan besar antara golongan kaya dan golongan miskin di mana golongan kaya menempati rumah-rumah yang besar dan berkualitas baik seluas 50 sampai 100 m^2, sementara golongan miskin merasa senang bisa menempati rumah sederhana yang tidak harus mereka bayar. Beberapa orang baru saja menginvestasikan sampai Rp 2.000.000,- (9.500 liter beras) untuk rumahnya, sementara yang lain membayar kurang dari 5% dari pendapatan mereka setiap bulan untuk sewa rumah. Jelas bagi Soegoto bahwa program pembangunan flat pemerintah tidak dapat memenuhi kapasitas dan kebutuhan yang beragam. Ia menyatakan keprihatinan tentang apakah rencana pemukiman kembali yang diusulkan sesungguhnya akan menguntungkan sebagian besar anggota di daerah itu.

Namun demikian, karena program itu mendapatkan dukungan dari Presiden, Menteri dan Direktur Jenderal Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan, maka tidak ada jalan untuk kembali. Soegoto merepresentasikan kepada pejabat tingkat menteri dan meminta subsidi yang lebih dari pemerintah pusat (Rp 1,8 milyar) untuk proyek itu yang diperkirakan seluruhnya menelan biaya sampai Rp 4 milyar (US$ 6.000.000), tetapi ia tidak dapat mengubah disain dasar dari proyek itu. Banyak sekali perwakilan-perwakilan penting dan orang-orang yang memiliki otoritas memancangkan keberhasilannya. Perumnas siap untuk mengerahkan staf administratifnya yang besar, para insinyur dan kontraktor mendisain dan membangun flat-flat itu. Pemerintah Kota Jakarta memiliki staf-staf pembayaran gaji untuk proyek. Tindakan yang paling baik dapat dilakukan Soegoto adalah membuat proyek itu dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebutuhan penduduk kampung yaitu dengan menetapkan harga flat yang lebih rendah dan mengubah ukuran, kondisi penggunaan dan pembayarannya.[24]

---

24 Kemudian pada bulan November 1981, ini disajikan kepada penduduk kampung dalam bentuk tanya-jawab- "Tanya-Jawab Masalah Peremajaan Kota di Kebun Kacang-Jakarta" Perum Perumnas, Departemen Pekerjaan Umum.

Soegoto mengundang para juru bicara kampung untuk berdiskusi di Perumnas. Mereka disediakan transpor dan makanan disertai pertunjukan *slide* yang menjelaskan mengenai pemukiman kembali. Soegoto menjanjikan bahwa semua penduduk kampung akan diberi hak atas flat, sekalipun mereka kurang mampu untuk membayarnya. Seorang penduduk kampung yang semula menolak sebuah flat, mungkin karena kebodohan atau ketakutan, akan diberi kesempatan untuk mengubah pikirannya segera setelah flat-flat dibangun dan ia dapat melihat seperti apa flat-flat itu. Sebagai pengganti unit-unit yang berukuran 18 dan 36 m^2, ia mengusulkan berbagai ukuran 21, 42 dan 51 m^2. Angsuran dapat dibayarkan dalam cara yang luwes, baik bulanan, mingguan atau harian. Harga unit yang paling murah, 21 m^2, diperendah sampai Rp 9.600,- (46 liter beras) untuk setiap bulan, kira-kira 16% dari penghasilan penduduk kampung. Mereka yang kurang mampu membayar flat, dapat menyewa dengan harga nominal (Rp 8.000,- per bulan). Akomodasi sementara yang gratis mengenai air, listrik dan sanitasi disediakan sementara flat-flat dibangun dalam jangka waktu 6 sampai 12 bulan. Subsidi uang sebesar Rp 65.000 akan diberikan kepada semua rumah tangga yang terdaftar karena kesukaran yang dipikulnya sebagai konsekuensi penggusuran. Bagaimanapun harga asli dari ganti rugi tidak dapat diubah. Jika harga itu ditingkatkan, maka biaya flat juga akan naik.

Ketidaksepakatan timbul di antara para juru bicara kampung tentang mendukung atau tidak proyek yang direvisi itu. Syarifuddin menegaskan bahwa ia adalah juru bicara penduduk kampung yang utama dan mereka semua menyetujui proyek itu.[25] Namun para juru bicara kampung lainnya, menyatakan bahwa Syarifuddin tidak lagi menjadi juru bicara mereka dan bahwa sebagian besar penduduk kampung masih merasakan bahwa penawaran ganti rugi pemerintah tidak dapat disetujui.[26] Ada desas-desus bahwa Syarifuddin mendapat uang dari penguasa dan jaminan untuk mendapatkan flat yang luas di lantai dasar asal mendukung program pemerintah. Para juru bicara yang lain menyatakan bahwa lebih 50% komunitas tidak akan dapat membayar flat, meskipun pada harga yang lebih rendah, dan akan didepak keluar dari daerah itu. Para juru bicara ini tidak tertarik akan harga-harga flat

25 *Suara Karya*, 2 November 1981; *Berita Buana*, 4 November 1981.
26 *Kompas*, 24 Oktober 1981, 31 Oktober 1981; *Terbit*, 31 Oktober 1981.

yang disubsidi secara khusus, tetapi masih terus menuntut ganti rugi yang lebih tinggi, sehingga penduduk kampung dapat memukimkan diri mereka sendiri secara memadai di mana saja, tanpa harus bergantung pada pemerintah. Lagi pula, mereka merasa bahwa jika mereka kembali ke kampung dari pertemuan di Perumnas yang mendukung proyek itu, maka oleh orang-orang mereka akan dituduh telah berkhianat dan memihak kepada pemerintah.

Para pejabat di Perumnas yang terlalu banyak bekerja termasuk Soegoto, tidak menyadari adanya perpecahan di antara para juru bicara kampung dan salah dalam menganggap bahwa proyeknya telah disetujui. Selama hari-hari berikutnya, pers melaporkan bahwa proyek itu telah disetujui oleh sebagian besar penduduk kampung.[27]

Sifat dan tujuan proyek itu adalah menghilangkan pandangan ketika Kebun Kacang hancur luluh oleh ketidakmampuan para juru bicara itu untuk bersepakat. Dalam beberapa minggu, kelompok masyarakat yang rapuh, yang menentang proyek itu dihancurkan. Para juru bicara menyebarkan informasi yang mengandung kontradiksi tentang proyek itu dan penduduk kampung tidak pernah memahami sebagaimana mestinya perubahan yang telah dibuat oleh Soegoto untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka tetap tidak mengetahui mengenai disain, ukuran, harga dan kondisi khusus flat yang menjamin kemudahan bagi penduduk kampung untuk memasuki sebuah flat, khusus untuk mereka yang sangat miskin. Malahan sebagian besar penduduk kampung masih tetap menganggap bahwa flat-flat itu diperuntukkan bagi kelas menengah.

Sementara sebagian besar penduduk kampung masih tidak tahu apa yang harus diperbuat, pada akhir November 1981, beberapa rumah tangga mulai membongkar rumah-rumahnya, mengambil ganti ruginya dan mengajukan permohonan untuk memperoleh flat atau akomodasi alternatif. Syarifuddin dan para pembantunya membujuk penduduk kampung untuk menerima ganti rugi dengan menjanjikan pemrosesan yang cepat atas tuntutan-tuntutannya, dengan pilihan pertama terhadap akomodasi sementara dan kesempatan untuk mengajukan permohonan untuk sebuah flat tanpa uang muka sebagai prasyarat. Dilaporkan bahwa lebih banyak migran baru yang menyewa akomodasi di daerah itu

27 *Kompas*, 23 Oktober 1981, 27 Oktober 1981; *Pelita*, 26 Oktober 1981.

adalah yang pertama-tama menerima tawaran pemerintah.[28] Mereka tidak kehilangan apa-apa. Mereka hanya sedikit memiliki komitmen sosial atau ekonomi dengan lingkungan itu. Sebagai ganti membayar sewa, mereka dapat membayar angsuran dan memperoleh sebuah flat di daerah pusat kota, di mana mereka tidak akan pernah dapat membeli rumah dengan harga yang disubsidi semacam itu. Mereka yang mengambil ganti rugi atau menerima flat mendapat amarah dari mereka yang menolak untuk mengalah. Memang dapat dirasakan bahwa mereka yang menerima ganti rugi menghancurkan ketetapan hati komunitas yang menentang proyek itu.

Kekhawatiran komunitas ini mengakibatkan putusnya hubungan pinjam meminjam antara tetangga yang satu dengan yang lain yang membantu usaha mereka sehari-hari. Dari situ kepercayaan antara tetangga yang satu dengan yang lain menjadi pudar. Sebelumnya perekonomian komunitas itu diperlicin oleh pinjaman-pinjaman dari lintah darat, pengusaha warung, pedagang para tetangga dan teman-teman. Namun dengan adanya ancaman penggusuran, para kreditor menolak untuk memberikan pinjaman karena takut bahwa para peminjam akan menghilang tanpa membayar kembali pinjamannya. Para pengusaha kecil merasakan kesulitan untuk beroperasi karena mata rantai hubungan antara pembeli dan penjual telah putus. Para wiraswasta kecil dipanggil untuk menghadiri pertemuan-pertemuan atau mencari akomodasi alternatif dan merasakan kesulitan untuk mendapatkan penghasilan.

Rumah-rumah penduduk biasanya berdinding satu untuk dua rumah. Jika satu rumah dibongkar yang lain juga ikut kena. Penduduk kampung yang tetap tinggal tidak menghiraukan untuk memperbaiki atau mempertahankan rumah-rumahnya, karena mereka tidak tahu berapa lama mereka akan tinggal di situ. Tikus-tikus dan nyamuk-nyamuk berkerumun di puing-puing. Sistem keamanan kampung tidak lagi berfungsi secara efektif dan penduduk kampung takut terhadap orang-orang yang tidak mereka kenal yang melewati rumah-rumahnya yang berantakan karena membiarkan bahan-bahan bangunannya berserakan.

Pada akhir Desember, makin banyak penduduk kampung yang tidak dapat lagi menanggung ketidaktegasan, ketidaktentuan dan

---

28 *Berita Buana*, 24 November 1981.

demoralisasi. Kampung itu tak sedap dipandang ketika seseorang berjalan terhuyung-huyung di sepanjang gang-gang di atas reruntuhan bahan-bahan bangunan dan sampah-sampah. Dengan meningkatnya kesulitan ekonomi, banyak orang tertarik pada ganti ruginya. Selama waktu itu, para pejabat pemerintah mundur dan membiarkan mereka tercerai-berai dalam suasana kecurigaan, ketidakpercayaan dan ketakutan.

Penduduk kampung tampaknya semakin mencurigai satu sama lain, para pimpinannya dan pemerintah. Dokumen-dokumen telah dibocorkan kepada para pimpinan kampung yang merinci hak atas tanah, ukuran dan kualitas rumah dan barang-barang lain serta fasilitas- fasilitas dari setiap rumah tangga, yang atas dasar itu ganti rugi akan diberikan.[29] Pemerintah menyimpan rahasia mengenai rincian-rincian ganti rugi yang tepat dan hanya akan memberitahukan kepada para penduduk kampung mengenai pemikiran yang dapat mereka harapkan pada pertemuan massal bulan September. Dokumen-dokumen itu dibocorkan dengan maksud agar setiap pimpinan akan memberitahu penduduk kampungnya berapa banyaknya uang yang akan mereka terima. Tetapi banyak pimpinan menyimpan informasi itu untuk diri mereka sendiri dan tidak memberitahukan kepada para anggotanya.

Tanpa memberitahukan kepada para penduduk kampung berapa sebenarnya ganti rugi yang akan mereka terima, pimpinan lingkungan Innah menyelenggarakan pertemuan di mana ia menjanjikan untuk meningkatkan ganti rugi mereka dengan Rp 15.000,- per m^2 jika setiap rumah tangga menjamin untuk membayarnya Rp 5.000,- per m^2 dari peningkatan harga yang mereka terima. Semua anggota dalam lingkungan Ibu Innah dipaksa untuk menandatangani dokumen yang menyetujui usulan ini. Pimpinan lingkungan itu menemukan sertifikat tanah suami Ibu Innah yang asli dari tahun 1930-an yang membuktikan bahwa pajak telah dibayar kepada pemerintah Belanda. Ia memperlihatkan sertifikat ini kepada Badan Pertanahan Pemerintah Kota, yang membuktikan bahwa tanah yang mereka tempati memiliki legalitas yang lebih besar daripada yang ditunjukkan dalam catatan-catatan kota.

---

29 Daftar: Pembayaran Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Bangunan/Tanaman di Kampung Kebun Kacang untuk Keperluan Proyek Perum Perumnas Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 755/Tahun 1981 tanggal 18 Juli 1981.

Meskipun Administrasi Kota Jakarta secara resmi menolak untuk menaikkan ganti rugi namun melalui cara-cara informal ganti rugi itu dinaikkan dari Rp 25.000,- per m^2 menjadi Rp 40.000,- per m^2. Manuver-manuver semacam itu yang dilakukan oleh para pimpinan yang licik mengakibatkan pencarian sertifikat tanah pada zaman Belanda dulu di seluruh daerah itu dilakukan dengan mati-matian.

Jika harga ganti rugi tidak dapat diubah oleh penggunaan sertifikat-sertifikat tanah, maka para pimpinan lingkungan mencoba untuk memanipulasi sistem itu dengan membuat perjanjian-perjanjian dengan para pejabat pada tingkat yang lebih rendah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proyek itu. Para pejabat ditawari bagian keuntungan dari kenaikkan harga tanah, jika harga ganti rugi dinaikan secara gelap. Angka-angka resmi hanya dicoret dalam dokumen-dokumen pemerintah dan angka-angka baru dicantumkan. Pemimpin yang bisa menerobos ke atas dengan cara apa pun bisa memperoleh ganti rugi yang lebih tinggi. Kecemburuan dan perselisihan timbul ketika insentif beberapa rumah tangga dijanjikan tiga atau empat kali lebih banyak daripada yang lain karena kemampuan pimpinannya untuk memanipulasi sistem itu.

Pers tidak menyebut kekacauan di Kebun Kacang tetapi menyebutkan bahwa beberapa penduduk kampung masih mempertahankan untuk memperoleh ganti rugi yang lebih tinggi, sementara yang lain mulai mengambil ganti ruginya, merubuhkan rumah-rumahnya dan meninggalkan daerah itu.[30] Namun, satu di antara 3.500 orang di Kebun Kacang, menolak diintimidasi oleh para pejabat pemerintah maupun para pimpinan lokal. Ia menolak untuk menerima Rp 25.000,- per m^2 dan percaya bahwa jika beberapa orang dapat menerima Rp 60.000,- per m^2 melalui perjanjian di bawah tangan maka ia pun dapat memperolehnya dengan menolak untuk pindah. Ia tidak siap menerima harga yang paling rendah atau tidak juga mau memberikan komisi kepada pejabat atau perantara atas ganti rugi yang ia terima. Sementara semua penduduk kampung yang lain berkumpul untuk mengambil ganti rugi mereka dan membongkar rumah-rumahnya, ia dan keluarganya mempertahankan tanahnya. Asep memanfaatkan preman-preman untuk mengintimidasi keluarga itu agar pindah, de-

30 *Berita Buana*, 24 November 1981, 4 Desember 1981; *Kompas*, 27 November 1981; *Sinar Harapan*, 4 Desember 1981.

ngan melemparkan batu ke atas atapnya pada malam hari. Pada akhirnya, keluarga yang keras kepala itu memperoleh Rp 60.000,- per m^2, sehingga penderitaan dan ketakutannya tidak dirasakan sia-sia. Para penduduk kampung menyebutnya *Hukum Rimba*. Manusia, satu sama lain saling mengeksploitasi dan menipu agar dapat menebalkan kantong-kantongnya sendiri. Bahkan sanak-saudara atau para tetangga saling mencurigai satu sama lain untuk memperoleh uang.

Pers hanya memberitakan adanya penyimpangan-penyimpangan selama pembayaran ganti rugi. Dinyatakan bahwa jumlah ganti rugi yang besar telah salah dibayarkan kepada orang-orang yang telah meninggalkan daerah itu beberapa tahun sebelumnya.[31] Orang yang tidak lagi tinggal di Kebun Kacang, tetapi memiliki KTP, mengambil keuntungan dari keinginan pemerintah untuk mulai menggerakkan proyek itu. Di mata pemerintah menerima ganti rugi sama dengan menyetujui proyek itu. Maka beberapa warga Kebun Kacang yang dulu memperoleh dokumen-dokumen resmi yang ditandatangani *lurah* yang memberikan hak mereka secara gelap untuk menerima ganti rugi.[32]

Memang ada bukti mengenai kesalahan manajemen kelurahan yakni lebih dari lima puluh formulir permohonan untuk flat-flat kepada Perumnas, hilang.[33] Seharusnya semua formulir itu telah disalurkan kelurahan kepada rumah-rumah tangga di Kebun Kacang. Meskipun pers gagal untuk memberitakannya, namun penduduk kampung percaya bahwa *lurah* dan para pembantunya telah meraup keuntungan dengan menjual formulir ini kepada orang-orang luar yang menghendaki untuk membeli flat dalam proyek itu.[34]

---

31 *Berita Buana*, 7 Desember 1981.

32 Angka-angka yang akurat mengenai jumlah pembayaran yang salah memang sulit diperoleh. Baik Perumnas maupun para pejabat pemerintah lokal tutup mulut. Bagaimanapun, pers melaporkan bahwa beberapa di antara 78 orang yang semula menerima ganti rugi tidak memiliki hak untuk itu. (*Berita Buana*, 7 Desember 1981) dan di kampung penuh dengan desas-desus bahwa orang-orang yang sebenarnya tidak berhak telah dibayar.

33 *Berita Buana*, 7 Desember 1981.

34 Sebuah daftar telah disusun oleh sejumlah juru bicara kampung dari RW 01 "Daftar orang luar yang masuk Flat" menunjukkan bahwa 12 orang dari luar daerah proyek telah mendaftarkan diri untuk flat-flat Kebun Kacang dan secara ilegal telah diberi akomodasi sementara.

Semula sedikit penduduk kampung yang ingin memperoleh ganti rugi tetapi kemudian berubah menjadi banyak, karena mereka khawatir bahwa dana proyek akan dilarikan sebelum mereka dibayar. Ketakutan mereka bukan tidak beralasan, karena beberapa minggu kemudian bendaharawan pemerintah yang menangani dana ganti rugi diberhentikan karena menyalahgunakan dana dan banyak cek yang telah dikeluarkannya terbukti kosong.[35] Hal itu menimbulkan kejutan bagi penduduk kampung, yang tidak pernah menggunakan cek atau bank, mereka hanya memegang secarik kertas yang tidak berharga. Wajar saja rakyat berpikir bagaimana mereka akan mendapatkan ganti rugi apabila harga sudah dinaikkan dan banyak orang yang tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi bisa menerima.[36]

Para petugas di kantor pembayaran ganti rugi tidak terburu-buru memproses tuntutan penduduk kampung. Pekerjaan mereka sebagai pengurus ganti rugi merupakan kerja sambilan. Mereka datang terlambat di kantor, pada hari-hari tertentu mereka tidak datang sama sekali. Tanpa mengetahui kapan kantor akan dibuka, penduduk kampung antri di bawah terik matahari atau hujan yang deras. Mereka khawatir jika mereka tidak berada di sana maka ketika nama-nama mereka dipanggil, mereka akan terluput untuk dibayar. Setelah para petugas tiba, mereka santai saja, mereka makan siang dulu, tiduran atau mendengarkan radio, sementara penduduk kampung antri menunggu. Ketika para petugas mulai bekerja, mereka membuang-buang waktu dengan menyibukkan diri untuk mencari-cari sesuatu dalam map, formulir dan arsip. Mereka yang beruntung dipanggil untuk memproses ganti rugi, tetapi lebih sering mereka disuruh kembali lagi besok karena surat-surat belum lengkap -- misalnya belum ditandatangani *lurah*. Untuk mendapatkan tanda tangan *lurah* membutuhkan waktu banyak karena harus antri dan membayar ongkos tambahan.[37]

Ironisnya, kira-kira empat bulan sebelumnya, para penguasa sibuk untuk memulai pelaksanaan proyek dan menuduh pen-

---

35 *Sinar Pagi*, Desember 1981.

36 Sebuah daftar dengan 35 nama penduduk RW 01 disusun "Daftar Nama-Nama Warga RW 01" -- menunjukkan bahwa ganti ruginya telah ditingkatkan sampai Rp.60.000,- atau Rp.40.000,- meskipun tanahnya adalah "Tanah Garapan" (yang berharga Rp.25.000,-). Sebanyak 80 keluarga dari RW 03, tidak disebutkan dalam daftar ganti ruginya telah dinaikkan secara gelap.

37 *Sinar Pagi*, Desember 1981.

duduk kampung karena menyebabkan penundaan. Kini posisi itu terbalik. Sementara penduduk kampung hanya ingin mengambil ganti ruginya, membongkar rumah-rumahnya dan meninggalkan daerah itu, kaum birokrat yang mengatur proyek itu melakukan penundaan. Penduduk kampung percaya bahwa para pejabat dengan sengaja menunda pemrosesan tuntutan ganti rugi penduduk agar memperoleh bonus khusus yang dibayarkan oleh proyek itu. Sebagian besar penduduk kampung membutuhkan waktu untuk bekerja setiap hari guna menghidupi keluarganya. Penduduk yang lain merasa malu atau takut untuk meminta izin cuti dari para majikannya ketika mereka menunggu berhari-hari untuk mengurus formulir-formulirnya yang diproses.

Para pegawai pamong praja pada tingkat bawahan tampaknya berusaha untuk mengecilkan nyali penduduk kampung dalam mengambil flat. Meskipun diadakan dialog yang panas dalam pers dan dengan dikeluarkannya sejumlah pernyataan resmi, para pegawai pamong praja tampaknya tidak menyadari bahwa proyek itu diduga menjadi rencana pemukiman kembali yang inovatif. Mereka menganggap bahwa proyek itu merupakan program bangunan flat komersial lainnya yang berada di sepanjang deretan flat di Tanah Abang dan menegaskan bahwa flat-flat Kebun Kacang hanya untuk mereka yang berpendapatan tetap lebih dari Rp 60.000,- per bulan. Mereka menasehati penduduk kampung yang berpendapatan rendah atau tidak tetap menerima ganti rugi dan menerima unit-unit inti yang lebih murah di pinggiran Jakarta atau memukimkan diri mereka sendiri dimana saja.[38] Penduduk kampung yang sakit, tua dan miskin diberitahu bahwa flat-flat yang berukuran 21 m^2 akan tersedia hanya pada lantai yang paling tinggi, meski rencana-rencana terakhir Perumnas secara jelas menunjukkan bahwa unit-unit yang berukuran 21 m^2 terletak pada tingkat paling bawah. Jadi penduduk kampung yang telah mulai percaya kepada program pemerintah dan mau mengambil flat dengan perubahan begitu banyak akhirnya memutuskan tidak akan

38 Meskipun para pejabat lokal tidak mau tahu kesangsian dan ketakutan penduduk kampung dan beberapa pejabat memiliki kepentingan untuk diri sendiri dalam menjual flat-flat kosong kepada orang-orang luar yang lebih kaya, namun pengetahuannya mengenai proyek Tanah Abang membuatnya tidak percaya tentang kemampuan penduduk kampung untuk menerima atau membayar flat-flat. Berdasarkan pengalaman ini, beberapa pejabat mungkin secara terus terang telah memberikan nasehat yang paling baik kepada penduduk kampung.

mengambilnya. Memang terbukti bahwa para pegawai pamong praja lokal memiliki cadangan keuangan dalam flat-flat yang tidak dijual kepada penduduk kampung dengan harga yang disubsidikan. Dengan menggunakan formulir-formulir permohonan flat yang kosong dan nama-nama penduduk kampung yang telah meninggalkan proyek itu, mereka dapat menjual flat-flat itu secara gelap kepada orang-orang luar yang lebih kaya dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Satu hal yang menyenangkan dari proyek itu adalah bahwa *bulldozer-bulldozer* tidak digunakan untuk meratakan rumah-rumah di kampung itu. Penduduk kampung diharapkan membongkar rumah-rumahnya sendiri dalam waktu 14 hari setelah menerima ganti rugi dan dibolehkan untuk menggunakan kembali atau menjual bahan-bahan bangunan yang lama. Satu demi satu rumah dirubuhkan. Beberapa penduduk yang miskin, secara berhati-hati memindahkan ubin, bata merah dan papan kayu, agar dapat digunakan kembali untuk rumah mereka nanti. Banyak di antara mereka yang membeli, membongkar dan mengangkut dari rumah-rumah orang kaya yang tidak mau lagi memakai bahan dari bekas rumah sendiri. Pada akhir bulan Maret 1982, Kebun Kacang terlihat seolah-oleh baru saja dihujani bom. Hanya kemudian *bulldozer-bulldozer* mulai masuk untuk meratakan tanah sebagai persiapan untuk membangun flat.

Lebih dari tiga perempat penduduk kampung gagal untuk menerima flat-flat itu, karena meskipun proyek itu sudah berjalan mereka masih takut tentang ketidakmampuan mereka untuk membayar. Kurang lebih seperempatnya menerima tempat-tempat dan perumahan untuk dagang di pinggiran kota dan sisanya memukimkan diri mereka kembali.

Ironisnya, dulu mereka dianggap tinggal di tempat yang kumuh, sesudah digusur penduduk kampung justru mengalami keadaan yang benar-benar kumuh di tempat penampungannya. Sebagian besar dari 160 keluarga yang menerima flat harus menunggu dua setengah tahun dari enam sampai dua belas bulan yang dijanjikan. Pada saat itu mereka ditampung didekatnya oleh Perumnas di atas tanah pinjaman dengan akomodasi sementara seperti barak sampai flat-flat itu dibangun. Sebagian besar mereka harus bertahan dalam kondisi-kondisi yang penuh sesak, tidak sehat dan tidak menyenangkan dibanding rumah-rumah mereka sebelumnya. Meskipun akomodasi itu gratis, keluarga-keluarga

yang berada di dalamnya itu harus berdesak-desakan dalam ruangan seluas 8,5 m^2, kurang dari setengah ruangan yang pernah mereka miliki di Kebun Kacang. Di situ tidak ada organisasi komunitas atau kepemimpinan untuk memelihara atau mengawasi penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang gratis. Air dan kakus yang gratis cepat rusak. Bak-bak untuk mencuci tidak pernah berfungsi dan kakus digunakan juga untuk tempat mencuci. Selama bulan pertama, air leding tidak pernah dimatikan dan memancar bebas dari kerannya, tetapi kemudian sering tidak keluar airnya. Penduduk kampung terpaksa menadah tetesan air dalam ember-ember plastik sepanjang malam untuk digunakan esok harinya. Kakus-kakus umum tidak dibersihkan dan orang-orang luar juga menggunakannya. Penduduk kampung yang merasa kesal karena tinggal di dekat kakus-kakus itu menghalanginya dengan batu-batu besar dan menyemennya untuk mengatasi bau busuk dan penggunaan secara gelap oleh orang-orang luar. Dinding-dinding batu pada kakus-kakus itu segera dibongkar dan digunakan untuk keperluan-keperluan lain. Beberapa kakus yang masih ada digembok. Ketika penduduk kampung menggunakan fasilitas-fasilitas listrik melebihi bebannya, maka sering padam. Dinding-dinding tipis dari barak-barak tripleks dan kegaduhan yang terus menerus mengganggu ketenangan.

Kemelaratan fisik penduduk kampung ditutupi oleh keraguraguan, desas-desus dan ketakutan. Meskipun mereka telah setuju untuk membeli flat dan membayar deposito, namun mereka hanya memegang sebuah kwitansi untuk uang yang mereka bayar. Mereka tidak memiliki komitmen bahwa pemerintah akan menyediakan kepada mereka sebuah flat. Ketika bulan-bulan yang mereka lalui berlarut-larut dalam akomodasi sementara dan kecil, penduduk kampung menjadi sulit mempercayai bahwa kwitansinya suatu hari akan bisa diwujudkan menjadi flat. Mereka mulai mengingat-ingat kejadian yang dulu, di mana rumah-rumah dibongkar, gerobak-gerobak mereka diambil paksa tanpa ganti rugi sama sekali. Kemudian yang menimbulkan tanda tanya mereka, mengapa sekarang ada ganti rugi. Dan timbul iri hati kepada mereka yang tidak mengambil flat dan pindah ke pinggir kota atau ke tempat lain dan bisa mulai hidup kembali. Kebanyakan penduduk kampung yang telah memutuskan untuk mengambil flat, mulai berfikir bahwa pilihannya salah, dan beberapa orang meninggalkan akomodasi sementara dan menukar hak-haknya

atas flat-flat itu dengan tempat-tempat dan unit-unit untuk berdagang di pinggiran kota.[39]

Ketika flat-flat itu hampir selesai pada tahun 1983, mereka yang melihatnya terkejut, ketika menemukan keretakan-keretakan besar di bangunan itu. Penduduk kampung mengetahui bahwa flat-flat itu dibangun di atas tanah rawa-rawa yang lembek dan menduga bahwa dinding-dinding semen bertingkat empat akan roboh. Ketika flat-flat yang retak dibongkar dan dibangun kembali, penduduk kampung ingin tahu apakah mereka akan pernah pindah ke dalamnya. Dalam pada itu, penduduk kampung diperintahkan untuk meninggalkan barak-barak mereka yang sementara karena pemerintah kota yang lain ingin menggunakan tanah itu. Kontrak Perumnas untuk penggunaan tanah yang sementara itu telah berakhir beberapa bulan sebelumnya.[40] Penduduk kampung yang sudah tinggal di barak-barak penampungan menjadi bingung, mereka harus pindah, tetapi tidak tahu harus pindah ke mana.

Ketika flat-flat itu selesai dibangun, maka flat-flat itu diiklankan untuk dijual secara komersial sebelum penduduk kampung diberi jatah. Unit-unit itu akan dijual dengan harga antara Rp 13.000.000,- (US$ 13.000) dan Rp 16.500.000,- (US$ 16.500).[41] Harga-harga ini jauh melebihi harapan penduduk kampung. Kepanikan itu merebak, ketika mereka percaya bahwa harga-harga flat telah diubah melebihi kemampuannya dan bahwa unit-unit itu dijual untuk kelas-kelas menengah Jakarta. Sebagian besar penduduk kampung tidak memahami konsep "subsidi silang" dengan jalan mana flat-flat itu dijual untuk tujuan komersial yang akan membantu dalam mensubsidi flat-flat yang dijual dengan harga yang lebih rendah.

Akhirnya pada bulan April 1984, penduduk kampung mendapat jatah flat. Sebagian besar merasa senang keluar dari barak-

---

39 Ketika penduduk pada akhirnya pindah ke dalam flat-flat, hanya 146 keluarga tetap tidak termasuk dalam 160 keluarga yang semula. Pada bulan November 1986, diperkirakan 15% telah meninggalkan flat-flat (kerja lapangan tahun 1986).

40 Sebuah surat kepada Menteri Sekretaris Negara TN.13.03, 13 Juni 1981 dari Menteri Pekerjaan Umum, menunjukkan bahwa tanah yang dikontrol oleh Departemen Perhubungan akan dipinjam oleh proyek itu selama kira-kira dua tahun (dari bulan Juli 1981 sampai bulan Juli 1983).

41 Pengumuman Perum Perumnas Nomor: Dir 4/1182/21/111/84 Tentang Pembukaan Pendaftaran Penduduk Rumah Susun di Lokasi Kebun Kacang Jakarta Pusat, Jakarta 12 Maret 1984.

barak mereka yang sementara, tetapi beberapa yang lain merasa cemas oleh prosedur-prosedur alokasi dan biaya yang tidak dipenuhi lebih dahulu. Sumira, misalnya tidak memperoleh jatah flat yang ia minta. Unit itu lebih kecil, berada di lantai empat dan di blok flat-flat yang sudah retak. Penduduk lain merasa senang mendapatkan unit yang besar di lantai dasar. Setelah terjadi sedikit perlawanan oleh mereka yang merasa bahwa penjatahan flat itu tidak adil, maka akhirnya sebagian besar secara pasrah menerima flat yang ditawarkan itu. Mereka hanya ingin melepaskan diri dari ketidakamanan dan kemelaratan selama dua setengah tahun yang lampau dan menegakkan kembali cara hidup yang lebih permanen di flat-flat. Tetapi setelah pindah ke dalam unit-unit mereka, bagaimanapun, beberapa penduduk menghadapi biaya-biaya listrik, gas dan air yang tidak diduga sebelumnya dan sertifikat-sertifikat tambahan dari *lurah*. Mereka yang tidak dapat memikul beban-beban finansial ini akhirnya meninggalkan flat-flat itu.

Dua ratus keluarga yang tidak mengambil flat tetapi pindah ke unit-unit inti Perumnas beruntung karena dapat menempati langsung rumah-rumah baru mereka tanpa trauma ketika menunggu lama dalam akomodasi sementara. Mereka telah memilih tiga perumahan alternatif yang terletak 15 sampai 20 km ke sebelah selatan, timur atau barat Jakarta. Sebagian besar penduduk memilih lokasi yang terdekat dengan desa dari mana sanak-saudaranya datang dua puluh tahun yang silam. Dengan demikian, tidak merupakan kejadian yang kebetulan bahwa mereka yang dari kelompok kerabat Ibu Innah memilih Depok, sementara yang dari lingkungan Ibu Cia memilih Tangerang.

Enam bulan pertama di unit Perumnas merupakan keadaan yang sangat traumatis bagi kehidupan kebanyakan penduduk kampung. Unit-unit inti seluas 21 m^2 dalam keadaan rusak. Unit-unit ini dindingnya berlubang-lubang, jendelanya rusak dan tidak ada pintu. Munculnya desas-desus mengenai adanya pencuri membuat penduduk tidak berani meninggalkan unit-unit mereka karena takut kalau bupet, meja, pesawat televisi dan kursinya dicuri. Setiap unit memiliki kakus umum tetapi tidak satu pun yang digali sampai kedalaman tiga meter. Pada beberapa tempat, lantai dasar dari unit-unitnya lebih rendah dari kakus dan tempat mencuci sehingga air dan kotoran mengalir ke dalam rumah-rumahnya.

Semua masalah ini dapat diperbaiki sendiri oleh penduduk kampung itu, tetapi para pejabat Perumnas menegaskan bahwa

mereka harus memiliki izin untuk memperbaiki unit-unit itu. Perumnas sebenarnya bertanggung jawab atas bangunan dan pemeliharaan unit-unit ini, yang telah berdiri kosong selama paling tidak dua sampai tiga tahun. Jika penduduk kampung mengajukan permohonan tertulis untuk suatu perbaikan yang diperlukan, maka Perumnas berjanji untuk memperbaiki. Tetapi kalau tidak memberi uang kepada petugas Perumnas, permohonan mereka tidak diperhatikan. Penduduk kampung bahkan percaya bahwa unit-unit itu telah dirusak dengan sengaja oleh orang-orang yang berhubungan dengan Perumnas sehingga pendapatan tambahan dapat mereka peroleh dari perbaikan itu.

Penduduk malah memilih unit-unit Perumnas yang di pinggir kota supaya tidak repot dengan birokrasi pemerintah kota, namun mereka tidak bisa menghindarinya. Daripada repot mengurus izin perbaikan dari Perumnas yang belum tentu diperhatikan, penduduk memperbaiki sendiri unit-unit yang ditempatinya. Sementara penduduk kampung memindahkan kakus supaya air tidak mengalir ke lantai, petugas Perumnas datang dan bertanya mengapa memindahkan kakus tanpa izin. Para pegawai Perumnas mendapatkan uang atas izin-izin yang mereka jual. Mereka juga mencoba untuk mendikte mengenai bangunan unit-unit itu didisain kembali dan jenis bahan bangunan yang digunakan. Kayu dan bambu, misalnya, dilarang dan harus batako yang digunakan.[42] Para pegawai Perumnas marah terhadap penduduk kampung, karena melangkahi Perumnas dan melakukan pekerjaan mereka sendiri.

Lebih dari separuh rumah tangga kampung memukimkan diri mereka sendiri. Sebagian besar rumah tangga membeli tanah atau rumah-rumah *bobrok* yang dipasarkan di pinggiran kota atau berkumpul menyatu dengan sanak saudara. Mereka secara hati-hati menyelamatkan bahan-bahan bangunan dari rumah kampungnya dan membeli papan dan ubin dari rumah-rumah yang berdekatan di Kebun Kacang yang kemudian digunakan kembali untuk rumah-rumahnya di mana saja. Golongan minoritas yang lebih kaya menempati kembali di kampung-kampung dekat pusat kota serupa dengan Kebun Kacang. Beberapa dari mereka segera menemukan bahwa rumah-rumah baru ini juga akan terkena penggusuran dan bahwa mereka tidak memiliki hak legal yang lebih besar daripada yang telah mereka miliki di Kebun Kacang.

---

42 Batu tembok berlubang yang mudah remuk.

Pemukiman kembali sama sekali menampakkan ketidakberdayaan golongan miskin di perkotaan. Selama bertahun-tahun mereka telah merasakan ketidakberdayaan, tetapi pada masa lalu jarang harus berkonfrontasi secara langsung dengan pemerintah. Tetapi, dengan adanya penggusuran, pemerintah mencampuri langsung rumah-rumahnya. Dengan menghadiri pertemuan-pertemuan, dengan memahami kata-kata para pembuat kebijakan yang mengandung kontradiksi, dengan membaca dan mengisi formulir-formulir, dengan memperoleh tandatangan-tandatangan dan berurusan dengan kaum birokrat kecil, tiba-tiba kehidupan mereka didominasi seperti yang tidak pernah dialami sebelumnya. Sebagian besar penduduk kampung menyangsikan maksud-maksud baik pemerintah dan tidak tahu apa yang akan diharapkan atau bagaimana harus bereaksi.

Untuk pertama kali dalam eksistensi kampung, para anggotanya mencoba untuk berorganisasi. Pertemuan-pertemuan diselenggarakan dan para juru bicara dipilih untuk mewakili komunitas itu. Pers hanya memberi fasilitas saluran keluar bagi penduduk kampung untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap proyek itu. Lima dari penduduk kampung yang lebih berpendidikan dapat melancarkan kampanye pers yang canggih. Tetapi ketika beberapa pemimpin kampung yang penting beralih mendukung pemerintah, kesatuan penduduk kampung yang mudah retak dihancurkan. Komunitas itu pecah tercerai-berai sehingga penduduk kampung tidak mempercayai satu sama lain.

Penggusuran Kebun Kacang menandai titik-balik yang dramatis bagi sebagian besar penduduk kampung tetapi di pihak lain, hilangnya rumah-rumah atau sesuatu yang paling berharga merupakan kejadian biasa dalam kehidupan mereka yang berubah-ubah cepat. Yang luar biasa dalam kehidupan penduduk kampung adalah kenyataan bahwa ditawari ganti rugi yang pantas dan perumahan alternatif di flat-flat pusat kota atau tempat-tempat dan unit-unit Perumnas di pinggiran kota. Sementara sebagian kecil dapat menerima dan menyesuaikan dengan cara kehidupan baru di pusat kota, maka sebagian besar lari ke pinggiran dan mencoba untuk membangun kembali komunitas dan pekerjaan mereka yang telah hilang. Meskipun kampung Kebun Kacang dihancurkan, namun bagi penduduk sebelumnya, perjuangan hidup tetap terus berjalan.

6

Akibat Selanjutnya (1981-1987)

Meskipun bagi kebanyakan penduduk kampung, penggusuran Kebun Kacang merupakan pengalaman yang paling mengerikan dan mengecewakan dalam kehidupan mereka, namun hal itu juga memberikan kepada mereka kesempatan yang tak terbayangkan untuk menempuh kehidupan yang sangat berbeda. Tidak seperti sebagian besar rencana penggusuran lainnya yang telah memaksa penduduk pindah dari rumah-rumah mereka tanpa diberikan ganti rugi yang memadai atau perumahan alternatif. Rencana ini tidak hanya memberikan ganti rugi yang besar atas hilangnya rumah-rumah penduduk kampung, tetapi juga pemukiman kembali dalam flat-flat yang banyak disubsidi dan dilayani secara penuh di lokasi yang sama. Karena itu, untuk pertama kali dalam kehidupannya, penduduk kampung dapat memiliki sejumlah besar uang dan kesempatan untuk membeli akomodasi secara legal, aman dan dengan pelayanan yang baik.

Kesempatan untuk Memperoleh Ganti Rugi

Setelah pembayaran ganti rugi, sebagian besar penduduk kampung memiliki uang tunai lebih banyak daripada sebelumnya. Meskipun mereka mengeluh bahwa ganti rugi itu tidak memadai, setiap rumah tangga menerima jumlah uang yang besar daripada yang dapat mereka peroleh jika mereka menjual rumahnya dengan harga pasaran rumah kampung yang ada. Sebelum penggusuran, para penduduk kampung akan merasa beruntung jika menerima setengah harga saja dari ganti rugi yang ditawarkan di kemudian hari. Bagi mereka yang memiliki tanah dan perumahan sendiri, jumlah ganti rugi yang dibayarkan adalah dua sampai tiga kali

lipat daripada pendapatan mereka setiap tahun. Ketika uang berada di tangan, orang-orang tiba-tiba mendapatkan 100 sampai lebih dari 1000 kali penghasilannya sehari-hari.[1] Mereka belum bisa mengelola uang yang begitu banyak. Sebelumnya sebagian besar orang segera membelanjakan untuk apa pun setelah mereka mendapatkannya. Tidak sering terjadi ketika mereka memiliki lebih banyak uang daripada yang diperlukan, mereka membeli barang-barang konsumsi atau barang-barang perhiasan atau merenovasi rumah-rumahnya.

Pemerintah menganggap bahwa penduduk kampung akan membelanjakan sebagian besar, jika tidak semuanya, dari ganti rugi untuk akomodasi alternatif. Tetapi para penguasa tidak menghendaki adanya tekanan-tekanan praktis dan sosial yang ditunjukkan oleh sebagian besar penduduk kampung. Hanya sejumlah kecil penduduk yang berpendidikan, keadaan lebih baik dan

1 **Pembayaran ganti rugi, rata-rata penghasilan sehari-hari dan penghasilan satu tahun (rumah-rumah tangga terpilih).**

Rumah Tangga	*Pembayaran Ganti rugi dalam (Rp)*	*Penghasilan per hari*	*Rasio Pembayaran Ganti rugi terhadap penghasilan per hari*	*Pendapatan Tahunan dalam (Rp)*	*Rasio Ganti rugi terhadap Pendapatan Tahunan*
H. Eddy	9.000.000	7000	1000 : 1	2.700.000	3 : 1
Burhanuddin	7.615.000	7000	1000 : 1	2.700.000	3 : 1
Mus	3.393.000	3000	243 : 1	1.080.000	3 : 1
Idi	2.425.000	10.000	1434 : 1	3.600.000	0,67 : 1
Sumira	2.355.350	1665	1000 : 1	594.000	4 : 1
Acang	1.958.350	2000	800 : 1	720.000	3 : 1
Peking	1.198.350	1500	780 : 1	540.000	2 : 1
Salim	1.172.000	1500	700 : 1	540.000	2 : 1
Amat	1.025.000	1000	1000 : 1	360.000	3 : 1
Yusuf	500.000	2000	250 : 1	720.000	0,7 : 1
Tuti	250.000	1500	100 : 1	540.000	0,5 : 1
Karsinah	65.000	650	100 : 1	240.000	0,3 : 1
Badria	65.000	500	130 : 1	180.000	0,4 : 1

Tabel ini diperoleh sebagian dari daftar: Pembayaran Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Bangunan/Tanaman di Kebun Kacang untuk Keperluan Proyek Perum Perumnas Berdasarkan Surat Keputusan Gub. KDKI Jak. No. 755/Tahun 1981 tanggal 18 Juli 1981 dan dari kerja lapangan saya sendiri.

tidak terikat yang dapat membelanjakan sebagian besar ganti ruginya untuk perumahan bagi dirinya sendiri dan sisa untuk usaha-usaha produktif. Untuk sebagian besar penduduk, aset-aset kehidupan mereka segera dikonsumsi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keluarga, membayar kembali kepada para kreditor dan mewujudkan keinginan mereka. Dalam beberapa bulan, tinggal sedikit uang ganti rugi yang tersisa.

Cara kebanyakan penduduk kampung memakai uang ganti rugi dipengaruhi oleh pengalaman dan pendidikan yang terbatas, ekonomi dan hubungan sosial yang tidak pasti. Dari pengamatan saya, sebagian besar menggunakan uangnya sesuai dengan prioritas-prioritas berikut ini:

1. Kehidupan sehari-hari selama penggusuran dan pemukiman kembali.
2. Komisi-komisi untuk para pimpinan kampung dan perantara yang memberikan bantuan selama penggusuran.
3. Pembayaran kembali utang-utang.
4. Kewajiban-kewajiban dan warisan sosial.
5. Perumahan.
6. Barang-barang konsumsi.
7. Simpanan dalam bentuk barang perhiasan, tanah atau deposito di bank.
8. Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pendapatan.

Kebutuhan rumah tangga sehari-hari dipenuhi dengan menggunakan ganti rugi selama kekacauan penggusuran. Sumber pendapatan sebagian besar penduduk kampung terganggu dan mereka terpaksa mengandalkan sebagian ganti ruginya untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Mereka yang bekerja bebas sebagai pendaur ulang aki, pedagang kecil dan tukang becak terutama menerima dampaknya. Sementara menghadiri pertemuan-pertemuan, antri untuk mengambil ganti rugi dan mencari akomodasi alternatif, mereka tidak memperoleh penghasilan. Ketika kekacauan itu berakhir, paling tidak setelah enam bulan, mereka membutuhkan lebih dari Rp 200.000,- (950 liter beras) untuk makanan, transpor, tempat berteduh sementara dan biaya pendaftaran sekolah kembali . Mereka yang memiliki pekerjaan tetap merasa segan dan malu untuk meminta izin libur dari kantor, tempat mereka kerja, untuk mengurus pemukiman mereka kembali, tetapi mereka tetap menerima gaji.

Selama proses penggusuran, penduduk kampung diwajibkan membayar atas bantuan yang telah diterima dari pimpinannya. Untuk menerima ganti rugi, formulir harus diisi dan ditandatangani oleh petugas. Hampir tidak ada penduduk kampung terutama di kalangan yang paling miskin dan buta huruf, yang pernah melihat cek atau dunia perbankan. Karena itu mereka mempercayakan pada pimpinannya, atau beberapa perantara lainnya, untuk membantu menukar cek-ceknya dengan uang tunai. Pemimpin, seperti Cecep yang telah membantu menaikkan ganti rugi para warganya mengharapkan komisi, yang dapat mencapai 10% untuk setiap ganti rugi yang diterima oleh penduduk kampung. Cecep atau salah satu pembantunya, secara terang-terangan mendatangi rumah-rumah penduduk kampung dan meminta komisi. Jika komisi itu tidak diberikan, ia mengancam untuk membuat kehidupan penduduk kampung lebih sulit, dengan menolak untuk menandatangani dokumen apa pun yang dibutuhkan penduduk kampung untuk kepindahan mereka ke lokasi baru. Burhanuddin, suami dari Ibu Cum yang menerima ganti rugi yang paling tinggi, terpaksa harus mengeluarkan hampir setengah juta rupiah (2.400 liter beras) kepada Cecep, sementara Amat, salah seorang dari yang paling miskin, terpaksa melepaskan uang Rp 100.000 (500 liter beras), yang sangat dibutuhkan untuk perumahan alternatif. Hanya satu atau dua penduduk kampung yang dapat menghindarkan diri dari pembayaran komisi dengan cara menghilang dari daerah itu segera setelah mereka menerima ganti rugi itu, atau dengan menegaskan bahwa mereka telah membelanjakan uang ganti ruginya sebelum pimpinannya membuat "aturan main." Bagaimanapun beberapa penduduk kampung yang lain ingin memberikan sumbangan karena mereka merasa berterima kasih telah dibantu oleh pimpinannya selama kekacauan dalam penggusuran itu.

Dengan uang tunai di tangan, penduduk kampung merasa perlu untuk membayar kembali mereka yang telah menolong di masa lampau. Selama ini uang mereka belum kelihatan nyata karena semua dalam bentuk tanah dan rumah, sehingga mereka belum merasa perlu untuk membalas budi kepada orang yang pernah menolongnya. Kini tanah dan rumah mereka dalam bentuk uang. Mereka tidak dapat menghindar dari tanggung jawab untuk membalas budi. Misalnya seseorang membelanjakan seperempat bagian dari ganti rugi untuk orang yang telah memelihara anaknya

setelah istrinya meninggal. Seperempat bagian lagi dia pakai untuk selamatan orang yang telah meninggal.

Para kreditor yang merasa bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari ganti rugi penduduk kampung membuat tuntutan. Misalnya Peking mempunyai utang sampai 15% dari ganti ruginya untuk bahan makanan yang telah diperolehnya dari empat warung yang berlainan dalam lingkungan itu. Sumira harus membelanjakan 5% dari ganti rugi untuk membeli cincin emas bagi ibunya yang telah dipinjamnya ketika perdagangannya bangkrut. Ia juga mempunyai utang yang sudah lama kepada lintah darat (*moneylender*) untuk biaya renovasi rumah. Mus membelanjakan 15% dari ganti ruginya untuk membayar kembali utang-utang batik dan barang perhiasan yang dijual sambilan. Hampir tidak ada seorang penduduk kampung pun yang tidak mempunyai utang-utang semacam itu, tetapi sebagian besar yang berutang adalah golongan yang paling miskin, yang sering kehabisan uang.

Kadang-kadang ganti rugi dibagi di antara banyak saudara. Misalnya lima bersaudara yang bertempat tinggal berjauhan merasa mempunyai hak yang sama atas rumah yang mendapat ganti ruginya, maka masing-masing memperoleh seperlima bagian dari harga ganti rugi. Sedangkan mereka yang tinggal di rumah yang kena bongkar hanya menerima ganti rugi yang cukup untuk membayar uang muka flat, dan membeli sedikit perabot.

Orang yang dari dulu menyewa tanah untuk tempat membangun rumah juga mengalami kesulitan. Misalnya Yusuf menyewa tanah Haji Tejo. Dulu harga sewa tanah hampir tidak ada harganya. Pada saat dibongkar Yusuf hanya dapat ganti rugi untuk rumah dan Haji Tejo mendapat ganti rugi untuk tanah. Akibatnya Yusuf hanya menerima uang untuk membangun rumah, tetapi tidak cukup untuk membeli tanah.

Untuk menjamin di hari tuanya, para orang tua merasa wajib untuk memberikan sebagian dari ganti ruginya kepada anak-anaknya. Anak-anak, sebaliknya, merasa berhak untuk mewarisi sebagian dari ganti rugi orang tuanya karena rumah di kampung akan diwariskan. Anak-anak yang sudah nikah yang tinggal bersama orang tuanya biasanya menerima 5 sampai 10% dari ganti rugi itu, sehingga mereka dapat pindah rumah di tempat lain. Sebagaimana anak-anak Peking yang sudah nikah, mereka tidak terdaftar sebagai keluarga yang berdiri sendiri, dengan demikian

tidak berhak atas flat pemerintah atau unit Perumnas. Mereka harus pindah bersama orang tuanya atau menyewa akomodasi di tempat lain. Anak-anak yang belum nikah menerima hadiah-hadiah seperti anting-anting emas, radio-kaset, sepeda atau pesawat televisi.

Para isteri yang telah ditinggalkan atau diceraikan oleh para suaminya sering diwajibkan untuk menreima sebagian pembayarannya. Para suami yang sudah tidak muncul di rumah-rumah isterinya yang dulu dan menolak untuk pergi sampai mereka dibayar. Misalnya Janto, suami Sumira meminta sedikitnya 10% dari ganti rugi. Suami yang lain mengambil sepertiga dari ganti rugi isterinya. Para ayah yang selama bertahun-tahun menghilang tiba-tiba muncul untuk meminta bagian dari ganti rugi keluarganya. Beberapa penduduk kampung yang lihai memutuskan tidak menguangkan cek-ceknya sampai sanak-saudara yang memintanya telah pergi.

Pada saat itu penduduk yang paling miskin memukimkan kembali diri mereka, lebih dari seperempat bagian dari ganti ruginya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, komisi-komisi, utang-utang dan kewajiban-kewajiban sosial. Kebanyakan dari mereka yang menerima ganti rugi kecil seperti Salim, suami Juria atau Amat ditawari untuk membangun kembali rumah-rumah di kampungnya di samping rumah saudaranya. Uang yang tersisa dipakai untuk membeli dan mengangkut bahan-bahan bangunan yang tidak terpakai dari Kebun Kacang dan sisanya mereka pakai untuk membayar tanah saudaranya. Namun, kebanyakan kayu yang dibeli Salim, ternyata salah ukurannya dan jelek kualitasnya sehingga harus dibuang. Penduduk yang lain seperti isteri Yusuf tidak perlu mengharap pada saudara-saudaranya atas tanah, karena ia masih memiliki hak turun-temurun atas tanah di pinggiran Jakarta. Akibatnya, mereka dapat menggunakan sebagian besar dari ganti ruginya untuk membangun pondok bertingkat dua yang sangat menarik dengan jalan kecil berbatu, kakus dan fasilitas-fasilitas untuk mencuci yang dibangun oleh Yusuf dengan bantuan menantu lelakinya.

Penduduk kampung yang menerima ganti rugi kecil dan tidak memiliki hak turun-temurun atas tanah atau sanak-saudara untuk meminta bantuan, terpaksa menyimpan deposito untuk flat pemerintah, unit perumahan atau menyewa akomodasi di luar proyek. Mereka kekurangan sumber daya (dari Rp 1.100.000,- sampai

Rp 4.000.000,-/5.200-19.000 liter beras) untuk membeli perumahan alternatif di pusat atau di pinggiran kota. Jika mereka menerima flat pemerintah atau unit Perumnas, mereka harus membayar uang muka minimum Rp 75.000,- (360 liter beras) ketika mereka menerima ganti ruginya. Orang-orang seperti Karsinah, yang hanya menerima biaya untuk mengatasi kesukaran Rp 65.000,- harus mencari Rp 10.000,- untuk uang muka dan menggunakan semua uang tunai yang dimilikinya untuk perumahan kembali.

Beberapa penduduk kampung menolak kesempatan untuk membeli flat di pusat kota atau unit Perumnas secara cicilan. Mereka memiliki sumber daya secukupnya untuk membeli rumah kampung alternatif di pusat kota atau tanah di pinggiran kota. Misalnya, Mus membelanjakan setengah dari ganti ruginya untuk membeli rumah yang sebagian sudah terbakar di dekat pusat kota. Ia mendapatkan rumah itu melalui informasi dari mulut ke mulut. Para anak buahnya membuat es krim dan sanak-saudara dari desa, yang bekerja dalam satu keluarga, secara berhati-hati membongkar rumahnya di Kebun Kacang yang baru saja direnovasi. Mereka mengambil bahan-bahan bangunan lama, papan-papan ke lokasi baru. Dalam waktu empat hari mereka telah menyelesaikan rumah baru, yang tampak identik dengan rumah yang dapat mereka robohkan. Ketika di Kebun Kacang, Mus hanya menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang bekerja dan seluruh biaya tanah dan rumah hampir mendekati tiga perempat bagian dari ganti ruginya. Sebagian besar dari mereka yang mampu membeli rumah-rumah kampung alternatif di pusat kota seperti Haji Eddy, membayar dua kali sebanyak Ibu Mus yang telah beruntung membeli rumah yang sudah rusak dan mendapat bantuan tenaga dari kelompoknya. Mereka yang membeli tanah dan perumahan di pinggiran kota, hanya membayar seperempat dari biaya perumahan semacam itu di pusat kota.

Sebagian besar penduduk kampung yang menerima ganti rugi secukupnya lebih menyukai membayar secara penuh rumah-rumahnya yang baru, sehingga mereka tidak akan dibebani cicilan bulanan. Misalnya Burhanuddin dan Senah segera membayar unit-unit Perumnas dan dengan begitu mendapatkan hak legal dan hak untuk membangun kembali rumah-rumah baru mereka sebagaimana yang disukainya. Mereka segera membangun rumah-rumah yang serupa dari rumah-rumahnya yang hilang. Menurut mereka

bahwa pindah ke dalam rumah yang bentuknya sama dapat mengurangi trauma penggusuran.

Sebagian penduduk kampung setelah mengetahui jumlah minimal untuk membayar uang muka rumah, mereka memakai sisa uang untuk merenovasi dan membeli perabot-perabot rumah tangga yang baru. Untuk menjaga gengsi, mereka mengubah unit Perumnas yang sederhana dengan pilar-pilar di luar agar kelihatan lebih mewah. Misalnya Peking, yang dulu hanya memakai tikar robek, kini ikut-ikutan membeli perabot tempat tidur, kursi dan pesawat TV. Sedang yang lebih mampu dari Peking, mengganti kursi dengan sofa, bufet dan kulkas. Misalnya Ibu Sumira yang memperoleh ganti rugi besar memakai uangnya untuk memplester dinding rumah dan mengganti lantai semennya dengan ubin. Dalam suatu kasus ekstrim, seorang laki-laki membelanjakan semua uang ganti ruginya untuk makanan mewah, sepatu putih bertumit tinggi dan pakaian mahal, tanpa meninggalkan apa-apa untuk isteri dan anak-anaknya.

Kalaupun ada yang mau menyimpan uang, mereka membeli perhiasan emas dan barang-barang. Di samping perhiasan dan barang-barang yang mereka beli itu bisa dipakai sebagai perhiasan dan menambah prestise mereka, juga dengan mudah bisa dijual pada saat mereka perlu. Sebenarnya tak seorang pun menyimpan uang ganti ruginya di bank. Sebagian besar penduduk tidak memahami atau tidak mempercayai bank. Lebih jauh, Islam melarang memungut hasil dari suku bunga. Menurut Sumira, dengan menerima suku bunga dari deposito di bank berarti di akhirat akan menerima balasan yang setimpal. Sumira, yang menuruti nasehat saya menyimpan sejumlah besar ganti ruginya di bank, yang kemudian menariknya kembali untuk merenovasi flat.

Hanya sebagian kecil penduduk memakai uang ganti rugi untuk kegiatan yang produktif, yaitu untuk berdagang kecil-kecilan. Misalnya tiga perempat dari uang ganti rugi Acang dipakai untuk membuka warung kembali di unit Perumnas. Dengan modal yang lebih besar Acang bisa membuka warung yang lebih lengkap daripada dulu di Kebun Kacang. Dia membeli kulkas untuk minuman dingin yang dijual, juga ditambah dengan menjual beras, ikan asin, permen dan keperluan-keperluan lain yang kira-kira dibutuhkan tetangga. Tuti dan Boco menerima ganti rugi agak banyak, dan menyimpan setengah bayarannya di unit Perumnas dan sisanya diinvestasikan dalam perdagangan sayur-mayur segar milik Tuti.

Beberapa penduduk kampung yang kaya menanamkan uangnya dalam kendaraan angkutan umum. Ketika Burhanuddin mendapat ganti rugi dan pindah ke unit Perumnas di luar kota, dia mengubah haluan dari membuat es contong yang dulu di Kebun Kacang ke usaha membeli mobil angkutan. Menurut dia akan lebih berhasil dengan angkutan umum daripada membuat es contong karena langganannya sudah tersebar luas, tidak jelas kemana. Ketika terjadi penggusuran di Kebun Kacang, angkutan umum Burhanuddin mengangkut segala perabot dan bahan-bahan bangunan bekas milik penduduk ke tempat-tempat yang baru di pinggir kota. Jadi mereka menanam modal dalam angkutan umum dan berhasil. Walaupun mereka yang sudah menanamkan sebagian besar dari ganti ruginya untuk kegiatan yang produktif dengan prospek yang lebih bagus, mereka masih mempunyai masa depan yang belum jelas.

Rencana pemerintah pada awalnya adalah bahwa ganti rugi yang diberikan kepada penduduk untuk membangun kembali rumah mereka yang telah dibongkar, tetapi penduduk berpikir bahwa uang ganti rugi itu untuk maksud-maksud lain. Mereka belum pernah memegang uang begitu banyak. Mereka belum pernah harus membeli tanah dan membangun rumah secara kontan. Biasanya mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli tanah dan membangun rumah. Mereka tidak sempat berpikir mengenai masa depan, hidup hanya untuk hari ini. Jadi kalau mereka memegang uang habis untuk hari ini saja. Mereka mementingkan makan untuk hari ini, status sosial dan gengsi. Untuk meningkatkan status sosial dan gengsi, barang-barang konsumsi harus dibeli dan kewajiban-kewajiban sosial harus dipenuhi. Sebagian penduduk kampung tidak tahu bagaimana caranya melakukan investasi yang berhasil, tetapi mereka mengetahui bahwa kerabat keluarga dan teman-teman yang ditolongnya kelak akan datang untuk memberikan bantuan pada saat timbul kesulitan. Barang-barang konsumsi adalah nyata dan dapat digunakan dengan segera dan berguna pula sebagai simpanan kekayaan yang dapat diuangkan pada saat diperlukan. Mereka berpikir bahwa uang tidak terhambur atau hilang jika disimpan dalam bentuk barang. Hanya penduduk yang lebih kaya atau berpendidikan lebih baik secara hati-hati menyimpan sejumlah uang tertentu di bank atau mengadakan investasi untuk meningkatkan penda-

patan yang dapat memberikan keamanan ekonomi untuk jangka panjang.

Kesempatan Memperoleh Flat

Penduduk kampung ditawari kesempatan untuk membeli flat-flat yang banyak disubsidi, diberikan pelayanan penuh di pusat kota tempat kampungnya yang dulu berada. Flat-flat itu harus dibayar secara kredit setiap bulan selama dua puluh tahun dengan bunga 5% per tahun. Cicilan setiap bulan berkisar antara Rp 10.000,- sampai Rp 40.000,- (48-190 liter beras) dan diharapkan tidak lebih dari 25% dari pendapatan penduduk kampung. Setiap flat dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas gas, listrik dan air. Perumnas bertanggung jawab atas pengumpulan sampah secara teratur, penjaga malam dan pemeliharaan semua fasilitas. Klinik kesehatan, sekolah, mesjid dan gedung pertemuan dibangun di dekatnya.

Tidak mengherankan, kira-kira seperlima dari penduduk kampung (160 rumah tangga), terutama adalah kalangan yang sudah makmur dan berpengetahuan lebih baik, telah mendapatkan flat-flat itu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap atau pendapatan cukup dan merasa dapat memenuhi cicilan tetap setiap bulan. Misalnya, para pimpinan dan juru bicara kampung, memiliki hubungan yang lebih baik dengan pejabat pemerintah, mempunyai informasi yang lebih lengkap tentang proyek dan menaruh kepercayaan kepada pemerintah bahwa benar-benar akan diberikan rumah lagi. Mereka memahami bahwa pemerintah tidak mau gagal dengan contoh pertama pemukiman rakyat kecil di pusat kota. Tidak seperti penduduk kampung yang kurang berpengetahuan, mereka percaya bahwa jika mereka tidak dapat membayar flat-flat itu, mereka tidak akan dipaksa keluar. Sejumlah wiraswastawan yang lebih besar menerima flat itu seperti Idi, yang perlu bertempat tinggal di pusat kota dekat dengan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan penghasilan. Orang seperti Idi siap menanggung risiko dalam cara hidup yang sangat berbeda dari cara hidup yang telah dialaminya di kampung. Ia tidak bergantung pada lingkungan kampung untuk mata pencarian atau kesejahteraan dan dia mengharap untuk mencoba hidup dalam flat yang dikelilingi tetangga baru dan kelas menengah.

Sebaliknya, sebagian besar penduduk yang mendapatkan penghasilan kurang dari Rp 60.000,- (286 liter beras) per bulan atau

hanya memiliki pekerjaan tidak tetap, merasa tidak dapat membayar cicilan flat secara tetap. Para pengendara becak, penjual es krim, pendaur ulang aki dan mereka yang melayani kebutuhan-kebutuhan penduduk kampung seperti air, minyak tanah, makanan matang dan binatu, merasa bahwa flat-flat itu telah menghancurkan sarana mata pencariannya. Kebanyakan di antara mereka merasakan adanya ikatan emosional yang kuat dengan kampung dan secara sosial dan ekonomi merasa bergantung pada para tetangganya yang dulu. Mereka keberatan dengan suasana flat-flat yang asing dan terisolasi. Mereka ingin melestarikan ikatan-ikatan sosialnya dengan kerabat dan teman-teman kampung dan beberapa penduduk memilih untuk pindah bersama-sama ke pinggiran kota untuk mencoba menciptakan kembali komunitas yang telah hilang.

Sebagian kecil penduduk kampung yang miskin yang menerima flat-flat itu adalah mereka yang perlu tinggal di pusat kota jika mereka ingin tetap bekerja. Mereka memilih tempat tinggal yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki untuk menuju tempat kerja di sektor jasa yang dibayar rendah, karena tidak mampu membayar ongkos transpor sehari-hari. Selain meninggalkan pekerjaan dan pindah ke tempat lain, alternatif lainnya adalah menyewa akomodasi di pusat kota atau membayar cicilan untuk flat secara bulanan. Sebelum dibongkar beberapa penduduk hanya dapat menyewa akomodasi di Kebun Kacang dan tidak mampu untuk membeli rumah. Mereka menyadari bahwa daripada secara terus-menerus membayar sewa, lebih baik membayar cicilan untuk flat yang pada suatu saat nanti dapat mereka miliki.

Idi adalah satu contoh orang yang dapat menerima flat tanpa ragu. Ia adalah salah satu dari orang-orang yang paling kaya, berpengalaman dan dinamis dalam lingkungan Ibu Innah. Sementara sebagian besar penduduk kampung lainnya terombang-ambing pikirannya, tidak dapat memutuskan, Idi malah tidak hanya membeli satu tetapi dua unit flat di Tanah Abang.[2] Satu flat digunakan untuk tempat tinggal, sementara yang lainnya untuk perusahaannya membuat topi. Ia tidak meratapi kehilangan para tetangga di kampungnya dan rumah permanen bertingkat dua yang baru selesai dibangunnya. Ia percaya bahwa rahasia keberhasilan adalah

2 Ia tidak ingin menunggu enam sampai dua belas bulan flat-flat di Kebun Kacang dibangun.

menyesuaikan dengan keadaan yang berubah dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan baru.

Bang Idi segera melihat keuntungan dari flat-flat itu. Ia menyadari bahwa perusahaannya tidak dapat bertahan dalam keadaan kacau dan tidak menentu yang melilitnya selama enam bulan dalam penggusuran. Tanpa alamat yang jelas di dekat pusat kota, para penjahit topinya tidak dapat bekerja, para pelanggannya tidak dapat memberikan pesanan dan para pemasok bahan-bahan bakunya tidak akan memberikan kredit kepadanya. Yang terpenting, Idi merasa bahwa tanpa landasan yang stabil ia tidak dapat mengelola perusahaannya. Sebelumnya ia mendirikan sebuah perusahaan di desa dekat Bandung, ia telah belajar bahwa ia harus dekat dengan para pemasok bahan baku dan jaringan pemasaran di Tanah Abang dan kantor-kantor di Jakarta Pusat.

Bang Idi bisa mengelola sejumlah besar uang. Pada masa sebelumnya ia telah membeli pohon-pohon cengkeh, sawah, sebuah mobil dan generator dan membangun kembali rumahnya di desa. Ia telah memanfaatkan bank dan cek dalam transaksi-transaksinya dengan para pengusaha toko Cina dan departemen-departemen pemerintah. Ia memahami hipotik dan tingkat suku bunga dan menyadari bahwa pemerintah sedang menawarkan kepadanya investasi yang baik. Dengan demikian, ia menanamkan semua ganti ruginya, yang kurang dari tiga perempat dari pendapatannya setiap tahun, sebagai deposito dalam dua flat.

Dengan menjadi orang pertama dari penduduk kampung yang menerima tawaran pemerintah dan penggusuran rumahnya, ia mendapat perhatian yang cepat dan khusus dalam memproses tuntutan-tuntutannya dan pindah ke flat-flat itu. Namun keputusannya dianggap sebagai pengkhianatan oleh penduduk kampung. Mereka mengatakan "ia mencari untung dan melupakan teman-temannya." Ia dianggap sebagai orang yang mengambil keuntungan dalam kesempitan dan hanya mementingkan kekayaannya sendiri. Ketika usaha Bang Idi berhasil baik dan ia membeli rumah yang sudah rusak dan membangun rumah permanen, penduduk memandang dia dengan iri hati. Ia adalah orang pertama yang mengambil flat sebelum orang lain memutuskan untuk pindah ke flat. Menurut pandangannya, Idi merasa bahwa penduduk adalah "bodoh" dan terjerat dalam kemiskinan yang dibuatnya sendiri. "Di sinilah penduduk kampung memiliki kesempatan yang paling

baik untuk memulai kehidupan baru dan mereka tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang sedang ditawarkan pemerintah."

Ibu Karsinah miskin, buta huruf, tidak berpengetahuan, kurang mempunyai keyakinan dan merupakan salah seorang yang tidak mau mengambil flat. Kalau kita bisa mengerti tentang pikiran Ibu Karsinah mengapa dia tidak mau mengambil flat, kita bisa mengerti alasan rakyat kecil mengapa tidak mengambil flat. Ibu Karsinah berangan-angan untuk memiliki rumah sendiri daripada harus selalu menyewa tempat dan setiap tahun bekerja keras untuk mengumpulkan jumlah uang yang diperlukan. Selama tahun 1970-an, Ibu Karsinah terpaksa pindah dari satu kamar ke kamar lain di Kebun Kacang karena para pemilik kamar menaikkan harga sewanya. Sewa kamar naik tiga kali lebih cepat daripada harga beras.

Pada mulanya, Ibu Karsinah tidak melihat kesempatan baik yang ditawarkan. Sebagai orang yang miskin di daerah itu, yang tidak memiliki rumah, dia hanya menerima "uang susah" untuk pindah ke tempat lain. Uang susah itu disediakan untuk setiap kepala keluarga yang tinggal di daerah itu. Jadi ketika dia memperoleh uang itu rencananya untuk menyewa di tempat lain. Ia yakin bahwa flat-flat itu dimaksudkan untuk kalangan atas (kaya) dan bukan untuk orang-orang seperti dirinya. Ia khawatir dengan jumlah gaji yang diterimanya sebagai perempuan pencuci pakaian di rumah bersalin, tempat ia bekerja, tidak dapat memenuhi cicilan setiap bulan. Jika ia gagal untuk membayar, ia yakin bahwa ia akan diusir keluar ke jalanan. Pada masa silam, petugas pemerintah tidak pernah menunjukkan rasa simpati, jadi "kini mengapa mereka memperlakukannya dengan baik?" Ia khawatir akan suasana flat yang asing dan terisolasi, dan tidak membayangkan "tinggal sendirian, tinggi di langit seperti burung dalam sangkar yang nyata." Ia ingin tinggal di lantai dasar, dekat dengan anak perempuannya yang sudah nikah, yang telah memutuskan pindah ke unit Perumnas di pinggiran kota. Ia lebih menyukai suasana kampung yang beraneka ragam, dengan tempat-tempat yang lebih luas dan bebas untuk melakukan kegiatan berdagang.

Tanpa campur tangan saya, Ibu Karsinah tentu saja tidak akan menerima flat. Saya jelaskan kepadanya bahwa jika ia pindah ke pinggiran Jakarta, ia akan menghabiskan sebagian besar waktu dan gajinya untuk perjalanan ke dan dari tempat kerja setiap hari dan tidak punya uang untuk menyewa kamar, apalagi membeli rumah. Jika ia menyewa kamar di kampung yang lain dekat dengan

tempat kerjanya, maka biaya untuk mengatasi kesulitannya bahkan tidak akan dapat menutup sewa kamar untuk satu tahun. Malahan ia segera akan dipaksa mengumpulkan uang untuk membayar sewa yang lebih tinggi. Ia tidak akan pernah lepas dari rumah sewaan dari tahun ke tahun. Ia tidak akan pernah memperoleh keamanan dan kebanggaan akan rumahnya sendiri. Untuk pertama kali dalam kehidupannya, Ibu Karsinah dapat memulai membeli sebuah rumah dengan menanamkan uangnya dalam flat. Ketika ia hanya memiliki Rp 65.000,- (310 liter beras) dan membutuhkan paling sedikit Rp 75.000,- untuk menanamkan yang dalam flat, saya berjanji untuk menyelesaikan sisanya itu. Uang itu menjamin bahwa ia bisa menempati bedeng dan dapat air serta listrik gratis, sementara flat-flat itu dibangun.[3] Flat-flat yang diusulkan akan dibangun dekat tempat kerja Ibu Karsinah dan dengan begitu ia tidak perlu mengeluarkan ongkos dari pendapatannya untuk transpor ke tempat kerjanya. Ia biasa hidup sendirian di kampung dan dengan demikian flat yang paling kecil berukuran 21 m^2 sudah mencukupi. Dalam keadaan bimbang, Ibu Karsinah mengambil keputusan atas pertimbangan ekonomi, walaupun di dalam hati kecilnya masih ada keraguan dengan bentuk flat yang terpisah-pisah dan tidak membantu hubungan sosial yang lebih erat.

Namun kesangsian Ibu Karsinah tentang ketidakmampuannya untuk membayar flat, mungkin memang pada tempatnya. Dalam sejumlah kesempatan ketika biaya yang tidak dapat diantisipasi timbul, ia meminta bantuan saya. Ketika memasuki flat, ia kekurangan biaya untuk mengangkut barang miliknya dan membayar listrik, gas, dan air. Flatnya bocor sekali selama musim hujan dan ia tidak memiliki uang Rp 100.000,- yang diperlukan untuk memperbaikinya. Pada tahun 1986, Ibu Karsinah sebagaimana penduduk kampung lainnya yang telah menerima tawaran flat dari pemerintah, memiliki kesempatan untuk masuk BTN daripada terus-menerus membayar sewa kepada Perumnas. Adalah normal bagi penduduk perumahan Perumnas pada mulanya

---

3 Pada akhirnya flat-flat itu memerlukan waktu dua setengah tahun untuk dibangun. Kalau Ibu Karsinah telah menyewa kamar sendiri di pusat kota seperti beberapa tetangganya, maka ia harus menggunakan uang Rp 700.000,- untuk perumahan dan fasilitasnya daripada Rp 75.000,-. Tekanan-tekanan kauangan pada akhirnya memaksa mereka yang menyewa milik pribadi keluar dari pusat kota.

menyewa flat-flat selama dua tahun dan kemudian masuk BTN selama 15 sampai 20 tahun kemudian. Tetapi, urusan-urusan administratif untuk mengorganisasikan BTN memang menjadi penghalang. Surat-surat pekerjaan tetap, kelakuan baik dan kesehatan harus diperoleh dari atasannya, polisi, pemerintah daerah dan dokter. Apabila saya tidak mengatur hal-hal ini untuk Ibu Karsinah, maka selamanya tekanan-tekanan keuangan akan memaksa ia pindah keluar dari flat. Pada akhirnya, saya merasa bahwa pengalaman Ibu Karsinah tentang bagaimana dunia yang sebenarnya beroperasi merupakan pemandu yang lebih baik bagi penduduk kampung miskin daripada perhitungan-perhitungan saya berdasarkan pada janji-janji pemerintah.

Dari dua studi kasus ini menjadi jelas bahwa hanya penduduk yang memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup dapat menerima kesempatan mendapatkan flat. Idi mewakili tipe orang yang dinamis, berpengetahuan baik, terjamin secara ekonomi dan berani, yang segera mengenal dan merebut kesempatan yang ditawarkan pemerintah. Sebaliknya, Ibu Karsinah merupakan contoh khas dari sebagian besar penduduk miskin, buta huruf dan takut, yang tidak dapat menerima flat-flat kecuali orang luar menyediakan logika ekonomis yang diperlukan, sumber daya, keterampilan administratif dan pandangan ke depan untuk melihat bahwa memang penting untuk berdekatan dengan tempat kerja di pusat kota. Pendeknya, Ibu Karsinah adalah satu contoh yang bagus dan lain daripada yang lain yang membuktikan kehidupan orang miskin secara umum.

Nasib Penduduk Kampung

Memang sukar untuk melakukan generalisasi tentang nasib penduduk kampung setelah pemukiman kembali. Beberapa penduduk beruntung dan beberapa penduduk yang lainnya menderita, dan bahkan sebuah survai statistik hanya memberikan tinjauan kasar dan tak memberi kejelasan mengenai jangkauan pengalaman mereka. Beberapa penduduk yang menanamkan ganti ruginya dalam sebuah rumah yang berdekatan dengan tempat kerjanya seperti Idi dan Ibu Karsinah, atau dalam kegiatan untuk meningkatkan penghasilan seperti Burhanuddin, Tuti dan Acang beruntung. Yang lain-lain seperti Sumira, Mus, Senah, Salim, Amat atau Yusuf yang menggunakan sebagian besar ganti ruginya untuk

membayar utang-utang, sebuah rumah dan barang-barang konsumtif dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau kegiatan-kegiatan yang menghasilkan, didekat tempat tinggal mereka yang baru, mengalami kerugian. Selain Sumira dan Mus yang berlokasi di pusat kota, yang lain belum berpikir bagaimana sulitnya mendapatkan pekerjaan di pinggiran kota, atau waktu dan biaya yang diperlukan setiap hari dalam mendapatkan pekerjaan di pusat kota. Mereka yang memiliki rumah di pinggiran tetapi meneruskan pekerjaan di pusat kota membayar ongkos angkutan yang bisa mencapai 20% dari pendapatannya dan menghabiskan sampai empat jam per hari untuk pulang-pergi kerja, daripada sepuluh menit dengan berjalan kaki dari Kebun Kacang. Beberapa orang yang mendapatkan pekerjaan di pinggiran kota merasakan bahwa pendapatannya turun lebih dari setengahnya.

Walaupun Bang Idi mendirikan perusahaan dalam suasana kampung yang sederhana, di mana tidak perlu banyak keluar uang untuk biaya operasi, namun dia masih beruntung dapat menanamkan uangnya dalam dua buah flat. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk memperoleh perumahan yang luas di pusat kota dengan harga murah. Ia bisa mendapatkan telpon, tempat parkir dan alamat yang jelas, terhormat dan mudah didatangi, yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perusahaannya. Ia tidak lagi terjebak antara dunia kampung dan perekonomian modern. Daripada menghalangi gang di kampung yang sempit dengan sepeda motornya, ia membeli sebuah truk untuk mendistribusikan topinya dan memparkirnya langsung di depan flatnya. Daripada para pelanggannya harus pergi dengan berjalan kaki di gang-gang kampung yang berbelok-belok dan berlumpur, mereka dapat mengirimkan pesanan mereka melalui telpon. Beberapa tetangga kelas menengah, yang bekerja di kantor-kantor pemerintah atau swasta, juga memberikan pesanan untuk topi-topinya. Dengan bertempat tinggal di kalangan kelas menengah, ia tidak lagi diirikan dan diasingkan oleh para tetangga, atas keberhasilannya berwiraswasta. Ia memiliki waktu dan keleluasaan pribadi untuk mengkonsentrasikan usahanya. Ketika flat-flat itu dilengkapi fasilitas gas, air dan listrik, maka ia tidak lagi memerlukan para tetangga yang lebih miskin untuk mengantarkan kebutuhan pokok. Para tetangga kampung tidak lagi datang meminta bantuan ketika mereka tidak punya uang. Akibatnya, tabungan yang disimpannya dari hasil kerja kerasnya tidak terhambur.

Di flatnya yang baru, Ibu Karsinah merasakan bahwa ia berada dalam jarak yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki ke tempat kerjanya dan untuk pertama kali ia dapat membeli sebuah rumah. Ia merasakan kebanggaan yang besar terhadap flat dan fasilitasnya. Meskipun biaya bulanan untuk flat dan fasilitasnya menyerap lebih dari setengah pendapatannya, ia mulai belajar untuk mengatur anggaran belanja dan hidup sangat cermat agar tujuannya terpenuhi. Ia mengakui bahwa adalah lebih baik membayar flat daripada menggunakan setengah dari pendapatannya untuk perjalanan kerja setiap hari dan tetap tidak dapat membeli sebuah rumah.

Menantu lelaki Ibu Karsinah, yang telah mengambil unit Perumnas tidak mendapatkan pekerjaan di pinggiran kota dan terpaksa kembali ke pusat kota untuk mencari pekerjaan. Biaya dan waktu untuk pulang pergi dari rumahnya di unit Perumnas dan mengunjungi keluarganya setiap hari ternyata sangat mahal dan menghabiskan waktu. Mereka tidak dapat menyimpan uang cukup untuk membayar cicilan bulanan flatnya. Pada akhirnya, anak perempuan Ibu Karsinah dan keluarganya pindah ke flat Ibu Karsinah. Mereka tinggal di sana selama berminggu-minggu dan kembali ke unit Perumnas pada akhir pekan, ketika Ibu Karsinah ikut serta dengan mereka untuk menikmati udara dan alam segar serta hijaunya tetumbuhan. Ibu Karsinah sangat senang bersama dengan anak perempuannya, tetapi kepadatan dalam flat yang berisi 6 orang dengan ruangan yang berukuran 21 m^2 tidak memadai.

Setelah kepindahannya ke unit Perumnas di Depok, keluarga Burhanuddin meneruskan berbagai kegiatan untuk mendapatkan penghasilan, dalam upaya mempertahankan standar hidup yang pernah dimilikinya di Kebun Kacang. Mereka memperoleh pendapatan dari kendaraan yang telah dibeli Burhanuddin dari uang ganti rugi rumahnya. Isterinya, Ibu Cum, memulai lagi mengikuti pengajian singkat di daerah Perumnas, dan anak lelakinya sekali-sekali menyumbangkan pendapatannya dari pekerjaannya sebagai pegawai rendah di pemerintahan. Selama enam bulan pertama setelah kepindahannya, mereka mengalami kesulitan hidup. Belakangan meskipun mereka tetap bertahan dengan cara hidup sederhana, namun mereka menyukai kehidupan barunya di daerah Perumnas di Depok dan tidak dapat memahami bagaimana mereka dapat menahan kepadatan, kekotoran, kebisingan, kece-

maran dan bau busuk di Kebun Kacang. Di unit Perumnas, semua fasilitas berdekatan, termasuk fasilitas-fasilitas sekolah dan kesehatan. Di situ ada organisasi komunitas yang lebih baik. Kumpulan arisan, perlombaan olah raga dan perayaan Tahun Baru diselenggarakan. Pada malam hari para orang tua dan anak-anak bermain di lapangan-lapangan olah raga. Keluarga-keluarga menanami kebun-kebunnya sendiri.

Pada tahun 1986, Burhanuddin membeli mobil *second hand* dan menyewa dua orang supir untuk mengendarainya. Ia merasa makmur dan terlalu tua untuk bekerja dan mengabdikan dirinya kepada kegiatan-kegiatan agama. Bersama dengan dua puluh rumah tangga yang lebih kaya lainnya di daerah itu, Ibu Cum dan Burhanuddin memutuskan untuk membeli tanah kosong dari Perumnas dan mendirikan sekolah Islam. Burhanuddin merupakan motor penggerak di balik rencana itu dan menginvestasikan banyak waktunya untuk itu.

Acang, merupakan salah seorang dari beberapa yang ingin menginvestasikan sebagian besar uang ganti ruginya dalam kegiatan berdagang di daerah Perumnas yang selama dua setengah tahun pertama berhasil melampui semua yang diharapkan. Para tetangganya yang dulu menunjukkan keberhasilannya dengan rasa tidak percaya. Di Kebun Kacang ia hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di lokasinya yang baru, ia merupakan satu-satunya pedagang yang memiliki warung makanan kering yang besar dan dengan cepat mendapatkan pelanggan yang banyak. Seperti Burhanuddin, ia menghargai lingkungan yang banyak diperbaiki, kemungkinan untuk membeli tempat yang resmi dan kesempatan untuk mendirikan usaha baru, meskipun semula mereka sangat menolak adanya penggusuran rumah kampung mereka. Pada akhir tahun 1986, rumah Acang dan isterinya tinggal setengahnya diselesaikan, sedangkan warungnya diperluas dan anak-anaknya belajar dengan baik di sekolah.

Namun, setelah empat tahun berjalan, beberapa tetangganya mulai meniru usaha Acang. Acang khawatir bahwa kompetisi akan terjadi dan mengganggu perdagangannya, tetapi ia percaya bahwa jika ia dan isterinya bekerja keras, mengatur anggaran belanja secara hati-hati dan menetapkan harga di bawah harga para pesaingnya, maka usahanya akan tetap berhasil baik. Tetapi pada tahun 1987 penyakit TBC Acang kambuh kembali dan ia harus menjalani pengobatan secara tetap. Ia tidak dapat bekerja begitu

keras. Kulkasnya rusak. Para pelanggannya belanja di tempat lain, sehingga Acang dan isterinya sangat cemas bahwa anak-anaknya terpaksa keluar dari sekolah.

Tuti dan Boco, yang hidupnya *senen-kemis* di Kebun Kacang dan tidak pernah memiliki sumber penghasilan atau kesempatan untuk memiliki rumah, merasa heran bahwa empat tahun pertama di unit Perumnas ia banyak mendapat permintaan untuk pembangunan rumah dan berdagang sayuran. Tetangga Tuti tidak mau berjalan jauh ke pasar untuk membeli sayur, jadi Tuti dengan rajin ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sayur-mayur tetangganya. Boco pekerja bangunan mendapat banyak tawaran untuk merenovasi unit-unit Perumnas di sekitarnya. Mereka tidak lagi harus membayar sewa tetapi mulai membeli secara cicilian bulanan sebuah unit Perumnas. Mereka bangga mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah sendiri walaupun belum bisa mereka perbaiki. Keluarganya dapat menikmati tempat tinggal yang ukurannya dua kali dari yang pernah ditempatinya di Kebun Kacang. Selain itu, mereka memiliki fasilitas-fasilitas air ledeng, tempat mencuci dan kakus, listrik dan kebun, yang semua itu tidak pernah dimilikinya di Kebun Kacang. Namun, setelah tahun 1986, seperti halnya keluarga Acang, mereka mulai mengalami kesulitan yang meningkat dalam mata pencarian. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan para pedagang dan pekerja bangunan yang berhasil di daerah itu berkompetisi.

Sumira menggambarkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi seorang penduduk kampung yang menerima flat tetapi kemudian kehilangan sumber mata pencarian sebagai pembantu rumah tangga. Ketika ia pindah ke dalam flat, ia merasa sedih karena dinding-dinding flatnya kelabu dan menyatakan bahwa ibunya yang sudah tua tambah parah batuknya karena debu batako. Ia merasa iri terhadap para tetangganya yang sibuk memperbaiki flatnya dan merasa malu ketika ia tidak dapat mengundang para tamunya untuk duduk di kursi yang bagus. Sumira segera menggunakan sebagian besar ganti ruginya, yang telah saya nasehati untuk disimpan di bank, untuk merenovasi dan melengkapi rumahnya. Ia bangga dengan flatnya yang sudah direnovasi dan merasa yakin bahwa ia telah meningkat ke dalam kelas menengah.

Setelah ibunya meninggal dunia, Sumira meninggalkan pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga, untuk memelihara anak perempuannya yang sudah berumur tiga belas tahun, yang selalu

menyendiri dan tidak mau sekolah. Untuk mengatasi perasaan tertekan akibat kematian ibunya, Sumira mengambil sisa ganti ruginya untuk membeli kulkas, pesawat televisi berwarna, meja-kursi tamu dan bupet. Dengan tidak adanya pendapatan dari pekerjaannya, ia terpaksa menerima orang-orang indekos di rumahnya untuk membantu dalam membayar cicilan flat dan fasilitasnya. Namun, orang indekos itu akhirnya keluar dan Sumira tidak bisa mendapatkan orang yang mau indekos di rumahnya, sehingga ia tidak mempunyai pendapatan lagi. Untuk menutup biaya yang makin meningkat, ia terpaksa menjual barang-barang miliknya yang baru. Flatnya kemudian menjadi kosong.

Sumira mencoba untuk mendapatkan penghasilan lain dengan menyiapkan dan mengantarkan kue-kue pisang ke warung-warung di flat itu, suatu kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan perdagangan kue pada tahun 1960-an. Namun, menjajakan kue di flat-flat itu, membuatnya merasa lebih melarat karena ia dikelilingi oleh penduduk kelas-menengah yang makmur dan bukan penduduk kampung yang miskin. Lagi pula, ia tinggal di sebuah flat yang bukan miliknya karena ia tidak dapat membayar. Di kampung, ia memiliki rumah dan tidak merasa khawatir tentang pendapatan untuk makan sehari-hari. Pada akhir tahun 1986, Sumira berupaya untuk bertahan dengan menyewakan dua buah kamar tidurnya dan ia tidur dengan anak perempuannya di lantai kamar tamu. Ia merasa sedih, malu dan tertekan. Setahun kemudian ia meninggal dunia.

Mus, yang telah menjalankan usaha es krim dan rumah pemondokan, membeli rumah lain di pusat kota, merasa sulit untuk menjalankan kembali usahanya. Sebelum penggusuran Kebun Kacang, para penjual eskrimnya sudah menderita akibat kenaikan harga bahan baku, persaingan dengan produk sejenis yang diproduksi secara massal, penertiban dari pemerintah terhadap para pedagang kecil dan terjadi perubahan selera konsumen. Di tempat yang baru, mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya karena para penjual keliling yang lain sudah beroperasi. Meskipun para penjual yang dimiliki Mus harus mendorong kereta untuk menjajakan dagangannya dalam jarak jauh, namun mereka masih terus kembali ke rute perdagangan yang dulu dekat Kebun Kacang. Namun kebanyakan dari para pelanggan tetapnya, sudah tidak ada lagi di sana akibat adanya penggusuran.

Mus tidak memiliki waktu, keterampilan atau koneksi di pemerintahan kota untuk memastikan legalitas tanah yang ia beli. Kemudian ia menemukan bahwa tanahnya memang masuk dalam rencana yang akan digusur. Mus sering sakit dan menghabiskan banyak waktunya di desanya di Jawa Tengah. Rumah pemondokannya yang baru sering kosong. Memang sukar untuk memastikan apakah hal ini disebabkan oleh trauma penggusuran, umur, keletihan atau saat- saat ekonomi yang dalam keadaan sulit. Pada akhir tahun 1986, Mus tidak lagi kembali ke Jakarta. Ia sakit parah dan berbulan-bulan dirawat di rumah sakit di Yogyakarta. Hasil penjualan sapinya di Klaten telah membantu perawatannya di rumah sakit. Para sanak-saudaranya menjelaskan bahwa Mus mulai sakit sejak terjadinya penggusuran di Kebun Kacang.

Masa depan para penjual es krim di Jakarta Pusat tampak suram. Beberapa penjual kembali ke desanya untuk bercocok tanam atau menjadi buruh. Yang lain mencoba keberuntungannya dengan membuat es krim dengan tangan di kota-kota lain di Jawa atau di luar Jawa. Beberapa anak laki-laki penjual es krim beralih ke pekerjaan bangunan daripada menjual es krim dan berkerumun di sekitar tempat-tempat bangunan baru di pinggiran Jakarta. Tetapi dengan adanya resesi setelah tahun 1982, es krim buatan tangan, sebagaimana perusahaan-perusahaan berskala kecil lainnya tampaknya memperoleh kesempatan menjadi lebih baik. Meskipun Mus tidak lagi datang ke kota, namun beberapa dari para penjual es krim masih terus beroperasi dari rumahnya di pusat kota. Namun pendapatannya yang pasti, tidak lebih tinggi daripada tahun 1981.

Nasib Salim, tukang becak, merupakan contoh golongan yang paling miskin dan kurang berpengetahuan. Pengendaraan becaknya di pusat kota telah diusik, tetapi ia merasakan bahwa pekerjaan di pinggiran kota bahkan lebih sukar didapatkan. Di pinggiran Jakarta, para tukang becak harus mengayuh dalam jarak yang jauh di atas jalan-jalan yang berlubang untuk mendapatkan penghasilan sebanyak yang diperolehnya di pusat kota dengan mengendarai selama 15 menit di atas jalan aspal yang licin. Untuk masuk ke dalam kelompok tukang becak ia memerlukan saudara-saudara, teman, daya tarik pribadi dan keberanian. Karena itu, Salim yang sudah letih, tua dan tanpa koneksi masih terus mengendarai becaknya di lokasinya yang dulu di Kebun Kacang, tepat di samping bangunan flat-flat baru. Ia pulang ke rumahnya

yang berlokasi di Depok hanya jika ia memperoleh penghasilan yang cukup. Sementara di kota, ia tidur di becaknya dan makan di warung yang tetap. Ketiga anak laki-lakinya yang paling tua di antara semua anaknya juga terpaksa pergi ke kota karena tak ada kesempatan untuk mendapatkan penghasilan di Depok. Mereka melakukan pekerjaan sambilan yang sebelumnya pernah dilakukannya didekat Kebun Kacang, tinggal bersama teman-temannya yang berlainan dan hanya sekali-sekali kembali ke rumah.

Ketika Salim atau ketiga anak laki-lakinya tidak kembali ke rumah selama beberapa hari berturut-turut, maka Samilah harus mencari usaha lain untuk menghidupi keluarganya. Di Kebun Kacang ia telah dapat menciptakan penghasilan dari memperbaiki baju, tetapi di lokasi baru ia tidak mempunyai koneksi yang tetap. Ketika ia tidak mendapatkan pekerjaan, ia membantu perusahaan kasur milik sanak-saudaranya, tetapi hanya diberi makan dan sedikit uang saku. Dulu, tiga puluh tahun yang silam, ia berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan yang tidak menyenangkan dari saudara-saudaranya dan pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Sesudah penggusuran, terpaksa dengan rasa malu kembali untuk meminta pertolongan saudara. Meskipun pada mulanya disambut dengan baik namun sanak-saudaranya lama-kelamaan menjadi enggan untuk memikul beban dengan harus memberi makan tambahan.

Pada tahun 1982 becak milik Salim disita pemerintah. Selama dua puluh tahun ia bekerja untuk membeli kendaraan itu. Dengan rasa putus asa, ia kembali ke keluarganya di Depok. Isterinya menggadaikan mesin jahitnya seharga Rp 50.000 (240 liter beras) sehingga Salim dapat membuka warung sayur-mayur di rumahnya yang baru. Sementara Samilah bekerja memperbaiki pakaian, Salim mengurusi warung. Dalam beberapa minggu warung itu bangkrut, karena Salim tidak berpengalaman dalam berdagang. Dengan perasaan hancur luluh, ia kembali ke Jakarta dan terpaksa menyewa becak lagi. Tetapi pemerintah Jakarta mulai menertibkan secara ketat para tukang becak dan membatasi rute-rute yang dilaluinya, sehingga membatasi pula pendapatannya. Kepulangannya ke rumah dengan membawa uang untuk keluarganya menjadi lebih jarang. Juria merasa sedih karena keluarganya terpisah-pisah. Di Kebun Kacang mereka selalu tinggal bersama. Ia semakin menderita, kesepian dan putus asa karena dulu dia punya harapan anak-anaknya bisa maju, sekarang harapan itu sudah hancur.

Ironisnya keluarga Juria memiliki rumah yang lebih besar dan lebih kokoh daripada sebelumnya, tetapi mereka merasa begitu putus-asa dan begitu miskin dan tidak mempunyai kekuatan untuk merubah nasibnya. Sanak-saudara Juria masih memiliki tanah yang kini ditempati keluarga Juria. Juria khawatir bahwa pada tahun-tahun kemudian akan berkembang permusuhan di antara mereka mengenai siapa yang sebenarnya memiliki tanah itu. Pada tahun 1985, tanah itu terancam penggusuran. Pemerintah merencanakan untuk membendung sungai yang mengalir tepat di samping rumah Juria. Namun, tidak ada kejelasan kapan penggusuran itu akan dilaksanakan.

Suatu hal yang menguntungkan mengenai kepindahan mereka ke pinggiran adalah bahwa anak-anak Juria sebagaimana anak-anak lain di unit Perumnas, menyukai lingkungan fisik lebih baik. Anak-anak lebih jarang sakit daripada ketika tinggal di Jakarta Pusat. Meskipun jumlah orang yang datang menetap di daerah itu meningkat, namun lingkungan itu tidak sepadat dan sekotor Kebun Kacang. Sebuah sungai yang besar dikelilingi rumpun bambu mengalir di dekatnya dan anak-anak Juria berlari-lari dan bermain-main di sepanjang tepiannya. Keadaannya tidak begitu berbeda dengan Kebun Kacang pada masa tiga puluh tahun sebelumnya, meskipun banyak rumah besar modern berbatu bata dengan antena televisi yang kini bercampur baur dengan tempat pemukiman penduduk desa.

Setelah lima tahun, keluarga Juria tampaknya telah menetap dalam kehidupan di pinggiran kota, meskipun untuk mendapatkan penghasilan secukupnya masih tetap menjadi masalah. Bagaimanapun beratnya, Juria tetap akan mendidik anak-anaknya dengan baik. Beberapa anaknya yang tua mulai membantu keuangan keluarganya. Lama-kelamaan mereka mempunyai hubungan dan kesempatan di Depok. Anak lelakinya yang paling tua tidak lagi pergi ke Jakarta tetapi mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan di Depok. Ia memiliki koneksi dengan toko yang menyewakan kaset video dengan memboleh kannya meminjam kaset dan menyewakannya kepada para tetangga. Selain itu, ia pergi ke Bogor untuk mengurus pendaftaran dan surat izin mengemudi para tetangganya di Depok. Anak laki-lakinya yang nomor dua pulang-pergi ke Jakarta setiap hari untuk bekerja sebagai sopir dan tukang parkir mobil. Karena memiliki isteri dan anak di Depok, maka ia enggan untuk tinggal bermalam di kota. Anak laki-

lakinya yang ketiga telah beralih pekerjaan dari penyemir sepatu ke pencuci mobil. Anak keempat dan yang paling berpendidikan sekali-sekali mendapatkan rezeki *nomplok* dari tulisan-tulisan kaligrafi dan membuat hiasan-hiasan dari daun kelapa untuk pesta-pesta perkawinan. Anak-anak perempuan Juria masih tetap bersekolah, walaupun ibunya harus bekerja keras mencari uang untuk membayar pendidikan mereka. Anak perempuan yang paling tua bercita-cita menjadi perawat tetapi Juria merasa bahwa hal itu hanyalah impian.

Amat, penjual air yang telah menikahi Ani, adik perempuan Juria, memiliki pengalaman yang sama dengan keluarga Salim. Ia pindah ke tempat adik perempuannya yang agak jauh dari Juria. Ia tidak memiliki hak legal atas tanah yang didudukinya, dan baru saja dapat bertahan hidup dan kelihatan lebih tua dengan cepat. Ketika ia dan isterinya memiliki modal yang cukup (Rp 5.000,-/24 liter beras) mereka menjajakan bubur kacang hijau dari rumah ke rumah dan beruntung mendapatkan penghasilan Rp 5.500,- per hari, yang jumlahnya kurang daripada setengah dari apa yang telah dihasilkannya di Kebun Kacang. Juria dan adiknya Ani masih belum berkumpul kembali setelah dua setengah tahun penggusuran. Mereka terlalu miskin untuk mengunjungi rumah yang satu ke rumah lain. Hanya setelah kematian Amat pada tahun 1984, Ani pertama-tama mengunjungi Juria dan sekali-kali tinggal dengannya.

Yusuf, pendaur ulang aki, mengatakan bahwa sejak penggusuran ia "memiliki rumah besar tetapi berhati kecil." Dilihat dari luar, kehidupannya tampak makmur tetapi dilihat dari dalam ia merasa tak berdaya. Setelah bertahun-tahun berjuang, harapan-harapannya untuk membuat kehidupannya lebih baik telah hancur. Nasibnya pada hari tua, lebih buruk daripada kehidupannya selama 50 tahun yang lalu. Bahkan impiannya yang paling sederhana untuk merokok atau minum secangkir kopi tidak dapat terpenuhi. Ketika berdagang aki di Kebun Kacang ia dapat membeli ikan, mangga dan makanan-makanan lezat lainnya. Kini ia tidak punya uang untuk mengunjungi ibunya yang berumur 90 tahun di desa. Dulu ia bisa mengunjungi ibunya sekali atau dua kali dalam setahun.

Yusuf telah menggunakan ganti ruginya yang sedikit itu untuk membeli pesawat televisi dan membangun kembali rumahnya di atas tanah warisan di pinggiran kota. Karena tidak memiliki modal

untuk memulai kembali usaha pendauran akinya, yang ia yakin akan dapat maju pesat di pinggiran Jakarta, maka ia menyibukkan dirinya di kebun. Ia dan Rohani makan apa pun dari yang mereka hasilkan, yang sebagian besar terdiri dari singkong dan bayam. Untuk menambah variasi makanan dan uang, Yusuf memelihara ayam, tetapi tiba-tiba ayam-ayam itu sakit dan Yusuf dengan cepat menyalurkannya ke sanak-saudara Rohani untuk disembelih sebelum ayam-ayam itu mati. Yusuf sendiri hampir mati karena kolera. Isterinya tidak punya uang untuk membayar ongkos rumah sakit tempat ia dirawat dan akhirnya Yusuf tidak boleh pulang. Sambutan yang semula hangat dari sanak-saudara Rohani berubah menjadi ketidakacuhan. Mereka terlalu sibuk untuk memuaskan keinginan-keinginan materialnya sendiri dan tidak khawatir tentang kebutuhan-kebutuhan Rohani dan Yusuf.

Daerah Yusuf dan Rohani tampaknya akan mengalami perubahan yang mirip dengan Kebun Kacang tetapi lebih cepat. Dalam beberapa bulan jalan rusak yang melintasi rumah barunya sudah diaspal. Rohani senang, karena tidak hanya akan meningkatkan nilai tanah tetapi ia berharap akan datang lebih banyak pelanggan ke warungnya yang baru saja ia dirikan. Para pekerja bangunan dari Jawa Tengah datang bekerja di daerah itu, merenovasi rumah-rumah dan membangun kantor-kantor. Beberapa orang dari para pendatang baru ini makan di warung Rohani dan ia menawarkan tempat pemondokan. Tanah-tanah dibagi-bagi, banyak pembangunan rumah, banyak para migran baru, dan banyak usaha kecil bertambah, ini mengingatkan kita pada kejadian akhir di Kebun Kacang.

Jalan Keluar dari Kemiskinan atau Jebakan Kemiskinan?

Dengan melihat ke belakang, beberapa penduduk kampung (Idi, Ibu Karsinah, Burhanuddin) mengakui bahwa penggusuran Kebun Kacang telah memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih baik. Memang pada mulanya hal ini benar bagi Acang dan Tuti, tetapi empat tahun kemudian hal-hal itu menjadi buruk lagi. Bagi orang seperti Sumira, Mus, Salim, Amat dan Yusuf, penggusuran kampung tiba-tiba memberi mereka sejumlah besar uang dan barang-barang konsumtif, tetapi kemudian justru mencampakkan mereka kembali ke dalam kemiskinan.

Penduduk kampung yang beruntung atas proyek itu sudah memiliki pekerjaan yang terjamin dan pendapatan yang cukup

untuk membayar tempat tinggal dan fasilitas-fasilitasnya yang baru, atau dapat memperoleh pekerjaan yang menguntungkan di lokasi-lokasi yang baru. Kegiatan di Kebun Kacang dulu tidak berhasil, kini bisa mulai berhasil di pinggir kota. Penduduk yang tumbuh dengan cepat dan kurangnya transportasi dan toko-toko pengecer memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi tukang becak dan pedagang kecil untuk berkembang. Namun, memang sulit untuk mengetahui, berapa lama kesempatan-kesempatan di pinggiran kota akan berakhir. Selama kota masih terus berkembang, maka pengaruh-pengaruh yang sama yang pertama-tama mendorong dan kemudian merusak pedagang-pedagang kecil di Kebun Kacang juga mempengaruhi daerah-daerah pinggiran kota.

Penduduk kampung yang tidak beruntung atas proyek itu tetap terjebak oleh pekerjaan-pekerjaan yang tidak terjamin dan cara berpikir serta bersikap yang mencegah mereka untuk mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan baru. Proyek itu menunjukkan bahwa dengan memberikan sejumlah besar uang kepada penduduk di perkotaan yang miskin dan kesempatan untuk membeli rumah belum tentu dapat mengatasi kemiskinan mereka. Dengan sumber daya ini ,prioritas-prioritas mereka disimpangkan jauh dari kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, tetapi uang itu digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sosial, perumahan, renovasi-renovasi dan barang-barang konsumtif yang baru. Tiba-tiba mereka memiliki rumah-rumah yang besar dan kokoh, fasilitas-fasilitas dan barang-barang konsumtif yang banyak, tetapi tidak ada sumber pendapatan yang tetap. Barang-barang konsumtif -- dan dalam beberapa kasus bahkan rumah-rumahnya -- harus dijual untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Mereka kemudian jatuh kembali ke dalam keadaan yang sangat miskin yang telah mereka coba untuk melepaskan diri.

7
Roda Keberuntungan

Kebun Kacang: Potret Jakarta

Perubahan-perubahan yang dihadapi penduduk Kebun Kacang mempengaruhi kehidupan sebagian besar penduduk kampung di Jakarta. Mereka mengalami perpindahan dari suasana desa ke suasana kota serta mengalami perubahan-perubahan yang cepat dalam nilai-nilai sosial, ikatan satu orang dengan yang lain, pola-pola penerimaan pendapatan dan hubungannya dengan pemerintah. Meskipun ikatan sosial membantu mereka untuk memahami tekanan dari luar yang tidak tentu, di pihak lain ikatan sosial membuat mereka menjadi miskin, karena selalu harus membagi-bagi rezeki. Meskipun kegiatan-kegiatan untuk memperoleh penghasilan berskala kecil ini maju pesat dalam jangka waktu singkat, namun kegiatan-kegiatan ini tidak menjamin kehidupan mereka lagi dan sulit untuk mendapat pekerjaan di kantor. Pemerintah menjadi semakin mencampuri urusan penduduk kampung. Mereka menderita akibat penggusuran rumah. Meskipun pengalaman penggusuran ini sudah biasa, namun maksud pemerintah untuk memukimkan kembali penduduk kampung ke dalam flat-flat di kota merupakan sesuatu yang baru bagi penduduk Indonesia. Namun, program yang lebih cerah ini, tetap saja mengakibatkan sebagian besar penduduk kampung merasa terdesak keluar dari daerah pusat kota. Hanya sebagian kecil saja yang dapat mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan baru yang ditawarkan pemerintah untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Penduduk kampung yang pertama-pertama merasakan perubahan dari cara hidup di pedesaan ke cara hidup di perkotaan itu adalah mereka yang berlokasi di dekat pusat kota. Dari awal tahun 1900-an, jantung kota Jakarta bergeser secara cepat ke arah selatan, dari wilayah kota kolonial Batavia ke lapangan Merdeka dekat Kebun Kacang. Setelah Kemerdekaan pada tahun 1949, Jakarta mengalami ledakan penduduk. Kemiskinan dan kesulitan kehidupan di desa mendorong peningkatan jumlah penduduk yang menuju ke wilayah kota. Kampung seperti Kebun Kacang, yang pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an merupakan daerah pedesaan yang terpencil dan terkebelakang tiba-tiba menjadi bagian metropolis yang modern. Daerah ini berubah dari rawa dan kebun sayur yang berpenduduk jarang menjadi kota gubug.

Meningkatnya pembangunan pada akhir tahun 1960-an dan tahun 1970-an di berbagai tempat paling nyata di pusat Jakarta. Kampung-kampung di dalam kota seperti Kebun Kacang menjadi makmur karena berdekatan dengan proyek-proyek bangunan besar. Sebelum ada sektor padat modal, pembangunan dengan memakai sektor padat karya dapat menyerap tenaga kerja kampung untuk lowongan di bidang perdagangan, transportasi, industri rumah tangga dan pembangunan. Hubungan timbal-balik terjadi antara kampung dan kota, sedangkan kampung menyediakan tenaga kerja murah dan kota menyediakan pendapatan, harapan dan kemungkinan untuk melepaskan diri dari kemiskinan daerah pinggiran kota. Pendapatan yang lebih tinggi di kota memungkinkan banyak penduduk kampung mendidik anak-anak mereka, memperbaiki rumah-rumah dan membeli barang-barang konsumsi.

Tetapi pada akhir tahun 1970-an, hubungan yang saling melengkapi antara kampung dan kota mulai putus. Kampung-kampung di pusat kota seperti Kebun Kacang adalah yang pertama-tama merasakan pengaruh itu. Ketika kota modern merambah memasuki lingkungan-lingkungan itu, kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dari para warganya menjadi terdesak. Dengan adanya permintaan barang dan jasa secara drastis, mengakibatkan hilangnya mata pencarian rakyat, karena digantikan dengan usaha yang padat modal yang besar dengan pelayanan yang lebih mudah dan cepat. Setiap hari surat-surat kabar memberitakan tentang tukang becak dan pedagang kecil yang diusir dan rumah-rumah kampung yang digusur untuk membangun jalan raya, perkantoran dan tempat hiburan serta perumahan mewah.

Tahun 1981 adalah tahun yang luar biasa bagi Kebun Kacang yang masih mampu bertahan di jantung kota Jakarta. Sementara kampung-kampung di dekatnya telah digusur untuk pembangunan jalan Thamrin, Hotel Indonesia, toko serba ada Sarinah, dan sejumlah bangunan bertingkat banyak lainnya, Kebun Kacang tidak diusik. Banyak penduduk miskin mencari tempat perlindungan di Kebun Kacang setelah penggusuran di tempat lain. Pemerintah tampak bimbang untuk bertindak terhadap lingkungan yang sudah lama berdiri dan berpenduduk padat itu. Lagi pula lahan Kebun Kacang yang membentang rendah dan bekas rawa itu, tidak menarik perhatian untuk bangunan-bangunan besar. Namun, pada akhirnya Kebun Kacang dipilih sebagai proyek pemukiman kembali yang pertama-tama di pusat kota. Proyek itu dijadikan percontohan untuk pemukiman orang miskin di pusat kota yang berpenduduk padat.

Proses perubahan yang mempengaruhi Kebun Kacang selama tiga puluh tahun, kini terjadi di pinggiran kota. Lahan desa telah dibagi-bagi dan kebun-kebun sayur telah diubah menjadi jalan bagi penduduk sekitarnya. Penduduk desa yang memperoleh penghasilan terutama dari tanah beralih ke usaha menyewakan dan menjual tempat untuk para pendatang baru yang bekerja dalam perdagangan, transpor, industri rumah tangga atau pekerjaan-pekerjaan di kantor atau pabrik-pabrik. Para pendatang baru adalah para penduduk yang dulu tinggal di kampung-kampung di pusat kota seperti Kebun Kacang maupun para migran dari daerah-daerah pedesaan. Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan ekonomi di pinggiran kota menciptakan berbagai kesempatan baru untuk memperoleh penghasilan berskala kecil yang tidak lagi dapat hidup terus di pusat kota.

Kebun Kacang: Potret Indonesia

Kebun Kacang dan kampung-kampung lainnya di Jakarta belum tentu sama dengan kampung-kampung di kota-kota lain di Indonesia. Misalnya, John Sullivan dalam penelitiannya mengenai lingkungan kelas bawah di jantung kota Yogyakarta menolak pandangan bahwa kemiskinan, hidup yang tidak tentu, yang terus-menerus berubah bukan hal yang pokok bagi penduduk miskin.[1]

---

1 J. Sullivan "Back Alley Neighbourhood" hal. 1-7, 34, 36, 50-2.

Ia menemukan masyarakat yang stabil, tertib dan terintegrasi dengan organisasi kampung yang didukung oleh negara. Penduduk kampung tidak semata- mata sebagai pion dari kekuatan-kekuatan dari luar tetapi dapat mengontrol dan memperbaiki kehidupannya dengan ikatan-ikatan sosial dan kerja sama Kampung.[2] Meskipun disadari adanya pengecualian-pengecualian, namun John Sullivan menyatakan bahwa penemuan-penemuannya adalah berlaku untuk "ukuran penduduk perkotaan Indonesia."[3]

Perbedaan antara penelitian Sullivan dan gambaran saya mengenai kehidupan kampung, dapat dijelaskan oleh pengalaman pembangunan yang sangat berbeda dari dua kota itu. Sejak tahun 1949, Jakarta merupakan fokus pembangunan nasional. Yogyakarta, sebaliknya, sampai awal tahun 1970-an mengalami keterbelakangan ekonomi dan migrasi. Selama dasawarsa tahun 1961 sampai 1971, tingkat pertumbuhan Yogyakarta paling rendah di antara kota-kota besar di Indonesia.

Meskipun terjadi pertumbuhan cepat penduduk Yogyakarta selama dasawarsa tahun 1971-1980, namun pada akhir tahun 1979 kepadatan penduduk dan perumahan di distrik pusat kota yang diteliti Sullivan hanya berubah sedikit selama dua dasawarsa. Tingkat pertumbuhan penduduk kampung "tidak berarti pasti 0,1%."[4] Dari pandangan ini, stabilitas sosial dan sifat kerja sama kehidupan kampung di Yogyakarta mungkin tidak merupakan sesuatu yang khas bagi kota-kota berkembang lainnya secara lebih besar dan lebih cepat di Indonesia.

London Abad Sembilan Belas -- Sebuah Gambaran?

Pengalaman Kebun Kacang dan Jakarta yang modern bukan tanpa gambaran dari kota yang mengalami lebih dulu. Proses-proses serupa terjadi di London (dan kota-kota lainnya di dunia Barat) selama seratus tahun yang lalu. Selama paruh pertama abad kesembilan belas penduduk London berkembang cepat, yang semula kurang dari 1 juta menjadi 2,5 juta.[5] London Pusat dilanda arus urbanisasi yang besar oleh para pedagang kecil dan me-

---

2 Guinness (*Harmony and Hierarchy* hal. 42-53,171-76) juga menemukan "Kepaduan Luar Biasa" di kalangan penduduk kampung lain di Yogyakarta.

3. J. Sullivan "Rukun Kampung dan Kampung" hal. 327.

4 J. Sullivan "Back Alley Neighbourhood" hal. 6.

5. Quennell, P. (ed.) *Mayhew's London*, (London, 1984) hal. 18.

ningkatnya kaum buruh lepas dan pekerjaan-pekerjaan pinggir jalanan.[6] Pada tahun 1850-an diperkirakan ada 45.000 sampai 100.000 pedagang keliling.[7] Pendapatan yang dihasilkan untuk golongan miskin sangat tidak menjamin.[8]

Dari tahun 1860-an, tekanan-tekanan dari luar mulai mendesak golongan miskin yang bekerja sambilan ke luar dari tempat-tempat kediamannya di dalam kota. Meningkatnya sewa dan persaingan dengan barang-barang yang diproduksi secara massal dari daerah industri di bagian utara merugikan banyak bengkel kecil di London.[9] Ada empat tekanan -- seperti yang dimaksud di atas -- yaitu selera orang kelas menengah, peraturan pemerintah, tekanan ekonomi dan perubahan bentuk kota mendesak penduduk/rakyat kecil dari rumah dan pekerjaannya di pusat kota. Misalnya, kelas menengah menganggap bahwa pedagang kaki lima menimbulkan ketidaktertiban dan kegaduhan, sehingga pemerintah melarang mereka untuk berdagang.[10] Pembangunan jalan, jalan kereta api, pasar, gudang, perkantoran dan bank memaksa golongan kecil untuk pindah ke tempat yang lebih sempit dan berdesak-desakan.[11] Dengan itu ada perbedaan besar antara si kaya dan si miskin dan yang kaya melarikan diri ke daerah yang lebih bersih dan segar di pinggir kota.[12] Meskipun golongan miskin secara kejam disingkirkan dari rumah-rumahnya, mereka merasa terikat dengan London Pusat karena tiadanya pekerjaan di pinggiran kota dan tiadanya transpor yang murah yang dapat diandalkan dan menyenangkan.[13]

Program pembersihan daerah kumuh dan peremajaan perkotaan di London pada tahun 1860-an dan tahun 1870-an juga mengingatkan kepada Jakarta sekarang. Para perencana kota memandang daerah-daerah kumuh di London sebagai daerah yang mengganggu pemandangan dan terbelakang dalam zaman pembangunan. Mereka ingin memperindah kota dan mengatakan bah-

---

6 Green "Street Trading in London" hal. 130-9; Stedman-Jones *Outcast London* hal. 53-126.

7 Green, *Ibid.*, hal. 137.

8 Stedman-Jones *ibid.*, hal. 33-51.

9 *Ibid.*, hal. 19-32.

10 Green "Street Trading in London" hal. 138-46.

11 Stedman-Jones *Outcast London* hal. 161-3; Green, *Ibid.*, hal. 140-6.

12 *Ibid.*, hal. 166.

13 *Ibid.*, hal. 152-71, 207-9.

wa memukimkan kembali golongan miskin dalam rumah-rumah model atau flat-flat akan meningkatkan standar kehidupan mereka. Namun, seperti di Kebun Kacang, sebagian besar penduduk asli tidak dimukimkan kembali oleh pemerintah tetapi menderita akibat kehilangan rumah dan terpaksa berkumpul dan berdesak-desakan di kampung yang masih bertahan, sementara golongan yang sudah makmur memperoleh fasilitas tempat yang lebih baru dan mahal. Seperti di Jakarta, golongan miskin juga merasa terpukul oleh rencana penggusuran yang mengurangi dan tidak menambah perumahan di kota.[14]

Meskipun ada kesamaan yang mencolok antara London pada abad kesembilan belas dan Jakarta pada abad kedua puluh, namun tidak seharusnya dijelaskan secara berlebihan. *Pertama*, perubahan-perubahan yang terjadi di London, semula menarik namun kemudian menolak golongan miskin dari pusat kota, yang terjadi sepanjang abad kesembilan belas, sedangkan di Jakarta, perubahan-perubahan itu terjadi dalam jangka waktu tiga puluh tahun. *Kedua*, ada perbedaan-perbedaan mencolok dalam ukuran dan tingkat pertumbuhan penduduk. Sementara penduduk Jakarta hanya memerlukan waktu dua puluh tahun untuk berkembang dari kurang satu juta hingga hampir lima juta orang, sedangkan London memerlukan waktu seratus tahun. Jumlah pedagang kecil di Jakarta pada tahun 1970-an diperkirakan mencapai 500 kali pedagang kecil di London seratus tahun sebelumnya. *Ketiga*, ada perbedaan-perbedaan mencolok dalam tingkat penyerapan buruh. Di London sektor berskala kecil, pada akhirnya berangsur-angsur hilang. Masalah kekurangan pekerjaan atau pengangguran nyaris habis selama Perang Dunia Pertama ketika sebagian besar tenaga kerja lepas diserap dalam pabrik-pabrik yang menyediakan kebutuhan perang.[15] Namun, di Jakarta, kemungkinan sebagian besar buruh yang dipekerjakan secara lepas oleh sektor modern tampaknya sangat kecil. Sektor informal di Jakarta masih bertahan lama, meskipun terjadi pasang surut pedagang kecil di Kebun Kacang dan di pusat Jakarta selama tahun 1970-an. Peranannya telah diperkuat oleh resesi pada awal tahun 1980-an. Jakarta tampaknya cocok dengan argumen para penulis sebagaimana McGee dan Lewis mengatakan bahwa sektor informal akan berlangsung lama,

14. *Ibid.*, hal. 179-214.
15 *Ibid.*, hal. 336.

karena tidak ada jalan lain bagi golongan miskin di perkotaan dan pedesaan untuk mendapatkan mata pencarian.[16]

Para ahli menyatakan bahwa kota-kota di Dunia Ketiga seperti Jakarta kini menghadapi masalah-masalah yang lebih besar daripada London satu abad yang lalu.[17] Sementara penduduknya lebih banyak dan berkembang lebih cepat, revolusi teknologi pada abad kedua puluh telah memperlambat tingkat penyerapan buruh dalam industri modern.[18] Masalah yang paling sulit adalah penyediaan pekerjaan, perumahan dan fasilitas-fasilitas pokok bagi penduduk perkotaan. Sementara itu, aspirasi golongan miskin perkotaan abad kedua puluh meningkat. Dibanding dengan rekan-rekannya di London seratus tahun yang lalu, mereka memiliki kesempatan pendidikan yang lebih baik, komunikasi massa dan pengetahuan dunia luar. Mereka melihat kehidupan golongan kaya di layar televisi dan mengetahui apa yang seharusnya mereka miliki.

Kota-kota Asia Dewasa Ini

Di Asia dewasa ini, pengalaman-pengalaman yang sangat berbeda mengenai urbanisasi terlihat di Singapura, Hong Kong dan Manila. Di satu pihak, Singapura dan Hong Kong memberikan contoh bahwa negara-negara ini melalui industrialisasi telah meningkatkan standar kehidupan penduduknya. Di pihak lain, Manila memunculkan masalah-masalah besar kemiskinan yang berkembang seiring dengan penetrasi kapitalisme.

Meskipun proses perubahan dasar -- pertumbuhan ekonomi yang cepat, perubahan bentuk kota dan campur tangan pemerintah yang meningkat -- kelihatannya sama, namun pengaruhnya yang kuat berbeda secara mencolok. Tiga kota mengalami kecenderungan yang sama untuk menghilangkan daerah kumuh dan pedagang kecil dari pusat kota. Dalam kasus Hong Kong dan Singapura, sektor padat modal dapat menyerap dengan baik sebagian besar dari mereka yang terbuang dari kegiatan-kegiatan

---

16 McGee "The Persistence of the Proto-Proletariat" hal. 261, Lewis, W.A. "Unemployment in Developing Countries," *The World Today*, Vol. 23, No. 1: 1967: hal. 21-2.

17 McGee "Beach-heads and Enclaves."

18. Armstrong dan McGee "Revolutionary Change"; Reissman *The Urban Process* hal. 158-65.

padat karya, jadi selama tahun 1970-an kota-kota itu mengalami kekurangan tenaga kerja.[19] Sebaliknya, di Manila, golongan miskin terdorong keluar dari kegiatan-kegiatan untuk memperoleh penghasilan berskala kecil tanpa tersedia alternatif-alternatif yang memadai. Kekurangan pekerjaan dan pengangguran tetap merupakan masalah besar. Meskipun terjadi industrialisasi dan ada perpindahan golongan miskin dari sektor berskala kecil ke sektor yang berskala besar selama tahun 1970-an, namun ini timbul hanya sebagai fenomena sementara. Pekerjaan di pabrik-pabrik membuktikan tidak lebih terjamin daripada pekerjaan di dalam sektor berskala kecil.[20] Sebagai akibatnya, sebagian besar penduduk kota masih dipaksa untuk menambah mata pencarian dengan susah payah di sektor berskala kecil, yang secara terus-menerus diusik oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang mereka anggap kurang sesuai dan persaingan dengan perusahaan-perusahaan padat modal yang lebih besar.

Program-program perumahan di tiga kota memperlihatkan pengalaman-pengalaman mencolok yang serupa. Hong Kong dan Singapura menonjol sebagai contoh kota-kota yang dapat memberikan fasilitas perumahan kepada sebagian besar penduduknya di blok-blok apartemen yang bertingkat banyak,[21] tetapi dulu tidak selalu begitu. Selama tahun 1960-an, penduduknya tinggal di daerah-daerah kumuh yang mungkin lebih buruk daripada penduduk di kebanyakan kota Dunia Ketiga lainnya. Dewasa ini, di Manila diperkirakan seperempat sampai sepertiga penduduk kota yang berjumlah enam juta tinggal di perkampungan kumuh. Perkampungan ini oleh kalangan elite dipandang dengan sikap permusuhan dan terus-menerus terancam oleh penggusuran untuk kepentingan pembuatan jalan-jalan besar, blok-blok perkantoran dan industri.[22] Sejak pertengahan tahun 1970-an, pemerintah dengan dukungan Bank Dunia, menyetujui sejumlah rencana pemu-

---

19 Oshima, H. "Perspectives on Trends in Asian Household Income Distribution: An Overview with Special Reference to Indonesia," *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 30, No. 1: 1982: hal. 100-1.

20 Pinches "Anak-Pawis." hal. 248, 252, 298.

21 Dwyer *People and Housing*; Drakakis-Smith, *D.W. High Society Housing Provision in Metropolitan Hong Kong 1954 to 1979: A Jubiliee Critique*, (Hong Kong, 1979).

22 Pinches "Anak-Pawis" hal. 70-6, 139-45.

kiman kembali yang lebih baik bagi golongan miskin di perkotaan, tetapi hanya sedikit dari mereka telah beruntung.

Pengalaman Jakarta secara umum lebih tampak sama dengan Manila daripada Hong Kong dan Singapura. Pemerintah kota Jakarta dan Manila mencoba merencanakan penciptaan tenaga kerja dan perumahan rakyat, tetapi terhalang oleh pertumbuhan penduduk yang cepat. Tanpa daerah pedalaman di pedesaan, tanpa adanya daerah pedalaman pertanian, Hong Kong dan Singapura telah dapat membatasi arus tenaga kerja yang tidak berketerampilan secara lebih baik.[23] Meskipun negara-negara kota ini memiliki masalah-masalah sosial lainnya yang berhubungan dengan hilangnya hubungan sosial dan kontak dengan lingkungan alamiah, namun sebagian besar penduduknya telah mengalami peningkatan standar kehidupan, sementara ketidakmerataan juga menurun. Sebaliknya di Jakarta dan Manila, kemajuan-kemajuan apa pun yang terjadi baik dalam ketetapan kerja maupun perumahan, telah dilampaui oleh pertumbuhan penduduk dan arus petani miskin dari daerah pedalaman.

Kemiskinan

Literatur mengenai golongan miskin di perkotaan yang memfokuskan pada kurangnya sumber daya material, menyatakan bahwa masalah utama golongan miskin adalah rendahnya pendapatan dan tiadanya barang milik. Namun, dalam lingkungan Ibu Innah, kemiskinan memang tidak lazim. Bahkan golongan yang paling miskin dapat memenuhi kebutuhan dirinya, seperti makan dan pakaian. Dalam keadaan normal, orang-orang ini tidak berada dalam kebutuhan yang mendesak. Hanya selama pendudukan Jepang, penduduk kampung merasakan benar-benar miskin. Maka keperluan-keperluan pokok seperti makanan dan pakaian tidak tersedia selama periode pendudukan Jepang. Selama penjajahan Belanda dan sepuluh tahun setelah kemerdekaan, penduduk kampung hidup secara hemat. Mereka memiliki sedikit barang milik tetapi merasa beruntung menjadi bagian dari kota. Keinginan-keinginan mereka terbatas dan dapat dipuaskan.

---

23 Oshima "Perspectives on Trends in Asian Household Income Distribution" hal. 100-1.

Ironisnya, ketika penduduk kampung menjadi makmur selama tahun 1970-an, maka rasa kemiskinan dan ketidakpuasan meningkat. Keinginan-keinginan mereka meningkat secara drastis dan menjadi semakin sulit untuk dipenuhi. Kerja keras tidak lagi cukup untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Lagi pula, pekerjaan-pekerjaan menjadi lebih sukar didapatkan. Pada saat yang sama, beberapa penduduk kampung menjadi lebih kaya dan membeli barang-barang konsumsi, seperti pesawat televisi dan sepeda motor. Mereka yang tidak memilikinya merasa iri hati dan malu. Rasa kemiskinannya meningkat karena kesenjangan yang melebar dan nyata antara golongan kaya dan miskin di kota.

Bahkan dalam lingkungan miskin Ibu Innah, ada banyak variasi kekayaan. Beberapa rumah tangga menghasilkan pendapatan lebih daripada sepuluh kali pendapatan rumah tangga lainnya. Sementara seorang penduduk kampung seperti Idi memiliki sebuah rumah tembok bertingkat yang baru dengan pesawat televisi berwarna, dua sepeda motor dan sejumlah barang milik lainnya, namun Salim memiliki gubug reyot tanpa air, listrik atau fasilitas lainnya. Mungkin suatu saat, kekayaan penduduk dapat dinilai dari apa yang tampak dari luar, namun hal ini dapat juga menyesatkan mereka yang telah memperoleh barang-barang tersebut dan habis dengan cepat.

Dari sudut pandang penduduk kampung, ciri tetap kehidupannya bukanlah pendapatan yang sangat rendah atau sedikitnya barang-barang milik tetapi ketidakpastian. Segala sesuatu tampaknya dalam keadaan perubahan yang terus-menerus. Mereka tidak mengetahui berapa lama mereka akan memiliki pekerjaan, pendapatan, rumah atau barang-barang miliknya. Selama akhir tahun 1970-an, pekerjaan yang menguntungkan dalam industri rumah tangga atau perdagangan kecil-kecilan dengan cepat menjadi tidak laku lagi. Pendapatan yang diperoleh dengan waktu lama lebih daripada yang dibutuhkan sebuah rumah tangga untuk makan, secara mendadak jatuh menjadi sekadar untuk menyambung hidup. Ketika keberuntungan menjadi suram, barang-barang milik yang baru dibeli terpaksa dijual. Bahkan rumah-rumahnya, banyak di antaranya yang baru saja direnovasi, harus digusur untuk pembangunan jalan, yang merupakan rencana pemerintah untuk pemukiman kembali.

Hubungan manusia bersifat sementara. Meskipun jaringan-jaringan sosial memberikan perlindungan terhadap tingkah laku ke-

hidupan yang tidak pasti, namun jaringan itu juga mudah putus. Penduduk kampung telah kehilangan kontak dengan orang tua, kakak, adik, suami dan isteri. Sanak-saudara, para tetangga dan teman-teman yang saling menolong dalam saat-saat yang dibutuhkan tiba-tiba meninggalkannya. Penduduk kampung menyatakan bahwa ketidakpercayaan dan tipu-daya sebagai alasan utama mengapa mereka tidak dapat menghimpun sumber daya untuk tujuan-tujuan produktif, bahkan di dalam sebuah rumah tangga. Para suami dan isteri enggan untuk menyimpan penghasilan mereka karena takut satu sama lain akan saling menipu. Ketidakamanan itu meningkat sebagai akibat ketidakmampuan untuk bekerja sama.

Tidak hanya hubungan manusia tetapi juga nilai-nilai berada dalam perubahan terus-menerus. Ketegangan yang tetap timbul adalah antara kebutuhan penduduk kampung untuk membagi sumber-sumber dayanya dan kebutuhan untuk menyisihkannya agar mencegah penghamburan kekayaan. Mereka bimbang antara nilai-nilai tradisional mengenai pemerataan dan saling memberi dan menerima dan nilai-nilai modern mengenai pertukaran uang. Mereka terjepit antara dua dunia, yakni dunia komunitas dan dunia kota. Mereka terdorong keluar dari komunitas tetapi belum memperoleh jalan masuk ke institusi-institusi kota yang lebih formal.

Sebelum tahun 1970-an, ketika pemerintah sepenuhnya membiarkan penduduk kampung untuk melayani kebutuhan mereka menurut cara mereka sendiri, mereka tidak merasa sedemikian tidak berdaya. Perekonomian Indonesia yang mandek dan administrasi Jakarta yang lemah sedikit mengganggu kehidupannya. Mereka menciptakan kerja, rumah, fasilitas dan jaminan sosial bagi dirinya sendiri. Pemerintah mensahkan undang-undang dan tujuan-tujuan kesejahteraan, kecuali dalam bidang-bidang kesehatan dan pendidikan program-programnya sebagian besar tidak efektif. Kebijakan-kebijakan tidak dihiraukan dan penduduk kampung memilih para pimpinan lokal supaya menjauhi pemerintah.

Namun, setelah tahun 1970-an, rasa ketidakberdayaan penduduk kampung meningkat ketika pemerintah melakukan penetrasi lebih jauh ke dalam kehidupan mereka. Swadaya murni dalam pekerjaan dan perumahan semakin dibatasi oleh birokrasi yang meluas dan perekonomian modern. Penduduk kampung tidak memiliki harapan positif terhadap pemerintah, karena pe-

ngalaman yang lampau telah mengajarkan mereka bahwa kebijakannya melukai hati. Kebijakan kota tertutup, undang-undang antibecak dan antipedagang kecil dan rencana penggusuran kampung pada tahun 1970-an tidak memberikan mereka sedikit alasan untuk sebaliknya mempercayai. Karena itu penduduk kampung kurang memanfaatkan program-program kesejahteraan semacam itu, seperti poliklinik dan pendidikan dasar. Kebijakan-kebijakan lain yang secara nyata untuk keuntungan mereka, seperti kredit berskala kecil dan pemukiman kembali, dalam pelaksanaannya dikacaukan oleh pegawai rendahan, sambil mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Penggusuran Kebun Kacang mengakibatkan penduduk kampung merasa bingung. Kebanyakan dari mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan pemerintah dan tidak tahu kepada siapa mereka dapat meminta nasihat dan bantuan. Mereka diintimidasi oleh pertemuan-pertemuan pemerintah, kaum birokrat perintang dan dokumentasi resmi. Ketidaktahuan dan ketakutan membuat mereka tidak melihat, apalagi mengambil kesempatan baru. Persatuan kecil yang terbentuk di antara mereka dalam melawan rencana pemerintah mengenai pemukiman kembali, segera dihancurkan. Lain dengan kelas menengah, mereka tidak memiliki kontak-kontak yang diperlukan, modal, waktu dan pengetahuan mengenai pemerintah. Mereka tidak memiliki kepemimpinan dan kemampuan untuk mengorganisasikan dan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Tetapi yang terpenting adalah bahwa mereka tidak memiliki kepercayaan satu sama lain untuk bekerja sama demi tujuan bersama.

Sebab-sebab Kemiskinan

Sejumlah masalah lebih banyak menjengkelkan para ilmuwan sosial ketimbang sebab-sebab kemiskinan. Literatur mengenai kemiskinan dipertentangkan. Di satu pihak, mereka percaya pada "budaya kemiskinan," yaitu rakyat miskin tetap miskin karena mereka lahir dalam lingkungan miskin yang sulit untuk dipecahkan.[24] Budaya ini memungkinkan golongan miskin bertahan di bawah paksaan tetapi pada saat yang sama mengekalkan kemiskinan itu. Golongan miskin jarang dapat mempertahankan peker-

24 Lewis "*The Culture of Poverty*" hal. 19-25.

jaan untuk jangka waktu yang lama. Hasil yang sedikit diperolehnya segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pendapatannya dibiarkan terhambur, dengan membeli barang-barang mewah baik untuk dipertontonkan atau dibagikan pada orang-orang untuk meningkatkan status sosial dan prestisenya. Mereka menikmati hidup sepuas-puasnya ketika saatnya baik dengan perkiraan bahwa hari esok keadaanya akan buruk. Rakyat menjadi fatalistik dalam perbaikan nasibnya dan jarang melakukan investasi dengan cara-cara yang akan meningkatkan pendapatannya di masa depan. Hubungan manusia bersifat curiga dan bahkan kesatuan keluarga mudah retak, sehingga sulit untuk menghimpun sumber daya yang saling menguatkan. Masa kanak-kanak singkat dan pendidikan terbatas. Cara hidup ini berlaku dari generasi ke generasi dan menjadi fenomena yang muncul ke permukaan suatu lingkaran setan yang sulit untuk dihindari.

Sebaliknya, pandangan strukturalis, menyalahkan masyarakat yang memaksa penduduk terjebak kemiskinan.[25] Golongan miskin memiliki inisiatif, kemampuan dan keinginan untuk memperbaiki nasibnya tetapi dibatasi oleh struktur ekonomi dan politik bangsa. Ketidakamanan pekerjaan dan pendapatan menjadikan semua aspek kehidupan yang lain mudah dikecam. Bahkan mereka yang memiliki pekerjaan tetap menerima pendapatan sangat sedikit untuk jam-jam kerja mereka yang panjang dan sukar, sekalipun mereka beruntung dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, jangankan menabung untuk masa depan atau melakukan investasi yang berisiko. Dalam masyarakat yang dikuasai oleh uang, biaya-biaya pendidikan, perumahan, transportasi, fasilitas-fasilitas lainnya, semua meningkat sehingga rakyat tidak mampu untuk membayarnya. Perusahaan-perusahaan kecil dihancurkan oleh perusahaan-perusahaan besar padat modal. Dengan swadaya kampung semua yang diperlukan oleh masyarakat bisa diperoleh dengan harga rendah, tetapi semua ini terpaksa menyingkir untuk memberikan jalan kepada pembangunan padat modal berskala besar dan perkembangan birokratis. Ketiadaan sumber daya menghambat mereka dalam mendidik anak-anak secara memadai. Beberapa orang yang melakukannya, merasakan bahwa anak-anaknya masih kekurangan modal yang diperlukan, kontak-kontak atau keyakinan untuk memperoleh pekerjaan yang terjamin, dengan upah yang baik. Karena pendapatan mereka rendah dan tidak tentu, sehingga mereka tidak dapat mengambil berbagai kesempatan

baru dan pandangan mereka yang sudah sempit menjadi bertambah sempit. Mereka tidak sadar dan tidak mengenal pilihan, alternatif serta kesempatan. Kalaupun mereka sadar, mereka merasa bahwa seagian besar tidak akan mereka capai. Golongan miskin terjebak oleh struktur bangsa, yang hanya ada sedikit harapan untuk melepaskannya. Pilihan mereka adalah mundur ke dalam dunia agama yang mereka pasrah, atau membuat mereka menjadi begitu benci dan memberontak. Sistem yang memenjarakan mereka.

Yang manakah dari kedua teori ini yang akan dipilih -- apakah kebudayaan masyarakat sendiri ataukah sistem bangsa -- yang mempunyai pengaruh besar terhadap pengertian kemiskinan. Tesis budaya kemiskinan menyatakan bahwa pencarian sebab-sebab kemiskinan hampir sia-sia, karena kemiskinan itu sendiri membiakkan kemiskinan. Teori timbul dari orang yang tidak mengerti sejarah. Teori ini tidak menjelaskan mengapa kemiskinan pada tingkat awal mulai muncul, tetapi hanya menjelaskan mengapa kemiskinan itu bertahan. Teori ini dikaitkan dengan sikap-sikap dan perilaku individual dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pandangan lain, tidak puas hanya dengan menjelaskan apa itu kemiskinan tetapi mencoba mencari sebab di luar diri orang yang miskin dan lingkungannya yang paling dekat. Fokus pandangan yang belakangan ini diarahkan pada struktur dan proses.

Kebun Kacang memberikan banyak bukti untuk mendukung hipotesa "budaya kemiskinan." Kemiskinan itu sendiri tampaknya memperoleh momentum dari dirinya sendiri. Keluarga-keluarga cenderung tidak stabil. Ikatan antara suami dan isteri sering lemah. Anak-anak dilahirkan di dalam keluarga-keluarga yang hancur dan tidak selesai sekolah. Di kalangan anak-anak perempuan belasan tahun, kehamilan sebelum pernikahan adalah hal biasa dan anak-anak muda dipaksa nikah sebelum mereka dapat menghidupi sebuah keluarga. Baik di dalam maupun di antara keluarga-keluarga, orang-orang tidak mempercayai satu sama lain dan sumber daya yang ada tidak dapat dihimpun untuk tujuan-tujuan produktif. Fatalisme dan keputusasaan merebak ke mana-mana. Sebagaimana seorang penduduk kampung mengatakan apa gunanya berjuang, jika apa yang telah kau capai sama sekali tidak berguna? Pandangan hidup ini memenuhi diri sendiri. Masyarakat menanggulangi sebaik-sebaiknya yang dapat mereka lakukan

dari hari ke hari, dan memandang masa depan sebagai di luar jangkauan mereka.

Proyek pemukiman kembali memberikan bukti kuat mengenai eksistensi "budaya kemiskinan." Bahkan setelah mereka mendapatkan modal yang banyak sebagian besar penduduk kampung tidak dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan perumahan baru. Sikap-sikap dan pola-pola perilakunya yang dulu masih bertahan. Jumlah uang banyak yang diterima sebagai ganti rugi digunakan dengan cara yang lama untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang segera, keinginannya untuk barang-barang konsumsi dan kewajiban-kewajiban sosial. Dengan demikian, penduduk kampung memperoleh kepuasan segera dan menikmati kemakmuran sesaat tetapi membahayakan masa depannya dan mengekalkan kemiskinannya.

Namun demikian, dari sejarah Kebun Kacang kita dapat memperoleh gambaran bahwa jika penduduk miskin diberi kesempatan maka mereka akan dapat maju, tetapi jika mereka dihalangi oleh kekuatan luar, maka mereka terpaksa mundur. Selama tahun 1950-an dan tahun 1960- an tidak sulit untuk memperoleh pekerjaan dan penduduk kampung berkembang cepat. Dengan adanya ledakan ekonomi pada awal tahun 1970-an, penduduk kampung menikmati kemakmuran yang pernah terjadi sebelumnya. Aspirasi-aspirasinya timbul dan enerjinya tampak meningkat. Dengan ketekunan dan kerja keras, mereka percaya bahwa mereka dapat memperbaiki kehidupan mereka. Mereka berharap untuk mendidik anak-anaknya agar mendapatkan pekerjaan yang lebih terjamin dan bergengsi. Namun, setelah pertengahan tahun 1970-an, bagi kebanyakan penduduk kampung hal itu mulai suram. Ketika berbagai upayanya untuk memperbaiki nasibnya terbukti gagal, mereka merosot kembali ke dalam fatalisme dan putus asa.

Apakah penduduk kampung mempunyai harapan dan gairah atau keputusasaan, sebenarnya tergantung pada banyaknya kesempatan yang terbuka bagi mereka. Tersedianya kesempatan-kesempatan ini sangat sedikit berada di dalam jangkauannya. Pada dasarnya, muncul atau hancurnya kesempatan disebabkan oleh kekuatan-kekuatan di luar mereka. Pertumbuhan Kebun Kacang dari kebun sayur-sayuran pada tahun 1920-an menjadi kota gubug (*shantytown*) pada tahun 1950-an disebabkan oleh ekonomi dan pertumbuhan demografis kota. Dengan berada di pusat kota, penduduk daerah itu merasakan pengaruh kuat kemacetan ekonomi

dan kemudian pertumbuhan ekonomi. Selama tahun 1950-an dan tahun 1960-an mereka memanfaatkan kekosongan produksi dan distribusi barang-barang dan jasa. Dari pertengahan tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an, penduduk kota gubug menjadi makmur karena metropolis modern bangkit di sekitarnya. Tetapi selama pertengahan tahun 1970-an perubahan dramatis dalam permintaan dan penawaran barang-barang dan jasa menyatu dengan perubahan-perubahan fisik, demografis dan politik di pusat kota merusak perdagangan mereka. Ketika kota itu mancaplok kampung mereka, rumah dan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dianggap menghalangi pembangunan. Hubungan simbiotis antara kampung dan kota berubah menjadi bentrokan. Penduduk kampung harus meninggalkan daerah itu atau mengubah cara kehidupannya menjadi bagian dari metropolis modern.

Teori strukturalis dan budaya kemiskinan oleh karenanya saling memperkuat dan tidak bertentangan satu sama lain. Sebab-sebab kemiskinan material, ketidakpastian dan ketidakberdayaan tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan kondisi-kondisi ekonomi dan politik dari luar, maupun sikap-sikap dan pola perilaku pribadi. Sejarah enam puluh tahun Kebun Kacang telah mengungkapkan perjuangan yang terus-menerus antara upaya-upaya penduduknya untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan banyaknya kekuatan yang menghempaskannya. Ada celah antara kekuatan-kekuatan luar dan sikap-sikap serta perilaku penduduk yang menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Teori strukturalis membantu menjelaskan mengapa kemiskinan mulai ada pada tingkat pertama, sementara "budaya kemiskinan" membantu menjelaskan mengapa sebagian besar penduduk merasa sukar untuk melepaskan diri dari kemiskinan, bahkan paling tidak setelah beberapa kekuatan eksternal berhenti menindasnya.

Pandangan Sejarah Penduduk Kampung

Penduduk kampung mempunyai pandangan sejarah yang canggih. Tidak seperti kelas menengah yang optimistik, penduduk kampung tidak memandang sejarahnya sebagai semata-mata sebuah kemajuan ke arah kepastian, kemakmuran dan kebahagiaan yang lebih besar. Bagi mereka, sejarah penuh dengan hal-hal yang berlawanan: kemajuan material meningkat bersamaan dengan hilangnya stabilitas sosial, kepuasan hati dan ketenangan. Hubungan manusia direnggangkan oleh perjuangan untuk memperkaya dan memajukan

diri sendiri. Kekayaan dan barang-barang milik mejauhkan hubungan orang yang satu dengan lainnya. Hubungan yang intim di antara mereka berantakan. Kesempatan-kesempatan untuk memperoleh penghasilan baru secara mendadak timbul dan secara mendadak pula hilang. Kehidupan kampung timbul tenggelam. Rumah-rumah yang telah diperbaiki digusur. Pemerintah tampak kejam tapi juga baik. Harapan-harapan dan kesempatan-kesempatan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik timbul bersamaan dengan meningkatnya frustrasi, ketidakpuasan dan keputusasaan.

Penduduk menyadari bahwa mereka hidup dalam periode perubahan yang cepat, meskipun kadang-kadang sejarah berputar mengulanginya. Dalam masa hidupnya sendiri penduduk yang paling tua melihat kebun sayur-mayur berubah menjadi kampung yang berpenduduk padat dan pada akhirnya didirikan flat-flat bersusun tinggi. Mereka mengalami perbenturan nilai-nilai, merenggangnya ikatan-ikatan sosial, kegiatan-kegiatan untuk memperoleh penghasilan yang bersifat sementara dan perbedaan besar antara kemiskinan dan kekayaan. Pemerintah yang dulu tampaknya tidak penting, tiba-tiba ikut mencampuri. Mereka merasa bahwa keberadaan pedesaan yang lebih tertib dan tenang pada setengah abad sebelumnya telah memberi jalan ke masa perubahan yang dahsyat dan kacau.

Secara metaforik, penduduk kampung melukiskan kehidupannya seperti roda berputar. Kadang-kadang mereka di atas dan kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang mereka maju dan pada saat-saat yang lain mereka merosot. Analogi lain yang mereka gunakan adalah turun ombak, naik ombak, yang artinya bahwa jalan lintasannya dalam kehidupan adalah jalan yang berlubang, penuh dengan tanjakan dan jalan menurun. Pada saat ini nasib keberuntungan pribadi tampak meningkat -- roda berputar lebih cepat dan gelombang berkembang lebih besar.

Meskipun tulisan ini hanya mengenai sebuah kampung di Jakarta, namun ada pengalaman-pengalaman serupa mengenai perpecahan hubungan sosial, kemajuan dan kegagalan ekonomi, timbulnya harapan-harapan yang dihadapkan pada keputusasaan yang dialami oleh rakyat di manapun. Dalam kata-kata Sumira yang terakhir kepada saya, ia mengatakan "kita memasuki dunia ini tanpa sesuatu apa pun dan kita meninggalkannya tanpa apa pun." Meskipun barang milik dan kekayaan membuat kehidupan lebih mudah, pada akhirnya adalah ikatan manusialah yang memberikan arti bagi kehidupan penduduk kampung.

Post Script:

Kembali ke Kebun Kacang 1994

Setelah tiga belas tahun sejak penggusuran kampung Kebun Kacang, tidak ada gambaran yang jelas apa yang telah terjadi terhadap sebagian besar penduduk kampung itu. Setiap keluarga menempuh jalannya sendiri-sendiri. Beberapa orang seperti Bang Idi maju terus, yang lain seperti Ibu Cia, salah seorang pelopor kampung itu, jatuh dari kaya menjadi miskin. Beberapa orang di antara mereka bergulat terus untuk mencoba membayar angsuran dan fasilitas perumahan baru, bagi orang-orang yang paling miskin, memindahkan diri dan memakai ganti rugi yang cukup untuk membangun hidup kembali di tempat baru menurut cara mereka sendiri tanpa menerima rumah susun ataukah rumah inti Perumnas pinggir kota tampaknya pilihan yang terbaik. Hanya dengan suatu penelitian statistik bisa kita ketahui, berapa banyak keluarga diuntungkan oleh pemukiman kembali dan berapa banyak keluarga menderita. Tetapi kita masih akan bertanya-tanya mengenai apakah perubahan-perubahan dalam hidup mereka itu terutama disebabkan oleh penggusuran atau karena perubahan-perubahan umum di bidang ekonomi yang terjadi di Indonesia ataukah oleh faktor-faktor pribadi.

Kasus-kasus di bawah adalah sebagai gambaran sepintas lalu tentang kehidupan kawan-kawan saya dari Kebun Kacang, waktu saya kembali pada tahun 1994. Saya menengok mereka di dalam rumah susun, di rumah inti Depok maupun di pinggiran tempat mereka mendirikan rumah. Gambaran yang timbul adalah, bahwa mereka yang mau terus menerus tinggal di flat harus mempunyai kerja dan penghasilan tetap, mendapat pertolongan dari anak-anak mereka, mempunyai pendidikan cukup dan mampu mengatur

uang untuk membayar angsuran dan banyak biaya-biaya baru untuk fasilitas. Untuk mereka yang miskin, yang tidak punya penghasilan tetap, lebih baik pindah ke tempat di luar program Pemerintah, tempat mereka bisa mencari nafkah dan membangun rumah sendiri, tahap demi tahap pada saat mendapat rezeki. Keluarga miskin itu perlu keadaan longgar sehingga mereka bisa membayar untuk rumah ataukah fasilitas kapan saja mereka mendapat uang tidak secara tetap setiap bulan.

Yang Menerima Rumah Susun

Untuk mempertahankan hidup di flat, para keluarga membutuhkan pendapatan paling tidak di atas Rp 400.000,-. Kira-kira separuh dari keluarga-keluarga itu (80 dari 160), yang pada mulanya menerima akomodasi flat, dipaksa untuk meninggalkan flat-flat itu, karena tidak mampu membayar angsuran dan fasilitas setiap bulan. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan berpendapatan rendah yang pada akhirnya dipaksa untuk pindah dari flat. Banyak penghuni menjual unit-unitnya ke konglomerat Supermarket Golden Truly dengan harga antara Rp 15.000.000,- untuk unit berukuran 21 m^2 hingga Rp 39.000.000,- untuk unit berukuran 54 m^2. Orang di rumah susun percaya, bahwa pemilik-pemilik Golden Truly ingin membeli seluruh rumah susun dan membongkarnya untuk membuat bangunan lain untuk tempat-tempat parkir mobil, tempat tinggal orang mewah dan perkantoran. Beberapa orang secara sinis mempercayai, bahwa proyek perumahan ini hanyalah program sementara untuk memindahkan penduduk kampung keluar dari daerah itu supaya orang besar bisa masuk.

Ibu Sumira, tokoh sentral dalam kisah ini tidak mempunyai pengalaman hidup lama di flatnya yang baru. Semula saya mengira, bahwa ia meninggal karena penderitaannya selama lebih sepuluh tahun waktu pedagangannya. Rumah kampung dan hubungan sosial hancur, tetapi kemudian ternyata, bahwa ia menderita penyakit kencing manis. Kematiannya mengerikan. Pertama jari kakinya dipotong dan kemudian kakinya diamputasi. Mini, anak perempuannya, yang hamil tua mengaku tidak dapat menunggui ibunya yang sakit, karena bau busuknya. Hanya Mimin, seorang tetangga kampung yang berani dan mempunyai keteguhan hati mengunjungi Sumira secara teratur sampai meninggal. Miminlah yang mengurus jenazah Sumira di kamar mayat. Ia me-

mandikan dan mengubur Sumira yang tanpa kaki itu. Kini makam Sumira hanya ditandai oleh kayu salib yang ditulisi namanya dan dikhawatirkan digali kembali karena Mini tidak dapat membayar Rp 80.000,- untuk keperluan makam permanen..

Mini mengambil alih flat Sumira dan tinggal di dalamnya dengan suami dan anaknya yang berusia dua tahun. Untuk mengatur pembayaran flat itu, ia menyewakan kamar-kamar yang ada kepada empat pemuda yang bekerja di Hotel Hilton. Suaminya yang berasal dari kampung dekat Kebun Kacang, adalah seorang sopir yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sejauh ini mereka mampu membayar angsuran flat dan Mini merasa bangga telah menjadi pemilik flat itu. Kalau ditanya, ia tidak mau kembali ke kehidupan di kampung Kebun Kacang yang lalu, di mana Ibu Sumira harus mengangkat air minum, harus ke kali untuk berak dan Mini sebagai anak kecil selalu ditakuti oleh kebakaran. Tetapi kini merasa bosan dengan kehidupan di flat dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya setiap hari. Ia mencoba berdagang tetapi gagal. Ia membeli karpet, televisi berwarna, dan kipas angin secara kredit, tetapi ia merasa kesulitan untuk membayarnya. Ibu kandung Mini, Ade datang dengan dua anaknya dari desa parung dan tinggal bersama Mini selama dua tahun, membantu mencuci dan memasak, tetapi ketika ibunya memerlukan uang untuk mengangkat tumor payudaranya, ia dikirim pulang ke desa. Mini tidak mempunyai uang untuk membantu ibunya.

Bang Idi beruntung oleh penggusuran Kebun Kacang dan mendapat kesempatan untuk membeli tidak hanya satu tetapi empat unit di rumah susun. Pada tahun 1994 ia punya kira-kira empat mobil dan sudah pergi naik haji. Tidak seperti banyak perusahaan berskala kecil di pusat Jakarta, usahanya maju pesat. Ia tetap memperoleh order dari kantor-kantor pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta dan toko-toko Cina. Dua anak tertuanya mengambil alih pengelolaan bisnisnya. Namun Bang Idi tetap mengawasi dan memberi keputusan akhir. Salah satu flatnya dijadikan kantor dengan dilengkapi meja besar, dua pesawat telepon, kartu nama, setumpuk kertas -- kartu pemesanan/tamu dan buku-buku cek, jauh berbeda dengan keadaan ketika Idi tidur di bawah meja dan mesin-mesin jahit yang menempati ruang sewaan seluas 4 m^2 di Kebun Kacang. Empat flat yang telah dibeli Bang Idi semuanya digunakan untuk usaha penjahitan picinya dan rumah permanennya berada di pinggir kota di mana isteri dan beberapa anaknya

tinggal. Beberapa anak lainnya belajar di sekolah swasta Islam di Jakarta. Setiap bulan Idi pulang ke kampung tempat ia sedang membangun kembali rumahnya seharga Rp. 150.000.000,-.

Mista yang pernah memiliki rumah di kampung Kebun Kacang dan kemudian pindah ke rumah susun, kini menyewa sebuah ruangan kecil di kampung dekat flat itu. Mista tak dapat mengingat waktu yang lebih buruk daripada kehidupannya sekarang. Ia sebenarnya telah kehilangan segalanya. Mukanya kelihatan suram. Impiannya tentang kehidupan yang lebih bagus sudah mati. Tidak jelas, apakah kesialannya disebabkan oleh kesalahan sendiri atau penggusuran. Mista terpaksa menjual flatnya yang berukuran 42 m^2, ketika ia dan istrinya tidak bekerja dan tidak dapat membayar angsuran dan fasilitas-fasilitas. Dari uang yang diperolehnya dari menjual flat itu, Mista membeli flat yang lebih kecil yaitu 21 m^2 dan dengan sisa modalnya mencoba membuka usaha baru di mana dia membawa kayu dengan truk dari desa di Jawa ke pelabuhan untuk ekspor ke Jepang. Beberapa truk kayu dianggap oleh penerima kualitasnya terlalu rendah sehingga tidak diterima untuk di ekspor. Mista terpaksa menjual flatnya yang kecil dan akhirnya modal Mista habis begitu saja. Isterinya meninggal. Tidak jelas apakah ia meninggal sebelum atau sesudah perkawinan Mista yang kedua. Ia merasa berduka cita karena kehilangan flatnya, salah seorang anak perempuannya terpaksa keluar dari sekolah karena hamil sebelum menikah dan terhamburnya banyak uang dan hilangnya kesempatan. Mista sekarang tidur di sebuah kamar yang kecil di loteng yang bukan main panasnya bersama dengan isteri baru dan anak perempuannya telah melahirkan bayi tanpa suami. Mereka hidup dari hari ke hari tanpa memiliki uang sepeser pun.

Ibu Karsinah yang telah menempati flatnya selama 10 tahun sangat berminat untuk menjualnya. Ia melepaskan pekerjaannya sebagai pencuci pakaian dari rumah bersalin terdekat dan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia benci dengan suasana gaduh di flat itu, sebab banyak anak muda yang menyewa unit-unit itu. Orang tua jarang tinggal di flat dan seringkali merasa terasing dan rindu akan suasana kampung yang dulu. Ibu Karsinah rindu akan suasana perkumpulan pengajian kecil di kampung tempat para perempuan saling mengobrol satu sama lain mengenai permasalahan sehari-hari. Ia rindu akan suasana para pedagang yang dengan giat dan sibuknya menjajakan dagangannya dari rumah ke rumah. Keberadaannya di lantai atas membuat temannya

yang lewat enggan untuk naik ke flatnya. Ia rindu untuk memandangi kehijauan tetumbuhan, sekalipun di sekelilingnya terdapat tanaman di pot-pot. Blok-blok tempat tinggal tidak menyenangkan dan kotor. Tak seorang pun yang peduli untuk membersihkan ruangan, gang-gang dan tangga umum. Golden Truly telah membeli beberapa unit perumahan dan kemudian menutup pintu dan jendela dengan papan dan unit-unit tersebut dibiarkan kosong.

Dibandingkan dengan kehidupan di kampung dulu, kehidupan Karsinah lebih makmur, rumahnya berdinding kokoh dilengkapi gas, listrik, air, kamar kecil, namun tampaknya ia tak bahagia. Dalam usianya yang tua, ia merindukan kembali ke gaya kehidupan kampung dan berdagang seperti yang pernah ia lakukan di kampung dan berdagang seperti yang pernah ia lakukan di kampung selama tahun 1960-an-70-an, menjajakan kue-kue dari rumah ke rumah. Ia mempertimbangkan menjual flat miliknya dan pindah ke sebuah rumah di desa. Untuk menghentikan rencananya menjual flat, saya menutup semua utangnya dan melunasi pembayaran flatnya. Bahkan setelah melunasi pembayaran flat Karsinah, ia tidak memperoleh hak legal, baik dari Perumnas maupun BTN. Muncullah kasak-kusuk yang merebak di lingkungan itu, mengenai "Golden Truly yang membeli hak legal atas semua flat disitu" tetapi penduduk kampung tidak mempunyai cara untuk membuktikan hal ini. Ada pernyataan resmi bahwa "hak atas akomodasi di semua flat di Jakarta masih belum diatur."

Yang Menerima Rumah Inti Perumnas

Untuk mempertahankan hidup di rumah-rumah inti Perumnas di pinggiran kota itu, setiap keluarga memerlukan pendapatan lebih dari Rp 300.000,- per bulan. Kira-kira Rp 30.000,- dibelanjakan untuk akomodasi dan fasilitas-fasilitas. Mereka yang mempunyai keahlian khusus yang diperlukan oleh penduduk sekitarnya seperti penjahit baju, pedagang sayur, guru ngaji, tukang listrik dapat menemukan pekerjaannya di rumah-rumah inti Perumnas itu. Omi, seorang penjahit baju, Bu Cum, guru ngaji, Tuti, pedagang sayur telah mampu menghidupi diri di tempat baru. Mereka hidup lebih baik dengan akomodasi yang luas dan telah mampu membayar unit-unitnya serta mendidik anak-anak mereka. Saya menghitung dua belas keluarga dan pasti ada lebih banyak lagi dari 20 yang dulu pindah dari Kebun Kacang ke rumah inti Depok yang

memperoleh kembali pekerjaan mereka dan hidup lebih baik daripada di Kebun Kacang.

Beberapa orang dari keluarga Ibu Innah pindah ke Depok secara berkelompok dan selanjutnya tinggal sebelah menyebelah di gang-gang yang sama. Mereka masih mempunyai hubungan tetangga dan saudara di tempat baru, tetapi makin lama mereka masuk kelas menengah dan menjadi lebih individualis daripada waktu mereka hidup di kampung. Pendapatan mereka rata-rata lebih dari sekitar Rp 400.000,- per bulan, cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, menyekolahkan anak, sandang, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya.

Sri, anak perempuan Karsinah tetap bertahan menempati rumah inti Perumnas di Depok, tetapi, pada tahun 1994 ia merencanakan menjualnya dan pindah ke desa di luar perumahan Perumnas. Ia tidak mampu tinggal di tempat banyak keluarga dengan cita-cita besar dan tempat para tetangganya menghina keluarga miskin. Setelah tiga belas tahun sesudah pembongkaran di Kebun Kacang, Sri dan suaminya masih belum sempat memperbaiki rumah inti itu. Mereka merasa malu. Perabot mereka masih tua dari Kebun Kacang dulu. Sejumlah pengeluaran harus mereka keluarkan untuk keperluan rumah inti yang tak terduga dan Sri merasa, jika ia hidup di sebuah desa, pengeluaran-pengeluaran tidak akan begitu besar. Disatu pihak, ia menyadari, bahwa ia memperoleh lingkungan yang lebih lega dan berbagai fasilitas yang lebih baik di perumahan Depok untuk anaknya, tetapi suaminya, Rohim mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan. Setelah pindah dari Kebun Kacang ia bekerja dalam bisnis penjualan mobil dan harus pulang pergi dari kota Jakarta paling tidak empat jam setiap harinya. Pendapatannya di bawah Rp 200.000,- hampir tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya untuk biaya-biaya transportasi ke tempat kerja, makan, pendidikan, perumahan, fasilitas-fasilitas dan sandang. Sri harus pandai-pandai mengelolanya. Tidak pernah kehabisan daya dalam perjuangannya. Ketika perusahaan tempat suaminya bekerja jatuh bangkrut, ia harus keluar dari pekerjaannya dan situasinya menjadi parah. Saya membantu menyediakan sepeda motor untuk Rohim dan Rohim bekerja sebagai "tukang ojek." Dengan pendapatan Rp 240.000,- setiap bulannya, keluarga tetap berjuang dan masih merasa ridak ada kepastian, apakah mereka bisa bertahan di rumah inti di Depok.

Masalah utama penduduk yang tinggal di pinggiran, ialah mereka harus mengeluarkan Rp 60.000,- per bulan dan perjalanan yang menyita waktu ke tempat kerja. Beberapa orang kehilangan pekerjaannya atau mengalami penurunan pendapatan di pusat kota, di samping itu masih harus membayar setiap bulan untuk rumah-rumah inti. Beberapa orang yang lain menjual unit-unitnya dan pindah kembali ke Depok seperti Acang mengalami penurunan usaha penjualan minuman es, pada akhirnya menyandarkan penghasilan dari istrinya, yang bekerja sebagai pencuci pakaian. Bani yang dulu menarik becak di Kebun Kacang dan saudara laki-lakinya, Canil, yang dulu menjual es batu di situ terpaksa menjual rumah inti Perumnas dengan murah karena kehabisan kerja di Jakarta dan membeli rumah alternatif di desa. Mereka meninggalkan anak-anak mereka di desa, sementara mereka bekerja di Jakarta. Keluarga besar Peking yang miskin dan memilih rumah inti, tetap hidup miskin seperti waktu mereka masih tinggal di Kebun Kacang dan dianggap hina oleh para tetangganya kelas menengah di Perumnas Depok.

Yang Membangun Rumah Sendiri

Orang-orang yang paling miskin seperti Juria dan Salim, yang dari awalnya telah memilih pemukiman kembali di luar flat, tampaknya telah melakukan pilihan yang benar. Mereka mampu membangun kembali rumah barunya dengan uang ganti rugi yang telah diterimanya dan dari bahan-bahan bangunan yang diambilnya dari tempat bangunan-bangunan yang telah dirobohkan. Mereka tidak mempunyai beban membayar angsuran dan fasilitas-fasilitas tetap, sementara mereka mencari pekerjaan-pekerjaan baru di sekitar tempat barunya itu. Lama-lama mereka bisa memperluas dan memperbaiki rumah mereka sebagaimana telah mereka lakukan di Kebun Kacang. Lama-lama dan sedikit demi sedikit, mereka memperoleh teman baru yang menolong mereka untuk memperoleh pekerjaan-pekerjaan baru. Bagi mereka yang tinggal di pinggiran kota Jakarta, seperti Juria dan Salim, dapat memperoleh air dan bahan bakar untuk masak secara bebas dari lingkungan sekitar rumahnya. Ada banyak lahan kosong untuk bermain anak-anak mereka. Karena Juria dari dulu mementingkan kebersamaan keluarga dan pendidikan anaknya, akhirnya anak-anak tertuanya merawat orang tuanya dan membantu mendidik saudara kandungnya. Sungguh pun ada kemajuan, hidup mereka tetap sulit

dan keluarga itu masih tidak bisa terhindar dari kemiskinan, dan terpaksa tetap mencari nafkah dari hari ke hari untuk membayar makan dan biaya sekolah anak-anak, namun mereka dapat melakukannya. Tampaknya bagi mereka dengan pendapatan dibawah Rp 300.000,- sebulan, membangun rumah sendiri di atas tanah sendiri di lingkungan kampung adalah pilihan terbaik.

Ibu Mus, yang mempunyai usaha es putar di rumah pondokan komunal juga membuat keputusan yang benar untuk tidak mengambil flat, tetapi pindah ke daerah Bongkaran, sebuah kampung yang berjarak satu setengah kilometer dari Kebun Kacang. Para migran sementara, seperti Mus mengikuti akal sehat untuk pindah ke kampung daripada menerima rumah susun atau rumah inti Perumnas di pinggir kota. Mereka tetap menginginkan hidup berbiaya rendah di kota, sehingga mereka dapat meneruskan perdagangannya di sektor padat karya dan murah dalam suatu lingkungan informal dan mengirim penghasilan dari kota ke desa untuk menanam modalnya di lahan, keluarga dan rumah di sana. Meskipun Mus secara terus-menerus khawatir mengenai penggusuran rumah barunya dan akhirnya ia sakit dan meninggal, generasi sesudahnya dari keluarga suaminya mengambil alih usaha rumah pondokan komunal. Para penjual es krimnya meneruskan penjualannya dari rumah pondokan Mus pindah ke pekerjaan baru. Mereka tidak mau lagi mengikuti jejak orang tuanya sebagai pedagang kecil. Mereka telah memperoleh pendidikan di desa dan menjadi satpam, sekretaris dan tukang kayu di Jakarta. Orang tua mereka yang bekerja keras sebagai penjual es putar telah menciptakan mobilitas kepada generasi sesudahnya. Generasi muda mempunyai pekerjaan yang lebih tetap dan enak daripada orang tuanya sungguhpun gaji mereka belum tentu lebih tinggi daripada penghasilan orang tuanya waktu bekerja sebagai tukang es. Sama dengan orang tuanya, generasi muda masih menganggap kampung di Klaten, Jawa Tengah, sebagai tempat tinggal mereka. Tidak seperti banyak penduduk kota yang merasa tersendiri dan terasing, orang muda di pondok Mus berkumpul bersama di Jakarta untuk merayakan suatu kegiatan, membantu satu sama lain dan mengadakan arisan. Pada tahun 1995, Pemerintah merencanakan akan menggusur lokasi rumah Mus untuk dijadikan rumah susun.

Haji Eddy yang telah pindah ke kampung lain di Jakarta Pusat mendirikan rumah hampir mirip dengan rumah yang ia miliki, ketika masih tinggal di Kebun Kacang dan ia dipercaya sebagai

ketua kelompok dalam komunitas barunya itu. Tidak lama kemudian komunitas itu terancam penggusuran dan Haji Eddy dan tetangganya di komunitas itu rupanya akan mengalami nasib sama dengan Kebun Kacang yang telah kena penggusuran. Namun Haji Eddy yang telah mempunyai pengalaman di Kebun Kacang, memberitahukan kepada semua warganya untuk bertahan di tempat mereka dan menolak rencana penggusuran tanpa ganti rugi yang adil. Rakyat di sana mempunyai lebih besar kekuatan untuk tawar-menawar, karena yang akan mendirikan perumahan bertingkat dan blok-blok mewah bukan Pemerintah melainkan developer swasta. Semula para developer menawar Rp 700.000,- per m^2, tetapi penduduk kampung menolak dan memasang harga Rp 1.000.000,-. Pada tahun 1994 komunitas itu tetap bertahan pada ganti rugi tersebut, tetapi angka itu meningkat menjadi Rp 2.000.000,- per m^2. Haji Eddy merasa, bahwa ia diuntungkan oleh penggusuran Kebun Kacang, karena ia tidak hanya dapat membeli rumah kampung di Jakarta Pusat di lokasi strategis, dekat dengan tempat ia dan isterinya bekerja, tetapi ia juga membeli sebuah unit di rumah susun di Kebun Kacang yang kini ia sewakan.

Yang Kehilangan Rumah

Perempuan muda yang mempunyai anak, tetapi tidak mempunyai suami yang setia seperti Badria dan anak perempuan Yusuf, banyak menderita akibat penggusuran Kebun Kacang. Setelah digusur, mereka tidak punya tempat tetap. Suami mereka telah menghambur-hamburkan uang ganti rugi, mereka tidak lagi mempunyai tempat tinggal tetap dan sanak saudaranya terpencar ke pinggiran Jakarta. Sungguhpun anak Yusuf mempunyai sanak saudara yang tinggal di flat, mereka sibuk berjuang membayar kamar dan fasilitas baru dan menghidupi keluarga mereka sendiri dan tidak mampu membantu saudara-saudara yang susah, yang tidak mempunyai rumah. Akhirnya selama sepuluh tahun, anak perempuan Yusuf tinggal bersebelahan dengan kedai dagangnya di jalan dekat rumah susun Kebun Kacang, sampai ia tak dapat bertahan lagi, lalu berusaha bunuh diri dengan cara membuang dirinya yang sedang hamil bersama kedua anaknya di depan mobil yang lewat. Banyak orang mengatakan, bahwa suaminya kurang ajar terhadap istrinya. Tetapi, kalau anak perempuan Yusuf masih punya keluarga dan teman-teman sekitarnya semacam di Kebun

Kacang dulu, ia bisa mencari penghasilan dan tinggal bersama mereka dan tidak akan bunuh diri. Pengalaman anak perempuan Yusuf juga dialami oleh Badria yang hidup mengembara dan lama kelamaan menjadi gila. Sulit untuk memperkirakan berapa banyak orang mengalami nasib seperti ini, karena mereka tidak gampang dilihat di jalanan umum, di gang-gang atau di bawah jembatan di Jakarta.

Beberapa orang yang menjual flatnya seperti Ibu Cia, pindah ke rumah inti di Depok atau Tangerang dan kemudian pindah ke sebuah rumah pedesaan di daerah pinggiran Jakarta. Setiap kepindahan baru menyebabkan mereka menjadi lebih miskin. Ibu Cia kehilangan rumah besar, keamanan sosial dan stabilitas komunitas kampung, tempat ia pernah hidup selama lebih 50 tahun dan kini ia terlihat terlunta-lunta di flat-flat Kebun Kacang dan meminta belas kasihan dari para tetanggà kampungnya terdahulu. Penggusuran bagi generasi tua tampaknya mengakibatkan mereka sulit untuk menambah pendapatan untuk membiayai harga-harga tinggi di flat, mengatur anggaran belanja dan menyesuaikan kembali dengan kehidupan rumah susun. Bahkan lebih tragis, orang seperti Ibu Cia, yang memiliki anak-anak, tidak mendapat bantuan dari mereka.

Kesimpulan

Akibat dari hal-hal tersebut sangat beragam dan bercampur-aduk sehingga membingungkan. Ada kekecualian seperti Ibu Cia tetapi, kebanyakan yang kaya sebelum penggusuran Kebun Kacang, sesudahnya menjadi lebih kaya, sedangkan kebanyakan dari mereka yang mengalami kemiskinan sebelumnya tetap miskin sesudahnya. Dengan kata lain, penggusuran mempertahankan dan melebih-lebihkan keadaan-keadaan yang sudah ada. Si kaya menjadi lebih kaya, si miskin menjadi lebih miskin. Memperluas kesempatan bagi sejumlah orang dan merusak kesempatan bagi yang lain. Kebanyakan orang yang kaya, berpendidikan dan mampu, maju terus untuk menciptakan kehidupan barunya di flat, rumah inti ataukah di desa tempat mereka mendirikan rumah mereka sendiri. Sejumlah orang miskin, kurang berpendidikan dan kurang mampu menjadi lebih miskin.

Namun ada perkecualian bahwa orang-orang yang dahulunya miskin (seperti Juria dan Salim, Tuti dan Boco) yang mengetahui, bagaimana mereka membelanjakan uang ganti ruginya mendapat

kesempatan untuk merubah hidup mereka. Modal yang mereka terima untuk rumah kampung mereka, secara hati-hati dibelikan sebuah rumah baru di flat, di kampung lain atau di pinggiran kota. Yang paling penting, para orang tua sudah bekerja keras untuk anak- anak mereka dan sesudah itu anak-anak yang berpendidikan mendukung orang tua. Mereka akhirnya hidup dalam lingkungan yang lebih baik dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas yang lebih baik. Sebaliknya, Ibu Cia merupakan satu kasus orang yang paling kaya di Kebun Kacang dulu, yang dapat ganti rugi yang paling besar, sesudah dibongkar menjadi orang paling miskin, karena tidak tahu caranya mengatur ganti rugi, tidak ada penghasilan tetap karena orangnya sudah tua dan anaknya tidak peduli.

Ada tujuh faktor yang mempengaruhi nasib penduduk kampung setelah penggusuran rumah kampung mereka:

1. Keteraturan dan besarnya pendapatan yang mereka terima sebelum dan sesudah penggusuran,
2. Pendidikan dan keahlian orang tua, kerja keras, tekun dan cerdik,
3. Besarnya uang ganti rugi,
4. Pilihan pemukiman kembali dan cara menggunakan uang ganti rugi,
5. Kemampuan mengatur anggaran belanja,
6. tingkat pendidikan anak dan kesediaan mereka untuk membantu orang tua,
7. Keberadaan tempat di desa yang mereka bisa pakai sebagai pangkalan.

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai apa yang telah terjadi terhadap penduduk Kebun Kacang, perlu diadakan satu survai statistik dan mempertimbangkan ketujuh aspek tersebut di atas.

Pengalaman Kebun Kacang dalam penggusuran sangat relevan untuk banyak kampung di kota-kota besar yang mengalami kejadian yang hampir sama. Pada tahun 1990-an lebih banyak lagi kampung di pusat maupun di pinggir kota dalam waktu cepat dibongkar habis dan diganti dengan apartemen-apartemen mewah, plaza-plaza dan kantor bertingkat. Proses penggusuran hampir mirip Kebun Kacang, bahkan lebih kejam lagi. Penduduk merasa takut, karena mereka tidak mengerti apa-apa, tidak percaya

terhadap RT dan Lurah dan mereka merasakan adanya penyelewengan mulai dari tingkat paling atas dari oknum pemerintahan sampai tingkat yang terbawah. Di tengah kekacauan suasana, muncul calo-calo dari kalangan oknum pemerintah maupun kalangan masyarakat yang sengaja memperkeruh suasana untuk mencari keuntungan. Akibat dari penggusuran dan pemukiman kembali, ada sebagian dari masyarakat yang menjadi lebih kaya dari dulu dan ada sebagian yang menjadi lebih miskin dan sengsara.

Pada tahun 1990-an rakyat kampung yang mengalami penggusuran seringkali tidak diberi ganti rugi, kesempatan untuk pindah ke tempat atau ke rumah alternatif seperti yang dialami penduduk Kebun Kacang. Mungkin pemerintah merasa terlalu banyak menghabiskan biaya dan enerji. Kalau ganti rugi diterima oleh rakyat, besarnya sama nilainya dengan ganti rugi yang diterima oleh rakyat Kebun Kacang pada tahun 1981 padahal harga tanah sudah kurang lebih tiga puluh kali lipat. Lagipula untuk mencari tempat tinggal alternatif lebih sulit sekarang dibandingkan dulu. Kalau dulu rakyat Kebun Kacang diberi penampungan sementara sambil menunggu selesainya flat-flat dibangun, sekarang pengalaman di Kebun Kacang tinggal merupakan impian bagi masyarakat tergusur.

Sebagai contoh, di kampung Sawah pada tahun 1992, 2.000 penduduk kampung itu tidak ditawari ganti rugi, tetapi mereka dipaksa menerima rumah inti di Tangerang, Karawaci atau Bekasi. Mereka harus membayar uang muka Rp 350.000,- untuk unit-unit mereka dan membayar Rp 16.640,- per bulan untuk angsuran selama 15 tahun. Padahal di K ebun Kacang uang muka hanya Rp 75.000,- dan untuk pindah ke rumah inti di Depok dan Tangerang hanya membayar angsuran Rp 6.000,- sebulan. Rakyat Kampung Sawah dipaksa pindah ke rumah inti yang rusak. Ketika penduduk kampung berdemonstrasi dan menolak untuk pindah ke luar dari rumah-rumah mereka di Kampung Sawah, rumah-rumah mereka dibulldozer dan beberapa penduduk pada akhirnya ditawari ganti rugi antara Rp 500.000,- sampai Rp 750.000,- per rumah -- separoh daripada yang diterima oleh penduduk Kebun Kacang tiga belas tahun yang lalu. Tidak jelas apakah mereka pernah menerima uang tersebut.

Namun pemerintah mengatakan, bahwa penduduk Kampung Sawah secara tidak resmi menempati tanah itu, mereka tidak mem-

punyai hak untuk mendirikan rumah-rumah di sana. Kampung Sawah dianggap sebagai sesuatu yang merusak pemandangan, bagaikan penyakit tumbuhan yang harus dibasmi. Selanjutnya dikatakan, bahwa tanah itu dimiliki oleh penduduk ataukah instansi lain, dan wilayah itu masuk ke dalam Perencanaan Tata Kota Jakarta 1985-2005 sebagai: "kawasan hijau." Selanjutnya Menteri Perumahan mengatakan, bahwa ia tidak ingin warga kota Jakarta hidup seperti penduduk kumuh, tetapi ingin agar mereka mempunyai akomodasi yang layak dan legal yang dilengkapi dengan sarana jalan, sanitasi, air dan listrik. Pembangunan besar-besaran telah terjadi di Jakarta dan tanah secara cepat menjadi langka dan mahal. Pemerintah merasa, bahwa ia perlu mengatur masyarakat, membangun jalan-jalan, infrastruktur dan perumahan. Makin banyaknya orang yang masuk ke kota Jakarta mengakibatkan jumlah penduduk bertambah menjadi 12.000.000 selama abad dua puluh, sehingga penduduk yang ada tak dapat dibiarkan bertempat tinggal di mana saja. Sekarang harus membayar untuk setiap sumber-sumber langka seperti lahan, air dan listrik. Dikatakan bahwa flat dapat menampung lebih banyak penduduk dan perumahan resmi lebih sehat, efisien dan terhormat daripada kampung. Lingkungan baru diduga dapat menciptakan cara baru kehidupan kaum miskin.

Tetapi dari sudut pandangan penduduk miskin di kampung, masalah utama baginya adalah pekerjaan dan pendapatan, bukan akomodasi Kampung Sawah adalah suatu daerah tempat mereka bisa memperoleh mata pencarian dan karena itu, dianggap sebagai tempat tinggal mereka. Kepindahan mereka ke dalam berbagai akomodasi yang terorganisir mengakibatkan membengkaknya biaya dan banyak di antara mereka yang tak dapat membayar. Akomodasi yang disediakan pemerintah, sangat mahal dan mewah dan terlalu jauh dari tempat mencari nafkah. Sejak penggusuran Kampung Sawah, sebagian besar penduduk belum mampu bertahan di rumah inti di pinggiran kota dan telah pindah kembali ke kampung di Jakarta. Karena penggusuran di Jakarta makin meningkat, kampung-kampung yang mampu bertahan, menjadi lebih padat, tidak sedap dipandang mata dan tidak higienis. Penduduk miskin merasa ditekan, -- komunitas-komunitasnya rusak dan mereka tidak tahu harus pergi ke mana untuk mencari penghidupan.

Salah satu jalan keluar untuk memecahkan masalah lapangan kerja dan tempat tinggal untuk rakyat kecil adalah menyediakan tanah negara yang strategis, tempat rakyat bisa mendirikan rumah sendiri menurut kemampuan dan kapasitas mereka. Di Jakarta, Bandung dan Semarang sudah dibentuk koperasi yang terdiri dari orang-orang miskin yang mengambil uang di Bank Tabungan Negara untuk membeli tanah. Tujuan koperasi adalah supaya rakyat menolong diri sendiri. Kalau tempat tinggal mereka dekat pusat kota atau tempat tinggal oran mampu, orang kecil bisa mencari nafkah dari orang kaya dan orang kaya bisa mempergunakan tenaga orang miskin. Tidak hanya persoalan pekerjaan dan perumahan tetapi persoalan tidak kemerataan juga bisa diatasi sedikit demi sedikit.

Apendiks

Harga Rata-rata Beras Eceran Per Tahun (Kualitas Sedang) di Jakarta Tahun 1953-1982.

Tahun	*Harga Beras/l-Rp.*
1953	1,8
1958	6
1959	5,3
1960	6
1961	10
1962	30
1963	53
1964	140
1965	305
1965 (September)	1100
1966 (Februari)	4500
1966 (April)	7000
1968	43
1969	32
1970	36
1971	36
1972	41
1973	58
1974	65
1975	82
1976	97
1977	101
1978	115
1979	150
1980	180
1981	210
1982	240

SUMBER: Tan, *Sukarno's Guided Democracy*, hal. 150, Mears, *The New Rice Economy of Indonesia*, hal. 496 dan Kerja Lapangan di Kebun Kacang 1972-82.

Catatan dari tahun 1978 harga-harga di kampung yang telah digunakan adalah 5%-10% di atas angka-angka yang diberikan oleh Mears.

Bursa Valuta Asing (US$ 1,00) di Jakarta, tahun 1968-83:

1968		Rp 414,—
1969		Rp 378,—
1970		Rp 382,—
1971		Rp 420,—
1978	Desember	Rp 632,—
1981	Desember	Rp 655,—
1982	Desember	Rp 697,—
1983	Januari	Rp 701,—
1983	Maret	Rp 980,—
1983	Desember	Rp 998,—

SUMBER: *Indikator Ekonomi*, 1973: hal. 103, 1980: hal. 114, 1983: hal. 38.

Bibliografi

Sejumlah Surat kabar dan Terbitan Berkala

Berita Buana, Harian, Jakarta
Berita dan Daerah, Harian, Jakarta
The Evening Star and News
Insight, Hongkong
Kompas, Harian, Jakarta
Merdeka, Harian, Jakarta
National Times, Mingguan, Sidney
Pelita, Harian Jakarta
Pos Kota, Harian, Jakarta
Sinar Harapan, Harian, Jakarta
Suara Karya, Harian, Jakarta
Sinar Pagi, Harian Jakarta
Tempo, Mingguan, Jakarta
Terbit, Harian, Jakarta

Terbitan-terbitan Resmi

BPS, Monthly, *Indikator Ekonomi*, Jakarta.
BPS, *Pekerja Sektor Informal di Indonesia*, Jakarta, 1986.
DKI, *Some Data About Djakarta*, Jakarta 1972.
DKI, *Karya Jaya*, Jakarta, 1977.
DKI, *Gita Jaya*, Jakarta, 1977.
DKI, Mimeo, *Penghapusan Becak di Djakarta*, Jakarta, 1977.
DKI, Kantor Sensus dan Statistik, *Kaki Lima-Hasil Pencacahan Pedagang Kaki Lima di DKI*.
DKI, Kantor Sensus dan Statistik, Kanwil. Ditjen Bina Guna, *Hasil Survey Tenaga Kerja di Kecamatan Miskin DKI*, Jakarta, 1978/1979.
DKI, Lembaga Penelitian Kemasyarakatan dan Lingkungan, Bekerjasama Dengan Team Studi Perumahan Direktorat IV, *Masalah Perumahan di DKI*, Jakarta, 1979.
DKI, Direktorat IV, *Kebijaksanaan Pembangunan Perumahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*, Jakarta, 1979.

DKI, BPS dan Kantor Statistik Provinsi, *Penduduk Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta 1980.
DKI, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Buku Data*, Jakarta, 1980.
DKI, Kanwil Dit-jen Bina Guna, Kantor Sensus dan Statistik, *Hasil Survey Tenaga Kerja Sub-Sektor Industri Kecil DKI Jakarta 1979-1980*, Jakarta, 1980.
DKI, Data dikumpulkan oleh Kelurahan Kebun Kacang, (Tidak diterbitkan), Jakarta, 1981.
DKI, Kantor Statistik Provinsi, *Hasil Survai Sosial Ekonomi DKI*, Jakarta, 1981.
DKI, Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung & Direktorat IV DKI, *Studi Pengembangan Lingkungan Perumahan Flat di DKI*, Jakarta, 1981.
DKI, Ministry of Information, *Short Guide Djakarta-Bogor- Bandung, Republic of Indonesia*, Jakarta 1981.
PCD (Planned Community Development Ltd.), *Kampung Improvement Programme, Jakarta, Indonesia, IBRD and IDA*, Washington D.C., 1973.
Watts, K. et al. *Rentjana Pendahuluan/Outline Plan Djakarta Raya*, Jakarta, 1957.
World Bank Consultans Report (PADCO), *Perumnas Policy Review and Background Materials for Pelita III Planning*, Mimeo, Vol. 2, Washington D.C., 1977.
World Bank, *The Urban Poor in Jakarta-Strategies for Integrating World Bank Projects*, Mimeo, Washington D.C., 1977.
World Bank, *Indonesia: Appraisal of Small Enterprise Development Project*, Mimeo, Washington D.C., 1978.
World Bank, Projects Development East Asia and Pacific Office, *Fourth Urban Development Project, Indonesia*, Washington D.C., 1984.

Sumber-sumber Sekunder

Abeyasekere, S. "Overview of the History of Jakarta 1930s to 1970s" dalam Abeyasekere, S. (ed.). *From Batavia to Jakarta: Indonesia's Capital 1930-1980*, Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University (1985), hal. 1- 24.
(ed.) *From Batavia to Jakarta: Indonesia's Capital 1930-1980*, Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1985.
------ *Jakarta: A History*, Singapore: Oxford University Press, 1987.
Abrams, C. *Housing in the Modern World*, London: Faber Press, 1966.
Abu-Lughod, J. and Hay, R. (eds.) *Third World Urbanization*, Chicago: Maaroufa Press, 1977.
Amin, S. *Unequal Development: An Essay on the Social Formation of Peripheral Capitalism*, Sussex: Harvester Press, 1976.
Anderson, B. dan McVey, R. *A Preliminary Analisys of the October 1, 1965, Coup in Indonesia*, Modern Indonesia Project Cornell University, Ithaca, 1971.
Armstrong, W.R. dan McGee T.G. "Revolutionary Change and the Third World City: A Theory of Urban Involution," *Civilizations*, Vol. 18, No. 13: 1968, hal. 353-78.
Arndt, H.W. "Economic Disorder and the Task Ahead" dalam Tan, T.K. (ed.) *Sukarno's Guided Democracy*, Brisbane: Jacaranda Press, 1976, hal. 129-40.
------ "Survey of Recent Developments," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 5, No. 2: 1968, hal. 1- 16.

——— "Suvey of Recent Development," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 7, No. 2, 1971, hal. 1-18.

——— "Survey of Recent Development,"*Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 10, No. 2: 1974, hal. 1-34.

Atma Jaya *Hawkers in Jakarta*, Vol. 1, Jakarta: Pusat Penelitian Atma Jaya, 1973.

Bianpoen "The Pattern of Settlement in Densely Populated Areas of Jakarta," Seminar on Urban Community Problems, Jakarta, November 15-17, 1976.

Bienefeld, M. "The Informal Sector and Peripheral Capitalism: The Case of Tanzania," *Institute of Development Studies Bulletin*, Sussex University, Vol. 6, No. 3: 1975, hal. 53- 74.

Bloomberg, W Jr. dan Schmandt, H.J. (eds.) *Power, Poverty, and Urban Policy*, Urban Affairs Annual Reviews, Vol. 2, Beverly Hills (Calif): Sage Publications, 1968.

Boeke, J.H. *Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia*, New York: Institute of Pacific Relations, 1953.

Bogaers, E. dan de Ruijter, P. "Ir. Thomas Karsten and Indonesian Town Planning, 1915-1940" dalam Nas, P. (ed.) *The Indonesian City: Studies in Urban Development and Planning*, Dordrecht: Foris, 1986, hal. 71-88.

Boland, B.J. *The Struggle of Islam in Indonesia*, The Hague: Martinus Nyhoff, 1982.

Booth, A. dan McCawley, P. (ed.) *The Indonesian Economy During the Soeharto Era*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1981.

Booth, C. *Life and Labour of the People in London*, London: Macmillan, 1902.

Breese, G.W. (ed.) *The City in Newly Developing Countries: Readings on Urbanism and Urbanization*, New Jersey: Prentice-Hall, 1969.

Breman, J. "A Dualistic Labour System? A Critique of the 'Informal Sector' Concept," *Economic and Political Weekly*, Vol. 11, No. 48, 49 dan 50: 1976: 1870-6, 1905-8, 1939-44.

Bromley, R. dan Gerry C. (eds.) *Casual Work and Poverty in Third World Cities*, Chichester: John Wiley, 1979.

Bulsara, J.F. *Patterns of Social Life in Metropolitan Areas- With Particular Reference to Greater Bombay*, Bombay: Gujarat Research Society, 1970.

Castles, L. *Religion, Politics, and Economics Behaviour in Java: The Kudus Cigarette Industry*, Cultural Report Series No. 15, Yale University: New Haven, 1967.

Chayanov, A.V. *The Theory of Peasant Economy*, Homewood (Illinois): Dorset Press, 1966.

Cobban, J.L. "The City on Java: An Essay in Historical Geography," Ph.D Thesis, Berkeley: University of California, 1970.

------- "Uncontrolled Urban Settlement: The Kampung Question in Semarang (1905-1940)." *Bijdragen tot de Tall-Land-en Volkenkunde*, Vol. 130, No. 4: 1974, hal. 403-427.

Cohen, D.J. "The People Who Get in the Way: Poverty and Development in Jakarta," *Politics*, Vol. 9, No. 1: 1974, hal. 1-9.

------- "Politics in a Jakarta: A Local History" dalam *Proceedings Conference on Modern Indonesia History*, Madison: Wisconsin University, 1975. Lihat juga Ann Arbor: University Microfilm International, 1982.

----- "Poverty and Development in Jakarta," Ph.D Thesis, Madison: Wisconsin University, 1975.

Cole, W.E. dan Sanders, P.D. "A Modified Dualism Model for Latin America," *Journal of Developing Areas*, Vol. 6, No. 2: 1972, hal. 185-98.

Collyer, L.G. "Report on the Food Markets-Fruit and Vegetables, Meat and Rice," Jakarta: Special Projects Department City of Jakarta, 1972.

Connell, J. et.al. *Migration from Rural Areas-The Evidence from Village Studies*, Delhi: Oxford University Press, 1976.

Cribb, R. "Political Dimensions of the Currency Question 1945-1947," *Indonesia*, No. 31, April: 1981, hal. 113-36.

——— "The Nationalist World of Occupied Jakarta, 1946-1949" dalam Abeyasekere, S. (ed.) *From Batavia to Jakarta: Indonesia's Capital 1930-1980*, Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1985, hal. 91-108.

Critchfield, R. *Hello Mister! Where are You Going?* Bagian 11, New York: The Alicia Patterson Fund, 1970.

——— "The Plight of the Cities: Djakarta-The First to 'Close'" *Columbia Journal of World Business*, Juli/August: 1971, hal. 89-93.

——— "Desperation Grows in a Jakarta Slum," *The Cristian Science Monitor*, 12 September 1973.

——— "Jakarta: Asia's First Closed City," *The Evening Star and News*, 10 April 1973.

Crouch, H., *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1978.

Dapice, D.O. "Trends in Income Distribution and Levels of Liiving 1970-75" dalam Papanek, G.F. (ed.) *The Indonesian Economy*, New York: Praeger, 1980, hal. 67-81.

de Jesus, C.M. *Child of the Dark-The Diary of Carolina Maria de Jesus*, London: Souvenir Press, 1962.

de Kadt, E. dan Williams, G. (eds.) *Sociology and Development*, London: Tavistock Publications, 1974.

Dennis, N. "The Popularity of the Neighbourhood Community Idea" dalam Pahl R.E. (ed.) *Readings in Urban Sociology*, Oxford: Pergamon Press, 1968, hal. 74-92.

Dewey, A. *Peasant Marketing in Java*, New York: Free Press of Glencoe, 1962.

Dick, H.W. "The Rise and Fall of Dualisme: The Indonesian Inter-Island Shipping Industry" dalam Fox, J.J. et.al. (eds.) *Indonesia: Australian Perspectives*, Canberra: Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1980, hal. 349-72.

——— "Urban Public Transport: Jakarta, Surabaya and Malang Part I and II," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 17, No. 1 dan 2: 1981, hal. 66-82, 72-88.

——— "Survey of Recent Economic Developments," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 18, No. 1, 1982, hal. 1-38.

——— "The Rise of a Middle Class and the Changing Concept of Equity in Indonesia: An Interpretation," *Indonesia*, No. 39, April, 1985, hal. 71-92.

——— and Rimmer, P.J. "Beyond the Formal/Informal Sector Dichotomy: Towards An Integrated Alternative," *Pacific Viewpoint*, Vol. 21, No. 1: 1980, hal. 26-41.

Dorleans, B. "Etude Geographique De Trois 'Kampung' A Jakarta," Department of Geography Publication No. 3, Paris: University of Sorbornne, 1976.

Dorodjatun Kuntjoro Jakti " Ekonomi Abang Becak," *Tempo*, 29 Januari: 1972, hal. 50.

——— "Alternatif Baru Pertumbuhan Kota di Dunia Ketiga: Sebuah Pemikiran," *Widyapura*, Vols 1, 7 dan 8: 1977, hal. 33-40.

Drakakis-Smith, D.W. *High Society Housing Provision in Metropolitan Hong Kong 1954 to 1979: A Jubilee Critique*, Hong Kong: Centre of Asian Studies, University London: Longman, 1975.

Dwyer, D.J. *People and Housing in Third World Cities: Perspectives on the Problem of Spontaneous Settlements, London: Longman, 1975.*

Eames, E. dan Goode, J.G. *Urban Poverty in a Cross-Cultural Context*, New York: Free Press, 1973.

----- *Anthropology of the City-An Introduction to Urban Anthropology, New Jersey: Prentice-Hall, 1977.*

Epstein, A.L. *Politics in a Urban African Community*, Manchester: Manchester University Press, 1958.

Erve, H. van der "Composition and Recruitment of Construction Labour in Semarang, Indonesia," Urban Research Working Paper No. 9, Amsterdam: Free University, 1986.

Evers, H. "Urban subsistence Production in Jakarta," Paper yang dibacakan pada Seminar Penelitian Lapangan dalam Pembangunan Asia Tenggara, Singapore: ISEAS, 15-19 November 1979.

Feith, H. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1962.

------"The Dynamics of Guided Democracy" dalam McVey, R. (ed.) *Indonesia*, Southeast Asia Studies, Yale University, New Haven: HRAF Press, 1963, hal. 309-409.

----- "President Soekarno the Army and the Communists: The Triangle Changes Shape," *Asian Survey*, Vol. 4, No. 8: 1964, hal. 969-80.

Forbes, D. "Urban-Rural Interdependence: The Trishaw Riders of Ujung Pandang" dalam Rimmer, P.J. et.al. (eds.) *Food, Shelter and Transport in Southeast Asia and the Pacific*, Canberra: Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1978, hal. 219-36.

-----"Development and the 'Informal' Sector: A Study of Pedlar and Trishaw Riders in Ujung Pandang, Indonesia," Ph.D. Thesis, Melbourne: Monash University, 1979.

----- "Production Reproduction and Underdevelopment: Petty Commodity Producers in Ujungpandang," Paper yang disampaikan pada Jubilee Anzaas Conference, Umilaide: 12-16 Mei 1980.

----- "Petty Commodity Production and Underdevelopment: The Case of Pedlars and Trishaw Riders in Ujungpandang Indonesia" dalam Diamond, D. dan McLoughlin, J.B. (eds.) *Progress in Planning*, Vol. 16, No. 2: 1981, hal. 107-78.

Fox, J.J. et al. (eds.) *Indonesia Australian Perspectives*, Canberra: Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1980.

Frank, A.G. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil*, New York: Monthly Review Press, 1967.

Franklin, S.H. "System of Production: Systems of Appropriation," *Pacific Viewpoint*, Vol. 6, No. 2: 1965, hal. 145-66.

Frederick, W.H. "Indonesian Urban Society in Transition: Surabaya, 1926-1946" Bagian I dan II, Ph.D. Thesis, University of Hawaii, 1967.

Gans, H. *The Urban Villagers: Group and Class in the Life of Italian-Americans,"* New York: Free Press, 1965.

Geertz, C."The Rotating Credit Association: A 'Middle Rung" dalam Development," *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 10, No. 3: 1962, hal. 241-64.

——— *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns*, Chicago: University of Chicago Press, 1963.

——— *The Social History of an Indonesian Town*, Cambrigge (Mass) M.I.T. Press, 1965.

——— *The Religion of Java*, Chicago: University of Chicago Press, 1976.

Geertz, H. *The Javanesse Family: A Study of Kinship and Socialization*, New York: Free Press, 1961.

Gerry, C. "Petty Production and Capitalist Production in Dakar: The Crisis of the self-employed," *World Development*, Vol. 6, 9 dan 10: 1978: 1147-60.

Gilbert, A "The Housing of the Urban Poor" dalam Gilbert, A dan Gugler, J (eds.) *Cities, Poverty and Development: Urbanization in the Third World*, Oxford : Oxford University Press, 1982, hal. 81-115.

------ dan Gugler, J *Cities, Poverty and Development: Urbanization in the third World*, Oxford University Press, 1982

Glassburner, B *The Economy of Indonesia: Selected Readings*, Ithaca: Cornell Universtiy Press, 1971

Green, D.R. "Street Trading in London: Case Study of Casual Labour 1830-1860" dalam Johnson, J. H. et al. (eds). *The Structure of Nineteenth Century Cities*, London: Croom Helm, 1982, hal. 129-51.

Grenville, S. "Monetary Policy and the Formal Financial Sector" dalam Booth, A dan McCawley, P (eds) *The Indonesian Economy During the Soeharto Era*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1981, hal. 102-22.

Guinness, P. *Harmony and Hierarchy in a Javanese Kampung*, Singapore: Oxford Universty Press, 1986.

Gugler, J.(ed) *The Urbanization of the Third World*, New York: Oxford University Press, 1988.

Gutkind, P.C.W. "The Energy of Despair: Social Organization of the Unemployed in Two African Cities: Lagos and Nairobi" *Civilizations*, Vol.17, No. 2: 1967, hal. 186-221.

------ "The Socio-political and Economic Foundations of Social Problems in African Urban Areas: An Exploratory Conceptual Overview," *Civilizations*, Vol.22, No. 1: 1972, hal. 18- 34.

Hart, J.K. "Informal Income Opportunities and Urban Emlpoyment in Ghana," *The Journal of Modern African Studies*, Vol. 11, No. 1: 1973, hal. 61-89.

Heeren, J.(ed) "The Urbanization of Djakarta," *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Jakarta, Vol. 8, No.11: 1955, hal. 696- 736.

Herrle, P. "The Informal Sector: Survival Economy in Third World Metropolitan Cities," *Economics*, Vol. 26, 1982, hal. 109-26.

Hidayat, "The Urban Informal Sector Survey of Java: Some Preliminary Findings," Colloquium pada Hubungan Pedesaan Perkotaan dan Perencanaan Pembangunan di Asia, Nagoya: UNCRD, Mimeo, 1977 .

------ "Sektor Informal dalam Struktur Ekonomi Indonesia," *Profil Indonesia*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1979, hal. 35-51.

——— "Menuju Kebijaksanaan Tepat Guna Dalam Menunjang Peranan Sektor Informal," disajikan pada Seminar Mengenai Pertumbuhan Populasi, Urbanisasi dan Kebijakan Perkotaan Nasional yang dipersiapkan oleh Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Mimeo, Jakarta 15-18 Oktober 1986.

——— et al. (eds) *Penelitian Sosial Ekonomi Golongan Usaha Kecil di Sektor Informal Kotamdya Bandung, Bappeda Tingkat I* Bandung: Persatuan Wartawan dan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, 1978.

Hill, H. dan Mubyarto "Economic Change In Yogyakarta" *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 14, No. 1: 1978, hal. 22-44.

Hill, H. "Dualism, Technology and Small-Scale Enterprise in the Indonesian Weaving Industry" dalam Fox, J.J. et al. (eds). *Indonesia: Australia Perspectives* Canberra: Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1980, hal. 333-48.

Hollnsteiner, M.R. "The Case of The People Versus Mr Urbano Planner and Administrator" dalam Abu-Lughod, J dan Hay, R. (eds) *Third World Ubanization*, Chicago: Maaroufa Press, 1977, hal. 307-20.

Hugo, G.J. "Population Mobility in West Java, Indonesia," Ph.D. Thesis, Canberra: Australian National University, 1975.

——— et al. *The Demographic Dimension in Indonesian Development*, Singapore: Oxford University Press, 1987.

Hughes, J. *The End of Sukarno-A Coup that Misfired: A Purge That Ran Wild*, London: Angus & Robertson, 1967.

Hull, T. H. dan Mantra, I.B "Indonesia's Changing Population" dalam Booth, A dan McCawley, P.(eds) *The Indonesian Economy During the Soeharto Era*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1981, hal. 262-88.

Huntington, S.P. dan Nelson, J.M. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, Cambridge (Mass): Harvard University Press, 1976.

Ibrahim, M.A. "The Growth of Indonesian Industry: a Sectoral View," *Prisma*, No.6, Juni 1977, hal. 28-36.

——— *Employment, Incomes and Equality: A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya*, Geneva: ILO, 1972.

Jay, R.R.: *Javanese Villagers: Social Relations in Rural Modjokerto*, Cambridge, Mass: M.I.T. Press, 1969.

Jellinek, L., "The Life of a Jakarta Street Trader" dalam Abu- Lughod, J. dan Hay, R.(eds) *Third World Ubanization*, Chicago: Maaroufa Press, 1977, hal. 244-56.

——— "The Life of a Jakarta Street Trader-Two years Later" Working Paper No. 13, Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1977.

——— "Circular Migration and the Pondok Develling System: A Case Study of Ice-Cream Traders in Jakarta," dalam Rimmer, P. J. et al.(eds) *Food, Shelter and Transport in Southeast Asia and the Pacific*, Canberra: Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1978, hal. 135-54.

——— "The Pondok System and Circular Migration" dalam Jellinek, L. et al. *The Life of the Poor in Indonesian Cities* Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1978, hal. 1-16.

—— "Underview: Memories of Kebun Kacang, 1930s to 1980s" dalam Abeyasekere, S. (ed) *From Batavia to Jakarta, Indonesia's Capital 1930-1980*, Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1985, hal. 25-90.

—— "Three Petty Enterpreneurs-The Wheel of Fortune" dalam Pinches, M. dan Lakha, S. (eds) *Wage Labour and Social Change*, Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1987.

—— "The Changing Fortunes of a Jakarta Street Trader" dalam Gugler, J.(ed.) *The Urbanization of the Third World*, New York: Oxford University Press, 1988

—— Manning, C dan Jones, G. *The Life of the Poor in Indonesian Cities*, Melbourne: Centre of Southeast Asia Studies, Monash University, 1978.

Johnson, J.H. et al. (eds) *The Structure of Nineteenth Century Cities*, London Croom Helm, 1982.

Johnson, R. et al *Business Environment in a Emerging Nation*, Evanston: Northeastern University Press, 1966

Juppenlatz, M. *Cities in Transformation*, St Lucia: Queensland University Press, 1970.

Kahn, J. "Imperalism and the Reproduction of Capitalism: Towards a Definition of the Indonesian Sosial Formation," *Critique of Antropology*, No. 2, 1974 hal. 1-35.

—— "Economy Scale and the Cycle of Petty Commodity Production in West Sumatera" dalam Bloch, M. (ed.) *Marxist Analysis and Social Anthropology*, London: Malaby Press, 1975, hal. 137-58.

Karamoy, A. "Analisa Kebutuhan Pengusaha Kecil dan Ekonomi Lemah di DKI Jaya," *Widyapura*, Vols. 1, 7 dan 8: 1977, hal. 1- 11.

—— dan Sablie, A. "The Communication Aspect and Its Impact on the youth of Poor Kampungs in the City of Jakarta *Prisma*, No. 1, Mei: 1975, hal. 60-9.

—— *Kota Pradja Djakarta Raya, Republik Indonesia*, Jakarta: Kementrian Penerangan, 1952.

Koentjaraningrat "The System and Spirit of Gotong Royong," *Prisma*, No. 6, Juni: 1977, hal. 20-25.

Krausse, G. "The Kampungs of Jakarta, Indonesia: A study of Spatial Patterns in Urban Poverty," Ph.D. Thesis, Pittsburgh: University of Pittsburgh, 1975.

Kroef, J.M. Van der *Indonesia in the Modern World*, Bandung: Masa Baru, 1954, hal. 133-88.

—— *Laporan Hasil Survey Profile Pedagang Kaki Lima di DKI Jaya*, Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia 1976.

Lebrun, O., dan Gerry. C. "Petty Producers and Capitalism," *Review of African Political Economy*, No. 3, Mei-Oktober: 1975, hal. 20-32.

Legge, J.D. *Indonesia* (3rd ed.) Sydney: Prentice-Hall, 1980.

Leiserson, M. et al. *Employment and Income Distribution in Indonesia*, Washington D.C. World Bank, 1978.

Lewis, O. "Urbanization Without Breakdown: A Case Study," *Scientific Monthly*, Vol. 75, No. 1, 1952, hal. 31-41.

—— *The Children of Sanchez: Autobiography of a Mexican Family*, Harmondsworth, Penguin Books, 1961.

—— "The Cultural of Poverty," *Scientific American*, Vol. 215, No. 4, 1966, hal. 19-25.

—— *La Vida: A Puerto Rican Family in the Cultural of Poverty-San Juan and New York*, New York: Random House, 1966.

------ *A Death in the Sanchez Family*, New York: Random House, 1969.
------ *Five Families-Mexican Case Studies in the Cultural of Poverty*, London: Souveni Press, 1976.
Lewis, W.A. "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour," *Manches ter School of Economic and Social Studies*, Vol. 22, No. 2: 1954, hal. 139-91.
------ "Unemployment in Developing Countries," *The World Roday*, Vol. 23, No. 1 1967, hal. 13-22.
Liebow, E. *Tally's Corner: A Study of Negro Streetcorner Men*, Boston: Little Brown, 1967.
Llyod, P. *Slums of Hope? Shanty town of the Third World*, Harmond Sworth: Penguin, 1979.
Lagsdon, M. "Leaders and Followers in Urban Neighbourhoods: An Exploratory Study of Djakarta, Indonesia," Ph.D. Thesis, Boston: Yale University, 1975.
Lomnitz, L. *Networks and Marginality: Life in a Mexican Shanty Town*, New York: Academic Press, 1977.
------ "Laporan Sementara Hasil Penelitian Golongan Berpenghasilan Rendah DCI, Jakarta," Mimeo Jakarta: LP3ES, 1972.
Lubis, M. "Jakarta Kota Penuh Kontras," *Prisma* No. 5, Mei: 1977: 32-44.
MacEwen, A. M. "Differentiation Among the Urban Poor: An Argentine Study" dalam de Kadt, E dan Williams, G. (eds) *Sociology and Development*, London: Tavistock Publications, 1974, hal. 197-226.
Mackie, J. *Problems of the Indonesian Inflation* Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, 1967.
Mahasin, A. "Human Rights: from Cultural Argumentation to Social Stratification," *Prisma* No. 13, Juni 1979, hal. 86-105.
Mangin, W. "Latin American Squaltter Settlements: A Problem and a Solution," *Latin American Research Review*, Vol. 2, No. 3: 1967, hal. 21-9.
------ "Squatter Settlements" Scientific America, Vol. 217, Oktober: 1967, hal. 21-9.
------ "Proverty and Politics in Cities of Latin America" dalam Bloomberg, W. Jr. dan Schmandt, H.J. (eds) *Power Poverty, and Urban Policy*, Urban Affair Annual Reviews Vo. 2, Beverly Hills (Calif): Sage Publications, 1968, hal. 397-432.
------ (ed) *Peasants in Cities: Readings in the Antropology of Urbanization* Boston: Houghton Mifflin, 1970.

Manning, C. "Pockets of Privilege Amidst Mass Poverty: Wages and Working Conditions in Indonesian Industry" dalam Jellinek, L. et al. *The Life of the Poor in Indonesian Cities* Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1978, hal. 17-31.
------ et al *Struktur Pekerjaan Sektor Informal dan Kemiskinan di Kota: Sebuah Studi Kasus di Diraprajan Yogyakarta*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependidikan Universitas Gadjah Mada, 1984.
Marzali, A "Impak Pembangunan Pabrik terhadap Sikap dan Mata Pencarian Masyarakat: Kasus Krakatau Steel," *Prisma* No. 3, April: 1976: 30-45.
Mayer, P. *Townsmen or Tribesmen*, Cape Town: Oxford University Press, 1961.
Mayhew, H. *London Labour and the London Poor* (4 volumes), London: Griffin, Bohn, Company, 1981.

Mazumdar, D. "The Urban Informal Sector," *World Development*, Vol. 4 No. 8: 1976, hal. 655-79.

McGee, T. G. *The Southeast Asian City: A Social Geography of the Primate Cities of Southeast Asia*, London: Bell and Sons, 1969.

——— *Hawkers in Hong Kong: A Study of Planning and Policy in A Third World City*, Hong Kong: Centre of Asian Studies, University of Hong Kong, 1973.

——— "Beach-heads and Enclaves: The Urban Debate and The Urbanization Process in Southeast Asia Since 1945," dalam Yeung, Y.M. dan Lo,C.P.(eds) *Changing South-East Asian Cities: Readings on Urbanization*, Singapore: Oxford Univercity Press, 1976, hal. 60-75.

——— "The Persistence of the Proto-Proletariat: Occupational Strutures and Planning for the Future of Third World Cities," dalam Abu-Lughod, J dan Hay, R.(eds). *Third World Urbanization*, Chicago: Maaroufa Press, 1977, hal. 257-70.

——— "From Urban Involution to Proletarian Transformation Asia Perspectives," paper yang disajikan pada Konperensi Tahunan Dewan Kanada untuk Penelitian Asia Tenggara Kedua belas, yang diadakan di Lakehead University, Thunder Bay, Ontario, 5-7 November 1982.

——— dan Yeung, Y.M. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*, Ottawa: International Development Research Centre, 1977.

McNicoll, G. dan Mamas, S.G.M. *The Demographic Situation in Indonesia*, Hawaii: East West Population Institute papers No. 28, 1973.

McVey, R. (ed) *Indonesia*, Southeast Asia Studies, Yale University, New Haven: HRAF Press 1963.

Meadow, P dan Mizruchi, E.H.(eds) *Urbanism, Urbanization and Change: Comparative Perspectives*, Reading (Mass): Addison- Wesley, 1969.

Mears, L.A. "Economic Development in Indonesia through 1958," *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 14, No.1 dan 2: 1961: 15-58.

——— *The New Rice Economy of Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.

Milone, P.D. *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts, Research Series*, No. 10, Berkeley: Institute of International Studies University of California, 1966.

Mintz, S.W. "The Role of the Middleman in the Internal Distribution System of a Caribbean Peasant Economy," *Human Organization*, Vol. 15, No. 2: 1956, hal. 18-23.

——— "Internal Market Systems as Mechanisms of Social Articulation" dalam Laporan Kerja Pertemuan Tahunan pada Musim Semi dari Masyarakat Etnologis Amerika, Seattle: Washington University Press, 1959, hal. 20-30.

——— "Men, Women and Trade," *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 13: 1971: hal. 247-69.

Moir, H dan Wirosardjono, S *The Jakarta Informal Sector*, Jakarta: ILO/Leknas/LIPI, Mimeo, 1977.

Moir, C "The Dual Economy and Marginality Debate and the Contribution of Micro Analysis: Market Sellers in Bogota," *Development and Change*, Vol. 8, No. 4: 1977, hal. 465-89.

Nas, P. (ed) *The Indonesian City: Studies in Urban Development and Plainning*, Dordrecht: Foris, 1986.

Nelson, J. "The Urban Poor: Disruption or Political Integration in Third World Cities? " *World Politice*, Vol. 22, No. 3: 1970, hal. 393-414.

Noormohamed, S. "Alternative Approaches to Low-Income Housing: A Case Study of Jakarta," Ph.D.Thesis, Canberra: Australian National University, 1981.

Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh *The Coup Attempt of the "30th September Movement" in Indonesia*, Djakarta: Pembimbing Masa, 1968.

Oshima, H. "Perspectives on Trends in Asian Household Income Distibution: An Overview with Special Reference to Indonesia," *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 30, No. 1: 1982, hal. 91-120.

Pahl, R.E. (ed) *Readings in Urban Socialogy*, Oxford: Pergamon Press, 1968.

Palma, G. "Dependency: A Formal Theory of Underdevelopment or a Methodology for the Analysis of Concrete Situations of Underdevelopment? "*World Development*, No. 6, 7 dan 8: 1978, hal. 881-924.

Palmer, I: *The Indonesian Economy Since 1965: A Case Study of Political Economy*, London: Frank Cass, 1978.

Papanek, G.F. "The Poor of Jakarta," *Economy Development and Cultural Change*, Vol. 24, No. 1: 1975, hal. 1-27.

------, (ed) *The Indonesian Economy*, New York: Praeger, 1980.

——, "Income Distribution and the Polities of Poverty "dalam Papanek, G.F. (ed) *The Indonesian Economy*, New York: Praeger, 1980, hal. 56-66.

------, "The Effect of Economic Growth and Inflation on Workers! Income" dalam Papanek, G.F. (ed) *The Indonesian Economy*. New York: Praeger 1980, hal. 82-120.

——, dan Dowest, D. "The Cost of Living 1938-1973," *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 13, No. 2: 1975, hal. 150-181.

Peattie, L.R. *The View from the Barrio*, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1968.

Perlman, J.E. *Myths of Marginality: The Urban Squalter in Brazil*, Berkeley: University of California Press, 1976.

Pinches, M.D., "Anak Powis Children of Sweat: Class and Community in a Manila Shanty Town," Ph.D. Thesis, Melbourne: Monash University, 1984.

——, dan Lakha, S. (ed) *Wage Labour And Social Change*, Mebourne: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1987.

Polle, V.F.L. dan Hofstee, P. "Urban Kampung Improvement and the Use of Aerial Photography for Data Collection" dalam Nas, P.(ed) *The Indonesian City: Studies in Urban Development and Planning*, Dordrecht: Foris, 1986, hal. 116-36.

Portes, A dan Walton, J. *Urban Latin America: The Political Condition from A bove and Below*, Austin: University of Texas Press, 1976.

------, *Labour, Class and The International System*, New York A Sumimic Press, 1981.

Praginanto, "Pak Parto Pengusaha Warung Tegal," *Galang* Vol. 1, No. 1: 1983, hal. 44-7.

Prawirasuganda, A "Adat Perkawinan di Tanah Pasundan," *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-en Volkenkunde* Vol. 84: 1950, hal. 209-79.

Quennell, P.(ed) *Mayhew's London*, London: Bracken Books 1984.

Ramedhan, E "The Disco Way of Life in Jakarta: from Subculture to Cultural Void," *Prisma*, No. 6, Juni 1977, hal. 16-20.

Reader, D.R. *The Black Man's Portion History Demography and Living Conditions in the Native Locations of East London Cape Province*, Cape Town: Oxford University Press, 1970.

Reissman, L. *The Urban Process: Cities in Industrial Societies*, Glencoe: Free Press, 1970.

Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia*, London: Macmillan, 1981.

Rimmer, P.J. et al: (eds) *Food, Shelter and Transport in Southeast Asia and the Pacific*, Canberra: Research School of Pacific Studies, Australian National University 1978.

Roberts, B.R. "Politics in a Neighbourhood of Guatemala City," *Sociology*, Vol. 2, No. 2: 1968, hal. 184-204.

——, "Protestant Groups and Coping with Urban Life in Guatemala City," *American Journal of Sociology*, Vol. 73, No.6: 1968, hal. 753-67.

——, *Organizing Strangers: Poor Families in Guatemala City*, Austin: University of Texas Press, 1973.

——— *Cities of Peasants: The Political Economy of Urbanization in the Third World*, London: Sage, 1978.

Roeder, O.G. *The Smiling General: President Soeharto of Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1969.

Rowntree, B.S. *Poverty: A Study of Town Life*, London Macmillan, 1910.

Sadli, Moh "Indonesia's Experience with the Application of Technology and its Employment Effects," *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 21, No. 3: 1973, hal. 147-60.

Sajogyo, "Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan" Menado: Laporan Seminar Nasional HIPIIS periode 1975-1977, Mimeo, 1977.

Sannen, Ad. M.H., "Mandur dan Tukang: The Functioning of Informal. Subcontractors and Building Workers in the Construction Sector of Bandung," dalam Nas, P (ed) *The Indonesian City: Studies in Urban Development and Planning*, Dordrecht: Foris, 1986, hal. 220-37.

Santos, M. "Economic Development and Urbanization in Underdeveloped Countries: The Two Systems of the Urban Economy and their Spatial Implications," Toronto: University of Toronto, Mimeo, 1972.

——, "Spatial Organization in the Third World: Two Urban Fields" Toronto: Department of Geography: University of Toronto, Mimeo, 1973.

Sapiie; S. "Study Rumah Murah di Jakarta," Jakarta Department of Public Works and Electric Power, 1972.

Sartono, Kartodirdjo *The Pedicab in Yogyakarta-A Study in Low Cost Transportation and Poverby Problems*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.

Sethuraman, S.V. *Urbanization and Employment in Jakarta*, Geneva: World Employment Programme, ILO, 1974.

Silaban, B dan Djazuli, A. *Kelompok Migran Sirkuler di DKI Jakarta*, Jakarta: Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan, DKI, 1978.

Smail, J.R.W. *A Study in the Social History of the Indonesian Revolution*, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Monograph Series, 1964.

Soedarno "Mobilitas Tenaga Kerja Antara Desa dan Kota Studi Kasus: Pengemudi Becak di Jakarta Timur," Jakarta: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 1976.

Soekotjo, R. "Beberapa Masalah Angkutan Kota-Suatu Kasus Transportasi di Kota Padat Penduduk," *Prisma*, No. 2, April 1974: 53-62.

Soemarno, S "Jakarta Bukan Hanya bagi Yang Berduit," *Prisma*, No. 5, Mei 1977, hal. 53-5.

Southall, A (ed) *Urban Anthropology: Cross Cultural Studies of Urbanization*, London: Oxford University Press, 1973.

Sritua Arief, *Indonesia: Growth, Income Disparity and Mass Poverty*, Jakarta: Sritua Arief Associates, 1977.

Stedman-Jones, G. *Outcast London: A Study in the Relation- ship Between Classes in Victorian Society*, Harmondsworth Penguin, 1971.

Steele, R.M. "Origins and Occupational Mobility of Lifetime Migrants to Surabaya, East Java," Ph. D. Thesis, Canberra: Australian National University, 1980

Steer, A "Indonesian Urban Services Sector Report," Washington, D.C: World Bank, Mimeo, 1983.

Suharso dan Speare, A "Migration Trends," dalam Booth, A dan Mc.Cowley, P. (eds) *The Indonesian Economy During the Soeharto Era*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1981, 289-315.

Sullivan, J, "Back Alley Neighbourhood: Kampung as Urban Community in Yogyakarta," Kertas Kerja No. 18, Melbourne: Center of Southeast Asian Studies, Monash University, 1980.

——, "Rukun Kampung and Kampung: State-Community Relations in Urban Yogyakarta," Ph. D. Thesis, Melbourne: Monash University, 1982.

Sullivan, N. "Masters and Managers in Sitiwaru: Men and Women in Yogyakarta Urban Kampung," Ph.D. Thesis, Melbourne: Monash University, 1983.

Sumardi, M. dan Evers, H. (eds.) *Golongan Miskin di Jakarta*, Jakarta: Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia, 1980.

Sundrum, R. "Consumer Expediture Patterns: An Analysis of the Socio-Economic Surveys," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 9, No. 1: 1973, hal. 86-106.

——, "Manufacturing Employment 1961-1971," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 9, No. 1: 1975, hal. 58- 65.

——, "Change in Consumption Patterns in Urban Jaya 1970-1976: *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 13, No. 2: 1977, hal. 102-16.

——, "Income Distribution, 1970-1976" *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 15, No. 1: 1979, hal. 137-41.

——, dan Booth, A. "Income Distribution in Indonesia: Trends and Determinants," dalam Fox, J.J. et al. (eds) *Indonesia: Australian Perspectives*, Canberra: Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1980, hal. 455-85.

——, *Rapid Economic Growth in Indonesia: 1968-1981, 1987.*

Sunindyo, Saraswati "Kampung Sawah, Studi Eksploratif Tentang Perkampungan Liar di Jakarta," B.A. Thesis. Jakarta: Universitas Indonesia, 1981

Sunuharyo, B.S "Analisa Biaya Hidup di Jakarta," dalam Sumardi, M. dan Evers, H. (eds) *Golongan Miskin di Jakarta*, Jakarta: Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia, 1980, hal. 73- 88.

Surachman, Samiun "Perantau Pengemudi Becak dan Gambaran Masa Depan Mereka: Kasus di Kota Magelang," disajikan pada Seminar Lembaga Kependidikan, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Mimeo, 1978.

Suryo, Djoko "Social and Economic Life in Rural Semarang under Colonial rule in the Later 19th Century," Ph.D Thesis, Melbourne: Monash University, 1982.

Sutter, J.O. *Indonesianisasi Politics in a Changing Economy, 1940-1955* (4 Volumes) Paper Data Program Asia Tenggara No. 36, Ithaca: Cornell University, 1959.

Swasono, Sri Edi (ed.) *Entrepeneurship in Indonesia*, Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia dan Bappenas, 1976.

Swinieswicz, S. "Tendencies to Development and Stagnation in the Indonesian Economy," *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 11, No. 1 dan 6: 1958, hal. 78-98.

Tan, T.K. (ed) *Sukarno's Guided Democracy*, Bribane: Jacaranda Press, 1967.

-----, "Sukarnian Economics" dalam Tan, T.K. (ed.) *Sukarno's Guided Democracy*, Brisbane: Jacaranda Press, 1967, hal. 29-45.

Tan Kim Swee, " A Study of Kongsi Houses Housing Immigrant Men," Singapore: University of Singapore, 1963.

Temple, G. "Migration to Jakarta: Empirical Search for a Theory", Ph.D. Thesis, Madison: Univesity of Wisconsin, 1974.

-----, "Migration to Jakarta," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 11, No. 1: 1975, hal. 76-81.

Teach, J.W. "The Hygiene Study Word Centre at Batavia: Planning and Preliminary, Results 1937-1941," Dissertatie, Leiden: Leiden University, 1948.

------, "Living Conditions of Municipally Employed Coolies in Batavia 1937," dalam Wertheim, W.F. (ed) *The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology, (Volume 4)*, The Hague: Van Hoeve, 1958, hal. 85-224.

Todaro, M.P. *Internal Migration in Developing Countries: A Review of Theary, Evidence, Methodology and Research Priorities*, Geneva: ILO, 1976.

Tokeman, V. E. "An Exploration in to the Nature of Informal- Formal Sector Relation Ships," *World Development*, Vol. 6, 9 dan 10: 1978, hal. 1067-75.

-----, "Competition between the Informal dan Formal Sectors in Retailing: The Case of Santiago," *World Development*, Vol. 6, 9 dan 10: 1978, hal. 1187-98.

Turner, J.C. "Uncontrolled Urban Settlements: Problems and Policies," dalam Breese, G. (ed) The City in Newly Developing Countries: Reading on Urbanisin and Urbanization, New Jersey: Prentice-Hall, 1969, hal. 507-34.

-----, "Barriers and Channels for Housing Development in Modernizing Countries" *dalam Mangin W. (ed) Peasants in Cities: Readings in the Anthropology of Urbanization*, Boston: Houghton, Mifflin, 1970, hal. 1-20.

------, *Housing by the People: Towards Antonomy in Building Environments*, London: Marion Boyars, 1976.

Universitas Indonesia, "Pola Management Pada Sejumlah Pedagang Kecil Eceran Mengenai Latar Belakang Kebudayaan di DKI Jakarta Raya," Jakarta: Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 1977.

-----, *Laporan Hasil Survey Profil Pedagang Kaki Lima di DKI Jaya*, Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1976.

Waworoentoe, W. *Hawkers and Vendors in Bandung*, Bandung: Institut Teknologi, 1974.

Wertheim, W. (ed.) *The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology* (Volume 4), The Hague: Van Hoeve, 1958.

-----, "Urban Characteristics in Indonesia" dalam W. Wertheim (ed.) *East West Parallels: Sociological Approaches to Modern Asia*, The Hague: Van Hoeve, 1964, hal. 65-85.

Whyte, W.F. *Street Corner Society: The Social Structure of An Italian Slum*, Chicago: University of Chicago, 1943.

Williams, J.B. "Sadikin Closes Jakarta," *Insight*, Hong Kong, Februari 16-20. 1973.

Wilson, M dan Mafeje, *A. Langa: A Study of Social Groups in An African Township*, Cape Town: Oxford University Press, 1963.

Wirth. L. "Urbanism as a Way of Life," *American Journal of Sociology*, Vol. 44, No. 1: 1938, hal. 1-24.

Yueng, Y.M. "The Marketing System in Singapore" dalam Yueng Y.M. dan Lo, C.P. (eds) *Changing South-East Asian Cities: Readings on Urbanization*, Singapore: Oxford University Press, 1976, hal. 153-64.

----- dan L, C.P. (eds) *Changing South East Asian Cities: Reading on Urbanization*, Singapore: Oxford University Press, 1976.

Indeks

A

abangan, 75, 76, 78
Abeyasekere, S., 7, 10, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 145-8, 155, 156
Abu-Lughod, J., vii
Acang, 219
Ali Sadikin, 96, 150, 155
Amat, 205
Amin, S., 4
arisan, 80
Armstrong, W.R., xxiii, xxiv, 3
Asian Games, kompleks, 148

B

Badan Pertanahan 191
Balai Agung Republik, 146
Bank Dunia, 235; pemukiman kembali, 236
Bank Dunia, xvii, 5, 153
Batavia, 229
Becak, 89; adanya kebebasan, 92; berasal dari, 90; gerakan anti, 152; pengganti delman, 90; tidak perlu keterampilan, 90; tidak perlu modal, 90; musim panen, 92; paternalisme, 93; penghasilan baik, 92; raja jalanan, 93, 143; tauke, 90; tukang, 89-99; vs kendaraan bermotor, 95; vs penghapusan 97; produksi dilarang, 95
bedeng, 215
Belanda, 25-9, 146, 147, 160, 163
Bianpoen, 43
birokrasi, 238
Boggers, E., 145
Bongkaran, 252
Booth, A., 6, 40
BTN, 215, 24
Budaya kemiskinan, 243
bulldozer, 16
Bulsara, J.F., 57
Burhanuddin, 205, 208, 219
buta huruf, pemberantasan, 149

C

Castles, L., 20
Cecep, 205
Cia, 172, 199
Cobban, J.L., 10, 22, 145, 146
Cohen, 23, 34, 35, 152
Cole, W.E., 137
Collyer, L.G., 113
Cribb, R., 29, 146
Critchfield, R., 7, 88, 89, 140, 152
Crouch, H., 38

D

Daerah kumuh, program pembersihan, 232
Dapice, 6

de Jesus, C.M., 3
de Ruijter, P., 145
Demokrasi Parlementer, 148
Demokrasi Terpimpin, 134, 148
Depok, 199, 223, 250
depopulasi, 4
Dewey, A., 81
Diamond, D., 119
Dick, H.W., 24, 90, 92, 94, 95, 97, 114, 138
Djazuli, A., 93
Dokumen, 182-183, 184, 191, 205
Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, 88, 97, 110

E

Evers, H., 7, 20

F

Flat, 173, 183, 196, 198, 211, 215, 216, 228, 246
Forbes, D., 57, 81, 88, 91, 113, 117, 118, 119
Frank, A.G., 4
Frederick, W.H., 93, 145, 146

G

Ganti rugi, 202, 204, 213, 216, 225, 242; bayar utang, 217; Sumira, 220
Geertz, C., xxii, 76, 81, 145
Gilbert, A., 4
Golden Truly, 246, 249
Golongan miskin, 176
Green, D.R., 3
Grenville, S., 40
Gugler, J., xvii, 4
Guinness, P., 8, 59, 69, 81

H

Harmondsworth, 2
Hereen, 25, 30, 100
Hernando de Soto, xxvi
Herrle, P., 89
Hidayat, 88, 97, 114, 116
Hill, H., 102
Hofstee, 145
Hollnsteiner, M.R., 3
Hong Kong, daerah kumuh, 234-236
Hotel Asoka, 114
Hotel Hilton, 247
Hotel Indonesia, 18, 32, 35, 114, 230
Hubungan ekonomi, 68; sosial, 60, 73; ikatan bertetangga, 62; ikatan kekerabatan, 62, 63, 65, 66, 74; kerja sama, 82, 85; ketidaktergantungan ekonomi, 70; ketidaktergantungan sosial, 70; persaingan, 85; prinsip dasar, 60
Hugo, 19, 20, 25, 27, 57, 88, 91, 94, 110, 113
Hukum rimba, 193
Hull, T.H., 155

I

Idi, 211, 212; tipe dinamis, 216
Idul Adha, 78, 79, 82, 85
Idul Fitri (Lebaran), 78, 79, 82, 85
Ikatan, 62-6, 75; abangan, 75, 76, 78; Al Qur'an, 75; Islam, 75, 77, 78; musholla, 75, 76; PKI, 78; agama, 75; bertetangga, 62; kekerabatan, 62, 63, 65, 66
ILO, 5, 101, 110, 126, 132, 153
Industri, kecil, 100; rakyat, 99-109
Innah, 172, 191, 199; kemiskinan, 236
Islam, 47, 75, 77, 78, 209

J

Jakarta, tenaga kerja, 236
Jaringan sosial, 48, 237
Jay, 51, 62, 81
Jellinek, L., xvii, 7, 57, 89, 104, 135
Jepang, 24-9, 90, 110, 146, 150, 160
Johan Silas, xxviii
Johnson, J.H., 3
Jones, G., 135

K

Kampung Sawah, 256
Kapitalisme, perluasan, 9
Karsinah, 214, 216, 218; seperti penduduk lain, 215; tipe miskin, 216
Karamoy, A., 102
Kebijakan perumahan, 174
Kebudayaan kemiskinan (sumber teori), xxii, xxiii; esensi, 49; Geertz, xxii; dasar hubungan, 49; involusi, xxii; Kebun Kacang, xix, xx, 15, 48; Lewis, O., xxiii; melestarikan pola, xxiii; pertukaran timbal balik, 49; sebuah kampung, 48; urbanisasi terperosok, xxii; Valentine, C.A., xxiii
Kebudayaan masyarakat, 241
Kebun Kacang, 172, 181, 193, 196, 200, 207, 212, 214, 217, 223; antara 1920-an - 1930-an, 229; budaya miskin 241; kekacauan, 12; meratakan, 173; potret Jakarta, 228-230; proyek percobaan, 175; sejarah, 242; tahun 1981, 230
Kegiatan Ekonomi, 87; ketidakmenentuan, 87; ketidak pastian penghasilan, 87; pasang surut, 87; ekonomi politik, 88
Kelas menengah, 232, 239; tetangga, 217
Keluarga besar, 50, 54; fasilitas bersama, 57; ikatan pernikahan, 54; konsekuensi dari, 54; kontrasepsi, 55; akomodasi alternatif, 54; sumber daya, 54; membagi ruang, 56
Keluarga inti, 50, 51; tidak utuh, 50, 51
Kemelaratan fisik, 197
Kemiskinan 229, 237; literatur, 236; pandangan strukturalis 240; sebab, 239; tesis budaya, 241
Kepala kampung, 151, 153-6, 159-162; kepemimpinan lokal, 159; kualitas jagoan, 160; pemilihan, 160
Kepemimpinan lokal, 159; bajingan, 171; kepala kampung, 159-162; lurah, 159; pejabat tinggi, 159;
Kerja sama (penduduk kampung), 82, 85
Kesehatan, pelayanan, 154-155, 169
Klaten, 252
Komunitas, organisasi, 219
Komisi, 205
Kota gubug, 173, 229, 242; 1960-an - 1970-an, 243
Krausse, 43, 118, 144, 163
Kredit, 127, 157; batas, 127; skala kecil, 157; Kredit Candak Kulak (KCK), 158; Kredit Investasi kecil (KIK), 157; lembaga, 167; lintah darat, 157-159; prosedur kompleks, 158; tanpa bunga, 167; wiraswasta lokal, 157
Kroef, J.M. van der, 25
KTP, 117, 151, 152, 157, 162
Kumuh, literatur, 4; aspek negatif 4; ciri-ciri positif 5

L

Lakha, S., 7
Lebaran, 167
Leiserson, M., 5
LEKNAS, 5
Lembaga Kebebasan dan Demokrasi (ILD), xxvi
Lewis, 233, kemiskinan, 239
Lewis, O., xxiii, 3, 52
Lloyd, P., 2, 11
Lomnitz, 62
London, abad 19, 231; empat tekanan 232; perbedaan dengan Jakarta, 233
London, 3, 4, 9
Longsdon, M., 146, 151, 156, 159, 161-2, 167
LP3ES, xxv, xxvi
lurah, 182, 184, 186, 193, 194

M

Mackie, J., 35, 149
Mafeje, A., 57
Malaise, 145
Malari, 153, 157
Mangin, W., 2
Manning, C., 135, 136
Mantra, I.B., 155
Manila, daerah kumuh, 234-236
Masyumi, 37

Mayer, P., 57
Mazumdar, D., 88
McGee, T.G., xxiii, xxiv, 3, 9, 88, 102, 110
McLoughlin, J.B., 119
Mears, L.A., 20
Merdeka, lapangan, 229
Milone, P.D., 146
Mintz, S.W., 114, 118
Moir, H., 5, 8, 88, 101, 102, 110, 126, 133
Moser, C., 118, 119
Mubyarto, 102

N

Neo-Marxis, 9
Noormohamed, S., 50

O

Octavia Hill, 166
orang dalam, 68,
orang luar, 68, 69, 72, 73, 75; definisi, 68;lima kelompok, 69; orang buangan, 69; orang makmur (makmur), 69, 70, 71, 72; partisipasi aktif, 69; pelacur, 69, 75
Orde Baru, xxi, 40; efisiensi administratif, 150
organisasi politik, 2
organisasi sosial, 2

P

Padco, 122
Palang Merah, 30
Palma, G., 9
Palmer, 100
Papanek, G.F., 8, 20, 40, 95
Partai, 37, 147
Pasar gelap, 33
Pedagang kecil, 109-120; diusir, 114-116; hubungannya, 111; kedai makanan, 115; kios, 117; pajak ilegal, 116; pembangunan gedung, 111, 113; pungutan liar, 116; rintangan birokratis, 117; tim pembersihan, 119
Pekerja bangunan, 120-125; *boom*, 120-121, 125; istirahat panjang, 124; mandor, 122-123; migran sirkuler, 121; sistem upah, 123
Pekerja suka rela, 163-4; Departemen Kesejahteraan Sosial, 164, 165; klinik, 165; kursus-kursus, 165; program, 165; sekolah, 164; menolong orang miskin, 164; rumah ibadah, 164
Pelacur, 69, 75, 120
Pelayanan kampung, 125; dukun, 126, 131-132; mencuci, memasak, 126-7; pedagang penganan, 128; berskala kecil, 125-6; pengobatan tradisional, 131; penjahit pakaian, 126, 131; penjual air, 126, 128; perkawinan, 131; pijat, 126, 131; sebagai akibat, 125; warung rumah tangga, 126-7
Pemerintah, 238; campur tangan, 172
Pemukiman, rakyat kecil, 211
Pembantu rumah tangga, 115, 126, 130; dibayar paling rendah, 130; pekerjaan rendahan, 129
Pembongkaran kampung, xxii
Pembuatan, topi kain, 101, 107-109; sektor modern, 108; perekonomian modern, 108; perusahaan besar, 108; terampil, 108
Pemusnahan kampung, xviii
Penduduk kampung, 186, 191, 195, 203, 216; generalisasi nasib, 216; hubungan dengan kota, 229; masalah utama, 257; pandangan sejarah, 243; perspektif kampung kumuh, 173; tahun 1970, 237; tujuh faktor, 255
Penggusuran, 176, 182, 185, 201, 202, 209, 221, 224, 226, 228, 235, 239, 253-254
Penetrasi pemerintah, 144-158; dewan kota, 147; efisiensi administratif Orde baru, 150; hukum adat, 144; kebijakan kota tertutup, 152, 161; keluarga berencana, 154-156; LKPMDK - Ibu Kota, 151; pengawasan urusan kampung, 145; Peraturan Pemerintah tahun 1851, 144;
Rencana Induk Jakarta, 148; sistem administratif kampung, 150;
Tonarigumi, 146
Penggusuran, xix, xx, 142, 171
"Peremajaan," 177, 232

"Perkampungan kumuh," 172
Perencanaan kota, 172, 176; perspektif kampung kumuh, 173
Perekonomian modern, 217
Pers, 192, 193, 201; laporan, 181
Perumahan, di tiga kota 235
Perumnas, 174, 187, 189, 195, 200, 207, 214, 218, 245, 2499; bayar sewa, 215; cicilan, 220; Depok, 218; direktur, 181; Inpres, 175; kontrak, 198
Persaingan, 85; akumulasi kekayaan, 86; ketidakamanan, 85-6
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), xvii, 153
Pinches, M.D., 7, 9, 137
PKI, 37, 38, 39, 45, 78 (orang merah 39), 150 .
PNI, 37
Polle, 145
Pondok komunal, 50, 57; ikatan, 59, 60; keanggotaan, 57; kebersamaan, 58, 59; orientasi sosial, 60; perselisihan, 59
Praginanto, 118
Preman, 192
Proyek pemukiman, 172
Program Perbaikan Kampung, 145, 153, 170

R

raja jalanan, 93-4, 143
Reader, D.R., 57
Reissman, L., 4
Ricklefs, M.C., 37
Rimmer P.J., xvii, 91
Roberts, 62
Rumah pemondokan, 221, 222
Rumah susun, 247

S

Sablie, A., 101
Sadli, M., 100
Sajogyo, xxi,6
Salim, tukang becak, 222
Sanders, P.D., 137
Sannen, Ad.M.H., 121
Sarinah, toserba, 230
Saraswati, 8
Sartono, K., 91,94,97
Sektor formal, 133-137; boom ekonomi, 133; digambarkan sebagai, 133; hubungan dengan sektor informal, 137-143; fasilitas pemerintah, 138; selera konsumen, 129; pola-pola konsumsi, 138; perusahaan multinasional, 136-7
Sektor informal, 87-8, 110, 120, 126; gerakan masyarakat, xxvii; sektor formal, 137-143; perekonomian rakyat, xxvii; sistem hukum, xxvii, 5,8
Sethuraman, S.V., 5, 8, 88, 101, 120, 126, 140
Sewa, becak, 223; kamar, 215; tanah, 206
Silaban, B., 93
Singapura, daerah kumuh, 234-231
Sistem bangsa, 241
sistem RT, RW, 151
Smail, J.W.R., 27
Soegoto, 187
Soedarno, 88,90,91
Soeharto, 41
Soekarno, 29, 34,36, 37, 38, 40, 41, 100, 120, 148-9
Sritua Arief, 6,102,140
Stedman-Jones,G., 3,9,166
Steele, R.M., 8
Steer, A., 7,43,103
Struktur sosial (sumber teori), xxii; akumulasi modal, xxiii; Armstrong, W., xxiii, xxiv; divergensi konsumsi, xxiv; Guinnesss, xxiii; kapitalisme di pedesaan, xxiii; konsentrasi modal, xxiv; konsumerisme, xxiv; konvergensi produksi, xxiv; McGee, T.G., xxiii, xxiv; monopolistik, xxv; proletarisasi, xxiii; serba serasi, xxiii; Sullivan, xxiii; urbanisasi, xxiv
Sudiro, 150
Sullivan, penelitian, 230-231
Sullivan, G., 8
Sullivan, J., 8,59
Sullivan, N., 49, 52, 59, 62, 81
Sumira, 199, 206, 209, 220
Sumardi, M., 20

Sundrum, R., 6, 40, 100
Sunindyo, 8, 43, 62
Sunuharyo, B.S., 20
Suprapto, 97
Surachman Samiun, 97
Suryo, D., 123
Sutter, J.O., 26
Swasono, Sri Edi, 26,110
Swianieswicz, S., 100
Syarifuddin, 188

T

Tan, TK., 149
Tan Kim Swee, 57
Tanah Abang, 174, 180, 195, 212
Tangerang, 199
Teori, ketergantungan, 9; pusat-pinggiran, 9; strukturalis, 243
Tesch, J.W., 22
Tjokropranolo, 96
Tokeman, V.E., 119
Tomasoa, 117
Tukang becak, 204

U

"uang susah", 214
Urbanisasi, Singapura dan Hong Kong, 234
Usaha kecil, timbul tenggelam, 137; daerah perdagangan, 140; pertumbuhan ekonomi, 141; perubahan fisik kota, 140; tiga sebab utama, 140-143

V

Valentine, C.C., xxiii

W

Watts, K., 33
Waworoentoe, W., 119
Wertheim, W.F., 10, 100
William, J.B., 152
Wilson, M., 57
wiraswastawan kecil xvii
Wirosardjono, S., 5, 8, 88, 101, 102, 110, 126, 133

Z

Zaman Kurang Ajar, 15, 45; dasar moral, 47; frustrasi, 45; Islam, 47; keretakan hubungan, 45; terpecah-pecah, 45
Zaman Merdeka (1949-1965), 19, 29; becak, 33; berpihak, 39; hak sah atas tanah, 36; hiperinflasi, 30; Hotel Indonesia, 32, 35; Jalan Thamrin, 32, 34, 37; kaum elite, 37; kekacauan ekonomi, 29; kekurangan bahan makanan, 30; kerusakan prasarana, 30; ketidakmampuan administratif, 29; Lapangan Merdeka, 37, 38; Masyumi, 37; Palang Merah, 30; partai, 37; pasar gelap, 33; pekerjaan dan penghasilan, 34; penjatahan makanan, 33; perang Korea, 29; perdagangan kaki lima, 34; PKI 37, 38, 39, (orang merah, 39); PNI, 37; Sarinah, 32, 35; Soekarno, 29, 34, 36, 37, 38; transaksi-transaksi rumah, 36; uang NICA, 29
Zaman Normal (1930an-1942), 15; aspirasi nasionalis, 16; HIS (*Hollandse Inlandshe School*), 23; Hotel Indonesia, 18; Jalan Thamrin, 18; kekacauan politik, 16; kerja - buruh upahan, 19; masa keemasan, 23; pedagang Cina dan Arab, 21; pondok-pondok, 21
Zaman Pembangunan (1965-1981), 15, 40; Demokrasi Terpimpin, 40; industri rakyat, 41; Jalan Thamrin, 41, 44; kemakmuran, 41, 43; lintah darat, 45; militer, 40; Orde Baru, 40; PKI, 45; pondokan, 41, Soeharto, 41; Soekarno, 40, 41; surat berkelakuan baik, 45; teknokrat, 40
Zaman Perang (1942-1949), 15, 24; bakaro Indonesia, 26; Belanda, 25 - 29; Jepang, 24 - 29; keluarga, 24; nafsu seksual, 25; mengambil hak tanah rawa, 27; pedal, 26; pondok persewaan, 28; Royal Netherland East Indies Army, 29; keadaan buruk, 24